



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.948, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. Klasifikasi Arsip, JRA, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI

KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan berdasarkan surat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/67/2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif NonKeuangan dan NonKepegawaian;

9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 668);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167);
12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
16. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Urusan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 551);

17. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
19. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1819);
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 78 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1918);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
3. Klasifikasi Arsip yang selanjutnya disingkat KA adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
4. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
5. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disingkat SKKAAD adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta Arsip dan pengguna dalam pelayanan Arsip.
6. Pencipta Arsip adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi komunitas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
8. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
9. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Maksud pengaturan KA, JRA, dan SKKAAD di lingkungan Kementerian sebagai acuan kegiatan pengelolaan Arsip dinamis untuk mendapatkan keseragaman dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Kearsipan di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

Tujuan pengaturan KA, JRA, dan SKKAAD di lingkungan Kementerian untuk menjamin terwujudnya sistem pengelolaan Arsip dinamis secara terintegrasi sejak penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan sampai penyusutan Arsip.

Pasal 4

- (1) Penciptaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pembuatan Arsip dan penerimaan Arsip yang dikelola berdasarkan pada KA.
- (2) Pemimpin Pencipta Arsip bertanggung jawab menetapkan KA berdasarkan pedoman penyusunan KA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan KA dilaksanakan dengan melakukan analisis fungsi.
- (2) Analisis fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menyusun skema klasifikasi Arsip dan KA secara logis, faktual, relevan, aktual, sistematis, akomodatif, dan kronologis.

Pasal 6

- (1) Skema klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang terdiri atas:
 - a. fungsi sebagai pokok masalah (primer);
 - b. kegiatan sebagai sub masalah (sekunder); dan
 - c. transaksi sebagai sub-sub masalah (tersier).
- (2) Skema klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) KA di lingkungan Kementerian menggunakan kode klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.

- (2) Kode klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi dan tugas Pencipta Arsip sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.
- (3) Penyusunan KA dikelompokkan berdasarkan:
 - a. fungsi substantif; dan
 - b. fungsi fasilitatif.

Pasal 8

- (1) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan pengelompokan Arsip yang dihasilkan dari kegiatan pokok.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan pengelompokan Arsip yang dihasilkan dari kegiatan penunjang
- (3) Fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berada pada:
 - a. Kementerian; dan
 - b. PTN.

Pasal 9

- (1) KA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) merupakan dasar penentuan sistematika JRA.
- (2) JRA dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
- (3) JRA paling sedikit memuat jenis Arsip, retensi Arsip, dan keterangan.
- (4) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. fungsi substantif; dan
 - b. fungsi fasilitatif.
- (5) Fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada:
 - a. Kementerian; dan
 - b. PTN.

- (6) Jenis Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Arsip yang tercipta dari pelaksanaan fungsi suatu organisasi.
- (7) Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan akumulasi dari retensi aktif dan retensi inaktif.
- (8) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (9) Penetapan JRA harus mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Penghitungan retensi Arsip dimulai setelah kegiatan dinyatakan selesai dan berkas sudah dinyatakan lengkap serta tidak berubah.
- (2) Penghitungan retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan antara lain:
 - a. sejak berakhirnya masa 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan;
 - c. sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku;
 - d. sejak peraturan perundang-undangan diundangkan;
 - e. setelah perjanjian, kontrak, kerja sama berakhir, dan kewajiban para pihak telah ditunaikan;
 - f. sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan;
 - g. setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. setelah kegiatan diaudit;
 - i. setelah serah terima hasil kegiatan dan retensi pemeliharaannya berakhir;
 - j. setelah suatu perizinan masa berlakunya berakhir;
 - k. setelah laporan hasil penelitian dipublikasikan;
 - l. setelah data diperbaharui; dan/atau
 - m. setelah sistem aplikasi ditingkatkan dan dikembangkan.

- (3) Penentuan retensi Arsip dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai guna Arsip.
- (4) Retensi Arsip ditentukan dengan masa simpan paling sedikit:
 - a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;
 - b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi, dan teknologi; dan
 - c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban keuangan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 11

- (1) Penetapan rekomendasi suatu jenis Arsip berdasarkan pertimbangan:
 - a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi;
 - b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder; dan
 - c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada Arsip yang dianggap berpotensi menimbulkan keraguan.
- (2) Penetapan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada series, sub-series, file atau item suatu jenis Arsip.

Pasal 12

- (1) Jenis arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penentuan sistematika SKKAAD.
- (2) SKKAAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 2 (dua) yang terdiri atas:
 - a. fungsi substantif; dan
 - b. fungsi fasilitatif.

- (3) SKKAAD fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada:
 - a. Kementerian; dan
 - b. PTN.
- (4) SKKAAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam melakukan pengamanan dan pemberian akses terhadap arsip dinamis di lingkungan Kementerian.

Pasal 13

SKKAAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikategorikan:

- a. sangat rahasia, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa;
- b. rahasia, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro;
- c. terbatas, apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan
- d. biasa/terbuka, apabila dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.

Pasal 14

KA, JRA, dan SKKAAD untuk Kementerian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Penyusunan KA, JRA, dan SKKAAD untuk PTN mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, KA, JRA, SKKAAD di lingkungan Kementerian harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL
RETENSI ARSIP, DAN SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI KEMENTERIAN

A. KLASIFIKASI ARSIP

KA menjadi kerangka dasar untuk pengodean (*coding*) dalam penciptaan, penggunaan dan penyimpanan, serta penyusutan arsip. KA dalam proses penciptaan arsip digunakan sebagai dasar penomoran surat. KA dalam proses penggunaan digunakan sebagai dasar pemberkasan dan penemuan kembali (*retrieve*). KA dalam penyusutan arsip, digunakan sebagai dasar penyusunan jadwal retensi arsip.

KA terbentuk dalam suatu format daftar jenis-jenis fungsi yang merupakan penjabaran dari fungsi dan tugas yang diemban oleh pencipta arsip baik yang bersifat substantif maupun fasilitatif di lingkungan Kementerian.

KA fungsi substantif dan fungsi fasilitatif di Kementerian di urutkan berdasarkan organisasi dan tata kerja Kementerian sebagai berikut:

-2-

1. Fungsi Substantif

- a) Pembelajaran (PB)
- b) Kemahasiswaan (KM)
- c) Penjaminan Mutu (JM)
- d) Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan (TK)
- e) Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya (ST)
- f) Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi (KB)
- g) Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KK)
- h) Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KD)
- i) Sarana dan Prasarana Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (SP)
- j) Riset dan Sistem Pengembangan (RS)
- k) Riset dan Pengabdian Masyarakat (RA)
- l) Pengembangan Teknologi Industri (KT)
- m) Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI)
- n) Penguatan Inovasi (PI)
- o) Akreditasi Perguruan Tinggi (AG)
- p) Biologi Molekuler (BM)
- q) Pembudayaan IPTEK (BI)
- r) Akademik Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) (AK)
- s) Kemahasiswaan LLDIKTI (KH)
- t) Kelembagaan LLDIKTI (KL)

-3-

2. Fungsi Fasilitatif

- a) Perencanaan (PR)
- b) Kepegawaian (KP)
- c) Keuangan (KU)
- d) Ketatausahaan (TU)
- e) Kearsipan (KA)
- f) Perlengkapan dan Barang Milik Negara (PL)
- g) Kerumahtanggaan (RT)
- h) Hukum (HK)
- i) Organisasi Dan Tata Laksana (OT)
- j) Hubungan Masyarakat/Komunikasi Publik (HM)
- k) Kerjasama (KS)
- l) Dokumentasi dan Perpustakaan (DP)
- m) Pengawasan (PA)
- n) Pendidikan Dan Pelatihan (DL)
- o) Data dan Informasi Iptek Dikti (DI)

Adapun daftar KA fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagai berikut:

POLA KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

PB PEMBELAJARAN

- 00 Kebijakan di bidang Pembelajaran meliputi standar kualitas sistem pembelajaran pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, serta pengakuan kualifikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan meliputi standar kualitas sistem pembelajaran pada pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi, pembelajaran khusus dan pengakuan kualifikasi mulai dari perencanaan sampai penetapan

- 01 Pendidikan Akademik

- 00 Pengembangan kurikulum pendidikan akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan kurikulum pendidikan akademik

- 01 Pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan akademik

- 02 Pendidikan Vokasi dan Profesi

- 00 Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi

- 01 Pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan vokasi dan profesi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan vokasi dan profesi

- 03 Pembelajaran Khusus

- 00 Pengembangan pembelajaran pendidikan jarak jauh

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan pembelajaran pendidikan jarak jauh

- 01 Pengembangan pembelajaran pendidikan khusus

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan pembelajaran pendidikan khusus

- 04 Pengakuan Kualifikasi

- 00 Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran

- 01 Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran lampau

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran lampau

-5-

- 02 Penetapan pengakuan capaian pembelajaran lampau
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan pengakuan capaian pembelajaran lampau
 - 03 Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyetaraan Ijazah Luar Negeri
 - 04 PINSIVIL (Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Informasi Verifikasi Ijazah Secara Elektronik)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan (Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Informasi Verifikasi Ijazah Secara Elektronik)
 - 05 Beasiswa Program Profesi Guru - SM3T dan PPGT
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Beasiswa Program Profesi Guru - SM3T dan PPGT
 - 06 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, pengakuan kualifikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, pengakuan kualifikasi
 - 07 Monitoring dan evaluasi meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi, pembelajaran khusus dan pengakuan kualifikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi, pembelajaran khusus dan pengakuan kualifikasi
- KM KEMAHASISWAAN
- 00 Kebijakan di bidang kemahasiswaan meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyelarasan dunia kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan di bidang kemahasiswaan meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyelarasan dunia kerja mulai dari perencanaan sampai penetapan
 - 01 Penalaran
 - 00 Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional (PILMAPRES)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional
 - 01 Olimpiade Nasional Matematika dan Sains
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan olimpiade nasional matematika dan sains

-6-

- 02 National University Debating Championship (NUDC)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan lomba debat bahasa inggris nasional di tingkat mahasiswa
- 03 Pengiriman Delegasi Internasional Mathematic Competition (IMC)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengiriman delegasi kompetisi matematika internasional
- 04 Pengiriman Delegasi World University Debating Championship (WUDC)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan lomba debat bahasa inggris mahasiswa tingkat internasional
- 02 Kreativitas
 - 00 Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM 5 Bidang)/ KRI/KJI/KBGI/KMHE/ KRTI
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi Program kreativitas Mahasiswa lima bidang , KRI, KJI, KBGI, KMHE
 - 01 Program Kreativitas Mahasiswa 5 Bidang
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program kreativitas mahasiswa dari tahapan pendaftaran sampai kegiatan penetapan Juara PIMNAS
 - 02 Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Regional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi robot Indonesia Tingkat Regional
 - 03 Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Nasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi robot Indonesia Tingkat Nasional
 - 04 Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Internasional Divisi Pemadam Api (FIRE FIGHTING)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi robot Indonesia Tingkat Internasional Divisi Pemadam Api
 - 05 Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Internasional Divisi Sepakbola (ROBOCUP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi robot Indonesia Tingkat Internasional Divisi Sepakbola
 - 06 Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Internasional Divisi ABU ROBOCON (Asia Pacific Broadcasting Union)

-7-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi robot Indonesia Tingkat Internasional Divisi Asia Pacific Broadcasting Union

07 Kompetisi Robot Terbang Indonesia (KRTI)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi robot terbang Indonesia

08 Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN)

09 Kompetisi Mobil Listrik Hemat Energi (KMHE)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kompetisi Mobil Listrik Hemat Energi

10 Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK)

11 Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi jembatan Indonesia

12 Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi bangunan gedung Indonesia

13 Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pekan ilmiah mahasiswa nasional

03 Kesejahteraan Mahasiswa

00 Penilaian usul dan bahan penetapan pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pemberdayaan mahasiswa lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian usul dan bahan penetapan pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pemberdayaan mahasiswa lainnya

01 Pemberian penghargaan kepada mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan bahan pemberian penghargaan kepada mahasiswa

04 Beasiswa Dalam Negeri

00 Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan beasiswa dalam negeri PPA

-8-

- 01 Beasiswa Prestasi Ekstrakurikuler
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan beasiswa prestasi ekstrakurikuler
- 02 Beasiswa OSI (Olimpiade Sains Indonesia) dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Beasiswa OSI (Olimpiade Sains Indonesia) dalam Negeri
- 03 Beasiswa Adik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Beasiswa ADik Papua
- 04 Beasiswa PEDP (Politeknik Education Development Project)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan beasiswa PEDP
- 05 Beasiswa PEDP On-Going (Penugasan)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan beasiswa PEDP On-Going
- 05 Bantuan Pendidikan Bidikmisi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan pendidikan bidikmisi
- 06 Beasiswa luar Negeri
 - 00 Beasiswa Luar Negeri (global)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan beasiswa luar negeri
 - 01 Beasiswa OSI (Olimpiade Sains Indonesia) Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Beasiswa OSI (Olimpiade Sains Indonesia) Luar Negeri
- 07 Kewirausahaan
 - 00 Pengembangan program pendidikan kewirausahaan mahasiswa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan bahan pengembangan program pendidikan kewirausahaan
 - 01 Pemberian bantuan pelaksanaan kewirausahaan (Hibah)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan pelaksanaan kewirausahaan
- 08 Minat dan Bakat
 - 00 Musabaqoh Tilawil Qur'an Nasional Mahasiswa (MTQNM)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Musabaqoh Tilawil Qur'an Nasional Mahasiswa

-9-

- 01 Pekan Paduan Suara Gerejawi (Peparawis)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pekan paduan suara gerejawi
- 02 Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pekan seni mahasiswa tingkat nasional
- 03 Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pekan olahraga mahasiswa nasional
- 04 Sukan Malaysia Indonesia (Sukmalindo)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan olahraga persahabatan serumpun Indonesia-Malaysia
- 05 Asean University Games (AUG)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi olahraga mahasiswa tingkat Asean
- 06 Universiade
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kompetisi olahraga mahasiswa tingkat dunia
- 09 Organisasi Kemahasiswaan
 - 00 Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran bantuan untuk kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa
 - 01 Program Hibah Bina Desa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program hibah bina desa
 - 02 Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah dan Tingkat Lanjut
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa
 - 03 Mahasiswa mengikuti KKN Kebangsaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa mengikuti Kuliah, Kerja, Nyata Kebangsaan di pelosok desa
- 10 Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja
 - 00 Pengembangan sistem kebutuhan dunia kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan sistem kebutuhan dunia kerja

-10-

- 01 Kemitraan institusi dengan lembaga lain
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama/kemitraan institusi dengan lembaga lain
- 02 Validasi data dan kebutuhan dunia kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan validasi data dan kebutuhan dunia kerja berdasarkan data dari PDDIKTI
- 03 Analisis evaluasi dan rencana tindak lanjut
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis evaluasi dan rencana tindak lanjut tentang Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja
- 11 Pengembangan Pusat Karir
 - 00 Penulisan dokumen studi penelusuran lulusan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penulisan dokumen studi penelusuran lulusan
 - 01 Analisis evaluasi dan rencana tindak lanjut
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis evaluasi dan rencana tindak lanjut tentang Pengembangan Pusat Karir
 - 02 Pemberdayaan perguruan tinggi melaksanakan layanan pusat karir (hibah/bantuan)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan pengembangan layanan pusat karir pada perguruan tinggi dalam bentuk bantuan/hibah
- 12 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyalarsan dunia kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyalarsan dunia kerja
- 13 Monitoring dan evaluasi meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyalarsan dunia kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyalarsan dunia kerja
- JM PENJAMINAN MUTU
 - 00 Kebijakan Penjaminan Mutu
 - 00 Kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi meliputi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu dan kompetensi lulusan

-11-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi meliputi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu dan kompetensi lulusan mulai dari penyusunan sampai penetapan

- 01 Kebijakan mutu sarana prasana ilmu pengetahuan teknologi dan pendidikan tinggi sumber daya IPTEK dan DIKTI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kebijakan mutu sarana prasana ilmu pengetahuan teknologi dan pendidikan tinggi sumber daya IPTEK dan DIKTI mulai dari penyusunan sampai penetapan

- 02 Kebijakan penjaminan mutu dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan kelembagaan Ilmu pengetahuan teknologi dan dikti

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Kebijakan penjaminan mutu dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan kelembagaan Ilmu pengetahuan teknologi dan dikti dari perencanaan sampai penetapan

- 01 Program Studi Pendidikan Tinggi

- 00 Sistem penjaminan mutu internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi di bidang pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu internal

- 01 Revitalisasi program mutu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan revitalisasi program mutu

- 02 Peningkatan mutu program studi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan mutu program studi

- 02 Pengembangan Sistem Uji Kompetensi

- 00 Sistem Registrasi Online

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Registrasi Online

- 01 Sistem Uji Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Uji Kompetensi

- 02 Sistem Pengembangan Soal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Pengembangan Soal

- 03 Penerapan Uji Kompetensi

- 00 Instrumen Uji Kompetensi

Naskah-naskah/ Instrumen yang berkaitan dengan rumusan sebelum pelaksanaan ujian kompetensi

- 12 -

- 01 Uji Kompetensi Mahasiswa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan uji kompetensi kemahasiswaan mulai dari pendaftaran sampai data mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi
- 02 Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses hasil uji kompetensi sampai penetapan SK
- 03 Monitoring dan Evaluasi Uji Kompetensi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring evaluasi soal uji kompetensi dan uji pelaksanaan uji kompetensi
- 04 Mutu Sarana dan Prasarana
 - 00 Sistem Manajemen Mutu Sarana dan Prasarana
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sistem manajemen mutu sarana dan prasarana
 - 01 Analisis data pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Analisis data pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi
 - 02 Penyajian data dan informasi pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi
Naskah-Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyajian data dan informasi pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi
- 05 Mutu Kelembagaan
 - 00 Penyiapan dokumen akreditasi, surveilan, dan reakreditasi lembaga penelitian dan pengembangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan dokumen akreditasi, surveilan, dan reakreditasi lembaga penelitian dan pengembangan
 - 01 Penyajian data dan informasi akreditasi dan reakreditasi lembaga penelitian dan pengembangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyajian data dan informasi akreditasi dan reakreditasi lembaga penelitian dan pengembangan
- 06 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi penjaminan mutu pendidikan tinggi , sarana prasarana ilmu pengetahuan teknologi dan dikti, penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

-13-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi penjaminan mutu pendidikan tinggi , sarana prasarana ilmu pengetahuan teknologi dan dikti, penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

- 07 Monitoring dan evaluasi meliputi penjaminan mutu pendidikan tinggi , sarana prasarana ilmu pengetahuan teknologi dan dikti, penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi meliputi penjaminan mutu pendidikan tinggi , sarana prasarana ilmu pengetahuan teknologi dan dikti, penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

TK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

- 00 Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan meliputi unggulan iptek, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kementerian, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Non Kementerian, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan di industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat, Lembaga penelitian dan pengembangan di industri berbasis teknologi tinggi, Penilaian Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan mulai dari perencanaan sampai penetapan

- 01 Unggulan Iptek

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan unggulan iptek

- 02 Penelitian dan Pengembangan Kementerian

- 00 Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan kegiatan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan kementerian

- 01 Data pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan Kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Data pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan Kementerian

- 03 Penelitian dan Pengembangan Non Kementerian

- 00 Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan kegiatan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian

- 01 Data pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Data pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian

04 Penelitian dan Pengembangan Daerah

00 Laporan Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan daerah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan daerah.

01 Analisis data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah daerah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan analisis data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah daerah

05 Industri Manufaktur, Agro, Kesehatan, dan Obat

00 Data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat

01 Laporan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat

06 Industri Berbasis Teknologi Tinggi

00 Data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri berbasis teknologi tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri berbasis teknologi tinggi

01 Laporan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri berbasis teknologi tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan bahan laporan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri berbasis teknologi tinggi

07 Penilaian Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan

00 Pengolahan data kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

-15-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

01 Pengujian data kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengujian data kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

08 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi unggulan IPTEK, penelitian dan pengembangan kementerian dan non kementerian, penelitian pengembangan daerah, industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat, industri berbasis teknologi dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi unggulan IPTEK, penelitian dan pengembangan kementerian dan non kementerian, penelitian pengembangan daerah, industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat, industri berbasis teknologi dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

09 Monitoring dan evaluasi meliputi unggulan IPTEK, penelitian dan pengembangan kementerian dan non kementerian, penelitian pengembangan daerah, industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat, industri berbasis teknologi dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi meliputi unggulan IPTEK, penelitian dan pengembangan kementerian dan non kementerian, penelitian pengembangan daerah, industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat, industri berbasis teknologi dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan

ST SAINS DAN TEKNOLOGI DAN LEMBAGA PENUNJANG LAINNYA

00 Kebijakan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan meliputi sains dan teknologi, inkubator dan intermediasi teknologi, Organisasi Profesi Ilmu Pengetahuan, Penunjang Kelembagaan Lainnya mulai dari penyusunan sampai penetapan

01 Kawasan Sains dan Teknologi

00 Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi

01 Evaluasi Kawasan Sains dan Teknologi (KST)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi kawasan sains dan teknologi

02 Inkubator dan Intermediasi Teknologi Kelembagaan

00 Inkubator Teknologi Kelembagaan

-16-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pembinaan lembaga inkubator teknologi

01 Intermediasi Teknologi Kelembagaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan dan pembinaan lembaga intermediasi teknologi

03 Organisasi Profesi Ilmu Pengetahuan dan teknologi

00 Penataan Organisasi Profesi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang penataan organisasi profesi ilmu pengetahuan dan teknologi

01 Pengawasan Organisasi Profesi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan organisasi profesi ilmu pengetahuan dan teknologi

04 Penunjang Kelembagaan Lainnya

00 Dewan Riset Nasional (DRN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Dewan Riset Nasional (DRN)

01 Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN)

02 Dewan Pendidikan Tinggi (DPT)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Dewan Pendidikan Tinggi (DPT)

03 Lembaga Penunjang Lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Penunjang Lainnya.

KB PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI

00 Kebijakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi meliputi pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan penetapan perumusan kebijakan, pedoman, standar dan kriteria pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi meliputi pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi dari penyusunan sampai penetapan

- 01 Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik
 - 00 Pendirian dan pencabutan ijin perguruan tinggi swasta program akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendirian dan pencabutan ijin perguruan tinggi swasta program akademik sampai dengan rekomendasi
 - 01 Pembukaan dan penutupan program studi pada perguruan tinggi program akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukaan dan penutupan program studi pada perguruan tinggi program akademik sampai dengan rekomendasi
 - 02 Monitoring dan evaluasi pasca rekomendasi pengembangan perguruan tinggi program akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi pasca rekomendasi pengembangan perguruan tinggi program akademik
 - 03 Laporan di bidang pengembangan perguruan tinggi program akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan di bidang pengembangan perguruan tinggi program akademik
- 02 Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi
 - 00 Pengkajian dan penilaian usul pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian dan penilaian usul pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi
 - 01 Pendirian, perubahan, dan penutupan kelembagaan perguruan tinggi negeri program vokasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan penetapan pedoman pengembangan perguruan tinggi program vokasi
 - 02 Pemberian ijin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta program vokasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian ijin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta program vokasi
 - 03 Evaluasi pelaksanaan pengembangan perguruan tinggi program vokasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Evaluasi pelaksanaan pengembangan perguruan tinggi program vokasi

- 04 Laporan di bidang pengembangan perguruan tinggi program vokasi
- Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan di bidang pengembangan perguruan tinggi program vokasi
- 03 Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi
- 00 Perubahan Perguruan Tinggi
- Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengusulan, penilaian, pengkajian perubahan perguruan tinggi sampai dengan rekomendasi
- 01 Pembukaan program studi dalam rangka perubahan bentuk perguruan tinggi
- Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengusulan, penilaian, pengkajian pembukaan program studi dalam rangka perubahan bentuk perguruan tinggi sampai dengan rekomendasi
- 02 Monitoring dan evaluasi pasca rekomendasi penataan kelembagaan perguruan tinggi
- Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi pasca rekomendasi penataan kelembagaan perguruan tinggi
- 03 Laporan di bidang penataan kelembagaan perguruan tinggi
- Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan di bidang penataan kelembagaan perguruan tinggi
- 04 Pemberdayaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
- 00 Program Pembinaan perguruan tinggi swasta
- Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan program pembinaan perguruan tinggi swasta mulai dari usulan sampai dengan laporan
- 05 Tata Kelola Perguruan Tinggi
- 00 Penilaian usul tata kelola perguruan tinggi
- Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian usul tata kelola perguruan tinggi
- 01 Rekomendasi calon penerima bantuan untuk tata kelola perguruan tinggi
- Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rekomendasi calon penerima bantuan untuk tata kelola perguruan tinggi
- 02 Data dan informasi perguruan tinggi penerima bantuan untuk tata kelola perguruan tinggi

-19-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan data dan informasi perguruan tinggi penerima bantuan untuk tata kelola perguruan tinggi

- 06 Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi
 - 00 Data perguruan tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan data perguruan tinggi
 - 01 Peta perguruan tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan peta perguruan tinggi
 - 02 Rekomendasi penyelesaian permasalahan kelembagaan perguruan tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rekomendasi penyelesaian permasalahan kelembagaan perguruan tinggi
- 07 Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi
 - 00 Penilaian Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian pusat unggulan IPTEK Perguruan Tinggi
 - 01 Instrument penilaian kinerja perguruan tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan penetapan instrument penilaian kinerja perguruan tinggi
 - 02 Data kinerja perguruan tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengumpulan data kinerja perguruan tinggi
- 08 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi Pengembangan perguruan tinggi akademik, pengembangan perguruan tinggi program vokasi, penataan kelembagaan perguruan tinggi, pemberdayaan kelembagaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, pengendalian kelembagaan perguruan tinggi dan penilaian kinerja perguruan tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi Pengembangan perguruan tinggi akademik, pengembangan perguruan tinggi program vokasi, penataan kelembagaan perguruan tinggi, pemberdayaan kelembagaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, pengendalian kelembagaan perguruan tinggi dan penilaian kinerja perguruan tinggi
- 09 Monitoring dan evaluasi Pengembangan perguruan tinggi akademik, pengembangan perguruan tinggi program vokasi, penataan kelembagaan perguruan tinggi, pemberdayaan kelembagaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, pengendalian kelembagaan perguruan tinggi dan penilaian kinerja perguruan tinggi

-20-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi Pengembangan perguruan tinggi akademik, pengembangan perguruan tinggi program vokasi, penataan kelembagaan perguruan tinggi, pemberdayaan kelembagaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, pengendalian kelembagaan perguruan tinggi dan penilaian kinerja perguruan tinggi

KK KARIER DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

00 Kebijakan Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Iptek Dikti

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan meliputi karier pendidik/dosen, karier tenaga kependidikan, kompetensi sumber daya manusia IPTEK DIKTI mulai dari perencanaan sampai penetapan

01 Karier Pendidik/Dosen

00 Penilaian angka kredit Karier Pendidik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian angka kredit karier pendidikan (lektor kepala dan guru besar)

01 Sertifikasi Dosen

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sertifikasi Dosen

02 Alih status dan mutasi dosen

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih status dan mutasi dosen

02 Karier Tenaga Kependidikan

00 Penilaian angka kredit Karier Tenaga Kependidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian angka kredit karier tenaga kependidikan

01 Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Tenaga Kependidikan ke luar negeri

02 Sistem Informasi Tenaga Kependidikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan dan Sistem Informasi Tenaga Kependidikan

03 Kompetensi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

00 Perencanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-21-

- 01 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 04 Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi
 - 00 Pemilihan dan Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemilihan Tenaga Kependidikan Berprestasi
 - 01 Seleksi Program Mobilisasi Dosen

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Seleksi Program Mobilisasi Dosen
 - 02 Magang Dosen

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Magang Dosen (Dosen baru yang ditempatkan di Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berkualifikasi baik)
 - 03 Program SAME (Scheme for academic mobility and exchange)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan dosen di luar negeri selama jangka waktu tertentu (tiga sampai enam bulan)
 - 04 Registrasi Pendidik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi registrasi pendidik
 - 05 World Class Profesor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan visiting profesor dari luar negeri
- 05 Bimbingan teknis/workshop/seminar Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi karier pendidik/dosen, karier tenaga kependidikan, kompetensi SDM IPTEK dan DIKTI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi karier pendidik/dosen, karier tenaga kependidikan, kompetensi SDM IPTEK dan DIKTI
- 06 Monitoring dan evaluasi Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi karier pendidik/dosen, karier tenaga kependidikan, kompetensi SDM IPTEK dan DIKTI

Naskah-Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi karier pendidik/dosen, karier tenaga kependidikan, kompetensi SDM IPTEK dan DIKTI

KD KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- 00 Kebijakan Kualifikasi Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI di dalam dan luar negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Kebijakan Kualifikasi Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI di dalam dan luar negeri mulai dari perencanaan sampai penetapan

- 01 Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 00 Pendidikan Dalam Negeri (Beasiswa)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pendidikan dalam negeri (beasiswa) untuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) di lingkungan Kemenristekdikti

- 01 Pendidikan Luar Negeri (Beasiswa)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pendidikan luar negeri (beasiswa) untuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) di lingkungan Kemenristekdikti

- 02 Kualifikasi Pendidik

- 00 Pendidikan Dalam Negeri (Beasiswa)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pendidikan dalam negeri untuk Dosen/ Tenaga Pendidik

- 01 Pendidikan Luar Negeri (Beasiswa)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pendidikan luar negeri untuk Dosen/Tenaga Pendidik

- 03 Kualifikasi Tenaga Kependidikan

- 00 Pendidikan Dalam Negeri (Beasiswa)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pendidikan dalam negeri untuk Tenaga Kependidikan (Fungsional Non Dosen)

- 01 Pendidikan Luar Negeri (Beasiswa)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program pendidikan luar negeri untuk Tenaga Kependidikan

- 04 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi kualifikasi Sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI, kualifikasi pendidik, kualifikasi tenaga kependidikan

-23-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi kualifikasi Sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI, kualifikasi pendidik, kualifikasi tenaga kependidikan

- 05 Monitoring dan evaluasi meliputi kualifikasi Sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI, kualifikasi pendidik, kualifikasi tenaga kependidikan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi meliputi kualifikasi Sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI, kualifikasi pendidik, kualifikasi tenaga kependidikan

SP SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

- 00 Kebijakan Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan meliputi Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana, Pengembangan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPTEK DIKTI mulai dari perencanaan sampai penetapan

- 01 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI
 - 00 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 01 Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi

- 02 Pengembangan Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI
 - 00 Pengembangan Sarana dan Prasarana IPTEK
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 01 Pengembangan Sarana dan Prasarana DIKTI
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana DIKTI

- 03 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI
 - 00 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPTEK
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPTEK

- 01 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana DIKTI
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana DIKTI

-24-

- 04 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi perencanaan teknis sarana prasarana IPTEK dan DIKTI, pengembangan teknis sarana prasaran IPTEK dan DIKTI, pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana IPTEK dan DIKTI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi perencanaan teknis sarana prasaran IPTEK dan DIKTI, pengembangan teknis sarana prasaran IPTEK dan DIKTI, pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana IPTEK dan DIKTI

- 05 Monitoring dan evaluasi meliputi perencanaan teknis sarana prasaran IPTEK dan DIKTI, pengembangan teknis sarana prasaranaa IPTEK dan DIKTI, pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana IPTEK dan DIKTI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi meliputi perencanaan teknis sarana prasarana IPTEK dan DIKTI, pengembangan teknis sarana prasarana IPTEK dan DIKTI, pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana IPTEK dan DIKTI

RS RISET DAN SISTEM PENGEMBANGAN

- 00 Kebijakan Riset dan Pengembangan meliputi pengembangan sistem riset, harmonisasi program, evaluasi sistem, kemitraan strategis dan sistem informasi riset dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan meliputi Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan, Harmonisasi Program dan Evaluasi Sistem Risbang, Kemitraan Strategis Risbang, Sistem Informasi Riset dan Pengembangan mulai dari penyusunan sampai penetapan

- 01 Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan

- 00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan sistem riset dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan sistem riset dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

- 01 Laporan pengembangan sistem riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan Laporan pengembangan sistem riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- 02 Harmonisasi Program dan Evaluasi Sistem Risbang

- 00 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan

-25-

- 01 Laporan harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan laporan harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan
- 03 Kemitraan Strategis Risbang
 - 00 Kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan fasilitasi kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri
 - 01 Monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri
 - 02 Laporan di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan laporan di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri
- 04 Sistem Informasi Riset dan Pengembangan
 - 00 Pengembangan sistem informasi riset dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem informasi riset dan pengembangan
 - 01 Monitoring dan evaluasi di bidang program sistem informasi riset dan pengembangan serta standardisasi riset dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang program sistem informasi riset dan pengembangan serta standardisasi riset dan pengembangan
 - 02 Laporan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta standarisasi riset dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta standarisasi riset dan pengembangan
- 05 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi pengembangan sistem riset, harmonisasi program, evaluasi sistem, kemitraan strategis dan sistem informasi riset dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi pengembangan sistem riset, harmonisasi program, evaluasi sistem, kemitraan strategis dan sistem informasi riset dan pengembangan

RA RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

- 00 Kebijakan Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan meliputi riset dasar, riset terapan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas riset mulai dari penyusunan sampai penetapan

01 Riset Dasar

- 00 Pemetaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemetaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan

01 Penilaian dan seleksi

Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan Penilaian dan seleksi

02 Penetapan penerima bantuan riset dasar

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan penerima bantuan riset dasar

02 Riset Terapan

- 00 Pemetaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemetaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan

01 Penilaian dan seleksi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian dan seleksi

- 02 Penetapan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan

03 Pemberdayaan Masyarakat

- 00 Pemetaan perguruan tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemetaan perguruan tinggi

-27-

- 01 Penilaian dan seleksi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian dan seleksi
 - 02 Penetapan Perguruan Tinggi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan Perguruan Tinggi
 - 04 Peningkatan Kapasitas Riset
 - 00 Peningkatan kapasitas riset peneliti
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Peningkatan kapasitas riset peneliti
 - 01 Koordinasi peningkatan kapasitas riset peneliti
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Koordinasi peningkatan kapasitas riset peneliti
 - 05 Bimbingan teknis/workshop/seminar Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat
 - 06 Monitoring dan evaluasi Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat
- KT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI
- 00 Kebijakan Pengembangan Teknologi Industri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan meliputi Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan, 'Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi, Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat, Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju mulai dari Penyusunan dan penetapan
 - 01 Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan
 - 00 Data teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Data teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan

-28-

- 01 Laporan pengembangan teknologi industri informasi komunikasi dan pertahanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan pengembangan teknologi industri informasi komunikasi dan pertahanan
 - 02 Laporan pengembangan teknologi industri informasi komunikasi dan keamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan pengembangan teknologi industri informasi komunikasi dan keamanan
 - 03 Monitoring dan evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan
 - 04 Laporan Termin dan Laporan Administrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Termin dan Laporan Administrasi
 - 05 Laporan Akhir
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Akhir
- 02 Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi
- 00 Data Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Data Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi
 - 01 Laporan Pengembangan Teknologi Industri Energi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Pengembangan Teknologi Industri Energi
 - 02 Laporan Pengembangan Teknologi Industri Transportasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Pengembangan Teknologi Industri Transportasi
 - 03 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi
 - 04 Laporan Termin dan Laporan Administrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Termin dan Laporan Administrasi

-29-

- 05 Laporan Akhir
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Akhir
- 03 Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat
 - 00 Data Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Data Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat
 - 01 Laporan Pengembangan Teknologi Industri Pangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Pengembangan Teknologi Industri Pangan
 - 02 Laporan Pengembangan Teknologi Industri Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Pengembangan Teknologi Industri Kesehatan
 - 03 Laporan Pengembangan Teknologi Industri Obat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan pengembangan teknologi industri obat
 - 04 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat
 - 04 Laporan Termin dan Laporan Administrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Termin dan Laporan Administrasi
 - 05 Laporan Akhir
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Akhir
- 04 Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju
 - 00 Data Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Data Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju
 - 01 Laporan Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Laporan Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku

-30-

02 Laporan Pengembangan Teknologi Industri Material Maju

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Pengembangan Teknologi Industri Material Maju

03 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju

04 Laporan Termin dan Laporan Administrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Termin dan Laporan Administrasi

05 Laporan Akhir

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Akhir

05 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi Pengembangan Teknologi industri informasi komunikasi dan pertahanan dan keamanan, teknologi industri energi dan transportasi, teknologi industri pangan, kesehatan dan obat dan industri bahan baku dan material maju

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi Pengembangan Teknologi industri informasi komunikasi dan pertahanan dan keamanan, teknologi industri energi dan transportasi, teknologi industri pangan, kesehatan dan obat dan industri bahan baku dan material maju

KI PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

00 Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Intelektual

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan meliputi Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual, Fasilitasi Jurnal Ilmiah, Fasilitasi Publikasi Ilmiah, Perijinan Penelitian mulai dari penyusunan sampai penetapan.

01 Valuasi dan Kekayaan Intelektual

00 Usulkan memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendataan hasil penelitian yang diusulkan memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten

01 Data hasil penelitian yang diusulkan memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan data hasil penelitian yang diusulkan memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten

-31-

- 02 Seleksi peneliti dan lembaga yang akan mendapatkan insentif atas pemerolehan paten dan hak kekayaan intelektual non paten
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan seleksi peneliti dan lembaga yang akan mendapatkan insentif atas pemerolehan paten dan hak kekayaan intelektual non paten
 - 03 Penetapan penerima insentif bagi para peneliti dan lembaga atas pemerolehan paten dan hak kekayaan intelektual non paten
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan bahan penetapan penerima insentif bagi para peneliti dan lembaga atas pemerolehan paten dan hak kekayaan intelektual non paten
 - 04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan valuasi dan kekayaan intelektual untuk memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan valuasi dan kekayaan intelektual untuk memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten
 - 05 Laporan pelaksanaan valuasi dan fasilitasi kekayaan intelektual untuk memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan valuasi dan fasilitasi kekayaan intelektual untuk memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten
- 02 Jurnal Ilmiah
- 00 Usulan Jurnal Ilmiah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Jurnal Ilmiah
 - 01 Pemberian hibah peningkatan tata kelola jurnal menjadi jurnal ilmiah bereputasi internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pemberian hibah peningkatan tata kelola jurnal menjadi jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah bereputasi internasional
 - 02 Pemberian insentif atas peningkatan tata kelola jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah bereputasi internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pemberian insentif atas peningkatan tata kelola jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah bereputasi internasional
 - 03 Penilaian terbitan berkala jurnal ilmiah nasional dan internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan bahan penilaian terbitan berkala jurnal ilmiah nasional

-32-

- 04 Penetapan akreditasi terbitan berkala jurnal ilmiah nasional dan internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan bahan penetapan akreditasi terbitan berkala jurnal ilmiah nasional
 - 05 Monitoring dan evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah bereputasi internasional
 - 06 Laporan di bidang jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah bereputasi internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan di bidang fasilitasi jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah bereputasi internasional
- 03 Publikasi Ilmiah
- 00 Usulan Publikasi Ilmiah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Publikasi Ilmiah
 - 01 Pemberian hibah peningkatan tata kelola publikasi ilmiah menjadi publikasi ilmiah nasional dan publikasi ilmiah internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pemberian hibah peningkatan tata kelola publikasi ilmiah menjadi publikasi ilmiah nasional dan publikasi ilmiah bereputasi internasional
 - 02 Pemberian insentif atas peningkatan tata kelola publikasi ilmiah nasional dan publikasi ilmiah bereputasi internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pemberian insentif atas peningkatan tata kelola publikasi ilmiah nasional dan publikasi ilmiah bereputasi internasional
 - 03 Penilaian terbitan berkala publikasi ilmiah nasional dan internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian terbitan berkala publikasi ilmiah nasional dan internasional
 - 04 Penetapan akreditasi terbitan berkala publikasi ilmiah nasional dan internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan akreditasi terbitan berkala publikasi ilmiah nasional dan internasional
 - 05 Monitoring dan evaluasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi

-33-

- 06 Laporan di bidang publikasi ilmiah nasional dan publikasi ilmiah bereputasi internasional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan di bidang publikasi ilmiah nasional dan publikasi ilmiah bereputasi internasional
- 04 Hak Atas Kekayaan Intelektual
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengurusan masalah HAKI sampai dengan penyelesaian masalah HAKI.
- 05 Perijinan Penelitian Asing
- 00 Persyaratan dalam penelitian asing beresiko tinggi dan berbahaya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Persyaratan dalam penelitian asing beresiko tinggi dan berbahaya
- 01 Pengkajian dan penilaian perijinan penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian dan penilaian usul perijinan penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya
- 02 Seleksi peneliti dan lembaga yang akan mendapatkan insentif atas pemerolehan paten dan hak kekayaan intelektual non paten
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Seleksi peneliti dan lembaga yang akan mendapatkan insentif atas pemerolehan paten dan hak kekayaan intelektual non paten
- 03 Data hasil penelitian yang diusulkan memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan data hasil penelitian yang diusulkan memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten
- 06 Bimbingan teknis/workshop/seminar valuasi dan fasilitasi Kekayaan Intelektual, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, hak atas kekayaan intelektual dan perizinan penelitian asing
Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar valuasi dan fasilitasi Kekayaan Intelektual, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, hak atas kekayaan intelektual dan perizinan penelitian asing
- 07 Monitoring dan evaluasi valuasi dan fasilitasi Kekayaan Intelektual, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, hak atas kekayaan intelektual dan perizinan penelitian asing
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi valuasi dan fasilitasi Kekayaan Intelektual, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, hak atas kekayaan intelektual dan perizinan penelitian asing

-34-

PI PENGUATAN INOVASI

00 Kebijakan Penguatan Inovasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang penguatan inovasi meliputi sistem inovasi, Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Inovasi Industri mulai dari penyusunan sampai penetapan

01 Sistem Inovasi

00 Rekomendasi Kebijakan Sistem Inovasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem dan jaringan inovasi termasuk rekomendasi kebijakan sistem inovasi

01 Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kemitraan strategis dan wahana inovasi termasuk kluster inovasi (kegiatan produk insentif/hibah mulai dari usulan/seleksi pemohon sampai dengan penetapan dana bantuan)

02 Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi

02 Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

00 Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi dan komunikasi dan pertahanan dan keamanan

01 Energi dan Transportasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan energi dan transportasi

02 Pangan, Kesehatan dan Obat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pangan, kesehatan dan obat

03 Bahan Baku dan Material Maju

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bahan Baku dan Material Maju

03 Inovasi Industri

00 Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan

-35-

- 01 Industri Energi dan Transportasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Industri Energi dan Transportasi
- 02 Industri Pangan,Kesehatan, dan Obat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Industri Pangan,Kesehatan, dan Obat
- 03 Industri Bahan Baku dan Material Maju
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Industri Bahan Baku dan Material Maju
- 04 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi sistem inovasi, perusahaan pemula berbasis teknologi dan inovasi industri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi sistem inovasi, perusahaan pemula berbasis teknologi dan inovasi industri
- 05 Monitoring dan evaluasi meliputi sistem inovasi, perusahaan pemula berbasis teknologi dan inovasi industri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi meliputi sistem inovasi, perusahaan pemula berbasis teknologi dan inovasi industri
- AG AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
 - 00 Program Studi
 - 00 Kebijakan akreditasi program studi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi program studi termasuk instrument
 - 01 Rekomendasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri mulai dari usulan sampai pencabutan pengakuan LAM
 - 02 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Program Studi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kriteria dan perangkat akreditasi program studi
 - 03 Izin penyelenggaraan program studi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Izin penyelenggaraan program studi

- 04 Pelayanan teknis dan administratif
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan teknis dan administratif
 - 05 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Program Studi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan akreditasi program studi
 - 06 Laporan Hasil Akreditasi Program Studi kepada Menteri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan melaporkan hasil akreditasi program studi kepada Menteri
- 01 Perguruan Tinggi
- 00 Kebijakan akreditasi perguruan tinggi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi termasuk instrumen perguruan tinggi
 - 01 Rekomendasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan memberikan rekomendasi atas usul pendirian LAM dari Pemerintah atau masyarakat kepada Menteri mulai dari usulan sampai pencabutan pengakuan LAM
 - 02 Kriteria dan Perangkat Akreditasi Perguruan Tinggi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi
 - 03 Izin penyelenggaraan perguruan tinggi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Izin penyelenggaraan perguruan tinggi
 - 04 Pelayanan teknis dan administratif
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pelayanan teknis dan administrative
 - 05 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi
 - 06 Laporan Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi kepada Menteri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri

-37-

- BM BIOLOGI MOLEKULER
- 00 Kebijakan Biologi Molekuler
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kebijakan Biologi Molekuler
 - 01 Penyakit Menular
 - 00 Bakteri
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit menular tentang bakteri
 - 01 Dengue
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit menular tentang dengue
 - 02 Hepatitis
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit menular tentang hepatitis
 - 03 Malaria
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit menular tentang malaria
 - 04 Virus
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian tentang virus yang baru dan terbaru
 - 05 Penyakit menular lainnya
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit menular lainnya
 - 02 Penyakit tidak menular dan kelainan genetika
 - 00 Kelainan Sel darah merah
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit tidak menular dan kelainan genetika tentang kelainan sel darah merah
 - 01 Thalassemia dan Hemoglobinopati
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit tidak menular dan kelainan genetika tentang thalassemia dan hemoglobinopati
 - 02 Obesitas dan Sindroma metabolik
 - Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit tidak menular dan kelainan genetika tentang obesitas dan sindroma metabolik
 - 03 Diabetes Melitus

-38-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit tidak menular dan kelainan genetika tentang Diabetes melitus

04 Kelainan Kromosom

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit tidak menular dan kelainan genetika tentang kelainan kromosom

05 Kanker

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit tidak menular dan kelainan genetika tentang kanker

06 Penyakit tidak menular dan kelainan genetika lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian penyakit tidak menular dan kelainan genetika lainnya

03 Keanekaragaman genom

00 Manusia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian keanekaragaman genom manusia

01 Non manusia

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian keanekaragaman genom non manusia

04 Pendukung Penelitian

00 Laboratorium Bioinformatika

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mendukung bioinformatika dan analisis data untuk semua kelompok penelitian di dalam Institut Eijkman serta mengelola infrastruktur IT dan komputasi untuk institute

01 Laboratorium Biosafety Level 3

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan laboratorium biosafety level 3, alat pelindung khusus, seperti sendal karet, baju pengaman khusus, dan masker

02 Laboratorium Sequencing/Peruntunan DNA

Naskah- naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan sekuensing DNA untuk peneliti internal maupun masyarakat umum

03 Histopatologi dan Laboratorium TEM

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian mengenai Histopatologi (cabang biologi yang mempelajari kondisi dan fungsi jaringan dalam hubungannya dengan penyakit

-39-

- 05 Terapan di bidang biologi molekuler medis dan nonmedis
 - 00 Laboratorium Sitogenetika

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan sitogenetika (SITOGENETIKA adalah ilmu yang berkembang dari ilmu pengetahuan sitologi dan genetika. Ilmu ini mempelajari perilaku kromosom-kromosom selama mitosis dan meiosis, hubungan kromosom dengan transmisi dan rekombinasi dari gen-gen, dan mempelajari penyebab serta akibat dari perubahan struktur dan jumlah kromosom)

- 01 Unit Forensik DNA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan forensik DNA melakukan penelitian tentang penggunaan DNA untuk identifikasi manusia dan spesies individu yang meliputi: uji keturunan (ayah dan / atau persalinan), DVI (Identifikasi Korban Bencana), identifikasi pelaku, identifikasi spesies satwa liar

- 02 Unit Konseling Genetik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan konseling genetik yang memberikan deteksi beragam kelainan genetik seperti talasemia, Atrofi Muscular Spinal (SMA), Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), achondroplasia, sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, Gangguan Sex Development (DSD), Prader Willi dan / atau Angelman Syndromes, dan kelainan atau sindrom lainnya

- 06 Layanan Penunjang Laboratorium

Naskah-naskah yang berkaitan dengan operasional dan manajemen laboratorium

- 07 Bimbingan teknis/workshop/seminar penyakit menular, penyakit tidak menular dan kelainan genetika, keanekaragaman genom, pendukung penelitian, terapan dibidang biologi molekuler medis dan non medis dan layanan penunjang laboratorium

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar penyakit menular, penyakit tidak menular dan kelainan genetika, keanekaragaman genom, pendukung penelitian, terapan dibidang biologi molekuler medis dan non medis dan layanan penunjang laboratorium

- 08 Monitoring dan evaluasi penyakit menular, penyakit tidak menular dan kelainan genetika, keanekaragaman genom, pendukung penelitian, terapan dibidang biologi molekuler medis dan non medis dan layanan penunjang laboratorium

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi penyakit menular, penyakit tidak menular dan kelainan genetika, keanekaragaman genom, pendukung penelitian, terapan dibidang biologi molekuler medis dan non medis dan layanan penunjang laboratorium

BI PEMBUDAYAAN IPTEK

00 Kebijakan peragaan dan pembudayaan ilmu pengetahuan teknologi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kebijakan peragaan dan pembudayaan ilmu pengetahuan teknologi

01 Peragaan IPTEK

00 Pengembangan Peragaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan peragaan

01 Peragaan Indoor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peragaan indoor

02 Peragaan Outdoor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peragaan outdoor

03 Peragaan Keliling

Naskah-naskah yang berkaitan dengan peragaan keliling

04 Perawatan Peragaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perawatan peragaan

05 Pemanduan Peragaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanduan peragaan

06 Pemanfaatan Peragaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan peragaan terkait peminjaman, hibah, sumbangan

07 Layanan Peragaan Pengunjung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan peragaan pengunjung

02 Program IPTEK

00 Pengembangan Program

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan program IPTEK

01 Program Regular

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program regular IPTEK (yang sudah terjadwal)

-41-

- 02 Program Non Regular
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program non regular
 - 03 Layanan Program
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan program
 - 03 Promosi
 - 00 Promosi ke Sekolah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi yang berhubungan dengan pemasaran PP-IPTEK ke Sekolah
 - 01 Promosi ke Lembaga Pemerintah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi yang berhubungan dengan pemasaran PP-IPTEK ke Lembaga Pemerintah
 - 02 Promosi ke Lembaga Swasta
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan promosi yang berhubungan dengan pemasaran PP-IPTEK ke Lembaga Swasta
 - 03 Layanan Pengunjung
Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan pengunjung
 - 04 Science Center Daerah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan science center daerah
 - 05 Forum Komunikasi Asosiasi Science Center Indonesia
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum komunikasi asosiasi science center Indonesia
 - 06 Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi peragaan, program, promosi dan science center daerah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi peragaan, program, promosi dan science center daerah
 - 07 Monitoring dan evaluasi meliputi peragaan, program, promosi dan science center daerah
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan evaluasi meliputi peragaan, program, promosi dan science center daerah
- AK AKADEMIK LLDIKTI
- 00 Kurikulum PTS

-42-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan, pengendalian dan pembinaan kurikulum PTS

01 Uji Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan uji kompetensi mulai dari awal pelaksanaan sampai penetapan kelulusan mahasiswa

02 Legalisasi Ijazah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan legalisasi ijazah dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh LLDIKTI

03 Pengembangan Ketenagaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan ketenagaan/dosen

04 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat

KH KEMAHASISWAAN LLDIKTI

00 Beasiswa

00 Bidikmisi, BPPPA, PPA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan beasiswa Bidikmisi, BPPPA, dan PPA

01 Sosialisasi/bimbingan program beasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi/bimbingan program beasiswa

02 Laporan beasiswa/pertukaran mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan beasiswa/pertukaran beasiswa

01 Kegiatan Mahasiswa

00 Program Kreativitas Mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program kreativitas mahasiswa

01 Program Kewirausahaan Mahasiswa

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program kewirausahaan mahasiswa

02 Lomba/Kompetisi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan lomba/kompetisi mulai dari penyampaian informasi sampai hasil laporan kegiatan antara lain: lomba mahasiswa berprestasi, debat bahasa inggris, paduan suara, olimpiade, MTQ

KL KELEMBAGAAN LLDIKTI

-43-

- 00 Administrasi Akreditasi dan Kelembagaan
 - 00 Rekomendasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian rekomendasi terkait pendirian perguruan tinggi swasta, pengembangan/penambahan program studi baru, perubahan bentuk perguruan tinggi, penutupan perguruan tinggi, penggabungan perguruan tinggi, pendidikan jarak jauh
 - 01 Pendampingan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pendampingan penjaminan mutu
- 01 Kebijakan-kebijakan Pendidikan Tinggi
 - 00 Sosialisasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi kebijakan-kebijakan Kementerian pada perguruan tinggi swasta
 - 01 Penyelesaian Sengketa/konflik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa/konflik berupa pendampingan fasilitasi
- 02 Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta
 - 00 Fasilitasi peningkatan perguruan tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi peningkatan perguruan tinggi
 - 01 Sarana prasarana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses bantuan/hibah sarana prasarana
 - 02 Kerja sama

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerja sama antar perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, perguruan tinggi dengan stake holder, perguruan tinggi dengan perusahaan
- 03 Sistem Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sistem informasi, proses belajar mengajar, tri dharma perguruan tinggi, registrasi dosen

POLA KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

PR PERENCANAAN

00 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan

00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

02 Rencana Strategis (Renstra)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis

03 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

01 Rencana Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

00 Dokumen usulan rencana kerja (pra pagu indikatif)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja

01 Penyusunan rencana kerja (renja) pagu indikatif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja (pagu indikatif)

02 Penyusunan rencana kerja dan anggaran pagu anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja (pagu anggaran)

03 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Pagu Alokasi Anggaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja (pagu alokasi)

02 Perjanjian Kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kinerja dengan atasan langsung

03 Perencanaan Program dan Anggaran

00 Operasional dan Rutin

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan alokasi operasional dan rutin

-45-

- 01 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
- 02 Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan KPBU
- 03 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SBSN
- 04 Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT)/ Biaya Kuliah Tunggal (BKT)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT)/ Biaya Kuliah Tunggal (BKT)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- 05 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan PNBP
- 06 Badan Layanan Umum (BLU)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana program dan anggaran Badan layanan Umum
- 07 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan PTN BH
- 08 Program Prioritas dari satker dan/atau unit eselon I di lingkungan Kemenristekdikti
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Program Prioritas dari satker dan/atau unit eselon I di lingkungan Kemenristekdikti
- 09 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan APBN-P
Naskah-naskah yang berkaitan dengan APBN-P
- 04 Revisi Dokumen Anggaran
 - 00 Revisi DIPA dan POK
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan revisi anggaran, baik revisi anggaran yang merupakan kewenangan Dirjen Pembendaharaan, Dirjen Anggaran, maupun kuasa pengguna anggaran (KPA).

-46-

- 05 Kegiatan Sidang
 - 00 Sidang Kabinet

Naskah-naskah yang berkaitan dengan materi/bahan untuk kegiatan sidang kabinet, hasil sidang kabinet, dan laporan
 - 01 Rapat Terbatas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan materi/bahan untuk kegiatan rapat terbatas, hasil rapat terbatas, dan laporan
- 06 Rapat/ Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja
 - 00 Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Rapat DPR terkait anggaran Kementerian/ Lembaga
 - 01 Rakor Tingkat Menteri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan materi/bahan untuk kegiatan rapat koordinasi tingkat menteri dan hasil rakor tingkat Menteri
 - 02 Rakor dengan Perguruan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi dengan perguruan tinggi
 - 03 Rakor/Raker MWA (Majelis Wali Amanat)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi atau rapat kerja MWA (Majelis Wali Amanat)
 - 04 Rakor/Raker Senat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi atau rapat kerja Senat
 - 05 Rakor/Raker/Forum Rektor

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi atau rapat kerja atau forum rektor
 - 06 Rakor/Raker dengan LLDIKTI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rapat koordinasi atau rapat kerja dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi baik materi dan hasil rapat
- 07 Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Kementerian
 - 00 Pemantauan dan Evaluasi

Naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

-47-

- 01 Dokumen Realisasi Capaian Kinerja Program, Capaian Output, dan Anggaran pada SIMonev
Naskah - naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi Eselon I dan Satker sampai menjadi dokumen
- 02 Dokumen Hasil Fact Finding dan Rekomendasinya (Kegiatan Prioritas, Kegiatan PTN/LLDIKTI)
Naskah - naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fact finding sampai menjadi dokumen
- 03 Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja LPNK (Lembaga Pemerintahan Non Kementerian)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) sampai jadi dokumen
- 08 Pemantauan, Evaluasi Program dan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI
- 09 Laporan
 - 00 Laporan Berkala
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja yang disusun seperti (laporan Triwulan, laporan Tahunan) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - 01 Laporan Khusus
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti : Pidato Presiden, Rapat dengan pendapat dengan DPR RI.
 - 02 Progress Report
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun).
 - 03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Laporan Kinerja (LAKIN)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal.

04 Evaluasi akuntabilitas kinerja PTN/LLDIKTI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di PTN dan LLDIKTI

KP KEPEGAWAIAN

00 Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

00 Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik di bidang manajemen kepegawaian

01 Penyusunan kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

02 Perumusan kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

03 Pemberian masukan dan dukungan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian masukan dan dukungan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

04 Penetapan kebijakan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian

05 *Memorandum of Understanding*

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan *Memorandum of Understanding*

01 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Apratur Sipil Negara

00 Perencanaan Kebutuhan ASN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan ASN

01 Perencanaan Pertimbangan Formasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perencanaan Pertimbangan Formasi

02 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

03 Standarisasi Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Standarisasi Jabatan

-49-

- 02 Formasi dan Pengadaan Pegawai
 - 00 Formasi ASN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Formasi ASN
 - 01 Pengadaan ASN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan ASN
 - 02 Sistem Rekrutmen ASN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sistem Rekrutmen ASN
- 03 Mutasi Pegawai
 - 00 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
 - 01 Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan
 - 02 Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional
 - 03 Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai
 - 04 Usulan Peninjauan Masa Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Peninjauan Masa Kerja
 - 05 Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat

04 Pengembangan Karir

- 00 Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta

- 01 Usulan Penyesuaian ijazah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Usulan Penyesuaian ijazah

- 02 Penyusunan sistem karier

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan sistem karier

- 03 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja

- 04 Angka Kredit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Angka Kredit

05 Kinerja Aparatur Sipil Negara

- 00 Hasil penilaian kinerja dan standar kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Hasil penilaian kinerja dan standar kerja

- 01 Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN

- 02 Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN

06 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

- 00 Kode Etik Pegawai

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kode Etik Pegawai ASN

-51-

- 01 Disiplin
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Disiplin ASN
- 02 Pemberhentian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberhentian ASN
- 03 Pensiun
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pensiun ASN
- 07 Bantuan Hukum
 - 00 Pemberian Bantuan Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum
 - 01 Bantuan Hukum Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum pegawai
- 08 Status dan Kedudukan Pegawai
 - 00 Pertimbangan status kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pertimbangan status kepegawaian
 - 01 Pertimbangan kedudukan kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pertimbangan kedudukan kepegawaian
 - 02 Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai
 - 03 Perselisihan/sengketa kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perselisihan/sengketa kepegawaian
- 09 Sistem Informasi Kepegawaian
 - 00 Pengolahan data dan informasi kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengolahan data dan informasi kepegawaian
 - 01 Pengembangan sistem informasi kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan sistem informasi kepegawaian
 - 02 Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian

- 10 Pengawasan dan pengendalian
 - 00 Formasi, pengadaan dan pasca diklat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Formasi, pengadaan dan pasca diklat
 - 01 Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan
 - 02 Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja
 - 03 Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN
 - 04 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
 - 05 Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorar
- 11 Administrasi Pegawai
 - 00 Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan surat perintah dinas/ surat tugas
 - 01 Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan
 - 02 Cuti Alasan Penting
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Cuti Alasan Penting
 - 03 Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara
 - 04 Dokumentasi Identitas Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Dokumentasi Identitas Pegawai

-53-

- 05 Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- 06 Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan
- 12 Kesejahteraan Pegawai
 - 00 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
 - 01 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS
 - 02 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan
 - 03 Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial
 - 04 Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas
 - 05 Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas
 - 06 Berkas tentang Pemberian Tali Kasih
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas tentang Pemberian Tali Kasih
 - 07 Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
 - 08 Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi
 - 09 Berkas tentang Medical Record
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas tentang Medical Record

-54-

13 Administrasi Perseorangan

00 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil

01 Berkas Perseorangan PPPK

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas Perseorangan PPPK

02 Berkas Perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas Perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional

14 Berkas Perseorangan Menteri/ Wakil Menteri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Berkas Perseorangan Menteri/ Wakil Menteri

15 Penilaian Kompetensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian kompetensi

KU KEUANGAN

00 Pelaksanaan Anggaran

00 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran yang berupa penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan), maupun revisi DIPA/POK.

01 RAB (Rencana Anggaran Biaya)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan Rencana Anggaran Biaya yang terkait pengeluaran anggaran kegiatan

01 Pengeluaran Anggaran

00 Tunjangan kinerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tunjangan kinerja pegawai

01 Pengeluaran Anggaran Pelaksana Kegiatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran pengeluaran, mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang), SPP-LS (Langsung), SPP-UP (Uang Persediaan), SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan), Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Juklak/mechanisme pengelolaan APBN serta Bahan Nota Keuangan.

02 Penggajian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan anggaran berupa penggajian kepada pegawai, termasuk daftar gaji pegawai dan bukti pembayarannya, serta usulan tunjangan kinerja

03 KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa KP4 yaitu surat Keterangan untuk Mendapat Tunjangan Keluarga dan Surat Keterangan lainnya.

02 Pengelolaan Perbendaharaan

00 Perbendaharaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa Surat/usulan Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan.

01 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan, penataan, pembinaan PNBP dan aplikasi SIMPONI

02 Badan Layanan Umum (BLU)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan, penataan, pembinaan BLU

03 Kartu Pengawasan Kredit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa kartu pengawasan kredit anggaran.

04 Pajak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan Surat Setoran Pajak (SSP).

05 Penerimaan Non Pajak

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa penerimaan dan penyetoran non pajak

melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) ke Kas Negara.

- 06 Berita Acara Pemeriksaan Kas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan berupa berita acara pemeriksaan kas.
- 07 Verifikasi anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran
- 08 Pembukuan Rekening
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembukuan Rekening
- 09 Pembukuan Anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran yang berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP) dan kartu-kartu realisasi anggaran dan kartu pengawasan realisasi anggaran.
- 10 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti ; Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang/uang, SK tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke Kas Negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyelesaian TP-TGR
- 11 Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan hasil penyelesaian LHP BPK RI, atau LHP lainnya yang ditindak lanjuti sampai dengan pelaporan.
- 12 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/ ITJEN/ BPKP
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan hasil pemeriksaan dari BPK, ITJEN, BPKP
- 03 Administrasi Keuangan
 - 00 Keterangan Penghasilan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan ketatausahaan keuangan berupa keterangan penghasilan perorangan.

-57-

- 01 Permohonan Pinjaman
Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketatausahaan keuangan yang berupa permohonan pinjaman.
- 02 Iuran Keanggotaan Organisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan iuran keanggotaan dalam organisasi baik tingkat nasional maupun internasional mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran anggota sampai laporan.
- 03 Speciment Tanda Tangan KPA, BP, PPK, dan BPP
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Speciment Tanda Tangan KPA, BP, PPK, dan BPP
- 04 Belanja
 - 00 Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen Pembayarannya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk dokumen-dokumen pembayarannya
 - 01 Belanja Modal
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Belanja Modal
 - 02 Belanja Operasional lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Belanja Operasional lainnya
- 05 Bantuan Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bantuan dana dari Luar Negeri
- 06 Layanan Keuangan
 - 00 Administrasi perbendaharaan dan penggajian
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Administrasi perbendaharaan dan penggajian
 - 01 Verifikasi anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Verifikasi anggaran
 - 02 Koordinasi keuangan (Rekonsialisasi)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Koordinasi keuangan (Rekonsialisasi)
 - 03 Koordinasi pelaksanaan kegiatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Koordinasi pelaksanaan kegiatan

-58-

- 04 Sosialisasi keuangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi keuangan
- 07 Akuntansi dan Pelaporan
 - 00 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
 - 01 Perhitungan anggaran
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Perhitungan anggaran
 - 02 Laporan keuangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan yang telah dilakukan
 - 03 Evaluasi laporan keuangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan yang telah dilakukan
 - 04 Pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan
- TU KETATAUSAHAAN
 - 00 Administrasi Menteri/Pimpinan
 - 00 Sambutan Pidato Menteri/Pimpinan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sambutan Pidato Menteri/Pimpinan yang ada di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 01 Ucapan (ucapan terimakasih, simpati, pesan/kesan, dan rekomendasi)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian ucapan selamat, ucapan terimakasih, ucapan belasungkawa, dan ucapan permohonan maaf, rekomendasi yang ada di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 02 Risalah/notula
Naskah-naskah yang berkaitan dengan risalah/notula menteri yang ada di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

-59-

- 03 Memori jabatan pimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Memori jabatan pimpinan yang ada di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 01 Keprotokolan
 - 00 Upacara/ Acara Kedinasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, upacara serah terima jabatan
 - 01 Kunjungan Kedinasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kunjungan Tamu Negara
 - 02 Acara Pimpinan (agenda pemimpin dan kunjungan kerja)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Agenda Pemimpin dan kunjungan kerja
 - 03 Audiensi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audiensi sampai laporan
- 02 Pencetakan, Penggandaan, dan Penjilidan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pencetakan, Penggandaan, dan Penjilidan (naskah pidato/sambutan Menteri, buku acara Menteri/pejabat, buku agenda kegiatan dan buku alamat pejabat) dalam rangka kedinasan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 03 Administrasi Rapat Menteri/Pimpinan
 - 00 Rapat Pimpinan Kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan risalah atau notula Rapat Pimpinan Kementerian setingkat Menteri sampai Eselon II
 - 01 Rapat Terbatas Pimpinan Kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan risalah atau notula Rapat Terbatas Pimpinan Kementerian setingkat Menteri dengan Eselon lainnya
 - 02 Rapat Kegiatan Kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan risalah atau notula Rapat Kegiatan Kementerian yang melibatkan unsur internal maupun eksternal Kementerian
- 04 Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan Perjalanan Dinas Dalam Negeri termasuk kegiatan permohonan ijin perjalanan dinas dalam negeri sampai pembiayaannya

-60-

- 05 Praktik Kerja Lapangan/Magang
 - 00 SMU/SMA/SMK

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Magang SMU/SMA/SMK
 - 01 Perguruan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Magang Perguruan Tinggi
- 06 Organisasi Non Kedinasan
 - 00 KORPRI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - 01 Dharma Wanita

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi dharma wanita Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - 02 Koperasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan koperasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
 - 03 Yayasan Kemenristekdikti

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Yayasan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 04 Asosiasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi Asosiasi.
 - 05 Organisasi non kedinasan lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non kedinasan lainnya.
- KA KEARSIPAN
 - 00 Persuratan di Kementerian
 - 00 Pengurusan Surat Masuk di Kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk
 - 01 Pengurusan Surat Keluar di Kementerian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar

-61-

- 01 Penyimpanan dan pemeliharaan arsip
 - 00 Penyimpanan arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyimpanan arsip
 - 01 Pemeliharaan arsip

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan arsip
- 02 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
- 03 Layanan Arsip (Peminjaman dan penggunaan arsip)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Layanan Arsip (Peminjaman dan penggunaan arsip)
- 04 Penyusutan
 - 00 Pemindahan Arsip Inaktif

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemindahan Arsip Inaktif
 - 01 Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna
 - 02 Penyerahan arsip statis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyerahan arsip statis
- 05 Pembinaan Kearsipan
 - 00 Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan
 - 01 Bimbingan Teknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan Teknis
 - 02 Supervisi dan monitoring

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Supervisi dan monitoring

-62-

PL PERLENGKAPAN DAN BARANG MILIK NEGARA

00 Perencanaan Perlengkapan dan Barang Milik Negara

00 Analisa Kebutuhan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan analisa kebutuhan dari unit kerja.

01 Daftar Rekanan Mampu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

02 Tata Ruang

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaturan tata ruang kantor.

01 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

00 Pengadaan Barang dan Jasa Secara langsung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang dengan nilai pengadaan di bawah 200 juta rupiah

01 Pengadaan melalui E-katalog

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan terhadap barang yang sudah terdaftar di dalam e-Katalog LKPP

02 Pengadaan barang lelang sederhana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang diatas 200 juta sampai dengan 5 Milyar

03 Pengadaan barang lelang umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan barang diatas 5 Milyar

04 Pengadaan jasa seleksi sederhana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan jasa seleksi sederhana diatas 50 juta sampai 200 juta

05 Pengadaan jasa seleksi umum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengadaan jasa seleksi umum diatas 200 juta

02 Pengelolaan Barang Milik Negara

00 Penggunaan Barang Milik Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan barang milik Negara

-63-

- 01 Pemanfaatan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan Barang milik Negara
 - 02 Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahtanganan Barang milik Negara
 - 03 Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara
- RT KERUMAHTANGGAAN
- 00 Pemeliharaan/ Perbaikan
 - 00 Barang Bergerak/ Inventaris
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan atau perbaikan barang bergerak atau inventaris
 - 01 Barang Tidak Bergerak/Investasi/Asset
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan atau perbaikan barang tidak bergerak atau investasi atau asset
 - 01 Fasilitas Kantor
 - 00 Kendaraan Dinas
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas, seperti: formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas, laporan kehilangan kendaraan.
 - 01 Ruang Rapat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan ruang rapat berikut sarana kelengkapan rapat.
 - 02 Telekomunikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan sarana telekomunikasi (telepon).
 - 03 Fasilitas Kantor lainnya
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan Fasilitas Kantor lainnya
 - 02 Keamanan dan Ketertiban
 - 00 Pengamanan, penjagaan, pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas

-64-

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengamanan, penjagaan, pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas terdiri daftar piket satpam/security, buku/formulir tamu, pengaturan akses masuk, surat izin masuk-keluar orang/barang lingkungan kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan pengaturan perparkiran termasuk kartu parkir.

01 Laporan ketertiban dan keamanan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan ketertiban dan keamanan meliputi kehilangan, kerusakan, kecelakaan dan gangguan.

02 Pemadam Kebakaran

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemadam kebakaran di lingkungan PUSPIPTEK

03 Perawatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perawatan lingkungan kantor seperti daftar piket pramukantor, cleaning service di lingkungan kantor Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

04 Mess, Rumah Jabatan, Rumah Dinas, Wisma/Villa, Hostel, Penginapan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Mess, Rumah jabatan, Rumah Dinas, Wisma/Villa, Hostel, Penginapan Pegawai di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

05 Kebersihan dan Taman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kebersihan dan Taman di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

06 Pelayanan Rumah Tangga

00 Layanan Pengelolaan Gedung

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pengelolaan gedung

01 Layanan wisma tamu

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Layanan wisma tamu

02 Layanan graha widya bhakti

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Layanan graha widya bhakti

-65-

- 03 Layanan balai pengobatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Layanan balai pengobatan
- 04 Sarana Prasarana Pendukung Inkubasi Bisnis Teknologi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Sarana Prasarana Pendukung Inkubasi Bisnis Teknologi
- 05 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan BPJS
- 06 Kesehatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai, general check up pejabat.
- 07 Rekreasi / Kesenian / Olah Raga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rekreasi / Kesenian / Olah Raga sebagai bentuk refreshing pegawai dalam bekerja
- 08 Bantuan Sosial
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk di dalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya.
- 09 Perumahan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumahan pegawai Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

HK HUKUM

- 00 Program Legislasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan program-program legislasi Kementerian dan Program-program legislasi Nasional
- 01 Produk Hukum
 - 00 Penetapan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan) yaitu Keputusan Penetapan Kegiatan dan Keputusan Pelaksanaan Kegiatan di bidang Ristek dan Dikti

01 Pengaturan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur seperti Peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, instruksi, prosedur tetap atau prosedur operasional standar, surat edaran di bidang Riset dan dikti mulai dari persiapan, analisa, penyusunan, pengkoordinasian, perumusan dan pembahasan, sampai dengan pengesahannya.

02 Telaah Hukum

00 Telaah Hukum Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk internal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (PTN Satker, BLU, LLDIKTI, dan Unit Utama)

01 Telaah Hukum Eksternal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum untuk eksternal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

03 Advokasi Hukum Litigasi

00 Advokasi Hukum Perkara Peradilan Tata Usaha Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian advokasi hukum dalam kasus hukum Tata Usaha Negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

01 Advokasi Hukum Perkara Perdata

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum perdata di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

02 Advokasi Hukum Perkara Pidana

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum dalam kasus hukum pidana di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

04 Advokasi Hukum Non Litigasi

00 Kajian Hukum

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kajian hukum

01 Pendampingan Saksi/Ahli

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan memberikan keterangan untuk saksi atau ahli dari Kemenristekdikti

02 Pemberian Keterangan sebagai Saksi/Ahli

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan memberikan keterangan saksi atau ahli dari Kemenristekdikti di Kepolisian

-67-

- 03 Telaah Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam negeri mulai dari persiapan, penandatanganan, pembinaan, sampai dengan evaluasi naskah kerjasama dalam negeri
- 04 Telaah Naskah Perjanjian Kerjasama luar negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama luar negeri mulai dari persiapan, penandatanganan sampai dengan evaluasi naskah kerjasama luar negeri.
- 05 Workshop/Sosialisasi/Bimbingan Teknis Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan workshop hukum
- 06 Inventarisasi dan Yurisprudensi Perkara Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Inventarisasi dan yurisprudensi perkara
- 05 Sosialisasi Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum dan penyebarluasan peraturan dan instrumen hukum kepada lembaga maupun perorangan.
- 06 Dokumentasi Hukum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi hukum, perluasan dan penyebaran informasi hukum
- OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
 - 00 Organisasi
 - 00 Pembentukan, penataan, dan penutupan/pembubaran organisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman pembentukan, penataan (perubahan nomenklatur, pengusulan, penambahan) dan penutupan/ pembubaran organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 01 Tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sampai dengan penetapan

-68-

- 02 Rincian tugas unit kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rancangan rincian tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 03 Sistem pengukuran dan penilaian kinerja organisasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengkajian dan penyusunan sistem pengukuran dan penilaian kinerja organisasi
- 04 Penyajian data dan informasi kelembagaan pengelola riset, teknologi, dan pendidikan tinggi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyajian data dan informasi kelembagaan pengelola riset, teknologi, dan pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 01 Tata Laksana
 - 00 Analisis jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan sampai dengan penetapan organisasi analisis jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 01 Sistem dan prosedur
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan sampai dengan penetapan peta bisnis proses, SOP, dan standar pelayanan publik di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 02 Pembinaan ketatalaksanaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 03 Evaluasi Analisis Jabatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan sampai dengan penetapan evaluasi analisis jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 04 Evaluasi Sistem dan prosedur
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan sampai dengan penetapan evaluasi sistem dan prosedur di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
 - 05 Reformasi Birokrasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

HM HUBUNGAN MASYARAKAT/ KOMUNIKASI PUBLIK

- 00 Hubungan Antar lembaga dan Komunikasi Publik
 - 00 Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Lembaga Pemerintah

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan, hubungan antar lembaga dan komunikasi publik/penyampaian pesan dan informasi kepada lembaga pemerintah
 - 01 Hubungan dan komunikasi publik Organisasi ristekdikti Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan dan komunikasi publik Organisasi ristekdikti Nasional
 - 02 Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan, hubungan antar lembaga dan komunikasi publik/penyampaian pesan dan informasi kepada lembaga swadaya masyarakat
 - 03 Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Pemangku Kepentingan lainnya

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan, hubungan antar lembaga dan komunikasi publik/penyampaian pesan dan informasi kepada pemangku kepentingan lainnya
 - 04 Bakohumas

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan (Bakohumas)
- 01 Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Media Massa
 - 00 Press Release

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan press release
 - 01 Laporan Hasil Monitoring dan Analisa Pemberitaan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Monitoring dan Analisa Pemberitaan termasuk Guntingan Berita/kliping koran/poster/majalah dan kunjungan wartawan/liputan
 - 02 Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Internal

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan, hubungan antar satuan kerja dan komunikasi publik/penyampaian pesan dan informasi kepada internal
 - 03 Layanan Informasi Publik
 - 00 Pengaduan Masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyusunan data pangaduan masyarakat dan informasi yang diterima dari publik melalui call center, email, help desk Information dan SMS Centre yang datang dari internal dan eksternal Kemenristekdikti sampai dengan laporan penyelesaiannya.

01 PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

04 Unit Layanan Terpadu

00 Penyelenggaraan Layanan Terpadu (PINTU)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Layanan Terpadu (PINTU)

01 Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Terpadu (PINTU)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Terpadu (PINTU)

05 Laporan Kegiatan Kehumasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Kegiatan Kehumasan termasuk anugerah Humas

06 Publikasi dan Dokumentasi

00 Informasi profil unit kerja

Naskah-naskah yang berkaitan dengan informasi profil unit kerja

01 Laporan Kegiatan Publikasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Kegiatan Publikasi termasuk Pameran/Sayembara, Talkshow, Festival, Pembuatan Spanduk, brosur dan Iklan

02 Pengumuman/ Pemberitahuan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumuman/ pemberitahuan terkait bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

KS KERJASAMA

00 Sistem Informasi Kerjasama

00 Sistem Informasi Kerjasama dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dalam aplikasi dan pengembangan Sistem Informasi Kerjasama dalam Negeri di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi

-71-

- 01 Sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dalam aplikasi dan pengembangan Sistem Informasi Kerjasama luar Negeri di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi
- 02 Data dan Informasi Perkembangan Kerja Sama
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dalam penyusunan data dan informasi perkembangan kerja sama di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi
- 01 Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - 00 Permohonan ijin
Naskah-naskah yang berkaitan dengan permohonan perijinan perjalanan dinas luar negeri
 - 01 Rekomendasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rekomendasi Perijinan Perjalanan Dinas Luar Negeri
 - 02 Pengurusan Paspor
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengurusan Paspor Dinas
 - 03 Pengurusan Visa
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengurusan Visa
- 02 Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan serta kenang-kenangan kepada instansi atau organisasi serta perorangan yang memiliki jasa atau prestasi di bidang Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- DP DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN
 - 00 Laporan Hasil Dokumentasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Dokumentasi
 - 01 Pengadaan bahan pustaka dan koleksi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bahan pustaka baik koleksi referensi seperti ensiklopedia, kamus, dll, koleksi langka, koleksi buku, koleksi media , dan lainnya di perpustakaan
 - 02 Daftar koleksi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar koleksi yang ada di perpustakaan

-72-

- 03 Penyimpanan deposit bahan pustaka
 - 00 Pengajuan ISBN ke Perpustakaan Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengajuan ISBN ke Perpustakaan Nasional
- 04 Layanan perpustakaan
 - 00 Peminjaman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan peminjaman koleksi di perpustakaan
 - 01 Pengembalian

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembalian koleksi di perpustakaan
- 05 Pelestarian bahan pustaka

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelestarian bahan pustaka
- PA PENGAWASAN
 - 00 Rencana Pengawasan
 - 00 Rencana Strategis Pengawasan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Strategis Pengawasan
 - 01 Rencana Kerja Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Kerja Tahunan
 - 02 Rencana Kinerja Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Kinerja Tahunan
 - 03 Penetapan Kinerja Tahunan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan Kinerja Tahunan
 - 04 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rakor Pengawasan Tingkat Nasional
 - 01 Pelaksanaan Pengawasan
 - 00 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE),

-73-

Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)

- 01 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)

- 02 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut (TL)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut (TL)

- 03 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan masyarakat

- 04 Laporan Pemutakhiran Data

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Pemutakhiran Data

- 05 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Perkembangan Barang Milik Negara

- 06 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Kementerian, LPNK, PTN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Kementerian, LPNK, PTN

- 07 Good Corporate Governance (GCG)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Good Corporate Governance (GCG)

- 02 Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing mulai dari usulan program, penetapan sampai dengan penerbitan Surat

-74-

DL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

00 Kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan

01 Perencanaan dan Program Pendidikan dan Pelatihan

00 Pelatihan Dasar CPNS

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mulai dari analisa/ perencanaan kebutuhan, penyusunan program penyelenggaraan diklat Pelatihan Dasar CPNS

01 Kepemimpinan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mulai dari analisa/ perencanaan kebutuhan, penyusunan program penyelenggaraan diklat kepemimpinan

02 Teknis

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mulai dari analisa/ perencanaan kebutuhan, penyusunan program penyelenggaraan diklat teknis meliputi : anggaran, peserta, waktu pelaksanaan, sistem dan metode, bahan ajar, kurikulum/silabus, tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan teknis

03 Fungsional

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mulai dari analisa/ perencanaan kebutuhan, penyusunan program penyelenggaraan diklat Fungsional

02 Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan

00 Dalam Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan dalam negeri

01 Luar Negeri

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan serta Pengiriman Peserta Pendidikan Gelar ke Luar negeri

03 Tenaga Kediklatan

00 Pengelola

Naskah-naskah yang berkaitan dengan tenaga kediklatan pengelola Pendidikan dan Pelatihan

01 Penyelenggara

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan

-75-

- 02 Pengajar/ Widyaiswara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajar Pendidikan dan Pelatihan
- 03 Pengelola Sistem Informasi Diklat (SIDA)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelola SIDA
- 04 Perancang Kurikulum
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perancang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan teknis/fungsional
- 05 Penganalisis Kebutuhan Diklat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penganalisis Kebutuhan Diklat Pendidikan dan Pelatihan teknis/fungsional
- 04 Peserta Pendidikan dan Pelatihan
 - 00 Pelatihan Dasar CPNS
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peserta Pendidikan dan Pelatihan prajabatan
 - 01 Kepemimpinan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
 - 02 Teknis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peserta Pendidikan dan Pelatihan teknis
 - 03 Fungsional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Peserta Pendidikan dan Pelatihan fungsional
- 05 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - 00 Pelatihan Dasar CPNS
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan prajabatan
 - 01 Kepemimpinan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan
 - 02 Teknis
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan teknis

-76-

- 03 Fungsional
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan fungsional
- 06 Sistem informasi Diklat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan sistem informasi diklat
- 07 Monitoring dan Evaluasi Diklat
 - 00 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan evaluasi perencanaan
 - 01 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama
 - 02 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program
 - 03 Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kediklatan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kediklatan
 - 04 Monitoring dan Evaluasi Peserta Diklat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Peserta Diklat
 - 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan diklat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan diklat
 - 06 Monitoring dan Evaluasi Alumni Pasca Diklat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Alumni Pasca Diklat
 - 07 Penjaminan Mutu Diklat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penjaminan mutu diklat
- 08 Akreditasi Diklat
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi diklat
- DI DATA DAN INFORMASI IPTEK DIKTI
 - 00 Kebijakan di bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi meliputi Infrastruktur, aplikasi,

-77-

dan sistem informasi, jaringan dan sarana, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

01 Jaringan & Sarana

00 Pengelolaan Data Center

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Data Center dari awal sampai monitoring dan evaluasi

01 Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK

02 Pengembangan Jaringan dan Sarana infrastruktur

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan Jaringan dan Sarana infrastruktur

03 Layanan Teleconference dan Video Confrence

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Layanan Teleconference dan Video Confrence

04 Dokumen Hosting

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan web site.

02 Aplikasi dan Sistem Informasi

00 Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi

01 Pemberian Fasilitas dan Layanan aplikasi sistem informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberian Fasilitas dan Layanan aplikasi sistem informasi

02 Pembaharuan Katalog Layanan Online

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pembaharuan Katalog Layanan Online

03 Pengelolaan Website Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan Website Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

04 Pemberian Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberian Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)

- 05 Pemeliharaan dan Keamanan Sistem Informasi
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemeliharaan dan Keamanan Sistem Informasi
- 03 Pengumpulan Data & Informasi IPTEK
 - 00 Instrumen pengumpulan data dan informasi di bidang iptek
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan instrumen pengumpulan data dan informasi di bidang iptek
 - 01 Pengelolaan data dan informasi dibidang iptek
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan data dan informasi dibidang iptek
 - 02 Pedoman pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan pedoman pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik
 - 03 Pengembangan sistem data statistik
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan sistem data statistik
 - 04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dibidang pengumpulan data di bidang iptek
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dibidang pengumpulan data di bidang iptek
- 04 Pengolahan Data & Informasi IPTEK
 - 00 Analisis data iptek
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan analisis data iptek
 - 01 Pengelolaan di bidang pengolahan data dan informasi iptek
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengelolaan di bidang pengolahan data dan informasi iptek
 - 02 Penyajian dan Layanan data statistik iptek
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyajian dan layanan data statistik iptek
 - 03 Pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan
Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan

-79-

- 04 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan di bidang pengolahan data dan informasi iptek

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan di bidang pengolahan data dan informasi iptek

- 05 Pengolahan Data PDDIKTI

- 00 Penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan PDDIKTI terintegrasi/ integrasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan PDDIKTI terintegrasi/ integrasi

- 01 Pengumpulan dan pengolahan data, kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data, kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat

- 02 Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

- 03 Pemanfaatan jaringan dan infrastruktur Teknologi Informasi di Lingkungan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemanfaatan jaringan dan infrastruktur Teknologi Informasi di Lingkungan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

- 04 Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

- 05 Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Database Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kumpulan data yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

- 06 Validasi dan Verifikasi Data pelaporan PDDIKTI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Validasi dan Verifikasi Data pelaporan PDDIKTI

- 07 Penyajian data kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyajian data kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 08 Pemutakhiran data kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemutakhiran data kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- 09 Penyiapan bahan integrasi dan sosialisasi Program PDDIKTI
 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan bahan integrasi dan sosialisasi Program PDDIKTI
- 10 Monitoring Dan Evaluasi Pengolahan Data Pendidikan Tinggi
 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pengolahan Data Pendidikan Tinggi
- 06 Informasi & Publikasi PDDIKTI
 - 00 Penyiapan bahan informasi dan publikasi di bidang Pendidikan Tinggi
 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan bahan informasi dan publikasi di bidang Pendidikan Tinggi
 - 01 Penyiapan bahan publikasi program di Lingkungan pusat
 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Penyiapan bahan publikasi program di Lingkungan pusat
 - 02 Pemberian layanan informasi dan publikasi di bidang Pendidikan tinggi
 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemberian layanan informasi dan publikasi di bidang Pendidikan tinggi
 - 03 Pengembangan strategi pelayanan informasi dan publikasi PDDIKTI
 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan strategi pelayanan informasi dan publikasi PDDIKTI
 - 04 Pemanfaatan PDDIKTI dibidang informasi dan publikasi data Pendidikan Tinggi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pemanfaatan PDDIKTI dibidang informasi dan publikasi data Pendidikan Tinggi

05 Desiminasi Publikasi PDDIKTI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Desiminasi kepada Pemangku Kepentingan

07 Monitoring dan Evaluasi Data dan Informasi

Naskah-naskah yang berkaitan dengan monitoring dan Evaluasi Pusat data dan informasi

A. JADWAL RETENSI ARSIP

Jadwal retensi arsip di Kementerian disusun berdasarkan urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan, Perencanaan serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan urusan Pendidikan dan Kebudayaan, urusan Kearsipan, Keuangan, Kepegawaian, Non Keuangan dan Non Kepegawaian, yang dikelompokkan dalam fungsi fasilitatif dan substantif serta sesuai dengan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/67/2018 Tanggal 17 April 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana berikut:

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

[illegible]

1	2	3	4	5
4	Pembelajaran Khusus a Pengembangan pembelajaran pendidikan jarak jauh 1) Hibah (SK Hibah) Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh 2) Kontrak Hibah Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh 3) Laporan Hibah Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh 4) TOR Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh b Pengembangan pembelajaran pendidikan khusus 1) Hibah (SK Hibah) Pembelajaran Pendidikan Khusus 2) Kontrak Hibah Pembelajaran Pendidikan Khusus 3) Laporan Hibah Pembelajaran Pendidikan Khusus 4) TOR Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Khusus	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
5	Pengakuan Kualifikasi a Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran 1) Hibah (SK Hibah) capaian pembelajaran 2) Kontrak Hibah capaian pembelajaran 3) Laporan Hibah capaian pembelajaran 4) TOR Kegiatan capaian pembelajaran b Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran lampau 1) Hibah (SK Hibah) rekognisi pembelajaran lampau 2) Kontrak Hibah rekognisi pembelajaran lampau 3) Laporan Hibah rekognisi pembelajaran lampau 4) TOR Kegiatan rekognisi pembelajaran lampau c Penetapan pengakuan capaian pembelajaran lampau 1) SK disetarakan 2) Ijazah RPL d Penyetaraan liziah Luar Negeri	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
		1 Tahun	4 Tahun	Musnah
		1 Tahun	4 Tahun	Permanen

1	2	3	4	5
e	1) Persyaratan dalam penyeteraan ijazah luar negeri : a. paspor b. transkrip akademik c. tesis d. ijazah e. SK Setneg (PNS) f. SK Tugas Belajar/ Ijin Belajar g. Referensi Kedubes/ Atdikbud h. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) 2) SK Hasil Penyetaraan Ijazah Luar Negeri PINSIVIL (Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Informasi Verifikasi Ijazah Secara Elektronik) 1) Panduan Penomoran Ijazah Nasional 2) Panduan Sistem Informasi Verifikasi Ijazah Secara Elektronik 3) Daftar Nomor Ijazah Secara Elektronik	2 Tahun 2 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun 4 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah
6	Beasiswa Program Profesi Guru - SM3T dan PPGT 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Usul Penerima Beasiswa 3) Daftar calon penerima beasiswa 4) Seleksi calon penerima mahasiswa 5) Penetapan Penerima Beasiswa 6) Perpanjangan beasiswa 7) Laporan	1 Tahun Setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
7	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, pengakuan kualifikasi yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

[illegible]

-87-

1	2	3	4	5
d	2) Daftar Calon Mahasiswa NUDC 3) Daftar Hasil Seleksi 4) SK Penetapan Juara NUDC Pengiriman Delegasi Internasional Mathematic Competition (IMC) 1) Administrasi Persuratan 2) Surat Tugas 3) Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
e	Pengiriman Delegasi World University Debating Championship (WUDC) 1) Administrasi Persuratan 2) Surat Tugas 3) Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3	Kreativitas			
a	Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM 5 Bidang)/ KRI/ KJI/KBGI/KMHE/ KRTI 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Perguruan Tinggi yang menjadi tuan rumah sosialisasi 3) Surat Pernyataan Kesediaan menjadi tuan rumah 4) Kontrak Penugasan 5) Berita Acara Rencana Pelaksanaan 6) SOP Pelaksanaan Sosialisasi 7) Laporan Kegiatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b	Program Kreativitas Mahasiswa 5 Bidang 1) Administrasi Persuratan 2) Unggah Proposal Daftar Proposal 3) Penetapan Peserta Pra Evaluasi: Hasil Evaluasi I Pra Evaluasi Hasil Pengumuman I 5) Penetapan Peserta Desk Evaluasi SK Penetapan peserta desk evaluasi 6) Desk Evaluasi Hasil Pengumuman Evaluasi II 7) Penetapan Pendanaan/Insentif: SK Penetapan Pendanaan 8) Entry Logbook (Catatan Harian): Daftar Logbook Peserta PKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-88-

1	2	3	4	5
	9) Unggah Laporan Kemajuan: Daftar Laporan Kemajuan PKM 10) Evaluasi Laporan Kemajuan: Hasil Evaluasi Laporan Kemajuan 11) Evaluasi Presentasi Money Eksternal Hasil Evaluasi Presentasi Monitoring Evaluasi Eksternal 12) Unggah Laporan Akhir Daftar Laporan Akhir Proposal yang didanai 15) Penetapan Peserta Pimnas SK Penetapan Peserta Pimnas 17) Unggah Profil (Registrasi Ulang) Daftar Profil yang mengikuti pimnas 18) Unggah Artikel Ilmiah Daftar Artikel ilmiah yang mengikuti pimnas 19) Unggah Poster Daftar Poster yang mengikuti pimnas 20) Evaluasi Laporan Akhir Hasil Evaluasi Laporan Akhir 21) Evaluasi Artikel Pimnas:Hasil Evaluasi Artikel pimnas 22) Evaluasi Presentasi Pimnas Hasil Evaluasi presentasi pimnas 23) Evaluasi Poster Pimnas Hasil Evaluasi poster pimnas 24) Penetapan Juara Pimnas SK Penetapan Juara Pimnas 25) Kontrak Penugasan			
c	Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Regional 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Proposal 3) Hasil Evaluasi Tahap I 4) Hasil Pengumuman Tahap I 5) Hasil Evaluasi Tahap II 6) Hasil Pengumuman Tahap II 7) SK Penetapan Peserta Regional 8) Hasil Pengumuman 9) SK Penetapan Peserta Nasional 10) Kontrak Penugasan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-89-

1	2	3	4	5
	d Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Surat Kesediaan menjadi tuan rumah			
	3) Kontrak Penugasan			
	4) Surat Tugas			
	5) Daftar Proposal			
	6) Sk Penetapan Juara			
	e Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Internasional Divisi Pemadam Api (FIRE FIGHTING)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Kontrak Penugasan			
	3) Surat Tugas			
	f Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Internasional Divisi Sepakbola (ROBOCUP)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Kontrak Penugasan			
	3) Surat Tugas			
	g Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Internasional Divisi ABU ROBOCON (Asia Pacific Broadcasting Union)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Kontrak Penugasan			
	3) Surat Tugas			
	h Kompetisi Robot Terbang Indonesia (KRTI)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Surat Kesediaan menjadi tuan rumah			
	3) Kontrak Penugasan			
	4) Daftar Proposal			
	5) Hasil Evaluasi Tahap I			

-90-

1	2	3	4	5
	6) Hasil Pengumuman Tahap I			
	7) Hasil Evaluasi Tahap II			
	8) Hasil Pengumuman Tahap II			
	9) SK Penetapan Juara			
	i Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Surat Kesediaan menjadi tuan rumah			
	3) Kontrak Penugasan			
	4) Daftar Proposal			
	5) Hasil Evaluasi Tahap I			
	6) Hasil Pengumuman Tahap I			
	7) Hasil Evaluasi Tahap II			
	8) Hasil Pengumuman Tahap II			
	9) Sk Penetapan Juara			
	j Kompetisi Mobil Listrik Hemat Energi (KMHE)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Surat Kesediaan menjadi tuan rumah			
	3) Kontrak Penugasan			
	4) Daftar Proposal			
	5) Hasil Evaluasi Tahap I			
	6) Hasil Pengumuman Tahap I			
	7) Hasil Evaluasi Tahap II			
	8) Hasil Pengumuman Tahap II			
	9) Sk Penetapan Juara			
	k Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Surat Kesediaan menjadi tuan rumah			

-91-

1	2	3	4	5
	3) Kontrak Penugasan 4) Daftar Proposal 5) Hasil Evaluasi Tahap I 6) Hasil Pengumuman Tahap I 7) Hasil Evaluasi Tahap II 8) Hasil Pengumuman Tahap II 9) Sk Penetapan Juara			
l	Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Permanen
	1) Administrasi Persuratan 2) Surat Kesediaan menjadi tuan rumah 3) Kontrak Penugasan 4) Daftar Proposal 5) Hasil Evaluasi Tahap I 6) Hasil Pengumuman Tahap I 7) Hasil Evaluasi Tahap II 8) Hasil Pengumuman Tahap II 9) Sk Penetapan Juara			
m	Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Permanen
	1) Administrasi Persuratan 2) Surat Kesediaan menjadi tuan rumah 3) Kontrak Penugasan 4) Daftar Proposal 5) Hasil Evaluasi Tahap I 6) Hasil Pengumuman Tahap I 7) Hasil Evaluasi Tahap II 8) Hasil Pengumuman Tahap II 9) Sk Penetapan Juara			
n	Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Permanen
	1) Administrasi Persuratan			

-92-

[illegible]

-95-

1	2	3	4	5
	e Sukan Malaysia Indonesia (Sukmalindo) 1) Administrasi Persuratan 2) SK Penetapan 3) Kontrak Penugasan 4) Laporan f Asean University Games (AUG) 1) Administrasi Persuratan 2) Kontrak Penugasan 3) SK Penetapan 4) Surat Tugas 5) Laporan g Universiade 1) Administrasi Persuratan 2) Surat Tugas 3) Laporan			
10	Organisasi Kemahasiswaan a Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa 1) Administrasi Persuratan 2) Usulan Proposal 3) Hasil Evaluasi 4) SK Penetapan 5) Laporan b Program Hibah Bina Desa 1) Administrasi Persuratan 2) Usulan Proposal 3) Hasil Evaluasi 4) SK Penetapan 5) Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-96-

1	2	3	4	5
	c Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah dan Tingkat Lanjut 1) Administrasi Persuratan 2) Data Peserta LKMM 3) Paparan Materi 4) Daftar Hadir 5) Notula 6) Laporan d Mahasiswa mengikuti KKN Kebangsaan 1) Administrasi Persuratan 2) Proposal 3) SK Penetapan 4) Laporan			
11	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja a Pengembangan sistem kebutuhan dunia kerja 1) Administrasi Persuratan 2) Manual Book Aplikasi 3) Leaflet 4) Poster b Kemitraan institusi dengan lembaga lain 1) Administrasi Persuratan 2) Data Perusahaan yang membutuhkan lowongan pekerjaan 3) Draft MoU 4) Dokumen MoU c Validasi data dan kebutuhan dunia kerja d Analisis evaluasi dan rencana tindak lanjut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
12	Pengembangan Pusat Karir a Penulisan dokumen studi penelusuran lulusan b Analisis evaluasi dan rencana tindak lanjut	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-97-

1	2	3	4	5
	c Pemberdayaan perguruan tinggi melaksanakan layanan pusat karir (hibah/bantuan) 1) Proposal 2) Seleksi dan Evaluasi Proposal 3) Sk Penetapan 4) Kontrak Penugasan			
13	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyalarsan dunia kerja yang terdiri dari : 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
14	Monitoring dan evaluasi meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyalarsan dunia kerja yang terdiri dari: 1) administrasi persuratan 2) notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
III	PENJAMINAN MUTU			
1	a Kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi meliputi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu dan kompetensi lulusan yang terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen

-98-

1	2	3	4	5
	b Kebijakan mutu sarana prasana ilmu pengetahuan teknologi dan pendidikan tinggi sumber daya IPTEK dan DIKTI yang terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria c Kebijakan penjaminan mutu dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan kelembagaan Ilmu pengetahuan teknologi dan dikti 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun 1 Tahun	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen
2	Program Studi Pendidikan Tinggi a Sistem penjaminan mutu internal 1) Administrasi Persuratan 2) Rencana Tindak Lanjut 3) Diseminasi Sistem Penjaminan Mutu Internal b Revitalisasi program mutu 1) Administrasi Persuratan 2) Draft Konsep buku panduan 3) Buku Panduan Pelaksanaan 4) SK Tim Pelaksanaan Hibah 5) SK/ Peraturan 6) Program Penguatan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi: 1. Proposal 2. Pedoman 3. Instrumen Penilaian 4. Laporan Monev 5. Kontrak 7) Hibah peningkatan mutu PTN	2 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun 4 Tahun	Musnah Musnah

-99-

1	2	3	4	5
	8) Program PT Asuh Menuju Prodi PT Unggul: 1. Proposal 2. Pedoman 3. Instrumen Penilaian 4. Laporan Monev 5. Kontrak 9) Rencana Tindak Lanjut c Peningkatan mutu program studi 1) Administrasi Persuratan 2) Draft Konsep pedoman 3) Buku Pedoman 4) SK/ Peraturan 5) Lokakarya SPMI 1. Data Peserta 2. Proposal 3. Laporan kegiatan 4. Paparan Narasumber 5. Dokumentasi Kegiatan 6) Semilokal Budaya Mutu 1. Data Peserta 2. Proposal 3. Laporan kegiatan 4. Paparan Narasumber 5. Dokumentasi Kegiatan 7) Lokakarya Audit Mutu Internal 1. Data Peserta 2. Proposal 3. Laporan kegiatan 4. Paparan Narasumber 5. Dokumentasi Kegiatan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-100-

1	2	3	4	5
	8) Pendampingan Audit Mutu Internal: 1. Data Peserta 2. Proposal 3. Laporan kegiatan 4. Paparan Narasumber 5. Dokumentasi Kegiatan 6. Rekomendasi narasumber kepada PT 9) Digitalisasi SPMI: 1. Data Peserta 2. Proposal 3. Laporan kegiatan 4. Paparan Narasumber 5. Dokumentasi Kegiatan 10) Lokakarya Audit Mutu Internal 1. Data Peserta 2. Proposal 3. Laporan kegiatan 4. Paparan Narasumber 5. Dokumentasi Kegiatan 11) Lokakarya Calon Pelatih SPMI 1. Data Peserta 2. Proposal 3. Laporan kegiatan 4. Paparan Narasumber 5. Dokumentasi Kegiatan 12) Penjaminan Mutu untuk PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) 1. Notulensi 2. paparan narasumber 3. buku pedoman 13) Rencana Tindak Lanjut			
3	Pengembangan Sistem Uji Kompetensi (<i>Virtual Account</i> Uji Kompetensi) 1) Data Kelulusan Uji Kompetensi 2) Pengumuman Hasil Uji Kompetensi 3) Hibah 4) Kontrak 5) Data Mahasiswa mengikuti uji kompetensi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-101-

1	2	3	4	5
4	Penerapan Uji Kompetensi	3 Tahun	2 Tahun	Musnah
	a Instrumen Uji Kompetensi			
	1) Data Calon Panitia Uji Kompetensi			
	2) Dokumen Profesi Uji Kompetensi			
	3) Draft Kebijakan, Kepmen, Kepdirjen di lingkup Uji Kompetensi			
	4) Workshop			
	5) Sosialisasi Uji Kompetensi			
	6) penyusunan kisi-kisi soal			
	7) penyusunan soal			
	8) Review Internal Uji Kompetensi			
	9) Review Eksternal Uji Kompetensi			
	b Uji Kompetensi Mahasiswa			
	1) Data Mahasiswa Peserta Uji Kompetensi			
	2) Laporan hasil uji kompetensi			
	3) Workshop Soal Uji Kompetensi			
	4) Tryout/Uji Coba Soal Uji Kompetensi			
	5) Review Internal: Review Soal			
	6) Review Eksternal: Review Soal oleh pihak eksternal			
	c Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi			
	1) Rapat Tim Pengarah Persiapan Uji Kompetensi			
	2) Kajian Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi			
	3) Standarisasi Pendidikan Indonesia			
	4) Rekomendasi Usulan Pembangunan Pendirian Struktur Sains dan Matematik			
	5) Laporan Uji Kompetensi			
	6) SK Kompetensi Lulusan			
	d Monitoring dan Evaluasi Uji Kompetensi			
	1) Monitoring dan Evaluasi			
	2) Uji Coba Soal			
	3) Analisa Uji Coba Soal			
	4) Analisis Uji Kompetensi			

-102-

1	2	3	4	5
	5) Laporan Uji Kompetensi			
	6) Analisis Dampak Uji Kompetensi			
	7) Rapat Tim Pengarah Laporan Hasil Uji Kompetensi			
	8) Laporan Monitoring Hasil Uji Kompetensi			
	9) Laporan Studi Banding di luar negeri			
5	Mutu sarana dan Prasarana	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
	a Sistem Manajemen Mutu Sarana dan Prasarana:			
	1) Panduan fasilitasi sistem manajemen mutu sarpras			
	2) Proposal terkait sistem manajemen mutu sarpras			
	3) Hasil review proposal terkait sistem manajemen mutu sarpras			
	b analisis data pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi			
	c penyajian data dan informasi pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi			
6	Mutu Kelembagaan	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	a penyiapan dokumen akreditasi, surveilan, dan reakreditasi lembaga penelitian dan pengembangan			
	1) Akreditasi:			
	2) Surveilans			
	3) Reakreditasi:			
	4) Laporan akreditasi, surveilan, dan reakreditasi lembaga penelitian dan pengembangan			
	b penyajian data dan informasi akreditasi dan reakreditasi lembaga penelitian dan pengembangan			
7	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi penjaminan mutu pendidikan tinggi , sarana prasarana ilmu pengetahuan teknologi dan dikti, penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan yang terdiri dari:	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Daftar Peserta			
	3) Materi Bimtek			
	4) Surat Perintah			
	5) Notula			
	6) Laporan			
8	Monitoring dan evaluasi meliputi penjaminan mutu pendidikan tinggi , sarana prasarana ilmu pengetahuan teknologi dan dikti, penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan yang terdiri dari:	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-103-

1	2	3	4	5
	1) administrasi persuratan 2) notula 3) laporan monitoring dan evaluasi			
IV	KARIER DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA			
1	a Kebijakan Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
2	Karier Pendidik/Dosen a Penilaian angka kredit Karier Pendidik 1) Berkas usulan dari PTN dan PTS -proposal -hasil penelitian 2) Pedoman penilaian angka kredit 3) Penilaian-Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan,Notulen dan Dokumentasi 4) Hasil penilaian 5) Layanan banding penilaian angka kredit guru besar 6) SK penilaian angka kredit	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b Sertifikasi Dosen 1) Berkas usulan dari PTN dan PTS -proposal -hasil penelitian 2) Pedoman penilaian sertifikasi 3) Penilaian -Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan,Notulen dan Dokumentasi 4) Hasil penilaian	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali

-104-

1	2	3	4	5
c	5) SK sertifikasi 6) Kontrak turjangan sertifikasi dosen Alih status dan mutasi dosen 1) Surat persetujuan rekomendasi 2) Berkas usulan 3) Penelaahan -Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan, Notulen dan Dokumentasi 4) Laporan evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3	Karier Tenaga Kependidikan a Penilaian angka kredit 1) Berkas usulan dari PTN dan PTS -proposal -hasil penelitian 2) Pedoman penilaian angka kredit 3) Penilaian-Undangan dan Surat Tugas-Materi-Daftar Hadir-Laporan,Notulen dan Dokumentasi 4) Hasil penilaian 5) Layanan banding penilaian angka kredit tenaga kependidikan 6) SK penilaian angka kredit b Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan 1) Berkas usulan 2) Sertifikat c Sistem Informasi Tenaga Kependidikan 1) Buku Manual Sistem Informasi 2) Data base Tenaga Kependidikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		1 Tahun	4 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Musnah
4	Kompetensi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a Perencanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1) Buku Panduan 2) Data base SDM IPTEK	2 Tahun	8 Tahun	Dinilai Kembali

-105-

1	2	3	4	5
	b Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1) Berkas usulan 2) Sertifikat 3) Rekomendasi			
5	Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi a Pemilihan dan Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi 1) Berkas usulan 2) Sertifikat 3) Tanda Terima Penghargaan b Seleksi Program Mobilisasi Dosen 1) Berkas usulan 2) Penetapan c Magang Dosen 1) Berkas usulan 2) Sertifikat d Program SAME (Scheme for academic mobility and exchange) 1) Berkas usulan 2) Sertifikat e Registrasi Pendidik 1) Buku Panduan 2) Data base Pendidik f World Class Profesor 1) Berkas usulan 2) SK Penetapan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6	Bimbingan teknis/workshop/seminar Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi karier pendidik/dosen, karier tenaga kependidikan, kompetensi SDM IPTEK dan DIKTI, yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-106-

1	2	3	4	5
7	Monitoring dan evaluasi Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi karier pendidik/dosen, karier tenaga kependidikan,, kompetensi SDM IPTEK dan DIKTI, yang terdiri dari: 1) Administrasi persuratan 2) Notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
V	KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Kebijakan Kualifikasi Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI di dalam dan luar negeri yang terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
2	Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi a Pendidikan Dalam Negeri (Beasiswa) 1) Administrasi Persuratan 2) Berkas Perscorangan Calon Penerima Beasiswa 3) SK Penetapan Penerima Beasiswa 4) Kontrak Perjanjian Beasiswa 5) Laporan Berkala persemester 6) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan) b Pendidikan Luar Negeri (Beasiswa) 1) Administrasi Persuratan 2) Berkas Perscorangan Calon Penerima Beasiswa 3) SK Penetapan Penerima Beasiswa 4) Kontrak Perjanjian Beasiswa 5) Laporan Berkala persemester 6) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan)	2 Tahun	8 Tahun	Musnah

-107-

1	2	3	4	5
3	Kualifikasi Pendidik a Pendidikan Dalam Negeri (Beasiswa) 1) Administrasi Persuratan 2) Berkas Perseorangan Calon Penerima Beasiswa 3) SK Penetapan Penerima Beasiswa 4) Kontrak Perjanjian Beasiswa 5) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan) b Pendidikan Luar Negeri (Beasiswa) 1) Administrasi Persuratan 2) Berkas Perseorangan Calon Penerima Beasiswa 3) SK Penetapan Penerima Beasiswa 4) Kontrak Perjanjian Beasiswa 5) Laporan Berkala persemester 6) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan)	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
4	Kualifikasi Tenaga Kependidikan a Pendidikan Dalam Negeri (Beasiswa) 1) Administrasi Persuratan 2) Berkas Perseorangan Calon Penerima Beasiswa 3) SK Penetapan Penerima Beasiswa 4) Kontrak Perjanjian Beasiswa 5) Laporan Berkala persemester 6) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan) b Pendidikan Luar Negeri (Beasiswa) 1) Administrasi Persuratan 2) Berkas Perseorangan Calon Penerima Beasiswa 3) SK Penetapan Penerima Beasiswa 4) Kontrak Perjanjian Beasiswa 5) Laporan Berkala persemester 6) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan)	2 Tahun	8 Tahun	Musnah
5	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi kualifikasi Sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI, kualifikasi pendidik, kualifikasi tenaga kependidikan yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-108-

1	2	3	4	5
	4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan			
6	Monitoring dan evaluasi meliputi kualifikasi Sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI, kualifikasi pendidik, kualifikasi tenaga kependidikan yang terdiri dari: 1) administrasi persuratan 2) notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
VI	SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI			
1	Kebijakan Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyusunan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
2	Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI a Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1) Administrasi Persuratan 2) Proposal IPTEK yang diterima terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana 3) Laporan Review Proposal IPTEK yang diterima terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana 4) Proposal IPTEK yang ditolak terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana 5) Laporan Review Proposal IPTEK yang ditolak terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana 6) SK Menteri Relokasi Sarana dan Prasarana IPTEK b Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi 1) Administrasi Persuratan 2) Proposal DIKTI yang diterima terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana	2 Tahun	8 Tahun	Musnah, kecuali berskala nasional/ internasional Dinilai Kembali

-109-

1	2	3	4	5
	3) Laporan Review Proposal DIKTI yang diterima terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana 4) Proposal DIKTI yang ditolak terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana 5) Laporan Review Proposal DIKTI yang ditolak terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana 6) SK Menteri Relokasi Sarana dan Prasarana DIKTI			
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI a Pengembangan Sarana dan Prasarana IPTEK 1) Administrasi Persuratan 2) Usulan Proposal yang diterima mengenai pembiayaan Alternatif 3) Laporan Review Proposal yang diterima terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana alternatif 4) Proposal yang ditolak terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana sarpras 5) Laporan Review Proposal IPTEK yang ditolak terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana sarpras 6) SK Menteri mengenai Lembaga Penerima Dana Alternatif 7) Laporan monitoring dan evaluasi pendanaan alternatif IPTEK b Pengembangan Sarana dan Prasarana DIKTI 1) Administrasi Persuratan 2) Usulan Proposal dari PTN yang diterima mengenai pembiayaan PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri), KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan alternatif lainnya 3) Laporan Review Proposal dari PTN yang diterima terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana alternatif 4) Proposal dari PTN yang ditolak terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana sarpras 5) Laporan Review Proposal IPTEK yang ditolak terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana sarpras 6) SK Menteri mengenai PTN Penerima Dana Alternatif 7) Laporan monitoring dan evaluasi pendanaan alternatif DIKTI	2 Tahun	8 Tahun	Musnah

 2 Tahun | 8 Tahun | Musnah |

-110-

1	2	3	4	5
4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI a Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPTEK 1) Administrasi Persuratan 2) Panduan (Petunjuk pelaksanaan Kegiatan) 3) Dokumen pendukung (Data, proposal, dan sejenisnya) 4) Hasil analisis (Hasil telaah, hasil review, dan sejenisnya) b Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana DIKTI 1) Administrasi Persuratan 2) Monitoring dan Evaluasi APBN: - Panduan Monev Alokasi APBN/P - Data dukung penelaahan/review APIP APBN/P - Berita Acara dan hasil penelaahan/review APIP APBN/P - Laporan - Notulasi Rapat - Kunjungan lapang - Monev 3) Standar Fisik Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI - Panduan standar fisik sarpras - Data dukung standar fisik sarpras - Hasil rumusan standar fisik sarpras - Laporan - Notulasi Rapat - Kunjungan lapang - monev 4) Sistem Informasi Manajemen/ Pemetaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI - Panduan/desain pengembangan SIM (pemetaan sarpras) - Data dukung pemetaan sarpras - Hasil analisis pemetaan sarpras - Laporan - Notulasi Rapat - Kunjungan lapang - Monev	2 Tahun	8 Tahun	Musnah

 2 Tahun | 8 Tahun | Musnah |

-111-

1	2	3	4	5
	5) Konstruksi Dalam Penyelesaian: - Panduan rekonsiliasi Konstruksi Dalam Penyelesaian /Gedung belum selesai - Data dukung rekonsiliasi Konstruksi Dalam Penyelesaian /Gedung belum selesai - Berita Acara dan hasil rekonsiliasi Konstruksi Dalam Penyelesaian/Gedung belum selesai - Laporan - Notulasi Rapat - Kunjungan lapang - Monev			
5	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi perencanaan teknis sarana prasarana IPTEK dan DIKTI, pengembangan teknis sarana prasarana IPTEK dan DIKTI, pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana IPTEK dan DIKTI yang terdiri dari : 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
6	Monitoring dan evaluasi meliputi perencanaan teknis sarana prasarana IPTEK dan DIKTI, pengembangan teknis sarana prasarana IPTEK dan DIKTI, pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana IPTEK dan DIKTI yang terdiri dari: 1) Administrasi persuratan 2) Notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
VII	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
1	Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan 1) Administrasi Persuratan 2) Draft SK Tim Kerja/ Penilai 3) SK Tim Kerja/ Penilai 4) Draft Pedoman 5) Pedoman Proposal 6) Proposal di seleksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-112-

1	2	3	4	5
	7) Berita Acara 8) SK Penerima Dana 9) Panduan Penilaian 10) Hasil Penilaian 11) Draft SK BPPD Berkinerja Utama 12) Sk BPPD Berkinerja Utama			
2	Unggulan Iptek 1) Usul unggulan Iptek 2) Bimbingan teknis 3) Penetapan Unggulan Iptek 4) Pengawasan dan pengendalian 5) Pemantauan dan evaluasi laporan	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
3	Penelitian dan Pengembangan Kementerian a Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan kementerian b Data pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan kementerian	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
4	Penelitian dan Pengembangan Non Kementerian a Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian b Data pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
5	Penelitian dan Pengembangan Daerah a Laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah daerah b Analisis data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah daerah	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
6	Industri Manufaktur, Agro, Kesehatan, dan Obat a Data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat b Laporan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali

-113-

1	2	3	4	5
7	Industri Berbasis Teknologi Tinggi a Data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri berbasis teknologi tinggi b Laporan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri berbasis teknologi tinggi	1 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
8	Penilaian Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan a Pengolahan data kinerja lembaga penelitian dan pengembangan b pengujian data kinerja lembaga penelitian dan pengembangan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
9	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi unggulan IPTEK, penelitian dan pengembangan kementerian dan non kementerian, penellitian pengembangan daerah, industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat, industri berbasis teknologi dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
10	Monitoring dan evaluasi meliputi unggulan IPTEK, penelitian dan pengembangan kementerian dan non kementerian, penellitian pengembangan daerah, industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat, industri berbasis teknologi dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan yang terdiri dari: 1) Administrasi persuratan 2) Notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
VIII	SAINS DAN TEKNOLOGI, DAN LEMBAGA PENUNJANG LAINNYA			
1	Kebijakan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya terdiri atas: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen

-114-

1	2	3	4	5
2	Kawasan Sains dan Teknologi a Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi 1) Administrasi Persuratan 2) draft perpres 3) Perpres 4) Draft Turunan Perpres 5) Permenristek 6) Petunjuk Pelaksanaan 7) Petunjuk Teknis 8) Pedoman/ Grand Desain KST 9) NSPK 10) Panduan Pengelolaan KST 11) Proposal-Proposal yang diajukan dari daerah/ perguruan tinggi 12) Studi Kelayakan 13) Hasil Seleksi Proposal 14) SK Penetapan 15) Master Plan 16) Detail Engineering Desain 17) Laporan-Laporan 18) Hasil Penilaian/ Peningkatan STP 19) Database Sistem Informasi STP di Website b Evaluasi Kawasan Sains dan Teknologi (KST) 1) Administrasi Persuratan 2) Notulen 3) Draft Kriteria Penilaian, Evaluasi dan Pemeringkatan KST 4) Pedoman Penilaian, Evaluasi dan Pemeringkatan KST 5) Hasil Penilaian, Evaluasi dan Pemeringkatan KST 6) SK Pemeringkatan/Apresiasi KST 7) Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
3	Inkubator dan Intermediasi Teknologi Kelembagaan a Inkubator Teknologi Kelembagaan 1) Administrasi Persuratan 2) Notulen 3) Draft Kajian 4) Kajian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-115-

1	2	3	4	5
	5) Draft Petunjuk Teknis 6) Petunjuk Teknis 7) Pedoman 8) Borang 9) SK 10) Database lembaga inkubator 11) Laporan 12) Sistem informasi lembaga inkubator b Intermediasi Teknologi Kelembagaan 1) Administrasi Persuratan 2) Notulen 3) Draft Kajian 4) Kajian 5) Draft Petunjuk Teknis 6) Petunjuk Teknis 7) Pedoman 8) Borang 9) SK 10) Database intermediasi teknologi kelembagaan 11) Laporan 12) Sistem informasi intermediasi teknologi kelembagaan			
4	Organisasi Profesi Ilmu Pengetahuan dan teknologi a Penataan Organisasi Profesi 1) Administrasi Persuratan 2) Notulen 3) Hasil Kajian Penataan Orprof 4) Borang Kelembagaan Orprof 5) Pedoman orprof 6) Hasil Seleksi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-116-

1	2	3	4	5
	7) SK organisasi profesi 8) Database organisasi profesi 9) Laporan b Pengawasan Organisasi Profesi 1) Administrasi Persuratan 2) Notulen 3) Hasil Kajian Pengawasan Orprof 4) Pedoman Pengawasan Orprof 5) Hasil Monitoring dan Evaluasi Program orprof 6) Laporan			
5	Penunjang Kelembagaan Lainnya a Dewan Riset Nasional (DRN) 1) Administrasi Persuratan 2) Notulen 3) Draft Kajian 4) Kajian 5) Pedoman 6) Borang 7) Hasil Seleksi 8) Database Dewan Riset 9) Laporan b Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN) 1) Administrasi Persuratan 2) Notulen 3) Draft Kajian 4) Kajian 5) Pedoman 6) Borang/proposal 7) Hasil Seleksi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-117-

1	2	3	4	5
	8) Database MPTN 9) Laporan c Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) 1) Administrasi Persuratan 2) Notulen 3) Draft Kajian 4) Kajian 5) Pedoman 6) Borang 7) Hasil Seleksi 8) Database DPT 9) Laporan d Lembaga Penunjang Lainnya 1) Administrasi Persuratan 2) Notulen 3) Draft Kajian 4) Kajian 5) Pedoman 6) Borang 7) Hasil Seleksi 8) Database Lembaga Penunjang Lainnya 9) Laporan			
IX	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI			
1	Kebijakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi meliputi pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi yang terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen

-118-

1	2	3	4	5
2	Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik a Pendirian dan pencabutan ijin perguruan tinggi swasta program akademik 1) Naskah usulan 2) Rekomendasi 3) SK perubahan b Pembukaan dan penutupan program studi pada perguruan tinggi program akademik 1) Naskah usulan 2) Rekomendasi 3) SK perubahan d Monitoring dan evaluasi pasca rekomendasi pengembangan perguruan tinggi program akademik e Laporan di bidang pengembangan perguruan tinggi program akademik	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
3	Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi a Pengkajian dan penilaian usul pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi 1) Naskah usulan 2) Rekomendasi b Pendirian, perubahan, dan penutupan kelembagaan perguruan tinggi negeri program vokasi 1) Naskah usulan 2) Rekomendasi 3) SK perubahan c Pemberian ijin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta program vokasi 1) Draft SK Pemberian Ijin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta program vokasi 2) SK perubahan d Evaluasi pelaksanaan pengembangan perguruan tinggi program vokasi e Laporan di bidang pengembangan perguruan tinggi program vokasi	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
4	Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi a Perubahan Perguruan Tinggi 1) Perubahan Perguruan Tinggi Negeri: -naskah terapan usulan	1 Tahun	4 Tahun	Permanen

-119-

1	2	3	4	5
	-rekomendasi -SK perubahan			
	2) Perubahan Perguruan Tinggi Swasta -naskah usulan -rekomendasi -SK perubahan 3) Usul Perubahan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga -naskah usulan -rekomendasi -SK perubahan b Pembukaan program studi dalam rangka perubahan bentuk perguruan tinggi 1) Naskah usulan 2) Rekomendasi 3) SK c Monitoring dan evaluasi pasca rekomendasi penataan kelembagaan perguruan tinggi d Laporan di bidang penataan kelembagaan perguruan tinggi			
5	Pemberdayaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Program Pembinaan perguruan tinggi swasta 1) Daftar Usulan Pendaftaran Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta 2) Program kegiatan pembinaan perguruan tinggi swasta	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
6	Tata Kelola Perguruan Tinggi a Penilaian usul tata kelola perguruan tinggi b Rekomendasi calon penerima bantuan untuk tata kelola perguruan tinggi c Data dan informasi perguruan tinggi penerima bantuan untuk tata kelola perguruan tinggi	1 Tahun setelah pelaksanaan selesai	4 Tahun	Musnah
7	Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi a Data perguruan tinggi b Peta perguruan tinggi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
8	Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi a Penilaian Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-120-

1	2	3	4	5
	b Instrument penilaian kinerja perguruan tinggi c Data kinerja perguruan tinggi			
9	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi Pengembangan perguruan tinggi akademik, pengembangan perguruan tinggi program vokasi, penataan kelembagaan perguruan tinggi, pemberdayaan kelembagaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, pengendalian kelembagaan perguruan tinggi dan penilaian kinerja perguruan tinggi yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
10	Monitoring dan evaluasi Pengembangan perguruan tinggi akademik, pengembangan perguruan tinggi program vokasi, penataan kelembagaan perguruan tinggi, pemberdayaan kelembagaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, pengendalian kelembagaan perguruan tinggi dan penilaian kinerja perguruan tinggi yang terdiri dari: 1) Administrasi persuratan 2) Notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
X	RISET DAN PENGEMBANGAN			
1	Kebijakan Riset dan Pengembangan meliputi pengembangan sistem riset, harmonisasi program, evaluasi sistem, kemitraan strategis dan sistem informasi riset dan pengembangan yang terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen

-121-

1	2	3	4	5
2	Pengembangan Sistem Riset dan Pengembangan a Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan sistem riset dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi b Laporan pengembangan sistem riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3	Harmonisasi Program dan Evaluasi Sistem Risbang a Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan b Laporan harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
4	Kemitraan Strategis Risbang a kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri - Daftar Kemitraan dengan berbagai lembaga b Monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri c Laporan di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
5	Sistem Informasi Riset dan Pengembangan a Pengembangan sistem informasi riset dan pengembangan 1) Daftar Modul Sistem terdahulu 2) Daftar Modul sistem yang diperbaharui b Monitoring dan evaluasi di bidang program sistem informasi riset dan pengembangan serta standarisasi riset dan pengembangan 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi 2) Laporan pelaksanaan 3) Laporan Kegiatan c Laporan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta standarisasi riset dan pengembangan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah
6	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi pengembangan sistem riset, harmonisasi program, evaluasi sistem, kemitraan strategis dan sistem informasi riset dan pengembangan yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-122-

1	2	3	4	5
	2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan			
XI	RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT			
1	Kebijakan Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
2	Riset Dasar a Pemetaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan b Penilaian dan seleksi c Penetapan penerima bantuan riset dasar	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
3	Riset Terapan a Pemetaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan b Penilaian dan seleksi c Penetapan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
4	Pemberdayaan Masyarakat a Pemetaan perguruan tinggi b Penilaian dan seleksi c Penetapan perguruan tinggi	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
5	Peningkatan Kapasitas Riset a Peningkatan kapasitas riset peneliti b Koordinasi peningkatan kapasitas riset peneliti	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
6	Bimbingan teknis/workshop/seminar Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-123-

1	2	3	4	5
	3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan			
7	Monitoring dan evaluasi Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari: 1) Administrasi persuratan 2) Notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
XII PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI				
1	Kebijakan Pengembangan Teknologi Industri terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
2	Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan a Data teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan b Laporan pengembangan teknologi industri informasi komunikasi dan pertahanan c Laporan pengembangan teknologi industri informasi komunikasi dan keamanan d Monitoring dan evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3	Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi a Data Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi b Laporan Pengembangan Teknologi Industri Energi c Laporan Pengembangan Teknologi Industri Transportasi d Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-124-

1	2	3	4	5
4	Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat a Data Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat b Laporan Pengembangan Teknologi Industri Pangan c Laporan Pengembangan Teknologi Industri Kesehatan d Laporan Pengembangan Teknologi Industri Obat e Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5	Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju a Data Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju b Laporan Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku c Laporan Pengembangan Teknologi Industri Material Maju d Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
6	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi Pengembangan Teknologi industri informasi komunikasi dan pertahanan dan keamanan, teknologi industri energi dan transportasi, teknologi industri pangan, kesehatan dan obat dan industri bahan baku dan material maju yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
XIII PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL				
1	Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen

-125-

1	2	3	4	5
2	Valuasi dan Kekayaan Intelektual a Usulan memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten b Data hasil penelitian yang diusulkan memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten c Seleksi peneliti dan lembaga yang akan mendapatkan insentif atas pemerolehan paten dan hak kekayaan intelektual non paten d Penetapan penerima insentif bagi para peneliti dan lembaga atas pemerolehan paten dan hak kekayaan intelektual non paten e Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan valuasi dan kekayaan intelektual untuk memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten f Laporan pelaksanaan valuasi dan kekayaan intelektual untuk memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3	Jurnal Ilmiah a Usulan jurnal ilmiah b Pemberian hibah peningkatan tata kelola jurnal menjadi jurnal ilmiah bereputasi jurnal internasional c pemberian insentif atas peningkatan tata kelola jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah bereputasi internasional d penilaian terbitan berkala jurnal ilmiah nasional dan internasional e penetapan akreditasi terbitan berkala jurnal ilmiah nasional dan internasional f monitoring dan evaluasi g laporan di bidang jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah bereputasi internasional	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4	Publikasi Ilmiah a Usulan publikasi ilmiah b Pemberian hibah peningkatan tata kelola Publikasi ilmiah menjadi publikasi ilmiah nasional dan publikasi ilmiah berputasi internasional c Pemberian insentif atas peningkatan tata kelola publikasi ilmiah nasional dan publikasi ilmiah bereputasi internasional d Penilaian terbitan berkala publikasi ilmiah nasional dan internasional e Penetapan akreditasi terbitan berkala publikasi ilmiah nasional dan internasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-126-

1	2	3	4	5
	f Monitoring dan evaluasi g Laporan di bidang publikasi ilmiah nasional dan publikasi ilmiah bereputasi internasional			
5	Hak Atas Kekayaan Intelektual 1) Hak Cipta 2) Hak Paten: a. Paten biasa b. Paten Sederhana 3) Hak Merk	1 Tahun setelah Hak Atas Kekayaan Intelektual habis	2 Tahun	Permanen
6	Perijinan Penelitian Asing a Persyaratan dalam penelitian asing beresiko tinggi dan berbahaya: 1) paspor 2) surat pengantar 3) Curriculum Vitae 4) dan lain lain penunjang perizinan penelitian b pengkajian dan penilaian usul perijinan penelitian asing dan berisiko tinggi dan berbahaya c Seleksi peneliti dan lembaga yang akan mendapatkan insentif atas pemerolehan paten dan hak kekayaan intelektual non paten d data hasil penelitian yang diusulkan memperoleh paten dan hak kekayaan intelektual non paten	2 Tahun	4 Tahun	Dinilai Kembali
7	Bimbingan teknis/workshop/seminar valuasi dan fasilitasi Kekayaan Intelektual, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, hak atas kekayaan intelektual dan perizinan penelitian asing yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
8	Monitoring dan evaluasi valuasi dan fasilitasi Kekayaan Intelektual, jurnal ilmiah, publikasi ilmiah, hak atas kekayaan intelektual dan perizinan penelitian asing terdiri dari: 1) Administrasi persuratan 2) Notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-127-

1	2	3	4	5
XIV	Penguatan Inovasi			
1	Kebijakan Penguatan Inovasi di industri dibidang sistem inovasi yang terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
2	Sistem Inovasi a Sistem dan Jaringan Inovasi 1) Administrasi Persuratan 2) Naskah Akademik : a. Resume b. Notula c. Prosiding b Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi tentang kluster inovasi Kluster Inovasi: 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Pengusul 3) Daftar calon pemenang 4) SK Penetapan 5) Proposal tidak lolos 6) Proposal Lolos c Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi - Database Produk Inovasi IPTEK dan DIKTI	2 Tahun setelah diperbaharui	8 Tahun	Musnah
3	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi a Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Pengusul 3) Daftar calon pemenang 4) SK Penetapan 5) Proposal tidak lolos 6) Proposal Lolos b Energi dan Transportasi	2 Tahun setelah diperbaharui	8 Tahun	Musnah

-128-

1	2	3	4	5
	1) Administrasi persuratan 2) Daftar Pengusul 3) Daftar calon pemenang 4) SK Penetapan 5) Proposal tidak lolos 6) Proposal Lolos c Pangan, Kesehatan dan Obat 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Pengusul 3) Daftar calon pemenang 4) SK Penetapan 5) Proposal tidak lolos 6) Proposal Lolos d Bahan Baku dan Material Maju 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Pengusul 3) Daftar calon pemenang 4) SK Penetapan 5) Proposal tidak lolos 6) Proposal Lolos			
4	Inovasi Industri a Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Pengusul 3) Daftar calon pemenang 4) SK Penetapan 5) Proposal tidak lolos 6) Proposal Lolos b Industri Energi dan Transportasi 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Pengusul 3) Daftar calon pemenang	2 Tahun setelah diperbaharui	8 Tahun	Musnah

-129-

1	2	3	4	5
	4) SK Penetapan 5) Proposal tidak lolos 6) Proposal Lolos c Industri Pangan, Kesehatan, dan Obat 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Pengusul 3) Daftar calon pemenang 4) SK Penetapan 5) Proposal tidak lolos 6) Proposal Lolos d Industri Bahan Baku dan Material Maju 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Pengusul 3) Daftar calon pemenang 4) SK Penetapan 5) Proposal tidak lolos 6) Proposal Lolos			
5	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi sistem inovasi, perusahaan pemula berbasis teknologi dan inovasi industri yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
6	Monitoring dan evaluasi meliputi sistem inovasi, perusahaan pemula berbasis teknologi dan inovasi industri yang terdiri dari: 1) Administrasi persuratan 2) Notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-130-

1	2	3	4	5
XV	AKREDITASI PERGURUAN TINGGI			
1	Program Studi a Kebijakan akreditasi program studi - Naskah Akademik b Rekomendasi c Kriteria dan Perangkat Akreditasi Program Studi d Izin penyelenggaraan program studi 1) Borang Program Studi 2) Borang Institusi Pengelola Program Studi 3) Panduan Pengisian Borang 4) Pedoman Penilaian Borang 5) Matriks Penilaian Borang 6) Pedoman Asesmen Lapangan 7) Pedoman Evaluasi Diri 8) SK Penetapan e Pelayanan teknis dan administratif f Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Program Studi g Laporan Hasil Akreditasi Program Studi kepada Menteri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, Kecuali Kebijakan, Rekomendasi, dan SK Permanen
2	Perguruan Tinggi a Kebijakan akreditasi perguruan tinggi 1) Standar dan Prosedur Akreditasi 2) Naskah Akademik b Rekomendasi c Kriteria dan Perangkat Akreditasi Perguruan Tinggi d Izin penyelenggaraan perguruan tinggi 1) Borang Perguruan Tinggi 2) Borang Institusi Pengelola Perguruan Tinggi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, Kecuali Kebijakan, Rekomendasi, dan SK Permanen

-131-

1	2	3	4	5
	3) Panduan Pengisian Borang 4) Pedoman Penilaian Borang 5) Matriks Penilaian Borang 6) Pedoman Asesmen Lapangan 7) Pedoman Evaluasi Diri e Pelayanan teknis dan administratif f Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi g Laporan Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi kepada Menteri			
XVI	BIOLOGI MOLEKULER			
1	Kebijakan biologi molekuler yang terdiri dari: 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
2	Penyakit Menular a Bakteri 1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain.	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-132-

1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan penelitian/penkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data 4) Hasil penelitian/penkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi b Dengue 1) Rencana Kerja - TOR - Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/penkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data 4) Hasil penelitian/penkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-133-

1	2	3	4	5
	c Hepatitis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Rencana Kerja			
	- TOR			
	- Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA)			
	- Perijinan penelitian			
	2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain.			
	3) Pelaksanaan penelitian/pengkajian			
	- Prosedur/petunjuk			
	- Data primer			
	- Log Book			
	- Studi kelayakan			
	- Instrumen penelitian			
	- Pelaksanaan survey			
	- Laporan hasil pendataan/survey			
	- Analisis/pengolahan data			
	4) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran- Rekomendasi			
	d Malaria	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Rencana Kerja			
	- TOR			
	- Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA)			
	- Perijinan penelitian			
	2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain.			

-134-

1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan penelitian/pengkajian			
	- Prosedur/petunjuk			
	- Data primer			
	- Log Book			
	- Studi kelayakan			
	- Instrumen penelitian			
	- Pelaksanaan survey			
	- Laporan hasil pendataan/survey			
	- Analisis/pengolahan data			
	4) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi			
	- Laporan hasil penelitian dan hasil luaran			
	- Rekomendasi			
	e Virus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Rencana Kerja			
	- TOR			
	- Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA)			
	- Perijinan penelitian			
	2) Administarsi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat dan bahan), dan lain-lain.			
	3) Pelaksanaan penelitian/pengkajian			
	- Prosedur/petunjuk			
	- Data primer			
	- Log Book			
	- Studi kelayakan			
	- Instrumen penelitian			
	- Pelaksanaan survey			
	- Laporan hasil pendataan/survey			
	- Analisis/pengolahan data			
	4) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi			
	- Laporan hasil penelitian dan hasil luaran			
	- Rekomendasi			

-135-

1	2	3	4	5
	f Penyakit menular lainnya 1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/ pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survei - Analisis/ pengolahan data 4) Hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3	Penyakit tidak menular dan kelainan genetika a Kelainan Sel darah merah 1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain.	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-136-

1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan penelitian/ pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/ pengolahan data 4) Hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi			
	b Thalassemia dan Hemoglobinopati 1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/ pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/ pengolahan data 4) Hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-137-

1	2	3	4	5
	e Obesitas dan Sindroma metabolik	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data 4) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi			
	d Diabetes Melitus	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk- Data primer-Log Book- Studi kelayakan- Instrumen penelitian- Pelaksanaan survey- Laporan hasil pendataan /survey- Analisis/pengolahan data 4) Hasil penelitian/ pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi			

-138-

1	2	3	4	5
	e Kelainan Kromosom	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data 4) Hasil penelitian/ pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran- Rekomendasi			
	f Kanker	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/kontrak MoU kerjasama/material transfer agreement - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat danbahan), dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/ pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data			

-139-

1	2	3	4	5
	4) Hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi g Penyakit tidak menular dan kelainan genetika lainnya 1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/ kontrak MoU kerjasama/ material transfer agreement - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/ surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/ formulir pendukung/ instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat dan bahan), dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/ pengkajian - Prosedur/ petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/ survey - Analisis/ pengolahan data 4) Hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4	Keanekaragaman genom a Manusia 1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/ kontrak MoU kerjasama/ material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/ surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/ formulir pendukung/ instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat dan bahan), dan lain-lain.	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-140-

1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan penelitian/ pengkajian - Prosedur/ petunjuk- Data primer- Log Book- Studi kelayakan- Instrumen penelitian- Pelaksanaan survey- Laporan hasil pendataan/ survey- Analisis/ pengolahan data 4) Hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi b Non manusia 1) Rencana Kerja - TOR - Draf Berkas/ kontrak MoU kerjasama/ material transfer agreement (MTA) - Perijinan penelitian 2) Administrasi penelitian : surat tugas/ surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/ formulir pendukung/ instruksi, persiapan survey, penggunaan peralatan (alat dan bahan), dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/ pengkajian - Prosedur/ petunjuk- Data primer- Log Book- Studi kelayakan- Instrumen penelitian- Pelaksanaan survey- Laporan hasil pendataan/ survey- Analisis/ pengolahan data 4) Hasil penelitian/ pengkajian/ rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5	Pendukung Penelitian a Laboratorium Bioinformatika 1) Rencana Kerja - TOR 2) Administrasi penelitian : surat tugas/ surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/ formulir pendukung/ instruksi, penggunaan peralatan , dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/ pengkajian - Prosedur/ petunjuk - Data primer/ Database - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/ pengolahan data	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali

-141-

1	2	3	4	5
	4) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi b Laboratorium Biosafety Level 3 1) Rencana Kerja - TOR 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, penggunaan peralatan , dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer/ Database - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data 4) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi c Laboratorium Sequencing/Peruntunan DNA 1) Rencana Kerja - TOR 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, penggunaan peralatan , dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer/ Database - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data 4) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali

-142-

1	2	3	4	5
	d Histopatologi dan Laboratorium TEM 1) Rencana Kerja - TOR 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, penggunaan peralatan , dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer/ Database - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data 4) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
6	Terapan di bidang biologi molekuler medis dan nonmedis a Laboratorium Sitogenetika 1) Rencana Kerja - TOR 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/formulir pendukung/instruksi, penggunaan peralatan,dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data 4) Data individu 5) Hasil pemeriksaan b Unit Forensik DNA 1) Rencana Kerja - TOR 2) Administrasi penelitian : surat tugas/surat perintah, pembentukan tim kerja,dokumen/formulir pendukung/instruksi, penggunaan peralatan , dan lain-lain.	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen

-143-

1	2	3	4	5
	3) Pelaksanaan penelitian/ pengkajian - Prosedur/ petunjuk - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/ pengolahan data 4) Data individu 5) hasil pemeriksaan c Unit Konseling Genetik 1) Rencana Kerja - TOR 2) Administrasi penelitian : surat tugas/ surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen/ formulir pendukung/ instruksi, penggunaan peralatan , dan lain-lain. 3) Pelaksanaan penelitian/ pengkajian - Prosedur/ petunjuk - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/ pengolahan data 4) Data individu 5) Hasil pemeriksaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7	Layanan Penunjang Laboratorium 1) SOP 2) Hasil Kalibrasi 3) Sertifikasi 4) Akreditasi 5) Daftar inventaris peralatan laboratorium 6) Daftar perbaikan peralatan laboratorium 7) Daftar penggunaan peralatan laboratorium	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8	Bimbingan teknis/ workshop/ seminar penyakit menular, penyakit tidak menular dan kelainan genetika, keanekaragaman genom, pendukung penelitian, terapan dibidang biologi molekuler medis dan non medis dan layanan penunjang laboratorium yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-144-

1	2	3	4	5
	4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan			
9	Monitoring dan evaluasi penyakit menular, penyakit tidak menular dan kelainan genetika, keanekaragaman genom, pendukung penelitian, terapan dibidang biologi molekuler medis dan non medis dan layanan penunjang laboratorium yang terdiri dari: 1) Administrasi persuratan 2) Notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
XVII PEMBUDAYAAN IPTEK				
1	Kebijakan peragaan dan pembudayan ilmu pengetahuan teknologi 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
2	Peragaan - a Pengembangan Peragaan 1) Administrasi Persuratan 2) Materi Peragaan 3) Materi Pengembangan Peragaan 4) Materi Pendukung/ Lingkungan Peragaan 5) SOP Pengembangan Alat peraga - b Peragaan Indoor 1) Administrasi Persuratan 2) Materi Peragaan Indoor 3) Data Peragaan Indoor beserta klasifikasinya - c Peragaan Outdoor 1) Administrasi Persuratan 2) Materi Peragaan outdoor 3) Data Peragaan outdoor beserta klasifikasinya	2 Tahun setelah tidak dipergunakan	3 Tahun	Musnah

-145-

1	2	3	4	5
	d Peragaan Keliling 1) Administrasi Persuratan 2) Materi Peragaan keliling 3) Data Peragaan keliling beserta klasifikasinya e Perawatan Peragaan 1) Administrasi Persuratan 2) Data Perbaikan dan Kerusakan Alat peraga 3) SOP Perawatan Peragaan f Pemanduan Peragaan 1) Administrasi persuratan 2) Daftar pemandu 3) Kebutuhan dan evaluasi pemandu 4) SOP Pemandu Peragaan g Pemanfaatan Peragaan 1) Administrasi Persuratan 2) Berita Acara Serah Terima 3) Data Kondisi alat peraga h Layanan Peragaan Pengunjung 1) Administrasi persuratan 2) Data alat peraga 3) Data kebutuhan pemandu			
3	Program a Pengembangan Program 1) Administrasi Persuratan 2) Materi Program 3) Materi Pengembangan Program 4) SOP Pengembangan program b Program Regular 1) Administrasi persuratan 2) Daftar jadwal kegiatan 3) Materi program regular 4) SOP Program Regular	2 Tahun diperbaharui	3 Tahun	Musnah

-146-

1	2	3	4	5
	5) Daftar peserta program regular c Program Non Regular 1) Administrasi persuratan 2) Daftar jadwal kegiatan 3) Materi program non regular 4) SOP Program non Regular 5) Daftar peserta program non regular d Layanan Program 1) Administrasi persuratan 2) Data layanan program 3) Data kebutuhan pemandu 4) SOP Layanan Program			
4	Promosi a Promosi ke Sekolah 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Sekolah yang akan dikunjungi 3) Daftar petugas 4) Daftar Pengunjung b Promosi ke Lembaga Pemerintah 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Lembaga Pemerintah yang akan dikunjungi 3) Daftar petugas c Promosi ke Lembaga Swasta 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Lembaga Swasta yang akan dikunjungi 3) Daftar petugas d Layanan Pengunjung 1) Administrasi persuratan 2) Statistik Daftar pengunjung	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-147-

1	2	3	4	5
	3) Data Komplain 4) Kuesioner			
5	Science Center Daerah 1) Administrasi persuratan 2) Kebijakan Science Center Daerah 3) Daftar science center daerah 4) Buku Panduan Science Center Daerah 5) Berita Acara Serah Terima Alat Peraga 6) Laporan Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
6	Forum Komunikasi Asosiasi Science Center Indonesia	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
7	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi peragaan, program, promosi dan science center daerah yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
8	Monitoring dan evaluasi meliputi peragaan, program, promosi dan science center daerah yang terdiri dari: 1) Administrasi persuratan 2) Notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
XVIII AKADEMIK				
1	Kurikulum PTS 1) Laporan pengawasan dan pengendalian tentang kurikulum 2) SK penetapan kurikulum	1 Tahun setelah yudisium	4 Tahun	Musnah, kecuali SK penetapan kurikulum Permanen
2	Uji Kompetensi 1) Daftar peserta	1 Tahun	4 Tahun	

-148-

1	2	3	4	5
	2) Materi pelatihan 3) Hasil uji kompetensi 4) Sertifikat			Musnah, kecuali sertifikat masuk berkas perseorangan
3	Legalisasi Ijazah 1) Salinan Ijazah 2) Surat keterangan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah,
4	Pengembangan Ketenagaan 1) Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) Dalam Negeri/Luar Negeri 2) Sertifikasi dosen 3) Pelatihan dosen (PEKERTI dan AA)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 1) Buku panduan 2) Usulan proposal 3) SK penetapan 4) Dokumen kontrak 5) Laporan hasil kegiatan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
XIX KEMAHASISWAAN LLDIKTI				
1	Beasiswa a Bidikmisi, BPPPA, PPA 1) Panduan pendaftaran 2) Administrasi beasiswa 3) SK penerima beasiswa 4) Laporan b Sosialisasi/bimbingan program beasiswa 1) Administrasi 2) Materi Bimtek 3) Laporan c Laporan beasiswa/pertukaran mahasiswa - Laporan beasiswa/pertukaran mahasiswa	1 Tahun setelah perubahan	4 Tahun	Musnah

-149-

1	2	3	4	5
2	Kegiatan Mahasiswa			
	a Program Kreativitas Mahasiswa	1 Tahun setelah perubahan	4 Tahun	Musnah
	1) Buku Panduan			
	2) Usulan Proposal			
	3) Hasil Seleksi			
	4) SK Penetapan			
	5) Monitoring dan Evaluasi			
	6) Laporan			
	b Program Kewirausahaan Mahasiswa	1 Tahun setelah perubahan	4 Tahun	Musnah
	1) Buku Panduan			
	2) Usulan Proposal			
	3) Hasil Seleksi			
	4) SK Penetapan			
	5) Monitoring dan Evaluasi			
	6) Laporan			
	c Lomba/Kompetisi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	1) Administrasi			
	2) Laporan			
XX	KELEMBAGAAN			
1	Administrasi akreditasi dan kelembagaan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
	a Rekomendasi			
	1) Surat rekomendasi			
	2) Borang			
	b Pendampingan			
	- Nilai akreditasi			
2	Kebijakan-kebijakan pendidikan tinggi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	a Sosialisasi			
	- Laporan kegiatan			
	b Penyelesaian Sengketa/konflik			
	- Laporan hasil penyelesaian			

-150-

1	2	3	4	5
3	Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a Fasilitasi peningkatan perguruan tinggi			
	1) Administrasi			
	2) Laporan			
	b Sarana prasarana			
	1) Administrasi			
	2) Rekomendasi			
	c Kerja Sama			
	- Dokumen kerjasama			
4	Sistem Informasi	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	1) Database perguruan tinggi			
	2) Nomor registrasi dosen			
	3) Berkas evaluasi kinerja akademik			

JADWAL RETANSI ARSIP FASILITATIF

NO.	JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	PERENCANAAN			
1	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan			
	a Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	selama berlaku	4 Tahun	Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Buku RPJP			
	b Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	selama berlaku	4 Tahun	Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Data/dokumen usulan sasaran, indikator kinerja, target untuk lima Tahun dan total anggaran yang dibutuhkan dari masing-masing unit eselon 1			
	3) Rancangan awal RPJM dari kementerian PPN/Bappenas			
	4) Hasil rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM): -Notula rapat -Laporan kegiatan			
	5) Buku RPJM			
	c Rencana Strategis (Renstra)	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Bahan Referensi berupa Hasil evaluasi Tahun sebelumnya pelaksanaan pembangunan di sektor Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta aspirasi masyarakat			
	3) Data/dokumen usulan sasaran, indikator kinerja, target untuk lima Tahun dan total anggaran yang dibutuhkan dari masing-masing unit eselon 1 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)			
	4) Rancangan teknokratik renstra yang mengacu kepada rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)			

1	2	3	4	5
	5) dokumen Rancangan Renstra hasil penyelarasan Rancangan Teknokratik Renstra dengan Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)			
	6) Surat pengantar Rancangan Renstra Kemenristekdikti kepada Kementerian PPN/Bappenas			
	7) Catatan hasil penelaahan rancangan Renstra Kemenristekdikti dari Kementerian PPN/Bappenas			
	8) Dokumen Renstra Kemenristekdikti yang telah ditetapkan			
	9) Produk Hukum			
	d Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Dokumen tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan			
	3) Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah			
	4) Dokumen RKP yang telah ditetapkan			
2	Rencana Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	8 Tahun	Dinilai Kembali
	a Dokumen usulan rencana kerja (pra pagu indikatif)			
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Bahan referensi tentang Hasil Reviu Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan			
	3) draft dokumen Usulan Angka Dasar untuk Pra pagu indikatif			
	4) Dokumen usulan inisiatif baru			
	5) Surat pengantar usulan Angka Dasar dan Usulan Inisiatif Baru dari Kemenristekdikti kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas			
	6) Dokumen Usulan Angka Dasar untuk pra pagu infikatif dari Kemenristekdikti kepada Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas			
	7) Hasil reviu Dokumen usulan Angka Dasar dan Usulan Inisiatif Baru oleh Bappenas dan Kemenkeu			

-153-

1	2	3	4	5
	b Penyusunan rencana kerja (renja) pagu indikatif 1) Administrasi Persuratan 2) Surat edaran tentang Pagu Indikatif dari Kemenkeu 3) Pagu Indikatif 4) Surat pengantar Surat Edaran Kemenkeu ke Unit Eselon I di Lingkungan Kemenristekdikti 5) Alokasi Pagu Indikatif untuk masing-masing satuan kerja dan unit eselon I 6) Surat pengantar Alokasi Pagu Indikatif untuk masing-masing satuan kerja dan unit eselon I 7) Usulan RKA-K/L Pagu Indikatif dari masing-masing Satker dan Unit eselon I di lingkungan Kemenristekdikti 8) Rencana Anggaran Biaya beserta Kerangka Acuan Kerja unit eselon I dan PTN serta LLDIKTI di Lingkungan Kemenristekdikti 9) Dokumen dan Arsip Data Komputer RKA-K/L Pagu Indikatif Kemenristekdikti 10) Dokumen Usulan Rencana Kerja dari masing-masing unit utama 11) Usulan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) dari masing-masing unit utama 12) Surat pengantar RKA-K/L Pagu Indikatif yang ditandatangani oleh Menristekdikti 13) Dokumen trilateral meeting pembahasan Renja dan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) 14) Usulan Rencana Kerja Kemenristekdikti 15) Surat pengantar usulan Renja Kemenristekdikti 16) Usulan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) Kemenristekdikti 17) Surat pengantar usulan Arsitektur Data dan Informasi Kinerja (ADIK) Kemenristekdikti c Penyusunan rencana kerja dan anggaran pagu anggaran 1) Administrasi Persuratan 2) Dokumen KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) 3) Dokumen hasil Trilateral Meeting 4) Dokumen hasil Pembahasan Pagu Anggaran DPR dan Pemerintah 5) Pagu Anggaran 6) Alokasi Pagu Anggaran, untuk masing-masing satuan kerja dan unit eselon I			

-154-

1	2	3	4	5
	7) Surat pengantar Alokasi Pagu Anggaran, untuk masing-masing satuan kerja dan unit eselon I 8) Usulan RKA-K/Pagu Anggaran dari masing-masing Satker dan Unit eselon I di lingkungan Kemenristekdikti 9) Rencana Anggaran Biaya beserta Kerangka Acuan Kerja unit eselon I dan PTN serta LLDIKTI di Kemenristekdikti 10) Berita acara penelitian RKA-K/L Pagu Anggaran 11) Berita acara reviu RKA-K/L pagu Anggaran oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 12) Dokumen dan Arsip Data Komputer RKA-K/L Pagu Anggaran Kemenristekdikti 13) Surat pengantar RKA-K/L Pagu Anggaran yang ditandatangani oleh Menristekdikti d Penyusunan rencana kerja dan anggaran Pagu Alokasi Anggaran 1) Administrasi Persuratan 2) Catatan penelaahan RKAKL pagu anggaran 3) Hasil penelaahan RKA-K/L Pagu Angaran dengan Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas 4) Dokumen Nota Keuangan 5) Dokumen RAPBN 6) Dokumen RUU APBN 7) Dokumen RKA-K/L hasil pembahasan dengan komisi VII dan Komisi X DPR RI 8) Dokumen Pagu Alokasi Anggaran 9) Pagu Alokasi Anggaran Kemenristekdikti 10) Pagu Alokasi Anggaran, untuk masing-masing satuan kerja dan unit eselon I 11) Surat pengantar Pagu Alokasi Anggaran, untuk masing-masing satuan kerja dan unit eselon I			

-155-

1	2	3	4	5
	12) Usulan RKA-K/Pagu Alokasi dari masing-masing Satker dan Unit eselon I di lingkungan Kemenristekdikti 13) Rencana Anggaran Biaya beserta Kerangka Acuan Kerja unit eselon I dan PTN serta LLDIKTI di Lingkungan Kemenristekdikti 14) Berita acara penelitian RKA-K/L Pagu Alokasi 15) Berita acara reviu RKA-K/L pagu Alokasi oleh APIP 16) Dokumen dan Arsip Data Komputer RKA-K/L Pagu Alokasi Kemenristekdikti 17) Surat pengantar RKA-K/L Pagu Alokasi yang ditandatangani oleh Menristekdikti 18) Catatan penelaahan RKAKL pagu alokasi 19) Perpres Rincian Belanja 20) Daftar Isian Pagu Anggaran Kemenristekdikti yang telah disahkan			
3	Perjanjian Kinerja 1) Administrasi Persuratan 2) Perjanjian Kinerja Menristekdikti 3) Perjanjian Kinerja Eselon I dengan Menteri 4) Perjanjian Kinerja Pimpinan PTN/LLDIKTI dengan Menteri 5) Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon I 6) Perjanjian Kinerja Eselon III dengan Eselon II 7) Perjanjian Kinerja Eselon IV dengan Eselon III	1 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah, kecuali perjanjian kinerja masuk berkas perseorangan
4	Perencanaan Program dan Anggaran a Operasional dan Rutin 1) Administrasi Persuratan 2) Data Usulan gaji 3) Usulan Tunjangan dan Sertifikasi Dosen dan Guru Besar 4) Usulan Belanja Operasional	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	8 Tahun	Dinilai Kembali

-156-

1	2	3	4	5
	b Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) 1) Administrasi Persuratan 2) Usulan PHLN 3) Rencana Penarikan PHLN Tahun n + 1 dari satker terkait 4) Bahan Pemantauan dan Evaluasi PHLN 5) Laporan Hasil Pemantauan PHLN c Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) 1) Administrasi Persuratan 2) Proposal usulan KPBU d Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Administrasi Persuratan 2) Proposal usulan SBSN e Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT)/ Biaya Kuliah Tunggal (BKT)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) 1) Administrasi Persuratan 2) Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT)/ Biaya Kuliah Tunggal (BKT)/Usulan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 3) Produk Hukum SSBOPT, BKT, UKT f Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1) Administrasi Persuratan 2) Proposal TRPNBP (Target Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak) 3) Produk hukum g Badan Layanan Umum (BLU) 1) Administrasi Persuratan 2) Usulan Rencana Bisnis Anggaran BLU 3) Rencana Bisnis Anggaran BLU 4) Usulan Rencana Strategis Bisnis BLU 5) Rencana Strategis Bisnis BLU 6) Produk Hukum			

-157-

1	2	3	4	5
	h Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) 1) Administrasi Persuratan 2) Usulan Rencana Kerja Tahunan PTN Badan Hukum 3) Rencana Kerja Tahunan PTN Badan Hukum 4) Produk hukum i Program Prioritas dari satker dan/atau unit eselon I di lingkungan Kemenristekdikti 1) Administrasi Persuratan 2) Dokumen usulan j Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan/APBN-P 1) Administrasi Persuratan 2) Persetujuan DPR terkait Penambahan/Pemotongan Anggaran 3) Surat terkait APBNP dari Kemenkeu 4) Hasil Rapat Pimpinan terkait Penambahan/Pemotongan Anggaran 5) Pagu Alokasi APBNP, untuk masing-masing satuan kerja dan unit eselon I yang mengalami perubahan 6) Surat pengantar Pagu Alokasi APBNP, untuk masing-masing satuan kerja dan unit eselon I yang mengalami perubahan 7) Usulan RKA-K/L APBNP dari masing-masing Satker dan Unit eselon I di lingkungan Kemenristekdikti 8) Rencana Anggaran Biaya beserta Kerangka Acuan Kerja unit eselon I dan PTN serta LLDIKTI di Kemenristekdikti 9) Berita acara penelitian RKA-K/L APBNP 10) Berita acara reviu RKA-K/L pagu Alokasi oleh APIP APBNP 11) Dokumen dan Arsip Data Komputer RKA-K/L APBNP Kemenristekdikti 12) Surat pengantar RKA-K/L APBNP yang ditandatangani oleh Menristekdikti 13) Catatan Penelaahan RKA-K/L APBNP 14) Daftar Isian Pagu Anggaran APBNP Kemenristekdikti yang telah disahkan			
5	Revisi Dokumen Anggaran Revisi DIPA dan POK 1) surat usulan revisi dari satker atau eselon I lainnya 2) Arsip data komputer RKA-K/L 3) Kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya 4) konsep revisi DIPA	2 Tahun setelah Tahun anggaran berakhir	8 Tahun	Musnah

-158-

1	2	3	4	5
	5) matrik usulan revisi 6) Surat sekretaris jenderal kepada Direktorat jenderal Anggaran perihal revisi anggaran			
6	Kegiatan Sidang a Sidang Kabinet 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan Sidang Kabinet 3) Risalah b Rapat Terbatas 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan Rapat Terbatas 3) Risalah	1 Tahun 1 Tahun	4 Tahun 4 Tahun	Permanen Permanen
7	Rapat/ Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja a Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat dengan DPR 3) Risalah/ Kesimpulan b Rakor Tingkat Menteri 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan 3) Risalah/ Kesimpulan c Rakor dengan Perguruan Tinggi 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan 3) Risalah/ Kesimpulan d Rakor/Raker MWA (Majelis Wali Amanat) 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan 3) Risalah/ Kesimpulan	1 Tahun	4 Tahun	Musnah, Kecuali Risalah rapat dengan DPR, rapat tingkat Menteri Permanen

-159-

1	2	3	4	5
	e Rakor/Raker Senat 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan 3) Risalah/ Kesimpulan f Rakor/Raker/Forum Rektor 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan 3) Risalah/ Kesimpulan g Rakor/Raker dengan LLDIKTI 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan 3) Risalah/ Kesimpulan			
8	Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Kementerian a Pemantauan dan Evaluasi 1) Administrasi Persuratan 2) Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonev) 3) Bahan penyusunan panduan SIMonev 4) Buku Panduan SIMonev b Dokumen Realisasi Capaian Kinerja Program, Capaian Output, dan Anggaran pada SIMonev 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan pelaksanaan fact finding 3) Hasil pelaksanaan fact finding c Dokumen Hasil Fact Finding dan Rekomendasinya (Kegiatan Prioritas, Kegiatan PTN/LLDIKTI) 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan pemantauan dan evaluasi kinerja LPNK 3) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LPNK	2 Tahun setelah pelaksanaan 2 Tahun setelah pelaksanaan 2 Tahun setelah pelaksanaan	4 Tahun 4 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah Musnah

-160-

1	2	3	4	5
	d Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja LPNK (Lembaga Pemerintahan Non Kementerian) 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan pemantauan dan evaluasi kinerja LPNK 3) Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LPNK	2 Tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
9	Pemantauan, Evaluasi Program dan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan pemantauan dan evaluasi Program dan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI 3) Hasil pemantauan dan evaluasi Program dan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI	2 Tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
10	Laporan a Laporan Berkala 1) Administrasi Persuratan 2) Laporan Bulanan Hasil dan Evaluasi ke Stakeholder lain 3) Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Triwulan (PHLN,Kegiatan Prioritas, Aksi PPK, Evaluasi Pelaksanaan Kemenkeu) 4) Rapor Triwulan Unit Kerja Berbasis SIMonev 5) Laporan Realisasi Anggaran dan Rekomendasinya b Laporan Khusus 1) Administrasi Persuratan 2) Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Triwulan (Prioritas Janji Presiden) 3) Laporan Evaluasi Kegiatan Mendalam untuk KemenpanRB 4) Laporan Kegiatan Penugasan Khusus 5) Laporan Hasil Verifikasi Spending Review	2 Tahun 		

-161-

1	2	3	4	5
	c Progress Report	2 Tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Bahan progress report			
	3) Hasil			
	d Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Laporan Kinerja (LAKIN)	1 Tahun	2 Tahun	Permanen
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Laporan Kinerja Kementerian			
	3) Laporan Kinerja Eselon I			
	4) Laporan Kinerja PTN dan LLDIKTI			
	e Evaluasi akuntabilitas kinerja PTN/ LLDIKTI	2 Tahun	4 Tahun	Musnah
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Dokumen Evaluasi			
	3) Hasil Evaluasi			
	II KEPEGAWAIAN			
	1. Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen
	1. Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik			
	2. Penyusunan kebijakan			
	3. Perumusan kebijakan			
	4. Pemberian masukan dan dukungan			
	5. Penetapan kebijakan			
	6. <i>Memorandum of Understanding</i>			
	2. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
	1. Perencanaan Kebutuhan ASN			
	a. Bahan penyusunan rencana kebutuhan			
	b. Analisis Kebutuhan			
	1) Aparatur Sipil Negara			
	2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)			

-162-

1	2	3	4	5
	c. Pengolahan data kebutuhan	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
	2. Perencanaan Pertimbangan Formasi			
	a. Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN			
	b. Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas			
	3. Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
	4. Standarisasi Jabatan	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen
	a. Informasi Jabatan			
	b. Kompetensi Jabatan			
	c. Klasifikasi Jabatan			
	3. Formasi dan Pengadaan Pegawai	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
	1 Formasi ASN			
	a. Usulan formasi disertai dengan:			
	1) Analisa Jabatan			
	2) Beban Kerja			
	b. Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN			
	c. Persetujuan Formasi			
	d. Penetapan Formasi			
	e. Penetapan Formasi Khusus			
	2. Pengadaan ASN	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
	a. Proses Rekrutmen ASN			
	b. Penetapan Pengumuman Kelulusan			
	c. Berkas Lamaran yang tidak diterima			
	d. Nota Usul Pengangkatan ASN			
	e. Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)			

-165-

1	2	3	4	5
6.	Kinerja Aparatur Sipil Negara 1. Hasil penilaian kinerja dan standar kerja a. Sistem penilaian kinerja ASN b. Standar kinerja jabatan pegawai ASN c. Penilaian kinerja pegawai ASN 2. Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN a. Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN b. Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN c. Teknis penilaian kinerja ASN 3. Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
7	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 1. Kode Etik Pegawai 2. Disiplin a. Penegakan Disiplin b. Peningkatan Disiplin 3. Pemberhentian a. Pemberhentian dengan hormat b. Pemberhentian tidak dengan hormat c. Pemberhentian tidak dengan hormat 4. Pensiun a. Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara 1) Administrasi pensiun ASN 2) Perakaman dan pemeliharaan data pensiun b. Penetapan Pensiun ASN	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	MusnahPermanen
		2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	2 Tahun	Musnah
		1 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	2 Tahun	Musnah

-166-

1	2	3	4	5
	c. Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN	1 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	2 Tahun	Musnah
	d. Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya 1) Administrasi pensiun Pejabat Negara 2) Penyiapan pensiun pejabat negara 3) Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara	1 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	2 Tahun	Permanen
8	Bantuan Hukum 1. Pemberian Bantuan Hukum 2. Bantuan Hukum Pegawai	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9	Status dan Kedudukan Pegawai 1. Pertimbangan status kepegawaian a. Analisis status kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan status kepegawaian 2. Pertimbangan kedudukan kepegawaian a. Analisis kedudukan kepegawaian b. Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian 3. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai 4. Perselisihan/sengketa kepegawaian	2 Tahun setelah SK ditetapkan	3 Tahun	Musnah
10.	Sistem Informasi Kepegawaian 1. Pengolahan data dan informasi kepegawaian a. Pengolahan Data 1) Pengelolaan database kepegawaian ASN 2) Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN b. Informasi kepegawaian 1) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah

-167-

1	2	3	4	5
	2) Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN 3) Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik 2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian 3. Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian a. Arsip kepegawaian elektronik 1) Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian 2) Perekaman dan arsip kepegawaian 3) Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik b. Arsip Kepegawaian Fisik	2 Tahun setelah diperbaharui 2 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun	3 Tahun 3 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen Musnah
11.	Pengawasan dan pengendalian 1. Formasi, pengadaan dan pasca diklat a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 2. Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 3. Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 4. Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN a. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan b. Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun setelah Tahun Anggaran berakhir	3 Tahun	Musnah

-168-

1	2	3	4	5
	c. Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan 5. Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian 6. Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer			
12.	Administrasi Pegawai 1. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas 2. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan 3. Cuti Alasan Penting 4. Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara 5. Dokumentasi Identitas Pegawai a. Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu b. Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan c. Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) d. Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) 6. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 7. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan	1 Tahun setelah pelaksanaan 1 Tahun setelah pelaksanaan 1 Tahun setelah pelaksanaan 1 Tahun setelah pelaksanaan 1 Tahun setelah pelaksanaan 1 Tahun 1 Tahun	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan Musnah Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan Musnah, kecuali SK masuk berkas perseorangan Musnah Musnah
13	Kesejahteraan Pegawai 1. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 2. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BRJS 3. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan 4. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial 5. Berkas tentang Layanan Pakiaian Dinas 6. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas	1 Tahun	1 Tahun	Musnah, kecuali medical record, piagam penghargaan dan tanda jasa masuk berkas perseorangan

-169-

1	2	3	4	5
	7. Berkas tentang Pemberian Tali Kasih 8. Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa 9. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi 10. Berkas tentang Medical Record			
14	Administrasi Perseorangan 1. Berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil 2. Berkas perseorangan PPPK 3. Berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional	5 Tahun setelah berhenti/pensiun 5 Tahun setelah berhenti/pensiun 1 Tahun setelah berhenti/pensiun	5 Tahun setelah hak & kewajibannya habis 5 Tahun setelah hak & kewajibannya habis 2 Tahun setelah hak & kewajibannya habis	Musnah, kecuali Pejabat Eselon I, Permanen Musnah Permanen
15	Berkas Perseorangan Menteri/ Wakil Menteri	1 Tahun setelah berhenti/pensiun	2 Tahun setelah hak & kewajibannya habis	Permanen
16	Penilaian Kompetensi 1. Berkas Penilaian Kompetensi 2. Hasil Penilaian Kompetensi	2 Tahun setelah penilaian berakhir	3 Tahun	Musnah
III	KEUANGAN			
1	Pelaksanaan Anggaran a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) 1) Surat Undangan 2) Notula Rapat 3) Draf DIPA 4) Draf POK	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil	5 Tahun	Musnah

-170-

1	2	3	4	5
	5) DIPA 6) POK b. RAB (Rencana Anggaran Biaya) 1) Surat Undangan 2) Notula Rapat 3) Draf RAB 4) RAB	pemeriksaan telah selesai		
2	Pengeluaran Anggaran a. Tunjangan kinerja 1) SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) 2) Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja 3) Daftar nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja 4) Daftar Pembayaran 5) Berkas Setoran Bank b. Pengeluaran Anggaran Pelaksana Kegiatan 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP-GU (Ganti Uang)) 2) SPP-LS (Langsung) 3) SPP-UP (Uang Persediaan) 4) SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan) 5) Surat Kuasa sampai Surat Perintah Membayar (SPM) 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 7) Juklak/mekanisme pengelolaan APBN 8) Bahan Nota Keuangan c. Penggajian 1) Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium 2) Kartu Gaji d. KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai)	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah

-171-

1	2	3	4	5
3	Pengelolaan Perbendaharaan			
a	Perbendaharaan			
1)	Usulan Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawa ban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
2)	SK Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan			
3)	SK Pengangkatan KPA, BP (Bendahara Pengeluaran)			
4)	SPP (Surat Permintaan Pembayaran)			
5)	Surat Perintah Membayar (SPM)			
6)	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)			
7)	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ)			
8)	Buku Kas Umum (BKU)			
b	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)			
-	Laporan PNBP	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawa ban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
c	Badan Layanan Umum (BLU)			
1)	Usulan Badan Layanan Umum	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Permanen
2)	Usulan Standar Pelayanan Minimum			
3)	Usulan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Badan Layanan Umum			
4)	Usulan Remunerasi dan tarif layanan BLU			
5)	Laporan Dewan Pengawas			
6)	Laporan Monitoring dan Evaluasi			
7)	Lampiran RPP Tarif PNBP			

-172-

1	2	3	4	5
d	Kartu Pengawasan Kredit	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawa ban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
e	Pajak			
1)	Surat Setoran Pajak	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawa ban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
2)	SPT			
f	Penerimaan Non Pajak			
1)	SSBP	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawa ban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
2)	SSPB			
g	Berita Acara Pemeriksaan Kas	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawa ban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah

-173-

1	2	3	4	5
	h Verifikasi anggaran 1) SPJ yang sudah absah dan benar	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
	i Pembukuan Rekening 1) Surat Persetujuan Pembukaan Rekening 2) Daftar Buku Rekening Perguruan Tinggi 3) Rekonsiliasi Rekening dengan Kementerian Keuangan	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
	j Pembukuan Anggaran 1) Buku Kas Umum 2) Buku Kas Pembantu 3) Kartu Realisasi Anggaran 4) Kartu Pengawasan Realisasi Anggaran	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
	k Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1) Laporan Kehilangan 2) Berita Acara Kehilangan 3) Berita Acara Sidang Majelis TGR 4) SK tanggung jawab mutlak 5) SK Penghapusan 6) Laporan Penyelesaian 7) Laporan Pemantauan dari BPK	2 Tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/ tuntutan ganti rugi dilunasi dan tindaklanjut hasil pemeriksaan sudah selesai	8 Tahun	Musnah

-174-

1	2	3	4	5
	l Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) 1) Laporan Penyelesaian 2) Laporan Pemantauan dari BPK	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
	m Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/ ITJEN/ BPKP 1) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2) Laporan Hasil Pemeriksaan ITJEN 3) Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
4	Administrasi Keuangan a Keterangan Penghasilan b Permohonan Pinjaman c Iuran Keanggotaan Organisasi d Speciment Tanda Tangan KPA, BP, PPK, dan BPP	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
5	Belanja a Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen Pembayarannya: 1) Barang pakai habis	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	3 Tahun	Musnah

-175-

1	2	3	4	5
2)	Barang inventaris: - Barang Bergerak/Barang Inventari	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah
	- Tanah dan bangunan	2 Tahun setelah barang tidak dikuasai	5 Tahun	Musnah
3)	Jasa	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 Tahun	Musnah
4)	Software Komputer	2 Tahun setelah software tidak digunakan	3 Tahun	Permanen
	Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain: - Pengumuman Lelang - Dokumen Prakualifikasi - Dokumen Peninjauan Lapangan - Berita Acara Penjelasan Pekerjaan - Berita Acara Pelelangan - Usulan Calon Pemenang - Surat Perintah Kerja (SPK) - Kontrak/Adendum Kontrak			

-176-

1	2	3	4	5
b	Belanja Modal	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
c	Belanja Operasional lainnya	2 Tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan telah selesai	8 Tahun	Musnah
6	Bantuan Luar Negeri 1) Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book) 2) Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book) 3) Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya 4) Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender 5) Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri	2 Tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 Tahun	Permanen

-177-

1	2	3	4	5
	6) Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya: (Reimbursement pinjaman berakhir, Direct Payment/Transfer Procedure, Special Commitment/ L/C Opening, Special Account/Imprest Fund, Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri, Notice Of Disbursement) 7) Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) 8) Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah PencairanDana (SP2D), SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan DataPendukung lainnya 9) Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No. Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure(SE) 10) Staff Appraisal Report 11) Report /Laporan yang terdiri dari: Progress Report Monthly Report Quarterly Report Final Report/Completion Report 12) Laporan Hutang Negara : Laporan Pembayaran Hutang Negara Laporan Posisi Hutang Negara 13) Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri			
7	Layanan Keuangan a Administrasi perbendaharaan dan penggajian b Verifikasi anggaran c Koordinasi keuangan (Rekonsiliasi) d Koordinasi pelaksanaan kegiatan e Sosialisasi keuangan	2 Tahun	8 Tahun	Musnah

-178-

1	2	3	4	5
8	Akuntansi dan Pelaporan a Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 1) Buku Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 2) Kebijakan Akuntansi (SK Sekjen/ Permen) 3) Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (Database) 4) Laporan Realisasi Semesteran APBN b Perhitungan anggaran 1) RKAKL 2) RAB 3) TOR c Laporan keuangan 1) Laporan Keuangan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) -Laporan Realisasi Anggaran -Laporan Operasional -Laporan Perubahan Ekuitas -Laporan Pendapatan -Laporan Barang Milik Negara -Laporan Persediaan -Berita Acara pengurusan Rekonsiliasi dengan KPPN -Berita Acara Rekonsiliasi Internal -Berita Acara Stock opname -Laporan Pertanggungjawaban Bendahara -Berita ACara Pemeriksaan Kas -Laporan Realisasi Belanja -Laporan Pengembalian Belanja -Catatan Atas Laporan Keuangan -Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara -Berita Acara Rekonsiliasi BMN dengan KPKNL 2) Laporan Keuangan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) -Laporan Realisasi Anggaran -Laporan Operasional -Laporan Perubahan Ekuitas -Laporan Pendapatan -Laporan Barang Milik Negara -Laporan Persediaan -Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN	2 Tahun setelah ada perubahan 		

-179-

1	2	3	4	5
	-Berita Acara Rekonsiliasi Internal -Berita Acara Stock opname -Laporan Pertanggungjawaban Bendahara -Berita Acara Pemeriksaan Kas -Laporan Realisasi Belanja -Laporan Pengembalian Belanja -Catatan Atas Laporan Keuangan -Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara 3) Laporan Neraca			
	d Evaluasi laporan keuangan - Laporan evaluasi Satuan Kerja e Pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan 1) Dokumen Akuntansi Keuangan: Berita Acara Pemeriksaan Kas Kas/Register Penutupan Kas Arsip Data Komputer (ADK) Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN Laporan			
IV	KETATAUSAHAAN			
1	Administrasi Menteri/Pimpinan			
	a Sambutan Pidato Menteri/Pimpinan 1) Naskah Pidato Menteri 2) Naskah Pidato Eselon I b Ucapan (ucapan terimakasih, simpati, pesan/kesan, dan rekomendasi) c Risalah/notula 1) Risalah/notulen/notula Menteri 2) Risalah/notulen/notula Eselon I	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun setelah pemeriksaan selesai 1 Tahun setelah pemeriksaan selesai	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah Musnah Permanen Musnah

-180-

1	2	3	4	5
	d Memori jabatan pimpinan 1) Memori Jabatan Menteri 2) Memori Jabatan Eselon I	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Permanen Musnah
2	Keprotokolan a Upacara/ Acara Kedinasan 1) Upacara Bendera 2) Upacara Hari besar 3) Upacara Pelantikan 4) Upacara Serah Terima Jabatan 5) Upacara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 6) Upacara Hari Pendidikan Nasional b Kunjungan Kedinasan - Buku tamu c Acara Pimpinan (agenda pemimpin dan kunjungan kerja) - Daftar Agenda Pimpinan d Audiensi	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 2 Tahun 4 Tahun 1 Tahun	Musnah Musnah Kecuali Pejabat Negara, Tokoh Nasional, Permanen Musnah Musnah Kecuali Pejabat Negara, Tokoh Nasional, Permanen
3	Pencetakan, Penggandaan, dan Penjilidan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
4	Administrasi Rapat Menteri/Pimpinan a Rapat Pimpinan Kementerian b Rapat Terbatas Pimpinan Kementerian c Rapat Kegiatan Kementerian	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
5	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6	Praktik Kerja Lapangan/Magang a SMU/SMA/SMK b Perguruan Tinggi	1 Tahun	2 Tahun	Musnah

1	2	3	4	5
7	Organisasi Non Kedinasan a KORPRI b Dharma Wanita c Koperasi d Yayasan Kemenristekdikti e Asosiasi f organisasi non kedinasan lainnya	1 Tahun setelah ditetapkan	3 Tahun	Musnah
V	KEARSIPAN			
1	Persuratan di Kementerian a Pengurusan Surat Masuk di Kementerian 1) Buku Agenda Surat Masuk 2) Buku Ekspedisi Surat Masuk b Pengurusan Surat Keluar di Kementerian 1) Bukti Tanda terima Surat 2) Buku Ekspedisi Surat Keluar 3) Buku Agenda Surat Keluar	1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali
2	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip a Penyimpanan arsip - Daftar Pertelaan Arsip b Pemeliharaan arsip - Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Selama dipergunakan 1 Tahun	- 2 Tahun	Musnah Musnah
3	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Sampai ditetapkan	3 Tahun	Permanen
4	Layanan Arsip (Peminjaman dan penggunaan arsip)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
5	Penyusutan a Pemindahan Arsip Inaktif 1) Berita acara pemindahan 2) Daftar arsip yang dipindahkan	1 Tahun	1 Tahun	Dinilai Kembali

1	2	3	4	5
b	Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna 1) Panitia Penilai 2) Penilaian Panitia Penilai 3) Permintaan Persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan) 4) Penetapan arsip yang diMusnahkan 5) Berita acara peMusnahan arsip 6) Daftar arsip yang diMusnahkan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
c	Penyerahan arsip statis 1) Pembentukan panitia penilai 2) Notulen rapat panitia 3) Surta pertimbangan panitia penilai 4) Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan 5) Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan dari pencipta arsip 6) Keputusan Penetapan Penyerahan 7) Berita acara penyerahan arsip 8) Daftar arsip yang diserahkan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
6	Pembinaan Kearsipan - a Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan - b Bimbingan Teknis - c Supervisi dan monitoring	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
VI	PERLENGKAPAN DAN BARANG MILIK NEGARA			
1	Perencanaan Perlengkapan dan Barang Milik Negara - a Analisa Kebutuhan 1) Daftar Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) 2) Usulan kebutuhan perlengkapan - b Daftar Rekanan Mampu 1) Daftar <i>Company Profile</i> 2) Surat Rekomendasi	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
		1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-183-

1	2	3	4	5
	3) Daftar Rekanan c Tata Ruang 1) Layout Ruang Kerja 2) Form Peminjaman Ruangan 3) Surat Undangan 4) Company Profile 5) Daftar Penawaran	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa a Pengadaan Barang dan Jasa Secara langsung b Pengadaan melalui E-katalog - Arsip elektronik : - Aplikasi e-katalog c Pengadaan barang lelang sederhana - Berita Acara hasil pelelangan d Pengadaan barang lelang umum - Berita Acara e Pengadaan jasa seleksi sederhana - Berita Acara f Pengadaan jasa seleksi umum - Berita Acara	2 Tahun setelah dipertanggungjawab- kan	8 Tahun	Dinilai Kembali
3	Pengelolaan Barang Milik Negara a Penggunaan Barang Milik Negara 1) Surat usulan 2) Surat Persetujuan/SK b Pemanfaatan Barang Milik Negara 1) Surat Usulan 2) Berita Acara Serah terima 3) SK c Pemindahtanganan Barang Milik Negara 1) Surat usulan 2) Surat Persetujuan/SK	2 Tahun	8 Tahun	Dinilai Kembali

-184-

1	2	3	4	5
	d Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara 1) Surat usulan 2) Surat Persetujuan/SK			
VII	KERUMAHTANGGAAN			
1	Pemeliharaan/ Perbaikan a Barang Bergerak/ Inventaris 1) Daftar inventaris kendaraan 2) Kartu kontrol kendaraan 3) Form servis kendaraan 4) Dokumen perpanjangan STNK b Barang Tidak Bergerak/Investasi/Asset 1) Daftar inventaris barang 2) Kartu kontrol barang 3) Form servis Barang 4) Berita acara pekerjaan	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
2	Fasilitas Kantor a Kendaraan Dinas 1) Formulir peminjaman kendaraan 2) Berita acara serah terima kendaraan dinas 3) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak b Ruang Rapat 1) Formulir peminjaman ruangan 2) Surat keterangan pemakaian ruang (jangka panjang) 3) Daftar kelengkapan ruangan c Telekomunikasi 1) Formulir peminjaman peralatan 2) Berita Acara Serah terima barang 3) Daftar Kelengkapan sarana telekomunikasi d Fasilitas Kantor lainnya	1 Tahun	4 Tahun	Musnah

-185-

1	2	3	4	5
3	Keamanan dan Ketertiban a Pengamanan, penjagaan, pengawasan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas 1) Daftar nama satuan pengamanan 2) Daftar jaga/ daftar piket 3) Catatan gangguan/pelanggaran/ kejadian 4) Surat ijin keluar masuk orang atau barang b Laporan ketertiban dan keamanan 1) Laporan kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan 5) Laporan pelaksanaan c Pemadam Kebakaran - Laporan monitoring kehandalan peralatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Perawatan 1) SK Perjanjian Kerja 2) Dokumen Kontrak Kerja	2 Tahun setelah kontrak kerja selesai	4 Tahun	Musnah
5	Mess, Rumah Jabatan, Rumah Dinas, Wisma/Villa, Hostel, Penginapan 1) Copy Tanda Bukti Kepemilikan 2) Surat Perjanjian Pemakaian	2 Tahun setelah kontrak kerja selesai	4 Tahun	Musnah
6	Kebersihan dan Taman 1) Daftar piket 2) Dokumen perjanjian kerja terkait kegiatan kebersihan dan taman	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Musnah
7	Pelayanan Rumah Tangga a Layanan Pengelolaan Gedung 1) Buku Tamu 2) Buku permohonan penggunaan gedung b Layanan wisma tamu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-186-

1	2	3	4	5
c	Layanan graha widya bhakti(Buku Permohonan Pengguna)			
d	Layanan balai pengobatan 1) Rekam Medis Pasien 2) Surat Keterangan Sehat 3) Surat Keterangan Sakit 4) Daftar Tenaga Medis dan Non Medis 5) Surat Keterangan Bebas Narkoba			
e	Sarana Prasarana Pendukung Inkubasi Bisnis Teknologi			
f	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)			
g	Kesehatan			
h	Rekreasi / Kesenian / Olah Raga			
i	Bantuan Sosial			
j	Perumahan			
VIII HUKUM				
1	Program Legislasi 1) Bahan /materi program legislasi nasional dari instansi 2) Program legislasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	Produk Hukum - a Penetapan 1) Surat Permohonan pembuatan SK dari Pemrakarsa 2) Dokumen Pendukung 3) SK Tim 4) SK Menteri/ SK Sekjen/ SK Dirjen/ SK Pembukaan Program Studi, SK Pendirian PTS , SK Perubahan, SK Penutupan Program Studi, SK Pencabutan Izin PTS dan Salinannya - b Pengaturan 1) Rancangan Undang-Undang 2) Undang-Undang 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	2 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Permanen
		2 Tahun setelah diperbaharui	4 Tahun	Permanen

-187-

1	2	3	4	5
	4) Peraturan Pemerintah 5) Peraturan/ Keputusan Presiden 6) Peraturan Menteri 7) Keputusan Menteri 8) Instruksi dan Edaran Menteri/LPNK/PTN 9) Peraturan Bersama/Surat Keputusan Bersama 10) Surat Edaran 11) Peraturan/Keputusan Eselon I 12) Peraturan Bersama/Surat Keputusan Bersama Eselon I 13) Surat Edaran/Surat Edaran Bersama Eselon I/Kepala Pusat 14) Peraturan/Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi 15) Peraturan/Keputusan Majelis Wali Amanat 16) Instruksi Pemimpin Perguruan Tinggi 17) Surat Edaran Pemimpin perguruan Tinggi 18) Keputusan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 19) Surat Edaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi			
3	Telaah Hukum a Telaah Hukum Internal 1) Telaahan 2) Surat Penyampaian Telaahan b Telaah Hukum Eksternal 1) Telaahan 2) Surat Penyampaian Telaahan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
4	Advokasi Hukum Litigasi a Advokasi Hukum Perkara Peradilan Tata Usaha Negara 1) Gugatan 2) Surat Kuasa 3) Jawaban 4) Replik (Balasan dari Penggugat) 5) Duplik (Balasan dari Hukor) 6) Alat bukti berupa surat 7) Surat Tugas Pemberian keterangan sebagai ahli/saksi	2 Tahun setelah kasus selesai	5 Tahun	Dinilai Kembali

-188-

1	2	3	4	5
	8) Putusan b Advokasi Hukum Perkara Perdata 1) Gugatan 2) Surat Kuasa 3) Jawaban 4) Replik (Balasan dari Penggugat) 5) Duplik (Balasan dari Hukor) 6) Alat bukti berupa surat 7) Surat Tugas Pemberian keterangan sebagai ahli/saksi 8) Putusan c Advokasi Hukum Perkara Pidana 1) Surat tugas pendampingan hukum 2) Surat Kuasa			
5	Advokasi Hukum Non litigasi a Kajian Hukum 1) Telaahan hukum 2) SK Tim b Pendampingan Saksi/Ahli - Surat Tugas keterangan ahli dan saksi c Pemberian keterangan sebagai saksi/ahli - Berita Acara Pemeriksaan d Telaah Naskah Perjanjian Kerjasama dalam negeri 1) Administrasi Persuratan 2) Nota Kesepahaman (MoU) 3) Perjanjian Kerjasama (Pks) 4) Bimbingan Teknis mengenai pembinaan kerjasama -Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan Bimtek/ Notula dan Dokumentasi 5) Laporan evaluasi kerjasama dalam negeri	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun setelah kegiatan	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 5 Tahun	Permanen Dinilai Kembali Permanen Musnah

-189-

1	2	3	4	5
	c Telaah Naskah Perjanjian Kerjasama luar negeri 1) Administrasi Persuratan 2) Database kerjasama bilateral 3) Nota Kesepahaman (MoU) 4) Univeristas Luar Negeri: -MoU -Implementing Arrangement -Agreement (Persetujuan) 5) Lembaga Pemerintah Luar Negeri -MoU -Implementing Arrangement -Agreement (Persetujuan) 6) Perjanjian Kerjasama (Pks) 7) Laporan evaluasi kerjasama luar negeri f Workshop/Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Hukum g Inventarisasi dan Yurisprudensi Perkara Hukum	2 Tahun setelah kegiatan 2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Dinilai Kembali
6	Sosialisasi Hukum 1) Bahan Presentasi dari Narasumber 2) Laporan Kegiatan Sosialisasi	1 Tahun setelah dilaksanakan	2 Tahun	Musnah
7	Dokumentasi Hukum - Arsip Elektronik/Database di JDIH	1 Tahun setelah terbit peraturan baru	2 Tahun	Musnah
IX	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA			
1	Organisasi a Pembentukan, penataan, dan penutupan/pembubaran organisasi 1) Pembentukan, penataan di Unit Utama 2) Pembentukan, penataan, dan penutupan di Perguruan Tinggi Negeri 3) Pembentukan, penataan, dan penutupan di Lembaga Layanan dan Pendidikan Tinggi 4) Pembentukan, penataan, dan penutupan di Pusat-Pusat dan Lembaga	2 Tahun setelah diperbaharui	5 Tahun	Permanen

-190-

1	2	3	4	5
	b Tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja 1) OTK Unit Utama 2) OTK dan Statuta Perguruan Tinggi Negeri 3) OTK Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 4) OTK Pusat-Pusat dan Lembaga c Rincian tugas unit kerja 1) Rincian tugas Perguruan Tinggi Negeri 2) Rincian tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 3) Rincian tugas Pusat-Pusat dan Lembaga d Sistem pengukuran dan penilaian kinerja organisasi 1) Pengukuran dan penilaian kinerja Unit Utama 2) Pengukuran dan penilaian kinerja Perguruan Tinggi Negeri 3) Pengukuran dan penilaian kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 4) Pengukuran dan penilaian kinerja Pusat-Pusat dan Lembaga e Penyajian data dan informasi kelembagaan pengelola riset, teknologi, dan pendidikan tinggi 1) Penyajian data dan informasi kelembagaan di Unit Utama 2) Penyajian data dan informasi kelembagaan di Perguruan Tinggi Negeri 3) Penyajian data dan informasi kelembagaan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 4) Penyajian data dan informasi kelembagaan pengelola di Pusat-Pusat dan Lembaga			
2	Tata Laksana a Analisis jabatan Kelas Jabatan: 1) Penetapan Jabatan Fungsional 2) Peta jabatan 3) Analisis beban kerja 4) Nama Jabatan 5) Uraian Jabatan (data dan informasi jabatan) 6) Perhitungan beban kerja b Sistem dan prosedur 1) Peta bisnis proses 2) SOP 3) Standar Pelayanan Publik	2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun 5 Tahun	Dinilai Kembali Permanen

-191-

1	2	3	4	5
	c Pembinaan ketatalaksanaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) Materi Bimtek tentang Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan: -Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan Bimtek/ Notula dan Dokumentasi			
	2) Materi Bimtek tentang Ketatalaksanaan, Sistem dan prosedur: -Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan Bimtek/ Notula dan Dokumentasi			
	d Evaluasi Analisis Jabatan	1 Tahun	5 Tahun	Musnah
	1) Kelas Jabatan: Penetapan Jabatan Fungsional 2) Peta jabatan 3) Analisis beban kerja : Nama Jabatan Uraian Jabatan (data dan informasi jabatan) Perhitungan beban kerja			
	e Evaluasi Sistem dan prosedur	1 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
	1) Peta bisnis proses 2) SOP 3) Standar Pelayanan Publik			
	f Reformasi Birokrasi	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
X	HUBUNGAN MASYARAKAT/ KOMUNIKASI PUBLIK			
1	Dengar Pendapat/hearing DPR			
	1) Rapat Terbuka: - Administrasi Persuratan - Notula - Bahan RDP (rapat dengar pendapat) DPR/DPD RI - Bahan Rapat Kerja - Laporan Singkat/ hasil rapat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-192-

1	2	3	4	5
	2) Rapat Tertutup: - Administrasi Persuratan - Notula - Bahan RDP (rapat dengar pendapat) DPR/DPD RI - Bahan Rapat Kerja - Laporan Singkat/ hasil rapat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	Hubungan Antar lembaga dan Komunikasi Publik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	a Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Lembaga Pemerintah			
	1) Administrasi Persuratan 2) Narasi tematik 3) Dokumentasi 4) Dokumen Kelengkapan penghargaan 5) Dokumen Program Kementerian			
	b Hubungan dan Komunikasi Publik Organisasi Ristekdikti Nasional			
	1) Administrasi Persuratan 2) Dokumen kegiatan 3) Laporan kegiatan			
	c Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat			
	1) Administrasi Persuratan 2) Dokumen kegiatan 3) Laporan kegiatan			
	d Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Pemangku Kepentingan lainnya			
	1) Administrasi Persuratan 2) Dokumen kegiatan 3) Laporan kegiatan			
	e Bakohumas			
	1) Administrasi Persuratan 2) Dokumen kegiatan 3) Laporan kegiatan			
3	Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Media Massa			
	a Press Release	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	b Guntingan Berita/ kliping koran/poster / majalah	1 Tahun	4 Tahun	Musnah
	c Kunjungan wartawan/liputan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	- Hasil liputan			

-193-

1	2	3	4	5
4	Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Internal 1) Administrasi Persuratan 2) Dokumen kegiatan 3) Laporan kegiatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Layanan Informasi Publik a Pengaduan Masyarakat 1) Laporan dari masyarakat 2) Tindak lanjut/ jawaban dari unit utama 3) Rekapitulasi laporan yang belum ada jawaban 4) Rekapitulasi laporan secara berkala b PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) - Kegiatan Sosialisasi Bimtek terkait PPID	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6	Layanan Unit Terpadu a Penyelenggaraan Layanan Terpadu (PINTU) 1) Isian Formulir 2) Data Pendukung 3) Surat Pengantar terkait permohonan data dari masyarakat ke Unit Utama 4) Tindak Lanjut/jawaban 5) Sending Report 6) Balasan dari masyarakat 7) Tanda Terima b Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Terpadu (PINTU) 1) Laporan monitoring evaluasi berkala	2 Tahun	4 Tahun	Musnah
7	Anugerah Humas 1) Daftar Peserta 2) SK Tim dan Juri 3) Hasil Seleksi 10 Terbaik 4) Hasil Seleksi Juri 5) SK Pemenang 6) Daftar penerima Sertifikat	2 Tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah
8	Publikasi dan Dokumentasi a Informasi profil unit kerja - Buku Profil	1 Tahun	2 Tahun	Musnah

-194-

1	2	3	4	5
	b Pameran/Sayembara, Talkshow,Festival, Pembuatan Spanduk, brosur dan Iklan 1) Laporan Pameran 2) Laporan Talkshow 3) Bukti Siar 4) Laporan Festival 5) Desain Spanduk c Pengumuman/ Pemberitahuan 1) Draf Pengumuman 2) Pengumuman			
XI	KERJASAMA			
1	Sistem Informasi Kerjasama a Sistem Informasi Kerjasama dalam Negeri 1) Surat Undangan 2) Pedoman/Panduan Penggunaan Sistem Informasi 3) Daftar Kerjasama b Sistem Informasi Kerjasama Luar Negeri 1) Surat Undangan 2) Pedoman/Panduan Penggunaan Sistem Informasi 3) Daftar Kerjasama c Data dan Informasi Perkembangan Kerja Sama	2 Tahun 2 Tahun setelah masa kerja sama berakhir	3 Tahun 3 Tahun	Permanen Dinilai Kembali
2	Perjalanan Dinas Luar Negeri a Permohonan ijin 1) Surat permohonan 2) Surat Undangan 3) KTP 4) CV 5) Surat Tugas b Rekomendasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri 1) Surat permohonan 2) Surat Undangan 3) KTP 4) CV c Pengurusan Paspor	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-195-

1	2	3	4	5
	1) Surat Rekomendasi			
	2) Formulir pengurusan paspor			
	3) Pas foto			
	d Pengurusan Visa			
	1) Formulir aplikasi			
	2) Surat rekomendasi Kemlu			
3	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	1) Administrasi Persuratan			
	2) Tanda Terima			
	3) Daftar			
XII	DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN			
1	Pengadaan bahan pustaka	2 Tahun setelah tidak digunakan	3 Tahun	Musnah, kecuali Buku Induk Koleksi Permanen
	1) Buku Induk Koleksi			
	2) Daftar buku terseleksi			
	3) Daftar buku dalam pemesanan			
	4) Daftar buku dalam permintaan			
	5) Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah, deposit, hibah			
	6) Daftar pengiriman bahan pustaka kepada pihak lain			
	7) Lembar kerja pengolahan BP (Bura, pengkatalogan)			
	8) Shelt List/ Jajaran kartu utama (master list)			
	9) Daftar tambahan buku (assesion list)			
	10) Daftar jajaran kendali (subyek dan pengarang)			
2	Daftar koleksi	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
3	Penyimpanan deposit bahan pustaka	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	- Pengajuan ISBN ke Perpustakaan Nasional			
	1) Berkas Verifikasi ISBN dari Perpustakaan Nasional			
	2) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit			
	Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka			
4	Layanan perpustakaan		2 Tahun	Musnah
	a Peminjaman			

-196-

1	2	3	4	5
	1) Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka	2 Tahun setelah diperbaharui		
	2) Pertanyaan rujukan dan jawaban			
	b Pengembalian	1 Tahun setelah pelaksanaan	2 Tahun	Musnah
	- Daftar Pengembalian Koleksi tercetak			
5	Pelestarian bahan pustaka	1 Tahun setelah diperbaharui	2 Tahun	Musnah
	1) Survei kondisi bahan pustaka			
	2) Reprografi bahan pustaka			
XIII	PENGAWASAN			
1	Rencana Pengawasan			
	a Rencana Strategis Pengawasan	5 Tahun	10 Tahun	Permanen
	b Rencana Kerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c Rencana Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	d Penetapan Kinerja Tahunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	e Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2	Pelaksanaan Pengawasan			
	a Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	b Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Musnah

-197-

1	2	3	4	5
	c Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAi) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut (TL) d Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan masyarakat e Laporan Pemutakhiran Data f Laporan Perkembangan Barang Milik Negara g Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Kementerian, LPNK, PTN h Good Corporate Governance (GCG)	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
3	Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
XIV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan 1) Surat permohonan akreditasi 2) Laporan hasil verifikasi lapangan 3) Berita acara rapat verifikasi 4) Berita acara tim penilai 5) Surat keputusan penetapan akreditasi 6) Sertifikat akreditasi 7) Laporan akreditasi lembaga diklat	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	Perencanaan dan Program Pendidikan dan Pelatihan a Prajabatan 1) Administrasi Persuratan 2) Renstra Pusdiklat 3) SK Perencanaan Diklat 4) Kalender Diklat b Kepemimpinan 1) Administrasi Persuratan 2) Renstra Pusdiklat 3) SK Perencanaan Diklat 4) Kalender Diklat	2 Tahun 1 Tahun setelah tidak berlaku	3 Tahun 4 Tahun	Musnah Musnah

-198-

1	2	3	4	5
	c Teknis 1) Administrasi Persuratan 2) Renstra Pusdiklat 3) SK Perencanaan Diklat 4) Kalender Diklat d Fungsional 1) Administrasi Persuratan 2) Renstra Pusdiklat 3) SK Perencanaan Diklat 4) Kalender Diklat	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
3	Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan a Dalam Negeri 1) Administrasi Persuratan 2) MoU 3) Perjanjian Kerjasama 4) Kontrak 5) Laporan Kerjasama dalam negeri b Luar Negeri 1) Administrasi Persuratan 2) MoU 3) Perjanjian Kerjasama 4) Kontrak 5) Laporan Kerjasama dalam negeri	2 Tahun setelah kerjasama selesai	3 Tahun	Musnah
4	Tenaga Kependidikan a Pengelola Berkas Persyaratan menjadi pengelola: 1) Daftar riwayat hidup Pengelola 2) Sertifikat MoT 3) Ijazah pendidikan terakhir 4) Sertifikat pelatihan yang berkaitan 5) Sertifikat diklatpim b Penyelenggara 1) Daftar riwayat hidup Penyelenggara 2) Sertifikat ToC 3) Ijazah pendidikan terakhir 4) Sertifikat pelatihan yang berkaitan	2 Tahun setelah tidak berlaku	-	Masuk berkas perscorangan

-199-

1	2	3	4	5
	c Pengajar/ Widyaiswara Berkas Persyaratan menjadi Pengajar: 1) Daftar riwayat hidup Pengajar 2) Sertifikat ToT 3) SK pengangkatan Widyaiswara 4) Ijazah pendidikan terakhir 5) Sertifikat pelatihan yang berkaitan 6) Pembinaan Widyaiswara Administrasi 7) Sertifikasi Peningkatan Kompetensi d Pengelola Sistem Informasi Diklat (SIDA) Berkas Persyaratan menjadi Pengelola SIDA: 1) Daftar riwayat hidup Pengelola SIDA 2) Ijazah pendidikan terakhir 3) Sertifikat pelatihan yang berkaitan e Perancang Kurikulum Berkas Persyaratan menjadi Pengelola SIDA: 1) Daftar riwayat hidup Pengelola SIDA 2) Sertifikat perancang kurikulum 3) Ijazah pendidikan terakhir 4) Sertifikat pelatihan yang berkaitan f Penganalisis Kebutuhan Diklat Berkas Persyaratan menjadi Penganalisis Kebutuhan Diklat: 1) Daftar riwayat hidup Penganalisis Kebutuhan Diklat 2) Sertifikat Penganalisis Kebutuhan Diklat 3) Ijazah pendidikan terakhir 4) Sertifikat pelatihan yang berkaitan			
5	Peserta Pendidikan dan Pelatihan a Prajabatan 1) Database Peserta 2) Database Alumni	1 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah

-200-

1	2	3	4	5
	b Kepemimpinan 1) Database Peserta 2) Database Alumni c Teknis 1) Database Peserta 2) Database Alumni d Fungsional 1) Database Peserta 2) Database Alumni			
6	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan a Prajabatan 1) Surat Izin Penyelenggaraan 2) SK penyelenggaraan 3) SK Penetapan Peserta 4) Pemanggilan peserta 5) Penetapan pengajar 6) Penetapan jadwal diklat (pembelajaran, seminar rancangan aktualisasi, dan seminar pelaksanaan aktualisasi) 7) Pedoman penyelenggaraan diklat 8) Daftar Hadir rapat persiapan 9) Notulen persiapan penyelenggaraan 10) Daftar hadir peserta 11) Daftar hadir tenaga pengajar 12) Surat permohonan penerbitan kode registrasi alumni 13) Laporan hasil aktualisasi 14) Surat Tanda Tamat Pelatihan 15) Laporan penyelenggaraan b Kepemimpinan 1) Surat Izin Penyelenggaraan 2) SK penyelenggaraan 3) SK Penetapan Peserta 4) Pemanggilan peserta 5) Penetapan pengajar	1 Tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Musnah

-201-

1	2	3	4	5
	6) Penetapan jadwal diklat (pembelajaran, seminar rancangan aktualisasi, dan seminar pelaksanaan aktualisasi) 7) Pedoman penyelenggaraan diklat 8) Daftar Hadir rapat persiapan 9) Notulen persiapan penyelenggaraan 10) Daftar hadir peserta 11) Daftar hadir tenaga pengajar 12) Surat permohonan penerbitan kode registrasi alumni 13) Laporan hasil aktualisasi 14) Surat Tanda Tamat Pelatihan 15) Laporan penyelenggaraan c Teknis 1) SK penyelenggaraan 2) SK Penetapan Peserta 3) Pemanggilan peserta 4) Penetapan pengajar 5) Penetapan jadwal diklat (pembelajaran, seminar rancangan aktualisasi, dan seminar pelaksanaan aktualisasi) 6) Pedoman penyelenggaraan diklat 7) Daftar Hadir rapat persiapan 8) Notulen persiapan penyelenggaraan 9) Daftar hadir peserta 10) Daftar hadir tenaga pengajar 11) Surat permohonan penerbitan kode registrasi alumni 12) Laporan hasil aktualisasi 13) Surat Tanda Tamat Pelatihan 14) Laporan penyelenggaraan d Fungsional 1) SK penyelenggaraan 2) SK Penetapan Peserta 3) Pemanggilan peserta 4) Penetapan pengajar 5) Penetapan jadwal diklat (pembelajaran, seminar rancangan aktualisasi, dan seminar pelaksanaan aktualisasi) 6) Pedoman penyelenggaraan diklat 7) Daftar Hadir rapat persiapan 8) Notulen persiapan penyelenggaraan			

-202-

1	2	3	4	5
	9) Daftar hadir peserta 10) Daftar hadir tenaga pengajar 11) Surat permohonan penerbitan kode registrasi alumni 12) Laporan hasil aktualisasi 13) Surat Tanda Tamat Pelatihan 14) Laporan penyelenggaraan			
7	Sistem informasi Diklat 1) Data lembaga diklat 2) Data prasarana diklat 3) Data sarana diklat 4) Data pengelola diklat 5) Data penyelenggara diklat 6) Data widyaiswara 7) Data program diklat	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
8	Monitoring dan Evaluasi Diklat a Monitoring dan Evaluasi Perencanaan 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi b Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi c Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi d Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kediklatan 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi e Monitoring dan Evaluasi Peserta Diklat 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi f Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan diklat 1) Instrumen monev	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-203-

1	2	3	4	5
	2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi g Monitoring dan Evaluasi Alumni Pasca Diklat 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi h Penjaminan Mutu Diklat 1) Berita acara/Laporan Komite Penjamin Mutu Diklat 2) SK Komite Penjamin Mutu			
9	Akreditasi Diklat 1) Surat permohonan akreditasi 2) Laporan hasil verifikasi lapangan 3) Berita acara rapat verifikasi 4) Berita acara tim penilai 5) Surat keputusan penetapan akreditasi 6) Sertifikat akreditasi 7) Laporan akreditasi lembaga diklat	2 Tahun setelah diperbaharui	5 Tahun	Permanen
XV DATA DAN INFORMASI IPTEK DIKTI				
1	Kebijakan di bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan dan penyusunan bahan 4) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	Jaringan & Sarana a Pengelolaan Data Center 1) Surat Undangan 2) Topologi Jaringan 3) Layout Perangkat Data Center 4) Jadwal Piket 5) SOP Pengelolaan Data Center 6) Logbook (Buku Tamu) 7) Laporan Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali

-204-

1	2	3	4	5
	b Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK 1) Surat Undangan 2) Topologi Jaringan 3) Layout Perangkat Infrastruktur 4) SOP Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK 5) Laporan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana 6) Laporan Monitoring dan Evaluasi c Pengembangan Jaringan dan Sarana infrastruktur 1) Surat Undangan 2) TOR Pengembangan Jaringan dan Sarana 3) Laporan Monitoring dan Evaluasi d Layanan Teleconference dan Video Confrence 1) Surat Undangan 2) Logbook Pemakaian 3) Perawatan 4) Laporan Monitoring dan Evaluasi e Dokumen Hosting 1) Formulir permintaan hosting 2) Laporan hasil uji kelayakan 3) Laporan pelaksanaan hosting			
3	Aplikasi dan Sistem Informasi a Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi 1) Surat Undangan 2) SOP Pengembangan Sistem Informasi 3) Standar Pengembangan Sistem Informasi 4) Buku Panduan 5) Laporan Monitoring dan Evaluasi b Pemberian Fasilitasi dan Layanan aplikasi sistem informasi 1) Surat Undangan 2) Web Service yang diberikan ke Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Unit Kerja c Pembaharuan Katalog Layanan Online 1) Surat Undangan 2) Daftar Katalog Aplikasi di Kemenristekdikti d Pengelolaan Website Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 1) Surat Undangan 2) Buku Panduan pengelolaan website	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Dinilai Kembali

-205-

1	2	3	4	5
	3) SOP Permohonan penambahan konten website 4) Laporan pengembangan website 5) Laporan Monitoring dan Evaluasi e Pemberian Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) 1) Surat Undangan 2) SK Tim 3) SOP LPSE 4) Buku Panduan 5) Sertifikat 6) Laporan Monitoring dan Evaluasi f Pemeliharaan dan Keamanan Sistem Informasi 1) Surat Undangan 2) Buku Panduan Pemeliharaan dan Keamanan Sistem Informasi 3) SOP Pemeliharaan dan Keamanan Sistem Informasi 4) Laporan Monitoring dan Evaluasi			
4	Pengumpulan Data & Informasi IPTEK a Instrumen pengumpulan data dan informasi di bidang iptek 1) Surat Undangan 2) Pedoman Pengumpulan data; SOP Pengumpulan data b Pengelolaan data dan informasi dibidang iptek 1) Surat Undangan 2) Dokumen data yang dikelola 3) Kamus data c Pedoman pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik 1) Surat Undangan 2) Pedoman Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik d Pengembangan sistem data statistik - Dokumen Perancangan pengembangan: Sistem Informasi IPTEK Nasional e Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dibidang pengumpulan data di bidang iptek - Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dibidang pengumpulan data di bidang iptek	1 Tahun setelah diperbaharui	2 Tahun	Musnah

-206-

1	2	3	4	5
5	Pengolahan Data & Informasi IPTEK a Analisis data iptek - Dokumen analisis data iptek b Pengelolaan di bidang pengolahan data dan informasi iptek - Dokumen Kajian data iptek c Penyajian dan Layanan data statistik iptek - Data Statistik IPTEK d Pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan 1) Surat Undangan 2) SOP Pengembangan Sistem Informasi 3) Standar Pengembangan Sistem Informasi 4) Buku Panduan 5) Laporan Monitoring dan Evaluasi e Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan di bidang pengolahan data dan informasi iptek	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
6	Pengolahan Data PDDIKTI a Penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan PDDIKTI terintegrasi/ intergrasi 1) Surat Undangan 2) Dokumen Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan PDDIKTI terintegrasi b Pengumpulan dan pengolahan data, kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat 1) Dokumen Laporan Pengumpulan Data 2) Dokumen Laporan Hasil Analisis Pengumpulan Data c Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 1) Surat Undangan 2) Dokumen Perancangan pengembangan:Forlap PDDIKTI 3) Dokumen Perancangan pengembangan: Sistem Informasi Geografi d Pemanfaatan jaringan dan infrastruktur Teknologi Informasi di Lingkungan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi 1) Laporan Kinerja Jaringan dan Infrastruktur PDDIKTI 2) Perencanaan (IT Plan) Jaringan dan Infrastruktur PDDIKTI e Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali

-207-

1	2	3	4	5
	1) Dokumentasi perancangan pengembangan: Feeder PDDIKTI 2) Dokumen Perancangan pengembangan: Validator Nasional PDDIKTI 3) Laporan Dokumen Up-grade Sistem f Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Database Pangkalan Data Pendidikan Tinggi - Data Base PDDIKTI g Validasi dan Verifikasi Data pelaporan PDDIKTI 1) Laporan Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi Data PDDIKTI 2) Dokumen Kumpulan aturan validasi h Penyajian data kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat - Laporan Penyajian data i Pemutakhiran data kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat - Laporan Hasil Pemutakhiran data j Penyiapan bahan integrasi dan sosialisasi Program PDDIKTI - Laporan Sosialisasi dan Workshop PDDIKTI k Monitoring Dan Evaluasi Pengolahan Data Pendidikan Tinggi - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data PDDIKTI			
7	Informasi & Publikasi PDDIKTI a Penyiapan bahan informasi dan publikasi di bidang Pendidikan Tinggi - Data dan informasi PDDIKTI b Penyiapan bahan publikasi program di Lingkungan pusat 1) Draft Bahan Publikasi Data dan Informasi 2) Buku Publikasi Data dan Informasi 3) Publikasi Data dan Informasi melalui media massa 4) Publikasi data dan informasi dalam bentuk digital (Infografis, e-book)	2 Tahun setelah pelaksanaan	3 Tahun	Dinilai Kembali

-208-

1	2	3	4	5
	c Pemberian layanan informasi dan publikasi di bidang Pendidikan tinggi 1) Dokumen Laporan layanan informasi dan publikasi 2) Data dan informasi Hasil Layanan d Pengembangan strategi pelayanan informasi dan publikasi PDDIKTI - Peta jalan Strategi pelayanan informasi dan publikasi PDDIKTI e Pemanfaatan PDDIKTI dibidang informasi dan publikasi data Pendidikan Tinggi - Buku Tematik f Desiminasi Publikasi PDDIKTI - Laporan Berkala Data dan informasi kepada Pimpinan			
8	Monitoring dan Evaluasi Data dan Informasi 1) Surat Undangan 2) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pusat Data dan Informasi	2 Tahun setelah pelaksanaan selesai	3 Tahun	Musnah

C. SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

SKKAAD bertujuan menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis, menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman, menyediakan informasi yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik, dan menjamin keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan, serta menciptakan kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian.

SKKAAD di Kementerian dikelompokkan menjadi 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagaimana daftar sebagai berikut:

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP SUBSTANTIF

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PEMBELAJARAN											
1	PB.00	Kebijakan di Bidang Pembelajaran meliputi standar kualitas sistem pembelajaran pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, serta pengakuan kualifikasi yang terdiri dari:										
		1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Pembelajaran
		2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Pembelajaran
2	PB.01	Pendidikan Akademik										
	PB.01.00	a Pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran pendidikan akademik Pengembangan Kurikulum Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Pembelajaran

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Hibah (SK Hibah) Kurikulum pendidikan akademik										
		2) Kontrak Hibah Kurikulum pendidikan akademik										
		3) Laporan Hibah Kurikulum pendidikan akademik										
		4) TOR Kegiatan Pendidikan Akademik										
		Pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan akademik										
		1) Hibah (SK Hibah) teknologi pembelajaran pendidikan akademik										
		2) Kontrak Hibah teknologi pembelajaran pendidikan akademik										
		3) Laporan Hibah teknologi pembelajaran pendidikan akademik										
		4) TOR teknologi pembelajaran pendidikan akademik										
3	PB.02	Pendidikan Vokasi dan Profesi										
	PB.02.00	a Pengembangan kurikulum dan teknologi pembelajaran pendidikan vokasi dan profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Pembelajaran
		Pengembangan kurikulum pendidikan vokasi dan profesi:	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	

-212-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Hibah (SK Hibah) Kurikulum pendidikan vokasi dan profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		2) Kontrak Hibah Kurikulum pendidikan vokasi dan profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		3) Laporan Hibah Kurikulum pendidikan vokasi dan profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		4) TOR Kegiatan Pendidikan vokasi dan profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		Pengembangan teknologi pembelajaran pendidikan vokasi dan profesi:	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	

-213-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Hibah (SK Hibah) teknologi pembelajaran pendidikan vokasi dan profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		2) Kontrak Hibah teknologi pembelajaran pendidikan vokasi dan profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		3) Laporan Hibah teknologi pembelajaran pendidikan vokasi dan profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		4) TOR teknologi pembelajaran pendidikan vokasi dan profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
4	PB.03	Pembelajaran Khusus										
	PB.03.00	a Pengembangan pembelajaran pendidikan jarak jauh dan pendidikan khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Pembelajaran

-214-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyusunan bahan pengembangan pembelajaran pendidikan jarak jauh:	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		1) Hibah (SK Hibah) Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		2) Kontrak Hibah Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		3) Laporan Hibah Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		4) TOR Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Jarak Jauh	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	

-215-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyusunan bahan pengembangan pembelajaran pendidikan khusus:	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		1) Hibah (SK Hibah) Pembelajaran Pendidikan Khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		2) Kontrak Hibah Pembelajaran Pendidikan Khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		3) Laporan Hibah Pembelajaran Pendidikan Khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		4) TOR Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	

-216-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PB.04	Pengakuan Kualifikasi										
	PB.04.00	a Pengakuan capaian pembelajaran dan pengakuan pembelajaran lampau	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Pembelajaran
		Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran:	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		1) Hibah (SK Hibah) capaian pembelajaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		2) Kontrak Hibah capaian pembelajaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		3) Laporan Hibah capaian pembelajaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	

-217-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) TOR Kegiatan capaian pembelajaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		Penyusunan bahan pengakuan capaian pembelajaran lampau:	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		1) Hibah (SK Hibah) rekognisi pembelajaran lampau	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		2) Kontrak Hibah rekognisi pembelajaran lampau	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		3) Laporan Hibah rekognisi pembelajaran lampau	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	

-218-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) TOR Kegiatan rekognisi pembelajaran lampau	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		Penetapan pengakuan capaian pembelajaran lampau:	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		1) SK disetarakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	
		2) Ijazah RPL	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	

-219-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PB.04.01	b Penyetaraan Ijazah Luar Negeri 1) Persyaratan dalam penyetaraan ijazah luar negeri : a. paspor b. transkrip akademik c. tesis d. ijazah e. SK Setneg (PNS) f. SK Tugas Belajar/ Ijin Belajar g. Referensi Kedubes/ Atdikbud h. SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) 2) SK Hasil Penyetaraan Ijazah Luar Negeri	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Pembelajaran
	PB.04.02	c PINSIVIL (Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Informasi Verifikasi Ijazah Secara Elektronik) 1) Panduan Penomoran Ijazah Nasional 2) Panduan Sistem Informasi Verifikasi Ijazah Secara Elektronik 3) Daftar Nomor Ijazah Secara Elektronik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Pembelajaran
6	PB.05	Beasiswa Program Profesi Guru - SM3T dan PPGT 1) Adminisrasi Persuratan 2) Daftar Usul Penerima Beasiswa 3) Daftar calon penerima beasiswa 4) Seleksi calon penerima mahasiswa 5) Penetapan Penerima Beasiswa 6) Perpanjangan beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Pembelajaran

-220-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	PB.06	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi, pembelajaran khusus, pengakuan kualifikasi yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Pembelajaran
8	PB.07	Monitoring dan evaluasi meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan profesi, pembelajaran khusus dan pengakuan kualifikasi yang terdiri dari: 1) administrasi persuratan 2) notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Pembelajaran

-221-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	KEMAHASISWAAN											
1	KM.00	Kebijakan di bidang kemahasiswaan meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyelarasan dunia kerja yang terdiri dari: 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan Dit. Kemahasiswaan
2	KM.01	Penalaran										
	KM.01.00	a Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional (FILMAPRES) 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Calon Mahasiswa Filmapres	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan Dit. Kemahasiswaan

-222-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar Hasil Seleksi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		4) SK Penetapan Juara Pilmapres	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.01.01	b Olimpiade Nasional Matematika dan Sains										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Daftar Calon Mahasiswa Olimpiade	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-223-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar Hasil Seleksi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		4) SK Penetapan Juara Olimpiade Nasional Matematika dan Sains	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.01.02	c National University Debating Championship (NUDC)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Daftar Calon Mahasiswa NUDC	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-224-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar Hasil Seleksi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		4) SK Penetapan Juara NUDC	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.01.03	d Pengiriman Delegasi Internasional Mathematic Competition (IMC) 1) Administrasi Persuratan 2) Surat Tugas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.01.04	e Pengiriman Delegasi World University Debating Championship (WUDC) 1) Administrasi Persuratan 2) Surat Tugas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-225-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	KM.02	Kreativitas										
	KM.02.00	a Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM 5 Bidang)/ KRI/KJI/KBGI/KMHE/ KRTI 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Perguruan Tinggi yang menjadi tuan rumah sosialisasi 3) Surat Pernyataan Kesiadaan menjadi tuan rumah 4) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan Dit. Kemahasiswaan Dit. Kemahasiswaan Dit. Kemahasiswaan

-226-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Berita Acara Rencana Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		6) SOP Pelaksanaan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		7) Laporan Kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.02.01	b Program Kreativitas Mahasiswa 5 Bidang										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-227-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Unggah Proposal Daftar Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		3) Penetapan Peserta Pra Evaluasi: Hasil Evaluasi I	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		4) Pra Evaluasi Hasil Pengumuman I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Penetapan Peserta Desk Evaluasi SK Penetapan peserta desk evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		6) Desk Evaluasi Hasil Pengumuman Evaluasi II	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-228-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Penetapan Pendanaan/Insentif: SK Penetapan Pendanaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		8) Entry Logbook (Catatan Harian): Daftar Logbook Peserta PKM	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		9) Unggah Laporan Kemajuan: Daftar Laporan Kemajuan PKM	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		10) Evaluasi Laporan Kemajuan: Hasil Evaluasi Laporan Kemajuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		11) Evaluasi Presentasi Monev Eksternal Hasil Evaluasi Presentasi Monitoring Evaluasi Eksternal	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan

-229-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		12) Unggah Laporan Akhir Daftar Laporan Akhir Proposal yang didanai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		15) Penetapan Peserta Pimnas SK Penetapan Peserta Pimnas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		17) Unggah Profil (Registrasi Ulang) Daftar Profil yang mengikuti pimnas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		18) Unggah Artikel Ilmiah Daftar Artikel ilmiah yang mengikuti pimnas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		19) Unggah Poster Daftar Poster yang mengikuti pimnas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-230-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		20) Evaluasi Laporan Akhir: Hasil Evaluasi Laporan Akhir	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		21) Evaluasi Artikel Pimnas: Hasil Evaluasi Artikel pimnas	Terbatas	√		√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		22) Evaluasi Presentasi Pimnas: Hasil Evaluasi presentasi pimnas	Terbatas	√		√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		23) Evaluasi Poster Pimnas: Hasil Evaluasi poster pimnas	Terbatas	√		√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan

-231-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		24) Penetapan Juara Pimnas SK Penetapan Juara Pimnas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		25) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
	KM.02.02	c Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Regional 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-232-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Evaluasi Tahap I	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		4) Hasil Pengumuman Tahap I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Hasil Evaluasi Tahap II	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		6) Hasil Pengumuman Tahap II	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		7) SK Penetapan Peserta Regional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-233-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Hasil Pengumuman	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		9) SK Penetapan Peserta Nasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		10) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
	KM.02.03	d Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Nasional										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Surat Kesiediaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-234-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Kontrak Pengawasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Mahasiswa
		4) Surat Tugas	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Mahasiswa
		5) Daftar Proposal	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Mahasiswa
		6) Sk Penetapan Juara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa

-235-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.02.04	c Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Internasional Divisi Pemadam Api (FIRE FIGHTING) 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa
		2) Kontrak Pengawasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Mahasiswa
		3) Surat Tugas	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Mahasiswa
	KM.02.05	f Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Internasional Divisi Sepakbola (ROBOCUP) 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa

-236-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		3) Surat Tugas	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
	KM.02.06	g Kompetisi Robot Indonesia (KRI) Tingkat Internasional Divisi ABU ROBOCON (Asia Pacific Broadcasting Union)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan

-237-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Tugas	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
	KM.02.07	h Kompetisi Robot Terbang Indonesia (KRTI)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Surat Kesiediaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		3) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		4) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-238-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Hasil Evaluasi Tahap I	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Mahasiswaan
		6) Hasil Pengumuman Tahap I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswaan
		7) Hasil Evaluasi Tahap II	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Mahasiswaan
		8) Hasil Pengumuman Tahap II	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswaan
		9) Sk Penetapan Juara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswaan

-239-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.02.08	i Kompetisi Kapal Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswaan
		2) Surat Kesiediaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswaan
		3) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Mahasiswaan
		4) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswaan

-240-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Hasil Evaluasi Tahap I	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		6) Hasil Pengumuman Tahap I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		7) Hasil Evaluasi Tahap II	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		8) Hasil Pengumuman Tahap II	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		9) Sk Penetapan Juara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-241-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.02.09	j Kompetisi Mobil Listrik Hemat Energi (KMHE)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Surat Kesiadaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		3) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		4) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Hasil Evaluasi Tahap I	Terbatas	√	√	√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan

-242-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Hasil Pengumuman Tahap I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		7) Hasil Evaluasi Tahap II	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		8) Hasil Pengumuman Tahap II	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		9) Sk Penetapan Juara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.02.10	k Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK) 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-243-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Kesiediaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		3) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		4) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Hasil Evaluasi Tahap I	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		6) Hasil Pengumuman Tahap I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-244-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Hasil Evaluasi Tahap II	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		8) Hasil Pengumuman Tahap II	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		9) Sk Penetapan Juara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.02.11	1 Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Surat Kesiediaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-245-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		4) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Hasil Evaluasi Tahap I	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		6) Hasil Pengumuman Tahap I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-246-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Hasil Evaluasi Tahap II	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		8) Hasil Pengumuman Tahap II	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		9) Sk Penetapan Juara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.02.12	rr Kompetisi Bangunan Gedung Indonesia (KBGI)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Surat Kesiediaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-247-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		4) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Hasil Evaluasi Tahap I	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		6) Hasil Pengumuman Tahap I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-248-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Hasil Evaluasi Tahap II	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		8) Hasil Pengumuman Tahap II	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		9) Sk Penetapan Juara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.02.13	n Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Perguruan Tinggi yang mencalonkan diri menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-249-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Pernyataan Kesiadaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		4) SK Penetapan menjadi Tuan Rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		6) Surat Tugas	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan

-250-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Laporan Kegiatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
4	KM.03	Kesejahteraan										
	KM.03.00	a Penilaian usul dan bahan penetapan pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pemberdayaan mahasiswa lainnya 1) Naskah usulan 2) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.03.01	b Pemberian penghargaan kepada mahasiswa 1) Administrasi Persuratan 2) Bahan Penghargaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
5	KM.04	Beasiswa Dalam Negeri										
	KM.04.00	a Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-251-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Administrasi Persuratan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		2) Daftar Usul Penerima Beasiswa PPA	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		3) Daftar calon penerima beasiswa dalam negeri	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		4) Seleksi calon penerima mahasiswa dalam negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Penetapan Penerima Beasiswa dalam negeri	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan

-252-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Perpanjangan beasiswa dalam negeri	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
	KM.04.01	b Beasiswa Prestasi Ekstrakurikuler										
		1) Daftar calon penerima beasiswa dalam negeri	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		2) Seleksi calon penerima mahasiswa dalam negeri	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		3) Penetapan Penerima Beasiswa dalam negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-253-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.04.02	c Beasiswa OSI (Olimpiade Sains Indonesia) dalam Negeri 1) Daftar calon penerima beasiswa dalam negeri 2) Seleksi calon penerima mahasiswa dalam negeri 3) Penetapan Penerima Beasiswa dalam negeri 4) Perpanjangan beasiswa dalam negeri	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
	KM.04.03	d Beasiswa Adik 1) Administrasi Persuratan 2) Data calon penerima Beasiswa Adik 3) Verifikasi dan Validasi -Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan / Notula dan Dokumentasi 4) Penetapan Penerima Beasiswa Adik	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
	KM.04.04	e Beasiswa PEDP (Politeknik Education Development Project) 1) Administrasi Persuratan 2) Data calon penerima Beasiswa Adik 3) Penetapan Penerima Beasiswa PEDP (Politeknik Education Development Project)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-254-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.04.05	f Beasiswa PEDP On-Going (Penugasan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
6	KM.05	Bantuan Pendidikan Bidikmisi 1) Administrasi Persuratan 2) Data Bantuan Pendidikan Bidikmisi 3) Verifikasi dan Validasi Bidikmisi -Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan / Notula dan Dokumentasi 4) Penetapan Penerima bantuan bidikmisi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
7	KM.06	Beasiswa luar Negeri	-						-	-	-	-
	KM.06.00	Beasiswa OSI (Olimpiade Sains Indonesia) luar Negeri 1) Daftar calon penerima beasiswa luar negeri	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan

-255-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Seleksi calon penerima mahasiswa luar negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		3) Penetapan Penerima Beasiswa luar negeri	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		4) Perpanjangan beasiswa luar negeri	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
8	KM.07	Kewirausahaan										
	KM.07.00	a Pengembangan program pendidikan kewirausahaan mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.07.01	b Pemberian bantuan pelaksanaan kewirausahaan (Hibah)										

-256-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa an
		2) Seleksi dan Evaluasi Proposal	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Mahasiswa an
		3) Sk Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa an
		4) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa an
		5) Laporan Monev	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Mahasiswa an

-257-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	KM.08	Minat dan Bakat										
	KM.08.00	a Musabaqoh Tilawil Qur'an Nasional Mahasiswa (MTQNM)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa an
		2) Surat Kesiediaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa an
		3) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa an
		4) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Mahasiswa an

-258-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
	KM.08.01	b Pekan Paduan Suara Gerejaawi (Peparawis)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Surat Kesediaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		3) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-259-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
	KM.08.02	c Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (Peksiminas)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Surat Kesediaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		4) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.08.03	d Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Kesiediaan menjadi tuan rumah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		3) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		4) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan

-262-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.08.04	c Sukan Malaysia Indonesia (Sukmalindo)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		3) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		4) Laporan	Terbatas	√		√	√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan

-263-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.08.05	f Asean University Games (AUG)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Kemahasiswaan
		3) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		4) Surat Tugas	Terbatas	√		√	√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		5) Laporan	Terbatas	√		√	√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan

-264-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.08.06	g Universiade										
		1) Administrasi Persuratan	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		2) Surat Tugas	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		3) Laporan	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
10	KM.09	Organisasi Kemahasiswaan										
	KM.09.00	a Pemberdayaan Organisasi Mahasiswa										

-265-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Usulan Proposal	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		3) Hasil Evaluasi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-266-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Laporan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
	KM.09.01	b Program Hibah Bina Desa										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Usulan Proposal	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		3) Hasil Evaluasi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan

-267-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		5) Laporan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
	KM.09.02	c Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah dan Tingkat Lanjut										
		1) Adminstrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		2) Data Peserta LKMM	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		3) Paparan Materi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-268-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Daftar Hadir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		5) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		6) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.09.03	d Mahasiswa mengikuti KKN Kebangsaan 1) Adminstrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-269-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Proposal	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		3) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		4) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
11	KM.10	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dan Dunia Kerja										
	KM.10.00	a Pengembangan sistem kebutuhan dunia kerja 1) Administrasi Persuratan 2) Manual Book Aplikasi 3) Leaflet 4) Poster	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
	KM.10.01	b Kemitraan institusi dengan lembaga lain										

-270-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Mahasiswa
		2) Data Perusahaan yang membutuhkan lowongan pekerjaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa
		3) Draft MoU	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa
		4) Dokumen MoU	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa
	KM.10.02	c Validasi data dan kebutuhan dunia kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa

-271-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.10.03	d Analisis evaluasi dan rencana tindak lanjut	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Mahasiswa
12	KM.11	Pengembangan Pusat Karir										
	KM.11.00	a Penulisan dokumen studi penelusuran lulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa
	KM.11.01	b Analisis evaluasi dan rencana tindak lanjut	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Mahasiswa
	KM.11.02	c Pemberdayaan perguruan tinggi melaksanakan layanan pusat karir (hibah/bantuan) 1) Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Mahasiswa

-272-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Seleksi dan Evaluasi Proposal	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
		3) Sk Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
		4) Kontrak Penugasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan
13	KM.12	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyalarsan dunia kerja yang terdiri dari : 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Kemahasiswaan

-273-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	KM.13	Monitoring dan evaluasi meliputi penalaran dan kreativitas, kesejahteraan mahasiswa, kewirausahaan, minat dan bakat, organisasi kemahasiswaan dan penyalarsan dunia kerja yang terdiri dari: 1) administrasi persuratan 2) notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Kemahasiswaan
III	PENJAMINAN MUTU											
1	JM.00	Kebijakan Penjaminan Mutu										
	JM.00.00	a Kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi meliputi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi pada pengembangan sistem mutu, penguatan mutu dan kompetensi lulusan yang terdiri dari: 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu Dit. Penjaminan Mutu

-274-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JM.00.01	b Kebijakan mutu sarana prasana ilmu pengetahuan teknologi dan pendidikan tinggi sumber daya IPTEK dan DIKTI yang terdiri dari: 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Direktorat Sarana dan Prasarana
		2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Direktorat Sarana dan Prasarana
	JM.00.02	c Kebijakan penjaminan mutu dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan kelembagaan ilmu pengetahuan teknologi dan dikti 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan
		2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan

-275-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	JM.01	Program Studi Pendidikan Tinggi										
	JM.01.00	a Sistem penjaminan mutu internal 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu
		2) Rencana Tindak Lanjut	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu
		3) Diseminasi dan Bimbingan Teknis Sistem Penjaminan Mutu Internal: 1. bahan paparan 2. data peserta 3. Notula 4. Lembar evaluasi 5. Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu
		4) Klinik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Mobile; Layanan Data Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu

-276-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JM.01.01	b Revitalisasi program mutu										
		1) Buku Panduan Pelaksanaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu
		2) SK Tim Pelaksanaan Program Revitalisasi Program Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu
		3) SK Pelaksana Revitalisasi Program Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu
		4) Kontrak Pelaksana Revitalisasi program studi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu

-277-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- 5) Laporan Pelaksanaan Program Revitalisasi Program Studi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu
		6) Laporan Perguruan Tinggi/ LLDIKTI mendapatkan Apresiasi Program Revitalisasi Program Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu
	JM.01.02	c Penguatan mutu program studi										
		1) Buku Panduan SPMI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu
		2) SK Tim Pengembang SPMI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu
		3) Laporan Program Studi mengikuti <i>Nurturing</i> SPMI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu

-278-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		4) Laporan Perguruan Tinggi mendapatkan Apresiasi SPMI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu
	JM.02	Pengembangan Sistem Uji Kompetensi										
	JM.02.00	a Sistem Registrasi Online										
		1) Data Mahasiswa mengikuti uji kompetensi (pengembangan uji kompetensi)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu
		2) Data Kelulusan Uji Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu
		3) Pengumuman Hasil Kelulusan Uji Kompetensi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Dit. Penjaminan Mutu

-279-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JM.02.01	Sistem Uji Kompetensi										
		1) Registrasi <i>Online</i>	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu
		2) Sistem Uji Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu
	JM.02.02	Sistem Pengembangan Soal	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu

-280-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	JM.03	Penerapan Uji Kompetensi										
	JM.03.00	a Instrumen Uji Kompetensi										
		1) Naskah Akademik Pelaksana Uji Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu
		2) Kebijakan, Permen, Kepmen, Kepdirjen di lingkup Uji Kompetensi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Penjaminan Mutu
		3) SK Panitia Uji Kompetensi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Dit. Penjaminan Mutu
		4) Dokumen kisi-kisi soal Uji Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu

-281-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Dokumen soal Uji Kompetensi	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu
		6) Hasil Review Uji Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu
	JM.03.01	d Evaluasi Uji Kompetensi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Dit. Penjaminan Mutu
		1) Laporan Penyelenggaraan Uji Kompetensi										

-282-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	JM.04	Mutu sarana dan Prasarana										
	JM.04.00	a Sistem Manajemen Mutu Sarana dan Prasarana: 1) Panduan fasilitisasi sistem manajemen mutu sarpras 2) Proposal terkait sistem manajemen mutu sarpras 3) Hasil review proposal terkait sistem manajemen mutu sarpras	Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √		Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kementeriandikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kementeriandikti	 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Sarana dan Prasarana
	JM.04.01	b Analisis data pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi	Terbatas	√	√	√	√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kementeriandikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Sarana dan Prasarana

-283-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JM.04.02	c Penyajian data dan informasi pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Direktorat Sarana dan Prasarana
6	JM.05	Mutu Kelembagaan										
	JM.05.00	a Penyiapan dokumen akreditasi, surveilan, dan reakreditasi lembaga penelitian dan pengembangan 1) Akreditasi 2) Surveilans 3) Reakreditasi 4) Laporan akreditasi, surveilan, dan reakreditasi lembaga penelitian dan pengembangan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kementeriandikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan
	JM.05.01	b Penyajian data dan informasi akreditasi dan reakreditasi lembaga penelitian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan

-284-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	JM.06	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi penjaminan mutu pendidikan tinggi, sarana prasarana ilmu pengetahuan teknologi dan dikti, penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Penelitian dan Pengembangan
8	JM.07	Monitoring dan evaluasi meliputi penjaminan mutu pendidikan tinggi, sarana prasarana ilmu pengetahuan teknologi dan dikti, penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan yang terdiri dari: 1) administrasi persuratan 2) notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Penelitian dan Pengembangan

-285-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IV	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN											
1	TK.00	Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan										
	TK.00.00	a. Kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah daerah										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembang an
		2) Draft SK Tim Kerja/Penilai	Terbatas	√		√	√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat

-286-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) SK Tim Kerja/Penilai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat
		4) Draft Pedoman	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat
		5) Pedoman Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat
		6) Proposal di seleksi	Terbatas setelah proposal ditetapkan	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat

-287-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat
		8) SK Penerima Dana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembang an
		9) Panduan Penilaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat

-288-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		10) Hasil Penilaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembang an
		11) Draft SK BPPD Berkinerja Utama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat
		12) SK BPPD Berkinerja Utama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembang an

-289-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	TK.01	Unggulan Iptek										
		1) Usul unggulan Iptek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembang an
		2) Bimbingan teknis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembang an

-290-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Penetapan Unggulan Iptek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembang an
		4) Pengawasan dan pengendalian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat
		5) Pemantauan dan evaluasi laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat

-291-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	TK.02	Penelitian dan Pengembangan Kementerian										
	TK.02.00	a Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan kementerian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat
	TK.02.01	b Data pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan kementerian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat
4	TK.03	Penelitian dan Pengembangan Non Kementerian										
	TK.03.00	a Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat
	TK.03.01	b Data pelaksanaan kebijakan di bidang Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan non kementerian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Pemerintah Pusat

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	TK.04	Penelitian dan Pengembangan Daerah									-	
	TK.04.00	a Laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah daerah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembang an
	TK.04.01	b Analisis data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah daerah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
6	TK.05	Industri Manufaktur, Agro, Kesehatan, dan Obat									-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TK.05.00	a Data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembang an
	TK.05.01	b Laporan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
7	TK.06	Industri Berbasis Teknologi Tinggi									-	
	TK.06.00	a Data pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri berbasis teknologi tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Lembaga Penelitian dan Pengembang an Daerah Direktorat Lembaga

-294-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TK.06.01	b Laporan penguatan lembaga penelitian dan pengembangan di industri berbasis teknologi tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Penelitian dan Pengembangan
8	TK.07	Penilaian Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengembangan									-	
	TK.07.00	a Data kinerja lembaga penelitian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan

-295-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	TK.08	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi unggulan IPTEK, penelitian dan pengembangan kementerian dan non kementerian, penelitian pengembangan daerah, industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat, industri berbasis teknologi dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan
10	TK.09	Monitoring dan evaluasi meliputiunggulan IPTEK, penelitian dan pengembangan kementerian dan non kementerian, penelitian pengembangan daerah, industri manufaktur, agro, kesehatan dan obat, industri berbasis teknologi dan penilaian kinerja lembaga penelitian dan pengembangan yang terdiri dari: 1) Laporan monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Direktorat Lembaga Penelitian dan Pengembangan

-296-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	SAINS DAN TEKNOLOGI DAN LEMBAGA PENUNJANG LAINNYA											
1	ST.00	Kebijakan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya terdiri atas:										
		1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		2) Penetapan dalam bentuk Kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		3) draft perpres	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-297-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Perpres	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		5) Draft Turunan Perpres	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		6) Permenristek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		7) Pedoman/ Grand Desain KST	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-298-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) NSPK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
2	ST.01	Kawasan Sains dan Teknologi										
	ST.01.00	a Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		2) Pedoman (Panduan, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Standar Operasional Prosedur)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-299-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Proposal-Proposal yang diajukan dari daerah/ perguruan tinggi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		4) Studi Kelayakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		5) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		6) Master Plan/ Detail engineering desain (DED)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-300-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Laporan-Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		8) Database STP di Website	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
	ST.01.01	b Evaluasi Kawasan Sains dan Teknologi (KST) 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-301-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Draft Kriteria Penilaian, Evaluasi dan Pemeringkatan KST	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		4) Pedoman Penilaian, Evaluasi dan Pemeringkatan KST	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		5) SK Pemeringkatan/Apresiasi KST	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-302-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ST.02	Inkubator dan Intermediasi Teknologi Kelembagaan										
	ST.02.00	a Inkubator Teknologi Kelembagaan										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		3) Draft Kajian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-303-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Kajian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		5) Pedoman (Draft Petunjuk Teknis, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, standar operasional prosedur)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		6) Borang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		7) SK Penetapan Pemenang Fasilitasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-304-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Database lembaga inkubator	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		9) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		10) SK Akreditasi Lembaga Inkubator	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
	ST.02.01	b Intermediasi Teknologi Kelembagaan 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-305-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		3) Draft Kajian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		4) Kajian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		5) Pedoman (Draft Petunjuk Teknis, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, standar operasional prosedur)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-306-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Borang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		7) SK Penetapan Pemenang Fasilitasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		8) Database intermediasi teknologi kelembagaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		9) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-307-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ST.03	Organisasi Profesi Ilmu Pengetahuan dan teknologi										
	ST.03.00	a Penataan Organisasi Profesi										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		3) Hasil Kajian Penataan Orprof	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-308-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Borang Kelembagaan Orprof	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		5) Pedoman (panduan, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Standar Operasional Prosedur) Orprof	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		6) SK organisasi profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		7) Database organisasi profesi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-309-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
	ST.03.01	b Pengawasan Organisasi Profesi										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-310-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Kajian Pengawasan Orprof	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		4) Pedoman Pengawasan Orprof	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		5) Hasil Monitoring dan Evaluasi Program orprof	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-311-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ST.04	Lembaga Penunjang Lainnya										
	ST.04.00	a. Dewan Riset										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		3) Draft Kajian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-312-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Kajian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		5) Pedoman (panduan, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Standar Operasional Prosedur)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		6) Borang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		7) Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-313-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Database Dewan Riset	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		9) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
	ST.04.01	b Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-314-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Draft Kajian	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		4) Kajian	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		5) Pedoman	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		6) Borang/proposal	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-315-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Hasil Seleksi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		8) SK MPTN	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		9) Database MPTN	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		10) Laporan	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-316-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ST.04.02	c Dewan Pendidikan Tinggi (DPT)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		3) Draft Kajian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		4) Kajian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-317-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Pedoman	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		6) Borang	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		7) Hasil Seleksi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		8) SK DPT	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-318-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9) Database DPT	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		10) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
	ST.04.03	d Lembaga Penunjang										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-319-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Draft Kajian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		4) Kajian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		5) Pedoman	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		6) Borang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya

-320-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		8) Database Lembaga Penunjang Lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
		9) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi, dan Lembaga Penunjang Lainnya
VI	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI											
1	KB.00	Kebijakan pengembangan dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi meliputi pengembangan dan penataan kelembagaan perguruan tinggi dan pembinaan kelembagaan perguruan tinggi yang terdiri dari:										

-321-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Pengembang an Perguruan Tinggi Program Akademik
		2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Pengembang an Perguruan Tinggi Program Akademik
2	KB.01	Pengembangan Perguruan Tinggi Program Akademik										
	KB.01.00	a Pendirian dan pencabutan ijin perguruan tinggi swasta program akademik									-	Subdirektora t Pengembang an Perguruan Tinggi Program Akademik
		1) Naskah usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	

-322-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Pengembang an Perguruan Tinggi Program Akademik
		3) SK perubahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
	KB.01.01	b Pembukaan dan penutupan program studi pada perguruan tinggi program akademik									-	
		1) Naskah usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
		2) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	

-323-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) SK perubahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Pengembang an Perguruan Tinggi Program Vokasi
	KB.01.02	c Monitoring dan evaluasi pasca rekomendasi pengembangan perguruan tinggi program akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
	KB.01.03	d Laporan di bidang pengembangan perguruan tinggi program akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
3	KB.02	Pengembangan Perguruan Tinggi Program Vokasi										Subdirektora t Pengembang
	KB.02.00	a Pengkajian dan penilaian usul pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi program vokasi									-	

-324-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Naskah usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	an Perguruan Tinggi Program Vokasi
		2) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
	KB.02.01	b Pendirian, perubahan, dan penutupan kelembagaan perguruan tinggi negeri program vokasi									-	Subdirektora t Pengembang an Perguruan Tinggi Program Vokasi
		1) Naskah usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
		2) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	

-325-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) SK perubahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
	KB.02.02	c Pemberian ijin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta program vokasi									-	Subdirektora t Pengembang an Perguruan Tinggi Program Vokasi
		1) Draft SK Pemberian Ijin pendirian, perubahan, dan penutupan perguruan tinggi swasta program vokasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
		2) SK perubahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
	KB.02.03	d Evaluasi pelaksanaan pengembangan perguruan tinggi program vokasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Pengembang an Perguruan Tinggi Program Vokasi

-326-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KB.02.04	c Laporan di bidang pengembangan perguruan tinggi program vokasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Pengembang an Perguruan Tinggi Program Vokasi
4	KB.03	Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi										
	KB.03.00	a Perubahan Perguruan Tinggi									-	Subdirektora t Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi
		1) Perubahan Perguruan Tinggi Negeri: -naskah usulan -rekomendasi -SK perubahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
		2) Perubahan Perguruan Tinggi Swasta -naskah usulan -rekomendasi -SK perubahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
		3) Usul Perubahan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga -naskah usulan -rekomendasi -SK perubahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	

-327-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KB.03.01	b Pembukaan program studi dalam rangka perubahan bentuk perguruan tinggi									-	Subdirektora t Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi
		1) Naskah usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
		2) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
		3) SK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
	KB.03.02	c Monitoring dan evaluasi pasca rekomendasi penataan kelembagaan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi

-328-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KB.03.03	d Laporan di bidang penataan kelembagaan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi
5	KB.04	Pemberdayaan Kelembagaan Perguruan Tinggi										
	KB.04.00	a Program Pembinaan perguruan tinggi swasta										
		1) Daftar Usulan Pendaftaran Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Pemberdayaa n Kelembagaan Perguruan Tinggi
		2) Program kegiatan pembinaan perguruan tinggi swasta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Penataan Kelembagaan Perguruan Tinggi
6	KB.05	Tata Kelola Perguruan Tinggi										
	KB.05.00	a Penilaian usul tata kelola perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Pemberdayaa n Kelembagaan Perguruan Tinggi

-329-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KB.05.01	b Rekomendasi calon penerima bantuan untuk tata kelola perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
	KB.05.02	c Data dan informasi perguruan tinggi penerima bantuan untuk tata kelola perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
7	KB.06	Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi										
	KB.06.00	a Data perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi
	KB.06.01	b Peta perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	

-330-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KB.06.02	c Rekomendasi penyelesaian permasalahan kelembagaan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
8	KB.07	Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi										
	KB.07.00	a Penilaian Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
	KB.07.01	b Instrument penilaian kinerja perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
	KB.07.02	c Data kinerja perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi

-331-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	KB.08	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi Pengembangan perguruan tinggi akademik, pengembangan perguruan tinggi program vokasi, penataan kelembagaan perguruan tinggi, pemberdayaan kelembagaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, pengendalian kelembagaan perguruan tinggi dan penilaian kinerja perguruan tinggi yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
10	KB.09	Monitoring dan evaluasi Pengembangan perguruan tinggi akademik, pengembangan perguruan tinggi program vokasi, penataan kelembagaan perguruan tinggi, pemberdayaan kelembagaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, pengendalian kelembagaan perguruan tinggi dan penilaian kinerja perguruan tinggi yang terdiri dari: 1) Laporan monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi
VII	KARIER DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI											
1	KK.00	Kebijakan Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang terdiri dari:										

-332-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
2	KK.01	Karier Pendidik/Dosen										
	KK.01.00	a Penilaian angka kredit Karier Pendidik										
		1) Berkas usulan dari PTN dan PTS -proposai -hasil penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-333-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Pedoman penilaian angka kredit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		3) Penilaian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		4) Hasil penilaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-334-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Layanan banding penilaian angka kredit guru besar	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		6) SK penilaian angka kredit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	KK.01.01	b Sertifikasi Dosen 1) Berkas usulan dari PTN dan PTS -proposal -hasil penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-335-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Pedoman penilaian sertifikasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		3) Penilaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		4) Hasil penilaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-336-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) SK sertifikasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		6) Kontrak tunjangan sertifikasi dosen	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	KK.01.02	c Alih status dan mutasi dosen 1) Surat persetujuan rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-337-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Berkas usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		3) Penilaian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		4) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Pendidik Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-338-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	KK.02	Karier Tenaga Kependidikan										
	KK.02.00	a Penilaian angka kredit										
		1) Berkas usulan dari PTN dan PTS -proposal -hasil penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Tenaga Kependidika n Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		2) Pedoman penilaian angka kredit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Tenaga Kependidika n Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		3) Penilaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Karier Tenaga Kependidika n Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-339-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Hasil penilaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Tenaga Kependidika n Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		5) Layanan banding penilaian angka kredit tenaga kependidikan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Karier Tenaga Kependidika n Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		6) SK penilaian angka kredit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Tenaga Kependidika n Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-340-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KK.02.01	b Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan 1) Berkas usulan 2) Sertifikat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Tenaga Kependidika n Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	KK.02.02	c Sistem Informasi Tenaga Kependidikan 1) Buku Manual Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Karier Tenaga Kependidika n Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		2) Daftar Tenaga Kependidikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Subdirektora t Karier Tenaga Kependidika n Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-341-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KK.03	Kompetensi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi										
	KK.03.00	a Perencanaan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1) Buku Panduan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		2) Daftar SDM IPTEK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
	KK.03.01	b Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Peningkatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1) Berkas usulan (TOR, Dokumen)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia

-342-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Rekomendasi Kajian										Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
5	KK.04	Kompetensi Sumber Daya Manusia Pendidikan Tinggi										
	KK.04.00	a Pemilihan dan Penghargaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi										
		1) Berkas usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		2) Lembar Penilaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-343-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) SK Pemenang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		b Seleksi Program Mobilisasi Dosen										
		1) Berkas usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		2) Lembar Penilaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-344-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) SK Pemenang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		
	KK.04.01	c Magang Dosen										
		1) Berkas usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		2) Sertifikat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		
		3) Lembar Penilaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-345-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) SK Pemenang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		
	KK.04.02	d Program SAME (Scheme for academic mobility and exchange)										
		1) Berkas usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		2) Sertifikat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		
		3) Lembar Penilaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		4) SK Pemenang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		

-346-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KK.04.03	c Registrasi Pendidik 1) Buku Panduan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
		2) Daftar Pendidik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		
	KK.04.04	f World Class Profesor 1) Berkas usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-347-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Lembar Penilaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) SK Pemenang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		
6	KK.05	Bimbingan teknis/workshop/seminar Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi karier pendidik/dosen, karier tenaga kependidikan,, kompetensi SDM IPTEK dan DIKTI, yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
7	KK.06	Monitoring dan evaluasi Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia meliputi karier pendidik/dosen, karier tenaga kependidikan, kompetensi SDM IPTEK dan DIKTI, yang terdiri dari: 1) Laporan monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Subdirektora t Kompetensi Sumber Daya Manusia Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

-348-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII	KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI											
1	KD.00	Kebijakan Kualifikasi Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI di dalam dan luar negeri yang terdiri dari: 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia	

-349-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	KD.01	Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi										
	KD.01.00	a Pendidikan Dalam Negeri (Beasiswa) 1) Administrasi Persuratan 2) Berkas Perscorangan Calon Penerima Beasiswa	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti		Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-350-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Subdirektorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		4) SK Penetapan Penerima Beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Subdirektorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-351-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Kontrak Perjanjian Beasiswa	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kementeriandikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		6) Laporan Berkala persemester	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti	-	Subdirektorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-352-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
	KD.01.01	b Pendidikan Luar Negeri (Beasiswa) 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-353-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Berkas Perscorangan Calon Penerima Beasiswa	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		3) Daftar Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-354-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) SK Penetapan Penerima Beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		5) Kontrak Perjanjian Beasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-355-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Laporan Berkala persemester	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		7) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-356-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	KD.02	Kualifikasi Pendidik										
	KD.02.00	a Pendidikan Dalam Negeri (Beasiswa)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Pendidik Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		2) Berkas Perseorangan Calon Penerima Beasiswa	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Kualifikasi Pendidik Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		3) Daftar Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Pendidik Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-357-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) SK Penetapan Penerima Beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Pendidik Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		5) Kontrak Perjanjian Beasiswa	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Kualifikasi Pendidik Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		6) Laporan Berkala persemester	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Subdirektora t Kualifikasi Pendidik Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		7) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Pendidik Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-358-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KD.02.01	b Pendidikan Luar Negeri (Beasiswa) 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		2) Berkas Perscorangan Calon Penerima Beasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-359-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		4) SK Penetapan Penerima Beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-360-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Kontrak Perjanjian Beasiswa	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		6) Laporan Berkala persemester	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Subdirektorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		7) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		

-361-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KD.03	Kualifikasi Tenaga Kependidikan										
	KD.03.00	a Pendidikan Dalam Negeri (Beasiswa)										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		2) Berkas Perseorangan Calon Penerima Beasiswa	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		3) Daftar Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-362-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) SK Penetapan Penerima Beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Tenaga Kependidika n Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		5) Kontrak Perjanjian Beasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Kualifikasi Tenaga Kependidika n Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		6) Laporan Berkala persemester	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Subdirektora t Kualifikasi Tenaga Kependidika n Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-363-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		
	KD.03.01	b Pendidikan Luar Negeri (Beasiswa)										Subdirektora t Kualifikasi Tenaga Kependidika n Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Kualifikasi Tenaga Kependidika n Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-364-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Berkas Perscorangan Calon Penerima Beasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		3) Daftar Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		4) SK Penetapan Penerima Beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia

-365-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Kontrak Perjanjian Beasiswa	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		6) Laporan Berkala persemester	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Subdirektorat Kualifikasi Tenaga Kependidikan Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
		7) Bukti Selesai Studi (Berkas Tanda Kelulusan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		
5	KD.04	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi kualifikasi Sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI, kualifikasi pendidik, kualifikasi tenaga kependidikan yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan

-366-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Materi Bimtek Laporan 4)										Teknologi Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
6	KD.05	Monitoring dan evaluasi meliputi kualifikasi Sumber daya manusia IPTEK dan DIKTI, kualifikasi pendidik, kualifikasi tenaga kependidikan yang terdiri dari: 1) Laporan monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Kualifikasi Sumber Daya Manusia
IX	SARANA DAN PRASARANA SUMBER DAYA ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TINGGI											
1	SP.00	Kebijakan Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-367-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
2	SP.01	Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI										
	SP.01.00	a Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-368-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Proposal Sarana dan Prasarana IPTEK yang diterima	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		3) Laporan Review Proposal Sarana dan Prasarana IPTEK yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-369-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Proposal Sarana dan Prasarana IPTEK yang ditolak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		5) Laporan Review Proposal Sarana dan Prasarana IPTEK yang ditolak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-370-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) SK Menteri Relokasi Sarana dan Prasarana IPTEK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
	SP.01.01	b Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-371-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Proposal DIKTI yang diterima terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		3) Laporan Review Proposal DIKTI yang diterima erkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-372-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Proposal DIKTI yang ditolak terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		5) Laporan Review Proposal DIKTI yang ditolak terkait perencanaan atau pengajuan alokasi dana sarana dan prasarana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-373-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) SK Menteri Relokasi Sarana dan Prasarana DIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Perencanaan, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
3	SP.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI										
	SP.02.00	a Pengembangan Sarana dan Prasarana IPTEK 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-374-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Usulan Proposal yang diterima mengenai pembiayaan Alternatif	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		3) Laporan Review Proposal yang diterima terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana alternatif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-375-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Proposal yang ditolak terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana sarpras	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		5) Laporan Review Proposal IPTEK yang ditolak terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana sarpras	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-376-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) SK Menteri mengenai Lembaga Penerima Dana Alternatif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		7) Laporan monitoring dan evaluasi pendanaan alternatif IPTEK	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-377-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SP.02.01	b Pengembangan Sarana dan Prasarana DIKTI										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		2) Usulan Proposal dari PTN yang diterima mengenai pembiayaan PHLN (Pinjaman Hibah Luar Negeri), KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan alternatif lainnya	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-378-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Laporan Review Proposal dari PTN yang diterima terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana alternatif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		4) Proposal dari PTN yang ditolak terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana sarpras	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-379-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Laporan Review Proposal IPTEK yang ditolak terkait pengembangan sarana dan prasarana sampai dengan penetapan penerima dana sarpras	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		6) SK Menteri mengenai PTN Penerima Dana Alternatif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-380-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Laporan monitoring dan evaluasi pendanaan alternatif DIKTI	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sub Direktorat Pengembangan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4	SP.03	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI										
	SP.03.00	a Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPTEK										

-381-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		2) Panduan (Petunjuk pelaksanaan Kegiatan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-382-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Data pendukung Proposal (Data, proposal, dan sejenisnya)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		4) Hasil Review	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-383-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SP.03.01	b Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana DIKTI										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		2) Monitoring dan Evaluasi APBN:										

-384-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Panduan Monev Alokasi APBN/P	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-385-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Data dukung penelaahan/review APIP APBN/P	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-386-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Berita Acara dan hasil penelaahan/review APIP APBN/P	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		Laporan - Notula Rapat - Kunjungan lapang - monev	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-387-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Standar Fisik Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKT - Panduan standar fisik sarpras	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-388-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Data dukung standar fisik sarpras	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		- Hasil rumusan standar fisik sarpras	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-389-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Laporan - Notula Rapat - Kunjungan lapang - monev	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		4) Sistem Informasi Manajemen/ Pemetaan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana IPTEK dan DIKTI										

-390-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Panduan/desain pengembangan SIM (pemetaan sarpras)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-391-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Data dukung pemetaan sarpras	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-392-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Hasil analisis pemetaan sarpras	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-393-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Konstruksi Dalam Penyelesaian: - Panduan rekonsiliasi Konstruksi Dalam Penyelesaian/Gedung belum selesai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-394-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Data dukung rekonsiliasi Konstruksi Dalam Penyelesaian / Gedung belum selesai	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-395-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Berita Acara dan hasil rekonsiliasi Konstruksi Dalam Penyelesaian/Gedung belum selesai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
		Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-396-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	SP.04	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi perencanaan teknis sarana prasaran IPTEK dan DIKTI, pengembangan teknis sarana prasaran IPTEK dan DIKTI, pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasaran IPTEK dan DIKTI yang terdiri dari : 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
6	SP.05	Monitoring dan evaluasi meliputi perencanaan teknis sarana prasaran IPTEK dan DIKTI, pengembangan teknis sarana prasaran IPTEK dan DIKTI, pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasaran IPTEK dan DIKTI yang terdiri dari: 1) Laporan monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Sub Direktorat Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, Direktorat Sarana dan Prasarana, Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi

-397-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	RISET DAN SISTEM PENGEMBANGAN											
1	RS.00	Kebijakan Riset dan Pengembangan meliputi pengembangan sistem riset, harmonisasi program, evaluasi sistem, kemitraan strategis dan sistem informasi riset dan pengembangan yang terdiri dari:										
		1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		2) Penetapan dalam bentuk Kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2	RS.01	Sistem Riset dan Pengembangan										
	RS.01.00	a Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan sistem riset dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Laporan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-398-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RS.01.01	b Laporan pengembangan sistem riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3	RS.02	Harmonisasi Program dan Evaluasi Sistem Risbang										
	RS.02.00	a Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan (Laporan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	RS.02.01	b Laporan harmonisasi program dan evaluasi sistem riset dan pengembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-399-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	RS.03	Kemitraan Strategis Risbang										
	RS.03.00	a kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
		1) Daftar Kemitraan dengan berbagai lembaga 2) Kajian <i>foresight</i>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	RS.03.01	b Monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-400-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RS.03.02	c Laporan di bidang kemitraan strategis riset dan pengembangan di dalam dan luar negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5	RS.04	Sistem Informasi Riset dan Pengembangan										
	RS.04.00	a Pengembangan sistem informasi riset dan pengembangan 1) Daftar Modul Sistem	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	RS.04.01	b Monitoring dan evaluasi di bidang program sistem informasi riset dan pengembangan serta standarisasi riset dan pengembangan 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi 2) Laporan pelaksanaan 3) Laporan Kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-401-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RS.04.02	c Laporan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta standarisasi riset dan pengembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6	RS.05	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi pengembangan sistem riset, harmonisasi program, evaluasi sistem, kemitraan strategis dan sistem informasi riset dan pengembangan yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Direktorat Sistem Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
XI RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT												
1	RA.00	Kebijakan Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari: 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

-402-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
2	RA.01	Riset Dasar										
	RA.01.00	a Daftar perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
	RA.01.01	b Laporan Koordinasi peningkatan riset dasar perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
	RA.01.02	c Hasil penilaian Proposal dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

-403-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RA.01.03	c SK penerima bantuan riset dasar Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
3	RA.02	Riset Terapan										
	RA.02.00	a Daftar perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Riset Terapan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
	RA.02.01	b Laporan Koordinasi peningkatan riset dasar perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Riset Terapan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
	RA.02.02	c Hasil penilaian Proposal dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Subdirektora t Riset Terapan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

-404-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RA.02.03	c SK penerima bantuan riset dasar Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Subdirektora t Riset Terapan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
4	RA.03	Pemberdayaan Masyarakat										
	RA.03.00	a Daftar perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
	RA.03.01	b Laporan Koordinasi peningkatan riset dasar perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
	RA.03.02	c Hasil penilaian Proposal dari perguruan tinggi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

-405-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RA.03.03	c SK penerima bantuan riset dasar Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
5	RA.04	Peningkatan Kapasitas Riset										
	RA.04.00	a Daftar perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
	RA.04.01	b Laporan Koordinasi peningkatan riset dasar perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
	RA.04.02	c Hasil penilaian Proposal dari perguruan tinggi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

-406-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RA.04.03	c SK penerima bantuan riset dasar Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
6	RA.05	Bimbingan teknis/workshop/seminar Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
7	RA.06	Monitoring dan evaluasi Riset dan Pengabdian Masyarakat meliputi riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas riset dan pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari: 1) Laporan monitoring dan evaluasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat

-407-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Hasil Penilaian Evaluasi Peneliti Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
	RA.07	Laporan Monitoring dan Evaluasi Lembaga Riset Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
XII	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI											
1	KT.00	Kebijakan Pengembangan Teknologi Industri terdiri dari: 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Pengembang an Teknologi Industri Direktorat Pengembang an Teknologi Industri

-408-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	KT.01	Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan										
		1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		2) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		3) Hasil Evaluasi Tahap I (Seleksi Administrasi)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-409-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Hasil Pengumuman Tahap I (Seleksi Administrasi)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		5) Hasil Evaluasi Tahap II (Seleksi Paparan)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		6) Hasil Pengumuman Tahap II (Seleksi Paparan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		7) Laporan Hasil Factfinding (Temuan Fakta)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-410-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Laporan Hasil Negosiasi (Anggaran)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		9) SK Penetapan Pemenang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		10) Kontrak Kerjasama	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.01.00	a Data teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-411-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KT.01.01	b Laporan bulanan pengembangan teknologi industri informasi komunikasi dan pertahanan	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.01.02	c Laporan bulanan pengembangan teknologi industri informasi komunikasi dan keamanan	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.01.03	d Monitoring dan evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Informasi Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan: a. Laporan hasil money	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-412-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KT.01.04	Laporan Termin dan Laporan administrasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.01.05	Laporan akhir	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
3	KT.02	Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √		Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-413-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Evaluasi Tahap I (Seleksi Administrasi)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		4) Hasil Pengumuman Tahap I (Seleksi Administrasi)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		5) Hasil Evaluasi Tahap II (Seleksi Paparan)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		6) Hasil Pengumuman Tahap II (Seleksi Paparan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-414-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Laporan Hasil Factfinding (Temuan Fakta)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		8) Laporan Hasil Negosiasi (Anggaran)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		9) SK Penetapan Pemenang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		10) Kontrak Kerjasama	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-415-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KT.02.00	a Data Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.02.01	b Laporan Bulanan Pengembangan Teknologi Industri Energi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.02.02	c Laporan Bulanan Pengembangan Teknologi Industri Transportasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.02.03	d Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Energi dan Transportasi -Laporan hasil Monev	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-416-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KT.02.04	Laporan Termin dan Laporan administrasi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.02.05	Laporan akhir	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
4	KT.03	Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	 	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-417-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Evaluasi Tahap I (Seleksi Administrasi)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		4) Hasil Pengumuman Tahap I (Seleksi Administrasi)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	 	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		5) Hasil Evaluasi Tahap II (Seleksi Paparan)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		6) Hasil Pengumuman Tahap II (Seleksi Paparan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	 	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-418-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Laporan Hasil Factfinding (Temuan Fakta)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		8) Laporan Hasil Negosiasi (Anggaran)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		9) SK Penetapan Pemenang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		10) Kontrak Kerjasama	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-419-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KT.03.00	a Data Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.03.01	b Laporan Bulanan Pengembangan Teknologi Industri Pangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.03.02	c Laporan Bulanan Pengembangan Teknologi Industri Kesehatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.03.03	d Laporan Bulanan Pengembangan Teknologi Industri Obat	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-420-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KT.03.04	c Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Pangan, Kesehatan dan Obat -Laporan Hasil Money	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.03.05	Laporan Termin dan Laporan administrasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.03.06	Laporan akhir	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
5	KT.04	Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju 1) Administrasi Persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-421-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Daftar Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		3) Hasil Evaluasi Tahap I (Seleksi Administrasi)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		4) Hasil Pengumuman Tahap I (Seleksi Administrasi)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		5) Hasil Evaluasi Tahap II (Seleksi Paparan)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		6) Hasil Pengumuman Tahap II (Seleksi Paparan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-422-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Laporan Hasil Factfinding (Temuan Fakta)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		8) Laporan Hasil Negosiasi (Anggaran)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		9) SK Penetapan Pemenang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
		10) Kontrak Kerjasama	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-423-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KT.04.00	a Data Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.04.01	b Laporan Bulanan Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.04.02	c Laporan Bulanan Pengembangan Teknologi Industri Material Maju	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.04.03	d Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Teknologi Industri Bahan Baku dan Material Maju -Laporan Hasil Monev	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-424-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KT.04.04	Laporan Termin dan Laporan administrasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
	KT.04.05	Laporan akhir	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengembangan Teknologi Industri
6	KT.05	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi Pengembangan Teknologi industri informasi komunikasi dan pertahanan dan keamanan, teknologi industri energi dan transportasi, teknologi industri pangan, kesehatan dan obat dan industri bahan baku dan material maju yang terdiri dari: 1) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengembangan Teknologi Industri

-425-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIII	PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL											
1	KI.00	Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang terdiri dari: 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 2) Penetapan dalam bentuk Kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
2	KI.01	Fasilitasi Kekayaan Intelektual										
	KI.01.00	Daftar Kekayaan Intelektual Perguruan Tinggi yang difasilitasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	KI.01.01	Daftar Sentra Kekayaan Intelektual yang memperoleh dana penguatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual

-426-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	KI.01.02	Pedoman Valuasi Teknologi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	KI.01.03	- laporan di bidang hak atas kekayaan intelektual	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	KI.02	Jurnal Ilmiah										
3	KI.02.00	a Daftar usulan jurnal ilmiah terdaftar di ARJUNA	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	KI.02.01	b Daftar penerima hibah peningkatan tata kelola jurnal menjadi jurnal ilmiah bereputasi jurnal internasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual

-427-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KI.02.02	c Daftar penerima insentif atas tata kelola jurnal ilmiah nasional dan jurnal ilmiah bereputasi internasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	KI.02.03	d SK akreditasi terbitan berkala jurnal ilmiah nasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	KI.02.04	e laporan di bidang jurnal ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
4	KI.03	Publikasi Ilmiah										
	KI.03.00	SK Penerima Hibah Publikasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	KI.03.01	SK Penerima Insentif Publikasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual

-428-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KI.03.02	laporan di bidang publikasi ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
5	KI.04	Perijinan Penelitian Asing										
	KI.04.00	a Persyaratan dalam penelitian asing beresiko tinggi dan berbahaya: 1) paspor 2) surat pengantar 3) Curriculum Vitae 4) dan lain lain penunjang perizinan penelitian (daftar persyaratan lebih lengkap ada di website frp.ristekdikti.go.id)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	KI.04.01	b matriks pengkajian dan penilaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	KI.04.02	c Surat izin penelitian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual
	KI.04.03	d Laporan perizinan penelitian asing	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual

-429-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIV	PENGUATAN INOVASI											
1	PI.00	Kebijakan Penguatan Inovasi di industri dibidang sistem inovasi yang terdiri dari: 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Inovasi Direktorat Sistem Inovasi
2	PI.01	Sistem Inovasi										
	PI.01.00	a Rekomendasi Kebijakan Sistem Inovasi 1) Naskah Akademik/Naskah Urgensi 2) Kebijakan 3) Laporan Kegiatan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	- - -	Direktorat Sistem Inovasi Direktorat Sistem Inovasi Direktorat Sistem Inovasi

-430-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pl.01.01	b Kemitraan Strategis dan Wahana Inovasi tentang klaster inovasi										
		Kluster Inovasi:										
		1) Administrasi persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Sistem Inovasi
		2) Daftar Pengusul	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Sistem Inovasi
		3) Daftar hasil penilaian	Terbatas	√	√		√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Sistem Inovasi
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Sistem Inovasi
		5) Proposal	Terbatas	√	√		√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Sistem Inovasi

-431-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Laporan Akhir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Sistem Inovasi
	Pl.01.02	c Sistem Informasi dan Diseminasi Inovasi 1) Daftar indeks daya saing daerah 2) Daftar produk inovasi nasional 3) Daftar Indikator Kinerja Lembaga Manajemen Inovasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Sistem Inovasi
3	Pl.02	Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi										
	Pl.02.00	a Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Pengusul	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi' Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi'

-432-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar hasil penilaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kementeriandikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		5) Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
	Pl.02.01	b Energi dan Transportasi										
		1) Administrasi persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		2) Daftar Pengusul	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

-433-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar hasil penilaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas kementeriandikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		5) Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
	Pl.02.02	c Pangan, Kesehatan dan Obat										
		1) Administrasi persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		2) Daftar Pengusul	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kementeriandikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

-434-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar hasil penilaian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√		√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		5) Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√		√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
	Pl.02.03	d Bahan Baku dan Material Maju										
		1) Administrasi persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√		√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		2) Daftar Pengusul	Biasa/Terbuka	√	√	√		√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

-435-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar calon pemenang	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√		√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		5) Proposal tidak lolos	Biasa/Terbuka	√	√	√		√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
		6) Proposal Lolos	Biasa/Terbuka	√	√	√		√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat 'Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi
4	Pl.03	Inovasi Industri										
	Pl.03.00	a Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pertahanan dan Keamanan										

-436-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Administrasi persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
		2) Daftar Pengusul	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
		3) Daftar calon pemenang	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Inovasi Industri
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
		5) Proposal tidak lolos	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Inovasi Industri

-437-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Proposal Lolos	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
	Pl.03.01	b Industri Energi dan Transportasi										
		1) Administrasi persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
		2) Daftar Pengusul	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
		3) Daftar calon pemenang	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Inovasi Industri
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri

-438-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Proposal tidak lolos	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Inovasi Industri
		6) Proposal Lolos	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
	Pl.03.02	c Industri Pangan,Kesehatan, dan Obat										
		1) Administrasi persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
		2) Daftar Pengusul	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
		3) Daftar calon pemenang	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Inovasi Industri

-439-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
		5) Proposal tidak lolos	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Inovasi Industri
		6) Proposal Lolos	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri
	Pl.03.03	d Industri Bahan Baku dan Material Maju										
		1) Administrasi persuratan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri Direktorat Inovasi Industri
		2) Daftar Pengusul	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Direktorat Inovasi Industri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Daftar calon pemenang	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Direktorat Inovasi Industri
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Inovasi Industri
		5) Proposal tidak lolos	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Inovasi Industri
		6) Proposal Lolos	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat Inovasi Industri
5	Pl.04	Laporan Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi sistem inovasi, perusahaan pemula berbasis teknologi dan inovasi industri yang terdiri dari:	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat sistem inovasi, perusahaan pemula berbasis teknologi, dan inovasi industri

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Pl.05	Monitoring dan evaluasi meliputi sistem inovasi, perusahaan pemula berbasis teknologi dan inovasi industri yang terdiri dari: 1) Laporan monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Direktorat sistem inovasi, perusahaan pemula berbasis teknologi, dan inovasi industri
XV AKREDITASI PERGURUAN TINGGI												
1	AG.00	Program Studi										
	AG.00.00	a Kebijakan akreditasi program studi 1) Naskah Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
	AG.00.01	b Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
	AG.00.02	c Kriteria dan Perangkat Akreditasi Program Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
	AG.00.03	d Izin penyelenggaraan program studi 1) Borang Program Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at	Tidak memiliki dampak yang	-	Unit yang membidangi

-442-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Borang Institusi Pengelola Program Studi 3) Panduan Pengisian Borang 4) Pedoman Penilaian Borang 5) Matriks Penilaian Borang 6) Pedoman Asesmen Lapangan 7) Pedoman Evaluasi Diri							Eselon III	mengganggu kinerja kemenristekdikti	- - - - -	Akreditasi Perguruan Tinggi
	AG.00.04	e Pelayanan teknis dan administratif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingkat Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
	AG.00.05	f Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Program Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingkat Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
	AG.00.06	g Laporan Hasil Akreditasi Program Studi kepada Menteri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingkat Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
2	AG.01	Perguruan Tinggi										
	AG.01.00	a Kebijakan akreditasi perguruan tinggi 1) Standar dan Prosedur Akreditasi 2) Naskah Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingkat Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi

-443-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	AG.01.01	b Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingkat Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
	AG.01.02	c Kriteria dan Perangkat Akreditasi Perguruan Tinggi 1) Borang Perguruan Tinggi 2) Borang Institusi Pengelola Perguruan Tinggi 3) Panduan Pengisian Borang 4) Pedoman Penilaian Borang 5) Matriks Penilaian Borang 6) Pedoman Asesmen Lapangan 7) Pedoman Evaluasi Diri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingkat Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
	AG.01.03	d Izin penyelenggaraan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingkat Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
	AG.01.04	e Pelayanan teknis dan administratif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingkat Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti		Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
	AG.01.05	f Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Akreditasi Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingkat Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi

-444-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	AG.01.06	g Laporan Hasil Akreditasi Perguruan Tinggi kepada Menteri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingkat at Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Unit yang membidangi Akreditasi Perguruan Tinggi
XVI	BIOLOGI MOLEKULER											
1	BM.00	Kebijakan biologi molekuler yang terdiri dari: 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	Lembaga Eijkman Lembaga Eijkman
2	BM.01	Penyakit Menular										
	BM.01.00	a Bakteri										Lembaga Eijkman

-445-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data 2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Rahasia Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon II Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	BM.01.01	b Dengue 1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√	√	√	√	√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman

-446-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	BM.01.02	c Hepatitis 1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data 2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman
			Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-447-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BM.01.03	d Malaria 1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data 2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman
			Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-448-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BM.01.04	c Virus										
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	BM.01.05	f Penyakit menular lainnya										
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman

-449-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
3	BM.02	Penyakit tidak menular dan kelainan genetika										
	BM.02.00	a Kelainan Sel darah merah										
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-450-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BM.02.01	b Thalassemia dan Hemoglobinopati										
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	BM.02.02	c Obesitas Sindroma Metabolik dan Diabetes Melitus										Lembaga Eijkman
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-451-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	BM.02.03	d Kelainan Kromosom										Lembaga Eijkman
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-452-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BM.02.04	c Penyakit tidak menular dan kelainan genetika lainnya										
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
4	BM.03	Keanekaragaman genom										
	BM.03.00	a Manusia										Lembaga Eijkman

-453-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	BM.03.01	b Non manusia										
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil pendataan/survey - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√	√	√			Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman

-454-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
5	BM.04	Pendukung Penelitian										
	BM.04.00	a Laboratorium Bioinformatika										
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer/ Database - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-455-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BM.04.01	b Laboratorium Biosafety Level 3										Lembaga Eijkman
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer/ Database - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	BM.04.02	c Laboratorium Sequencing/Peruntunan DNA										Lembaga Eijkman
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer/ Database - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-456-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	BM.04.03	d Histopatologi dan Laboratorium TEM 1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Data primer/ Database - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data 2) Hasil penelitian/pengkajian/rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil luaran - Rekomendasi	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman
			Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
6	BM.05	Terapan di bidang biologi molekuler medis dan nonmedis										
	BM.05.00	a Unit Sitogenetika										Lembaga Eijkman

-457-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		2) Data individu	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	

-458-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) hasil pemeriksaan	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	
	BM.05.01	b Unit Forensik DNA 1) Pelaksanaan penelitian/pengkajian - Prosedur/petunjuk - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman

-459-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Data individu	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	
		3) hasil pemeriksaan	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	

-460-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BM.05.02	c Unit Konseling Genetik										
		1) Pelaksanaan penelitian/pengekajian - Prosedur/petunjuk - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Analisis/pengolahan data	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Lembaga Eijkman
		2) Data individu	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	

-461-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) hasil pemeriksaan	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy , keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008	
7	BM.06	Layanan Penunjang Laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Lembaga Eijkman
8	BM.07	Bimbingan teknis/workshop/seminar penyakit menular, penyakit tidak menular dan kelainan genetika, kesnekaragaman genom, pendukung penelitian, terapan dibidang biologi molekuler medis dan non medis dan layanan penunjang laboratorium yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Lembaga Eijkman

-462-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	BM.08	Monitoring dan evaluasi penyakit menular, penyakit tidak menular dan kelainan genetika, keanekaragaman genom, pendukung penelitian, terapan dibidang biologi molekuler medis dan non medis dan layanan penunjang laboratorium yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Notula 3) Laporan monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Lembaga Eijkman
XVII PEMBUDAYAAN IPTEK												
1	Bl.00	Kebijakan peragaan dan pembudayan ilmu pengetahuan teknologi 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 2) Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur Kriteria	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Setingk at Eselon III Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PP-IPTEK PP-IPTEK
2	Bl.01	Peragaan										
	Bl.01.00	a Pengembangan Peragaan 1) Administrasi Persuratan 2) Materi Peragaan 3) Materi Pengembangan Peragaan 4) Materi Pendukung/Lingkungan Peragaan 5) SOP Pengembangan Alat peraga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK

-463-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bl.01.01	b Peragaan Indoor 1) Administrasi Persuratan 2) Materi Peragaan Indoor 3) Data Peragaan Indoor beserta klasifikasinya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.01.02	c Peragaan Outdoor 1) Administrasi Persuratan 2) Materi Peragaan outdoor 3) Data Peragaan outdoor beserta klasifikasinya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.01.03	d Peragaan Keliling 1) Administrasi Persuratan 2) Materi Peragaan keliling 3) Data Peragaan keliling beserta klasifikasinya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.01.04	e Perawatan Peragaan 1) Administrasi Persuratan 2) Data Perbaikan dan Kerusakan Alat peraga 3) SOP Perawatan Peragaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.01.05	f Pemanduan Peragaan 1) Administrasi persuratan 2) Daftar pemandu 3) Kebutuhan dan evaluasi pemandu 4) SOP Pemandu Peragaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.01.06	g Pemanfaatan Peragaan 1) Administrasi Persuratan 2) Berita Acara Serah Terima 3) Data Kondisi alat peraga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK

-464-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Bl.01.07	h Layanan Peragaan Pengunjung 1) Administrasi persuratan 2) Data alat peraga 3) Data kebutuhan pemandu	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
3	Bl.02	Program										
	Bl.02.00	a Pengembangan Program 1) Administrasi Persuratan 2) Materi Program 3) Materi Pengembangan Program 4) SOP Pengembangan program	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.02.01	b Program Regular 1) Administrasi persuratan 2) Daftar jadwal kegiatan 3) Materi program regular 4) SOP Program Regular 5) Daftar peserta program regular	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.02.02	c Program Non Regular 1) Administrasi persuratan 2) Daftar jadwal kegiatan 3) Materi program non regular 4) SOP Program non Regular 5) Daftar peserta program non regular	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.02.03	d Layanan Program 1) Administrasi persuratan 2) Data layanan program 3) Data kebutuhan pemandu 4) SOP Layanan Program	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK

-465-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Bl.03	Promosi										
	Bl.03.00	a Promosi ke Sekolah 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Sekolah yang akan dikunjungi 3) Daftar petugas 4) Daftar Pengunjung	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.03.01	b Promosi ke Lembaga Pemerintah 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Lembaga Pemerintah yang akan dikunjungi 3) Daftar petugas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.03.02	c Promosi ke Lembaga Swasta 1) Administrasi persuratan 2) Daftar Lembaga Swasta yang akan dikunjungi 3) Daftar petugas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
	Bl.03.03	d Layanan Pengunjung 1) Administrasi persuratan 2) Statistik Daftar pengunjung 3) Data Komplain 4) Kuesioner	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
5	Bl.04	Science Center Daerah 1) Administrasi persuratan 2) Kebijakan Science Center Daerah 3) Daftar science center daerah 4) Buku Panduan Science Center Daerah 5) Berita Acara Serah Terima Alat Peraga 6) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK

-466-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Bl.05	Forum Komunikasi Asosiasi Science Center Indonesia	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
7	Bl.06	Bimbingan teknis/workshop/seminar meliputi peragaan, program, promosi dan science center daerah yang terdiri dari: 1) Administrasi Persuratan 2) Daftar Peserta 3) Materi Bimtek 4) Surat Perintah 5) Notula 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PP-IPTEK
8	Bl.07	Monitoring dan evaluasi meliputi peragaan, program, promosi dan science center daerah yang terdiri dari: 1) Laporan monitoring dan evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Setingk at dengan Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PP-IPTEK
XVII I	AKADEMIK LLDIKTI											
1	AK.00	Kurikulum PTS 1) Laporan pengawasan dan pengendalian tentang kurikulum	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswa an

-467-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK penetapan kurikulum	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswa an
2	AK.01	Uji Kompetensi 1) Daftar peserta 2) Materi pelatihan 3) Hasil uji kompetensi	Terbatas Terbatas Terbatas	√ √		√ √		√ √	Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswa an Bidang akademik dan kemahasiswa an Bidang akademik dan kemahasiswa an

-468-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Sertifikat	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswaan
3	AK.02	Legalisasi Ijazah										
		1) Ijazah	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswaan
		2) Surat keterangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswaan
4	AK.03	Pengembangan Ketenagaan										
		1) Beasiswa BUDI (DN/LN)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswaan

-469-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Sertifikasi dosen	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswaan
		3) Pelatihan dosen (PEKERTI dan AA)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswaan
5	AK.04	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat										
		1) Buku panduan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		2) Usulan proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		3) SK penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan

-470-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Dokumen kontrak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		5) Laporan hasil kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
XIX	KEMAHASISWAAN LLDIKTI											
1	KM.00	Beasiswa										
	KM.00.00	a Bidikmisi, BPPPA, PPA										
		1) Panduan pendaftaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		2) Administrasi beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		3) SK penerima beasiswa	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswaan

-471-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
	KM.00.01	b Sosialisasi/bimbingan program beasiswa										
		1) Administrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		2) Materi Bimtek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
	KM.00.02	c Laporan beasiswa/pertukaran mahasiswa										
		1) Laporan beasiswa/pertukaran mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan

-472-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	KM.01	Kegiatan Mahasiswa										
	KM.01.00	a Program Kreativitas Mahasiswa										
		1) Buku Panduan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		2) Usulan Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		3) Hasil Seleksi	Terbatas	√	√	√	√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		5) Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	√	√	√	√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan

-473-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.01.01	b Program Kewirausahaan Mahasiswa										
		1) Buku Panduan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		2) Usulan Proposal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		3) Hasil Seleksi	Terbatas	√	√	√	√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswaan
		4) SK Penetapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan
		5) Monitoring dan Evaluasi	Terbatas	√	√	√	√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang akademik dan kemahasiswaan
		6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan

-474-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.01.02	c Lomba/Kompetisi 1) Administrasi 2) Laporan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √		Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang akademik dan kemahasiswaan Bidang akademik dan kemahasiswaan
XX	KELEMBAGAAN LLDIKTI											
1	KH.00	Administrasi akreditasi dan kelembagaan										
	KH.00.00	a Rekomendasi 1) Surat rekomendasi 2) Borang	Terbatas Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √		Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang Kelembagaan Bidang Kelembagaan

-475-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KH.00.01	b Pendampingan 1) Nilai akreditasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang Kelembagaan
2	KH.01	Kebijakan-kebijakan pendidikan tinggi										
	KH.01.00	a Sosialisasi 1) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang Kelembagaan
	KH.01.01	b Penyelesaian Sengketa/konflik 1) Laporan hasil penyelesaian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang Kelembagaan
3	KH.02	Peningkatan dan Pengembangan Perguruan Tinggi Swasta										
	KH.02.00	a Fasilitasi peningkatan perguruan tinggi 1) Administrasi 2) Laporan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang Kelembagaan Bidang Kelembagaan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KH.02.01	b Sarana prasarana 1) Administrasi 2) Rekomendasi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang Kelembagaan Bidang Kelembagaan
	KH.02.02	c Kerja Sama 1) Dokumen kerjasama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang Kelembagaan
4	KH.03	Sistem Informasi 1) Database perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang Kelembagaan
		2) Nomor registrasi dosen	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kementerian		Bidang Kelembagaan
		3) Berkas evaluasi kinerja akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Bidang Kelembagaan

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP FASILITATIF

NO.	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PERENCANAAN											
1	PR.00	Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan										
	PR.00.00	a Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 1) Buku RPJP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
	PR.00.01	b Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 1) Administrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
		2) Buku RPJM	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan

-478-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.00.02	c Rencana Strategis (Renstra)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
		1) Produk Hukum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
	PR.00.03	d Rencana Kerja Pemerintah (RKP)										
2	PR.01	Rencana Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi										
	PR.01.00	a rencana kerja (pra pagu indikatif)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
	PR.01.01	b rencana kerja (renja) pagu indikatif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan

-479-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.01.02	c rencana kerja dan anggaran pagu anggaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
	PR.01.03	d rencana kerja dan anggaran Pagu Alokasi Anggaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
3	PR.02	Perjanjian Kinerja										
		1) Perjanjian Kinerja Menristekdikti	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
		2) Perjanjian Kinerja Eselon I dengan Menteri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
		3) Perjanjian Kinerja Pimpinan PTN/LLDIKTI dengan Menteri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan

-480-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Perjanjian Kinerja Eselon II dengan Eselon I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
		5) Perjanjian Kinerja Eselon III dengan Eselon II	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
		6) Perjanjian Kinerja Eselon IV dengan Eselon III	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
4	PR.03	Perencanaan Program dan Anggaran										
	PR.03.00	a Operasional dan Rutin 1) Data Usulan gaji	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan

-481-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Usulan Tunjangan dan Sertifikasi Dosen dan Guru Besar	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
		3) Usulan Belanja Operasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
	PR.03.01	b Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) 1) Usulan PHLN	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
		2) Rencana Penarikan PHLN tahun n + 1 dari satker terkait	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan

-482-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Bahan Pemantauan dan Evaluasi PHLN	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
		4) Laporan Hasil Pemantauan PHLN	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
	PR.03.02	c Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) 1) Proposal usulan KPBU	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
	PR.03.03	d Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 1) Proposal usulan SBSN	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan

-483-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.03.04	e Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT)/ Biaya Kuliah Tunggal (BKT)/Uang Kuliah Tunggal (UKT)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
	PR.03.05	f Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1) Proposal TRPNBP (Target Rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak) 2) Produk hukum	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan Biro Perencanaan
	PR.03.06	g Badan Layanan Umum (BLU) 1) Rencana Bisnis Anggaran BLU	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Perencanaan

-484-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Rencana Strategis Bisnis BLU	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Perencanaan
		3) Produk Hukum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
	PR.03.07	h Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) 1) Rencana Kerja Tahunan PTN Badan Hukum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Perencanaan
		2) Produk hukum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan

-485-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.03.08	i Program Prioritas dari satker dan/atau unit eselon I di lingkungan Kemenristekdikti	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
	PR.03.09	j Daftar Isian Pagu Anggaran APBNP Kemenristekdikti yang telah disahkan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
5	PR.04	Revisi Dokumen Anggaran										
	PR.04.00	a DIPA Revisi dan POK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
6	PR.05	Kegiatan Sidang										
	PR.05.00	a Sidang Kabinet 1) Bahan Sidang Kabinet 2) Risalah	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan

-486-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.05.01	b Rapat Terbatas 1) Bahan Rapat Terbatas 2) Risalah	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
7	PR.06	Rapat/ Rapat Koordinasi/ Rapat Kerja										
	PR.06.00	a Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 1) Bahan Rapat Kerja / Rapat Dengar Pendapat dengan DPR 2) Risalah/ Kesimpulan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
	PR.06.01	b Rakor Tingkat Menteri 1) Bahan 2) Risalah/ Kesimpulan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
	PR.06.02	c Rakor dengan Perguruan Tinggi 1) Bahan 2) Risalah/ Kesimpulan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan

-487-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.06.03	d Rakor/Raker MWA (Majelis Wali Amanat) 1) Bahan 2) Risalah/ Kesimpulan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
	PR.06.04	e Rakor/Raker Senat 1) Bahan 2) Risalah/ Kesimpulan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
	PR.06.05	f Rakor/Raker/Forum Rektor 1) Bahan 2) Risalah/ Kesimpulan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
	PR.06.06	g Rakor/Raker dengan LLDIKTI 1) Bahan 2) Risalah/ Kesimpulan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Perencanaan
8	PR.07	Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Kementerian										
	PR.07.00	a Pemantauan dan Evaluasi										

-488-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMonev)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Biro Perencanaan
		2) Buku Panduan SIMonev	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
	PR.07.01	b Dokumen Realisasi Capaian Kinerja Program, Capaian Output, dan Anggaran pada SIMonev	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
		1) Bahan pelaksanaan fact finding 2) Hasil pelaksanaan fact finding										
9	PR.08	Pemantauan, Evaluasi Program dan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
		1) Bahan pemantauan dan evaluasi Program dan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI 2) Hasil pemantauan dan evaluasi Program dan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri dan LLDIKTI										
10	PR.09	Laporan										
	PR.09.00	a Laporan Berkala	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Biro Perencanaan

-489-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Laporan Bulanan Hasil dan Evaluasi ke Stakeholder lain								kinerja Kemenristekdikti		
		2) Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Triwulan (PHLN,Kegiatan Prioritas, Aksi PPK, Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI)										
		3) Rapor Triwulan Unit Kerja Berbasis SIMonev										
		4) Laporan Realisasi Anggaran dan Rekomendasinya										
	PR.09.01	b Laporan Khusus 1) Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Triwulan (Prioritas Janji Presiden) 2) Laporan Evaluasi Kegiatan Mendalam untuk Kemen PAN-RB 3) Laporan Kegiatan Penugasan Khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
	PR.09.02	c Progress Report 1) Bahan progress report 2) Hasil	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan
	PR.09.03	d Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/ Laporan Kinerja (LAKIN) 1) Laporan Kinerja Kementerian 2) Laporan Kinerja Eselon I 3) Laporan Kinerja PTN dan LLDIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Perencanaan

-490-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.09.04	e Evaluasi akuntabilitas kinerja PTN/LLDIKT Nilai Akuntabilitas Kinerja PTN/LLDIKT	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Perencanaan
XII KEPEGAWAIAN												
1	KP.00	Kebijakan di bidang manajemen Kepegawaian - Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik - Penyusunan kebijakan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan - Penetapan kebijakan - <i>Memorandum of Understanding</i>	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Sumber Daya Manusia
2	KP.01	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara										
	KP.01.00	a Perencanaan Kebutuhan ASN - Bahan penyusunan rencana kebutuhan - Analisis Kebutuhan -Aparatur Sipil Negara -Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - Pengolahan data kebutuhan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.01.01	b Perencanaan Pertimbangan Formasi - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu		

-491-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas								kinerja Kemenristekdikti		
	KP.01.02	c Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.01.03	d Standarisasi Jabatan - Informasi Jabatan - Kompetensi Jabatan - Klasifikasi Jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
3	KP.02	Formasi dan Pengadaan Pegawai										
	KP.02.00	a Formasi ASN -Usulan formasi disertai dengan: 1) Analisa Jabatan 2) Beban Kerja - Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN - Persetujuan Formasi - Penetapan Formasi - Penetapan Formasi Khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.02.01	b Pengadaan ASN - Proses Rekrutmen ASN - Penetapan Pengumuman Kelulusan - Berkas Lamaran yang tidak diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		

-492-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Nota Usul Pengangkatan ASN - Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)										
	KP.02.02	c Sistem Rekrutmen ASN - Pengelolaan sistem rekrutmen - standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai - kisi kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian - evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi - Fasilitas Penyelenggaraan Seleksi - Pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian - Penyelenggaraan dan pengolahan seleksi - Sertifikasi dan pelaporan - penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan - pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
4	KP.03	Mutasi Pegawai										
	KP.03.00	a Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-493-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.03.01	b Usulan Kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.03.02	c Usulan Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.03.03	d Penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.03.04	e Usulan Peninjauan Masa Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		

-494-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.03.05	f Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat	Rahasia	√	√	√	√	√	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
5	KP.04	Pengembangan Karir										
	KP.04.00	a Usulan Tugas Belajar/Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/Magang/Ujian Dinas/Praktek Kerja di Instansi lain/Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta 1) Perencanaan dan penyusunan analisis kebutuhan 2) Pelaksanaan 3) Pelaporan 4) Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)/Sertifikat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.04.01	b Usulan Penyesuaian ijazah	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-495-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.04.02	c Penyusunan sistem karier	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.04.03	d Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.04.04	e Angka Kredit a. Pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit b. Penilaian Daftar Usul Penetapan Angka Kredit	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
6	KP.05	Kinerja Aparatur Sipil Negara										
	KP.05.00	a Hasil penilaian kinerja dan standar kerja - Sistem penilaian kinerja ASN - Standar kinerja jabatan pegawai ASN - Penilaian kinerja pegawai ASN	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.05.01	b Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat	Pasal 17 huruf h	

-496-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN - Analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN - Teknis penilaian kinerja ASN								mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.05.02	c Hasil Evaluasi dan pemantauan penilaian kinerja dan standar kinerja jabatan pegawai ASN	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
7	KP.06	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN										
	KP.06.00	a Kode Etik Pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.06.01	b Disiplin - Penegakan Disiplin - Peningkatan Disiplin	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.06.02	c Pemberhentian - Pemberhentian dengan hormat - Pemberhentian tidak dengan hormat - Pemberhentian tidak dengan hormat	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-497-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.06.03	d Pensiun 1) Administrasi Pensiun ASN dan Pejabat Negara - Administrasi pensiun ASN - Perekaman dan pemeliharaan data pensiun 2) Penetapan Pensiun ASN 3) Penetapan Pertimbangan teknis pensiun ASN 4) Pensiun pejabat negara dan janda/dudanya - Administrasi pensiun Pejabat Negara - Penyiapan pensiun pejabat negara - Penetapan pensiun janda/duda pejabat negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
8	KP.07	Bantuan Hukum										
	KP.07.00	a Pemberian Bantuan Hukum	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.07.01	b Bantuan Hukum Pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-498-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	KP.08 KP.08.00	Status dan Kedudukan Pegawai a Pertimbangan status kepegawaian - Analisis status kepegawaian - Penyusunan pertimbangan status kepegawaian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.08.01	b Pertimbangan kedudukan kepegawaian - Analisis kedudukan kepegawaian - Penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.08.02	c Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.08.03	d Perselisihan/sengketa kepegawaian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
10	KP.09	Sistem Informasi Kepegawaian										
	KP.09.00	a Pengolahan data dan informasi kepegawaian - Pengolahan Data - Pengelolaan database kepegawaian ASN - Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN	Biasa/Terbuka	√		√		√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		

-499-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Informasi kepegawaian - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN - Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik										
	KP.09.01	b Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.09.02	c Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian - Arsip kepegawaian elektronik - Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian - Perakaman dan arsip kepegawaian - Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik - Arsip Kepegawaian Fisik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
11	KP.10	Pengawasan dan pengendalian										
	KP.10.00	a Formasi, pengadaan dan pasca diklat - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		

-500-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.10.01	b Kependidikan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.10.02	c Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.10.03	d Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.10.04	e Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		

-501-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.10.05	f Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
12	KP.11	Administrasi Pegawai										
	KP.11.00	a Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.11.01	b Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.11.02	c Cuti Alasan Penting	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.11.03	d Cuti Besar dan Cuti Diluar Tanggungan Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		

-502-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.11.04	e Dokumentasi Identitas Pegawai - Usul Penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu - Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan - Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) - Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.11.05	f Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.11.06	g Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/tunjangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
13	KP.12	Kesejahteraan Pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
	KP.12.00	a Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai										
	KP.12.01	b Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS										
	KP.12.02	c Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan										
	KP.12.03	d Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial										
	KP.12.04	e Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas										
	KP.12.05	f Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena Dinas										

-503-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.12.06	g Berkas tentang Pemberian Tali Kasih										
	KP.12.07	h Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa										
	KP.12.08	i Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi										
	KP.12.09	j Berkas tentang Medical Record										
14	KP.13	Administrasi Perseorangan	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.13.00	a Berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil										
	KP.13.01	b Berkas perseorangan PPPK										
	KP.13.02	c Berkas perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional										
15	KP.14	Berkas perseorangan Menteri/Wakil Menteri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
16	KP.15	Penilaian Kompetensi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.15.00	a Berkas Penilaian Kompetensi										
	KP.15.01	b Hasil Penilaian Kompetensi										

-504-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	KEUANGAN											
1	KU.00	Pelaksanaan Anggaran										
	KU.00.00	a Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Keuangan dan Umum
		-										
	KU.00.01	b RAB (Rencana Anggaran Biaya) 1) Notula Rapat 2) Draf RAB 3) RAB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
2	KU.01	Pengeluaran Anggaran										
	KU.01.00	a Tunjangan kinerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Keuangan dan Umum
	KU.01.01	b Pengeluaran Anggaran Pelaksana Kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Keuangan dan Umum

-505-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.01.02	c Penggajian 1) Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/Honorarium 2) Kartu Gaji	Rahasia	√	√	√	√	√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KU.01.03	d KP4 (Kartu Pengawasan Pembayaran Penghasilan Pegawai)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
3	KU.02	Pengelolaan Perbendaharaan										
	KU.02.00	a Perbendaharaan 1) SK Pengangkatan KPA, BP (Bendahara Pengeluaran) 2) SPP (Surat Permintaan Pembayaran) 3) Surat Perintah Membayar (SPM) 4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 5) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ) 6) Buku Kas Umum (BKU)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-506-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Usulan Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan 8) SK Keputusan penunjukan dan pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM dan Bendahara pengeluaran dan Bendahara penerimaan 9) Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kemenkeu 10) Laporan Hasil Verifikasi Spending Review										
	KU.02.01	b Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 1) Laporan PNBP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Keuangan dan Umum
	KU.02.02	c Badan Layanan Umum (BLU) 1) Usulan Badan Layanan Umum	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-507-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Usulan Standar Pelayanan Minimum	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		3) Usulan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Badan Layanan Umum	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		4) Usulan Remunerasi dan tarif layanan BLU	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		5) Laporan Dewan Pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
		6) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-508-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Lampiran RPP Tarif PNPB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	KU.02.03	d Kartu Pengawasan Kredit	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KU.02.04	e Pajak										
		1) Surat Setoran Pajak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
		2) SPT	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KU.02.05	f Penerimaan Non Pajak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Keuangan dan Umum
		1) SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak)										
		2) SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja)										

-509-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.02.06	g Berita Acara Pemeriksaan Kas	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KU.02.07	h Verifikasi anggaran	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		1) SPJ yang sudah absah dan benar										
	KU.02.08	i Pembukuan Rekening	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		1) Surat Persetujuan Pembukaan Rekening										
		2) Daftar Buku Rekening Perguruan Tinggi										
		3) Rekonsialisasi Rekening dengan Kementerian Keuangan										
	KU.02.09	j Pembukuan Anggaran	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		1) Buku Kas Umum										
		2) Buku Kas Pembantu										
		3) Kartu Realisasi Anggaran										
		4) Kartu Pengawasan Realisasi Anggaran										

-510-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.02.10	k Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 1) Laporan Kehilangan 2) Berita Acara Kehilangan 3) Berita Acara Sidang Majelis TGR 4) SK tanggung jawab mutlak 5) SK Penghapusan 6) Laporan Penyelesaian 7) Laporan Pemantauan dari BPK	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KU.02.11	l Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP) 1) Laporan Penyelesaian 2) Laporan Pemantauan dari BPK	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KU.02.12	m Laporan Hasil Pemeriksaan BPK/ ITJEN/ BPKP 1) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2) Laporan Hasil Pemeriksaan ITJEN 3) Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP	Rahasia	√		√		√	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat merusak kemitraan, kepercayaan, dan reputasi antar instansi	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
4	KU.03	Ketatausahaan Keuangan										
	KU.03.00	a Keterangan Penghasilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-511-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.03.01	b Permohonan Pinjaman	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KU.03.02	c Turan Keanggotaan Organisasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KU.03.03	d Speciment Tanda Tangan KPA, BP, PPK, dan BPP	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
5	KU.04	Belanja										
	KU.04.00	a Belanja Pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KU.04.01	b Belanja Operasional 1) Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen Pembayarannya: - Barang pakai habis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-512-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Barang inventaris: -barang bergerak/ inventaris										
		3) Barang inventaris: -tanah dan bangunan										
		4) Jasa										
		5) Software Komputer										
		Catatan: yang termasuk dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain: Belanja Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk Dokumen- Dokumen Pembayarannya: Barang pakai habis Barang inventaris: Penetapan Pemenang Pengumuman Lelang Dokumen Prakualifikasi Dokumen Peninjauan Lapangan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Berita Acara Pelelangan Usulan Calon Pemenang Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak/Adendum Kontrak										

-513-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.04.02	c Belanja Modal	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KU.04.03	d Belanja Operasional lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
6	KU.05	Bantuan Luar Negeri										
		1) Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		2) Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-514-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		4) Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		5) Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		6) Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya: Reimbursement pinjaman berakhir Direct Payment/Transfer Procedure Special Commitment/ L/C Opening Special Account/Imprest Fund Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri Notice Of Disbursement	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-515-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		8) Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, Berita Acara, dan Data Pendukung lainnya	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		9) Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No. Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure(SE)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		10) Staff Appraisal Report	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-516-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11) Report / Laporan yang terdiri dari: Progress Report Monthly Report Quarterly Report Final Report/Completion Report	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
		12) Laporan Hutang Negara : Laporan Pembayaran Hutang Negara Laporan Posisi Hutang Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
		13) Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
7	KU.06	Layanan Keuangan										
	KU.06.00	a Administrasi perbendaharaan dan penggajian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	KU.06.01	b Verifikasi anggaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-517-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.06.02	c Koordinasi keuangan (Rekonsialisasi)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	KU.06.03	d Koordinasi pelaksanaan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	KU.06.04	e Sosialisasi keuangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
8	KU.07	Akuntansi dan Pelaporan										
	KU.07.00	a Sistem Akuntansi Instansi (SAI)										
		1) Buku Manual Implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
		2) Kebijakan Akuntansi (SK Sekjen/ Permen)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-518-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (Database)	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
		4) Laporan Realisasi Semesteran APBN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Keuangan dan Umum
	KU.07.01	b Perhitungan anggaran 1) RKAHL 2) RAB 3) TOR	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Keuangan dan Umum
	KU.07.02	c Laporan keuangan 1) Laporan Keuangan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Keuangan dan Umum

-519-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Laporan Keuangan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) -Laporan Realisasi Anggaran -Laporan Operasional -Laporan Perubahan Ekuitas -Laporan Pendapatan -Laporan Barang Milik Negara -Laporan Persediaan -Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN -Berita Acara Rekonsiliasi Internal -Berita Acara Stock opname -Laporan Pertanggungjawaban Bendahara -Berita Acara Pemeriksaan Kas -Laporan Realisasi Belanja -Laporan Pengembalian Belanja -Catatan Atas Laporan Keuangan -Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara										
		3) Laporan Neraca	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Keuangan dan Umum
	KU.07.03	d Evaluasi laporan keuangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-520-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.07.04	1) Laporan evaluasi Satuan Kerja	Terbatas	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum	
		c Pemantauan pelaksanaan pelaporan keuangan 1) Dokumen Akuntansi Keuangan: Berita Acara Pemeriksaan Kas Kas/ Register Penutupan Kas Arsip Data Komputer (ADK) Berita Acara Rekonsiliasi Antara Satuan Kerja dan KPPN Laporan										
IV	KETATAUSAHAAN											
1	TU.00	Administrasi Menteri/ Pimpinan										
	TU.00.00	a Sambutan Pidato Menteri/ Pimpinan 1) Naskah Pidato Menteri 2) Naskah Pidato Eselon I	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	TU.00.01	b Ucapan (ucapan terimakasih, simpati, pesan/ kesan, dan rekomendasi)	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	TU.00.02	c Risalah/ notula 1) Risalah/ notulen/ notula Menteri 2) Risalah/ notulen/ notula Eselon I	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-521-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TU.00.03	d Memori jabatan pimpinan 1) Memori Jabatan Menteri 2) Memori Jabatan Eselon I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
2	TU.01	Keprotokolan										
	TU.01.00	a Upacara/ Acara Kedinasan 1) Upacara Bendera 2) Upacara Hari besar 3) Upacara Pelantikan 4) Upacara Serah Terima Jabatan 5) Upacara Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 6) Upacara Hari Pendidikan Nasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	TU.01.01	b Kunjungan Kedinasan 1) Buku tamu	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	TU.01.02	c Acara Pimpinan (agenda pemimpin dan kunjungan kerja) 1) Daftar Agenda Pimpinan	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-522-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TU.01.03	d Audiensi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
3	TU.02	Pencetakan, Penggandaan, dan Penjilidan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
4	TU.03	Administrasi Rapat Menteri/Pimpinan										
	TU.03.00	a Rapat Pimpinan Kementerian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	TU.03.01	b Rapat Terbatas Pimpinan Kementerian	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-523-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TU.03.02	c Rapat Kegiatan Kementerian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
5	TU.04	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
6	TU.05	Praktik Kerja Lapangan/Magang										
	TU.05.00	a SMU/SMA/SMK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	TU.05.01	b Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
7	TU.06	Oganisasi Non Kedinasan										
	TU.06.00	a KORPRI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	TU.06.01	b Dharma Wanita	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-524-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TU.06.02	c Koperasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	TU.06.03	d Yayasan Kemenristekdiktidikti	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	TU.06.04	e Asosiasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	TU.06.05	f organisasi non kedinasan lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
V	KEARSIPAN											
1	KA.00	Persuratan di Kementerian										
	KA.00.00	a Pengurusan Surat Masuk di Kementerian 1) Buku Agenda Surat Masuk 2) Buku Ekspedisi Surat Masuk	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	KA.00.01	b Pengurusan Surat Keluar di Kementerian 1) Bukti Tanda terima Surat 2) Buku Ekspedisi Surat Keluar 3) Buku Agenda Surat Keluar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-525-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	KA.01	Penyimpanan dan pemeliharaan arsip										
	KA.01.00	a Penyimpanan arsip 1) Daftar Pertelaan Arsip	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	KA.01.01	b Pemeliharaan arsip 1) Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
3	KA.02	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
4	KA.03	Layanan Arsip (Peminjaman dan penggunaan arsip)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
5	KA.04	Penyusutan										
	KA.04.00	a Pemindahan Arsip Inaktif 1) Berita acara pemindahan 2) Daftar arsip yang dipindahkan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-526-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KA.04.01	b Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna 1) Panitia Penilai 2) Penilaian Panitia Penilai 3) Permintaan Persetujuan (Kepala ANRI, Kepala Lembaga Kearsipan) 4) Penetapan arsip yang dimusnahkan 5) Berita acara pemusnahan arsip 6) Daftar arsip yang dimusnahkan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	KA.04.02	c Penyerahan arsip statis 1) Pembentukan panitia penilai 2) Notulen rapat panitia 3) Surta pertimbangan panitia penilai 4) Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan 5) Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan dari pencipta arsip 6) Keputusan Penetapan Penyerahan 7) Berita acara penyerahan arsip 8) Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
6	KA.05 KA.05.00	Pembinaan Kearsipan a Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-527-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KA.05.01	b Bimbingan Teknis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	KA.05.02	c Supervisi dan monitoring	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
VI	PERLENGKAPAN DAN BARANG MILIK NEGARA											
1	PL.00	Perencanaan Perlengkapan dan Barang Milik Negara										
	PL.00.00	a Analisa Kebutuhan 1) Daftar Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) 2) Usulan kebutuhan perlengkapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	PL.00.01	b Daftar Rekanan Mampu 1) <i>Daftar Company Profile</i> 2) Surat Rekomendasi 3) Daftar Rekanan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-528-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PL.00.02	c Tata Ruang 1) Layout Ruang Kerja 2) Form Peminjaman Ruangan 3) Administrasi Persuratan 4) Company Profile 5) Daftar Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
2	PL.01	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa										
	PL.01.00	a Pengadaan Barang dan Jasa Secara langsung	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	PL.01.01	b Pengadaan melalui E-katalog 1) Arsip elektronik : Aplikasi e-katalog	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	PL.01.02	c Pengadaan barang lelang sederhana 1) Berita Acara hasil pelelangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	PL.01.03	d Pengadaan barang lelang umum 1) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-529-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PL.01.04	e Pengadaan jasa seleksi sederhana 1) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	PL.01.05	f Pengadaan jasa seleksi umum 1) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
3	PL.02	Pengelolaan Barang Milik Negara										
	PL.02.00	a Penggunaan Barang Milik Negara 1) Surat usulan 2) Surat Persetujuan/SK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	PL.02.01	b Pemanfaatan Barang Milik Negara 1) Surat Usulan 2) Berita Acara Serah terima 3) SK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	PL.02.02	c Pemindahtanganan Barang Milik Negara 1) Surat usulan 2) Surat Persetujuan/SK	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-530-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PL.02.03	d Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara 1) Surat usulan 2) Surat Persetujuan/SK	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
VII KERUMAH TANGGAAN												
1	RT.00	Pemeliharaan/ Perbaikan										
	RT.00.00	a Barang Bergerak/ Inventaris 1) Daftar inventaris kendaraan 2) Kartu kontrol kendaraan 3) Form servis kendaraan 4) Dokumen perpanjangan STNK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	RT.00.01	b Barang Tidak Bergerak/Investasi/Asset 1) Daftar inventaris barang 2) Kartu kontrol barang 3) Form servis Barang 4) Berita acara pekerjaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
2	RT.01	Fasilitas Kantor										
	RT.01.00	a Kendaraan Dinas 1) Formulir peminjaman kendaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-531-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Berita acara serah terima kendaraan dinas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
		3) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum
	RT.01.01	b Ruang Rapat 1) Formulir peminjaman ruangan 2) Surat keterangan pemakaian ruang (jangka panjang) 3) Daftar kelengkapan ruangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	RT.01.02	c Telekomunikasi 1) Formulir peminjaman peralatan 2) Berita Acara Serah terima barang 3) Daftar Kelengkapan sarana telekomunikasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	RT.01.03	d Fasilitas Kantor lainnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
3	RT.02	Keamanan dan Ketertiban										
	RT.02.00	a Pengamanan, penjagaan, pengawasan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas 1) Daftar nama satuan pengamanan 2) Daftar jaga/ daftar piket	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Biro Keuangan dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Catatan gangguan/pelanggaran/ kejadian 4) Surat ijin keluar masuk orang atau barang								kinerja Kemenristekdikti		
	RT.02.01	b Laporan ketertiban dan keamanan 1) Laporan kehilangan 2) Kerusakan 3) Kecelakaan 4) Gangguan 5) Laporan pelaksanaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	RT.02.02	c Pemadam Kebakaran 1) Laporan monitoring kehandalan peralatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
4	RT.03	Perawatan 1) SK Perjanjian Kerja 2) Dokumen Kontrak Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
5	RT.04	Mess, Rumah Jabatan, Rumah Dinas, Wisma/Villa, Hostel, Penginapan 1) Copy Tanda Bukti Kepemilikan 2) Surat Perjanjian Pemakaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
6	RT.05	Kebersihan dan Taman 1) Daftar piket	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Biro Keuangan dan Umum

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Dokumen perjanjian kerja terkait kegiatan kebersihan dan taman								kinerja Kemenristekdikti		
7	RT.06	Pelayanan Rumah Tangga										
	RT.06.00	a Layanan Pengelolaan Gedung 1) Buku Tamu 2) Buku permohonan penggunaan gedung	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	RT.06.01	b Layanan wisma tamu	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	RT.06.02	c Layanan graha widya bhakti 1) Buku Permohonan Pengguna	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	RT.06.03	d Layanan balai pengobatan 1) Rekam Medis Pasien 2) Surat Keterangan Sehat 3) Surat Keterangan Sakit 4) Daftar Tenaga Medis dan Non Medis 5) Surat Keterangan Bebas Narkoba	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Keuangan dan Umum

-534-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.06.04	e Sarana Prasarana Pendukung Inkubasi Bisnis Teknologi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	RT.06.05	f BRUS	Rahasia	√	√	√	√	√	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi		Biro Keuangan dan Umum
	RT.06.06	h Rekreasi / Kesenian / Olah Raga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
	RT.06.07	i Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum

-535-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.06.08	j Perumahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Keuangan dan Umum
VIII	HUKUM											
1	HK.00	Program Legislasi 1) Bahan /materi program legislasi nasional rancangan undang-undang, program penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden dari instansi 2) Daftar penyusunan peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
2	HK.01	Produk Hukum										
	HK.01.00	a Penetapan 1) SK Tim 2) SK Menteri/ SK Sekjen/ SK Dirjen/ SK Pembukaan Program Studi, SK Pendirian PTS , SK Perubahan, SK Penutupan Program Studi, SK Pencabutan Izin PTS dan Salinannya	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi Biro Hukum dan Organisasi

-536-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.01.01	b Pengaturan		√	√	√	√	√				
		1) Rancangan Undang-Undang	Biasa/Terbuka						Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Hukum dan Organisasi
		2) Undang-Undang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		4) Peraturan Pemerintah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		5) Peraturan / Keputusan Presiden	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		6) Peraturan Menteri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi

-537-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Keputusan Menteri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		8) Instruksi dan Edaran Menteri/LPNK/PTN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		9) Peraturan Bersama/Surat Keputusan Bersama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		10) Surat Edaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		11) Keputusan Eselon I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi

-538-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		12) Surat Keputusan Bersama Eselon I	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		13) Surat Edaran/Surat Edaran Bersama Eselon I/Kepala Pusat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		14) Keputusan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		15) Surat Edaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
3	HK.02	Telaah Hukum										
	HK.02.00	a Telaah Hukum Internal 1) Telaahan 2) Surat Penyampaian Telaahan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi

-539-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.02.01	b Telaah Hukum Eksternal 1) Telaahan 2) Surat Penyampaian Telaahan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
4	HK.03	Advokasi Hukum Litigasi										
	HK.03.00	a Advokasi Hukum Perkara Peradilan Tata Usaha Negara 1) Gugatan 2) Surat Kuasa 3) Jawaban 4) Replik (Balasan dari Penggugat) 5) Duplik (Balasan dari Hukor) 6) Alat bukti berupa surat 7) Surat Tugas Pemberian keterangan sebagai ahli/saksi 8) Putusan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
	HK.03.01	b Advokasi Hukum Perkara Perdata 1) Gugatan 2) Surat Kuasa 3) Jawaban 4) Replik (Balasan dari Penggugat) 5) Duplik (Balasan dari Hukor) 6) Alat bukti berupa surat 7) Surat Tugas Pemberian keterangan sebagai ahli/saksi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi

-540-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	HK.04 HK.04.00	8) Putusan										
		c Advokasi Hukum Perkara Pidana	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
		1) Surat tugas pendampingan hukum										
		2) Surat Kuasa										
5	HK.04 HK.04.00	Advokasi Hukum Non litigasi										
		a Kajian Hukum	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti		Bagian Perundangan-undangan Biro Hukum dan Organisasi
		1) Telaahan hukum										
		2) SK Tim										
5	HK.04.01	b Pendampingan Saksi/Ahli	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		1) Surat Tugas keterangan ahli dan saksi										
5	HK.04.02	c Pemberian keterangan sebagai saksi/ahli	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
		1) Berita Acara Pemeriksaan										

-541-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	HK.04.03	d Telaah Naskah Perjanjian Kerjasama dalam negeri	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
		1) Draf Nota Kesepahaman (MoU)										
		2) Draf Perjanjian Kerjasama (PKS)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
		3) Bimbingan Teknis mengenai pembinaan kerjasama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
5	HK.04.04	-Undangan dan Surat Tugas										
		-Materi										
		-Daftar Hadir										
		-Laporan Bimtek/ Notula dan Dokumentasi										
5	HK.04.04	e Telaah Naskah Perjanjian Kerjasama luar negeri	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
		1) Draf Nota Kesepahaman (MoU)										

-542-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Univeristas Luar Negeri: Draf MoU Draf Implementing Arrangement Draf Agreement (Persetujuan)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
		3) Lembaga Pemerintah Luar Negeri Draf MoU Draf Implementing Arrangement Draf Agreement (Persetujuan)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
		4) Draf Perjanjian Kerjasama (PKS)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf f Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
		5) Berkas mengenai bimbingan teknis, Sosialisasi mengenai pembimbingan kerjasama -Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan Bimtek/ Notula dan Dokumentasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi

-543-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.04.05	f Workshop/ Bimbingan Teknis Hukum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
	HK.04.06	g Inventarisasi dan Yurisprudensi Perkara Hukum	Terbatas	√	√	√	√		Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro Hukum dan Organisasi
6	HK.05	Sosialisasi Hukum 1) Bahan Presentasi dari Narasumber	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
		2) Laporan Kegiatan Sosialisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro Hukum dan Organisasi
7	HK.06	Dokumentasi Hukum 1) Arsip Elektronik/Database di JDIH: Resume MoU Materi Pendidikan Anti Korupsi (PAK)/ Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi

-544-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX	ORGANISASI DAN TATA LAKSANA											
1	OT.00	Organisasi										
	OT.00.00	a Pembentukan, penataan, dan penutupan/pembubaran organisasi 1) Pembentukan, penataan di Unit Utama 2) Pembentukan, penataan, dan penutupan di Perguruan Tinggi Negeri 3) Pembentukan, penataan, dan penutupan di Lembaga Layanan dan Pendidikan Tinggi 4) Pembentukan, penataan, dan penutupan di Pusat-Pusat dan Lembaga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
	OT.00.01	b Tugas, fungsi, dan susunan organisasi unit kerja 1) OTK Unit Utama 2) OTK dan Statuta Perguruan Tinggi Negeri 3) OTK Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 4) OTK Pusat-Pusat dan Lembaga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
	OT.00.02	c Rincian tugas unit kerja 1) Rincian tugas Perguruan Tinggi Negeri 2) Rincian tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 3) Rincian tugas Pusat-Pusat dan Lembaga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
	OT.00.03	d Sistem pengukuran dan penilaian kinerja organisasi 1) Pengukuran dan penilaian kinerja Unit Utama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Biro Hukum dan Organisasi

-545-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Pengukuran dan penilaian kinerja Perguruan Tinggi Negeri 3) Pengukuran dan penilaian kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 4) Pengukuran dan penilaian kinerja Pusat-Pusat dan Lembaga								kinerja Kemenristekdikti		
	OT.00.04	e Penyajian data dan informasi kelembagaan pengelola riset, teknologi, dan pendidikan tinggi 1) Penyajian data dan informasi kelembagaan di Unit Utama 2) Penyajian data dan informasi kelembagaan di Perguruan Tinggi Negeri 3) Penyajian data dan informasi kelembagaan di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 4) Penyajian data dan informasi kelembagaan pengelola di Pusat-Pusat dan Lembaga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
2	OT.01	Tata Laksana										
	OT.01.00	a Analisis jabatan Kelas Jabatan: 1) Penetapan Jabatan Fungsional 2) Peta jabatan 3) Analisis beban kerja 4) Nama Jabatan 5) Uraian Jabatan (data dan informasi jabatan) 6) Perhitungan beban kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi

-546-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OT.01.01	b Sistem dan prosedur 1) Peta bisnis proses 2) SOP 3) Standar Pelayanan Publik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
	OT.01.02	c Pembinaan ketatalaksanaan 1) Materi Bimtek tentang Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan: -Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan Bimtek/ Notula dan Dokumentasi 2) Materi Bimtek tentang Ketatalaksanaan, Sistem dan prosedur: -Undangan dan Surat Tugas -Materi -Daftar Hadir -Laporan Bimtek/ Notula dan Dokumentasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
	OT.01.03	d Evaluasi Analisis Jabatan 1) Kelas Jabatan: Penetapan Jabatan Fungsional 2) Peta jabatan 3) Analisis beban kerja : Nama Jabatan Uraian Jabatan (data dan informasi jabatan) Perhitungan beban kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
	OT.01.04	e Evaluasi Sistem dan prosedur 1) Peta bisnis proses 2) SOP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Biro Hukum dan Organisasi

-547-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Standar Pelayanan Publik								kinerja Kemenristekdikti		
	OT.01.05	f Reformasi Birokrasi 1) Peta Jalan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro Hukum dan Organisasi
X	HUBUNGAN MASYARAKAT/ KOMUNIKASI PUBLIK											
1	HM.00	Hubungan Antar lembaga dan Komunikasi Publik										
	HM.00.00	a Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Lembaga Pemerintah 1) Narasi tematik 2) Dokumentasi 3) Dokumen Kelengkapan penghargaan 4) Dokumen Program Kementerian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
	HM.00.01	b Hubungan dan Komunikasi Publik Organisasi Ristekdikti Nasional 1) Dokumen kegiatan 2) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
	HM.00.02	c Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat 1) Dokumen kegiatan 2) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP

-548-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	HM.00.03	d Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Pemangku Kepentingan lainnya 1) Dokumen kegiatan 2) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
-	HM.00.04	e Bakohumas 1) Dokumen kegiatan 2) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
2	HM.01	Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Media Massa										
	HM.01.00	a Press Release 1) Press Release	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
	HM.01.01	b Laporan Hasil Monitoring dan Analisa Pemberitaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
3	HM.02	Hubungan dan Komunikasi Publik dengan Internal 1) Dokumen kegiatan 2) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP

-549-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	HM.03	Layanan Informasi Publik										
	HM.03.00	a Pengaduan Masyarakat 1) Laporan dari masyarakat 2) Tindak lanjut/ jawaban dari unit utama 3) Rekapitulasi laporan yang belum ada jawaban 4) Rekapitulasi laporan secara berkala	Terbatas Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka	√ √ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	√ √ √	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro KSKP Biro KSKP Biro KSKP Biro KSKP
	HM.03.01	b PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi) 1) Kegiatan Sosialisasi Bimtek terkait PPID 2) Daftar Informasi Publik 3) Prosedur Permohonan Informasi Publik 4) SOP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP

-550-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Proses Korespodensi Permohonan Informasi -Surat Pengantar terkait permohonan data dari masyarakat ke Unit Utama -Tindak Lanjut/Jawaban -Sending Report -Balasan dari masyarakat -Tanda terima										
5	HM.04	Unit Layanan Terpadu										
	HM.04.00	a Penyelenggaraan Layanan Terpadu (PINTU) 1) Data Customer	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro KSKP
		2) Data Pendukung Customer	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro KSKP
	HM.04.01	b Evaluasi Penyelenggaraan Layanan Terpadu (PINTU) 1) Laporan monitoring evaluasi berkala	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	- -	Biro KSKP

-551-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	HM.05	Laporan Kegiatan Kehumasan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro KSKP
7	HM.06	Publikasi dan Dokumentasi										
	HM.06.00	a Informasi profil unit kerja 1) Buku Profil	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
	HM.06.01	b Laporan Kegiatan Publikasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
	HM.06.02	c Pengumuman/ Pemberitahuan 1) Pengumuman	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
XI	KERJASAMA											
1	KS.00	Sistem Informasi Kerjasama										
	KS.00.00	a Data Kerjasama dalam Negeri 1) Pedoman/Panduan Penggunaan Sistem Informasi 2) Daftar Kerjasama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP

-552-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KS.00.01	b Data Kerjasama Luar Negeri 1) Pedoman/Panduan Penggunaan Sistem Informasi 2) Daftar Kerjasama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
	KS.00.02	c Data Kerjasama Perguruan Tinggi 1) Pedoman/Panduan Penggunaan Sistem Informasi 2) Daftar Kerjasama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		
2	KS.01	Perjalanan Dinas Luar Negeri										
	KS.01.00	a Permohonan ijin 1) Surat permohonan 2) KTP 3) CV	 Terbatas Terbatas Terbatas	 √ √ √	 √ √ √	 √ √ √	 √ √ √	 √ √ √	 Eselon III Eselon III Eselon III	 Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro KSKP

-553-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Surat Tugas	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KS.01.01	b Rekomendasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri 1) Surat permohonan 2) KTP 3) CV	 Terbatas Terbatas Terbatas	 √ √ √	 √ √ √	 √ √ √	 √ √ √	 √ √ √	 Eselon III Eselon III Eselon III	 Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro KSKP

-554-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KS.01.02	c Pengurusan Paspor 1) Surat Rekomendasi 2) Formulir pengurusan paspor 3) Pas foto	Terbatas Terbatas Terbatas	√ √	√ √	√ √			Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro KSKP
	KS.01.03	d Pengurusan Visa 1) Formulir aplikasi 2) Surat rekomendasi Kemlu	Terbatas Terbatas	√ √	√ √	√ √			Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Biro KSKP

-555-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KS.01.04	Laporan Rekapitulasi Perjalanan Dinas Luar negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
3	KS.02	Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan 1) Tanda Terima 2) Daftar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro KSKP
XII DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN												
1	DP.00	Laporan Hasil Dokumentasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
2	DP.01	Pengadaan bahan pustaka dan koleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
3	DP.02	Daftar koleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP

-556-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	DP.03	Penyimpanan deposit bahan pustaka										
	DP.03.00	a Pengajuan ISBN ke Perpustakaan Nasional 1) Berkas Verifikasi ISBN dari Perpustakaan Nasional 2) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
5	DP.04	Layanan perpustakaan										
	DP.04.00	a Peminjaman 1) Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka 2) Pertanyaan rujukan dan jawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
	DP.04.01	b Pengembalian 1) Daftar Pengembalian Koleksi tercetak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		Biro KSKP
6	DP.05	Pelestarian bahan pustaka 1) Survei kondisi bahan pustaka 2) Reprografi bahan pustaka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Biro KSKP

-557-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIII	PENGAWASAN											
1	PA.00	Rencana Pengawasan										
	PA.00.00	a Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
	PA.00.01	b Rencana Kerja Tahunan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
	PA.00.02	c Rencana Kinerja Tahunan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
	PA.00.03	d Penetapan Kinerja Tahunan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
	PA.00.04	e Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat

-558-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	PA.01	Pelaksanaan Pengawasan										
	PA.01.00	a Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemantauan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Review (LHR), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
	PA.01.01	b Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemantauan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Review (LHR), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
	PA.01.02	c Laporan Audit Tujuan Tertentu yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
	PA.01.03	d Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan masyarakat	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat

-559-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.01.04	e Laporan Pemutakhiran Data	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
	PA.01.05	f Laporan Perkembangan Barang Milik Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Inspektorat
	PA.01.06	g Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Reviu Kementerian, PTN	Terbatas	√	√	√			Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
	PA.01.07	h Kebijakan Pengawasan SPI (Sistem Pengendalian Internal)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	Inspektorat

-560-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	PA.02	Pengaduan Masyarakat Whistle Blowing	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
4	PA.03 PA.03.00	Berita Acara Pemeriksaan (BAF) a Berita Acara Pemeriksaan Disiplin Pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
	PA.03.01	b Berita Acara Pemeriksaan Kerugian Negara	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Inspektorat
XIV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
1	DL.00	Kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan 1) Kebijakan Bidang Diklat - Masukan dan dukungan kebijakan - Penetapan Kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
2	DL.01	Perencanaan dan Program Pendidikan dan Pelatihan										

-561-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DL.01.00	a Pelatihan Dasar CPNS 1) Renstra Pusdiklat 2) SK Perencanaan Diklat 3) Kalender Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.01.01	b Kepemimpinan 1) Renstra Pusdiklat 2) SK Perencanaan Diklat 3) Kalender Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.01.02	c Teknis 1) Renstra Pusdiklat 2) SK Perencanaan Diklat 3) Kalender Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.01.03	d Fungsional 1) Renstra Pusdiklat 2) SK Perencanaan Diklat 3) Kalender Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
3	DL.02	Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan										
	DL.02.00	a Dalam Negeri 1) MoU 2) Perjanjian Kerjasama 3) Kontrak 4) Laporan Kerjasama dalam negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT

-562-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DL..02.01	b Luar Negeri 1) MoU 2) Perjanjian Kerjasama 3) Kontrak 4) Laporan Kerjasama Luar negeri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
4	DL.03	Tenaga Kediklatan										
	DL.03.00	a Pengelola Berkas Persyaratan menjadi pengelola: 1) Daftar riwayat hidup Pengelola 2) Sertifikat MoT 3) Ijazah pendidikan terakhir 4) Sertifikat pelatihan yang berkaitan 5) Sertifikat diklatpim	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDIKLAT
	DL.03.01	b Penyelenggara 1) Daftar riwayat hidup Penyelenggara 2) Sertifikat ToC 3) Ijazah pendidikan terakhir 4) Sertifikat pelatihan yang berkaitan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDIKLAT
	DL.03.02	c Pengajar/ Widyaiswara Berkas Persyaratan menjadi Pengajar:										

-563-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Daftar riwayat hidup Pengajar	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDIKLAT
		2) Sertifikat ToT	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDIKLAT
		3) SK pengangkatan Widyaiswara	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDIKLAT
		4) Ijazah pendidikan terakhir	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDIKLAT
		5) Sertifikat pelatihan yang berkaitan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDIKLAT

-564-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Pembinaan Widyaiswara Administrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
		7) Sertifikasi Peningkatan Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDIKLAT
	DL.03.03	d Pengelola Sistem Informasi Diklat (SIDA) Berkas Persyaratan menjadi Pengelola SIDA: 1) Daftar riwayat hidup Pengelola SIDA 2) Ijazah pendidikan terakhir 3) Sertifikat pelatihan yang berkaitan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDIKLAT
	DL.03.04	e Perancang Kurikulum Berkas Persyaratan menjadi Pengelola SIDA: 1) Daftar riwayat hidup Pengelola SIDA 2) Sertifikat perancang kurikulum 3) Ijazah pendidikan terakhir 4) Sertifikat pelatihan yang berkaitan	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDIKLAT
	DL.03.05	f Penganalisis Kebutuhan Diklat Berkas Persyaratan menjadi Penganalisis Kebutuhan Diklat:	Terbatas	√		√		√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu	Pasal 17 huruf h Undang-	PUSDIKLAT

-565-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Daftar riwayat hidup Penganalisis Kebutuhan Diklat 2) Sertifikat Penganalisis Kebutuhan Diklat 3) Ijazah pendidikan terakhir 4) Sertifikat pelatihan yang berkaitan								pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Undang Nomor 14 Tahun 2008	
5	DL.04	Peserta Pendidikan dan Pelatihan										
	DL.04.00	a Pelatihan Dasar CPNS 1) Database Peserta 2) Database Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.04.01	b Kepemimpinan 1) Database Peserta 2) Database Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.04.02	c Teknis 1) Database Peserta 2) Database Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.04.03	d Fungsional 1) Database Peserta 2) Database Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
6	DL.05	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan										
	DL.05.00	a Pelatihan Dasar CPNS										

-566-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Izin Penyelenggaraan	Biasa/Terbuka		√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		2) SK penyelenggaraan	Biasa/Terbuka		√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		3) SK Penetapan Peserta	Biasa/Terbuka		√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		4) Pemanggilan peserta	Biasa/Terbuka		√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		5) Penetapan pengajar	Biasa/Terbuka		√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT

-567-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Penetapan jadwal diklat (pembelajaran, seminar rancangan aktualisasi, dan seminar pelaksanaan aktualisasi)	Biasa/Terbuka		√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		7) Pedoman penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka		√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		8) Surat permohonan penerbitan kode registrasi alumni	Biasa/Terbuka		√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		9) Laporan hasil aktualisasi	Biasa/Terbuka		√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		10) Surat Tanda Tamat Pelatihan	Biasa/Terbuka		√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT

-568-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11) Laporan penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.05.01	b Kepemimpinan										
		1) Surat Izin Penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		2) SK penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		3) SK Penetapan Peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		4) Pemanggilan peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT

-569-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Penetapan pengajar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		6) Penetapan jadwal diklat (pembelajaran, seminar rancangan aktualisasi, dan seminar pelaksanaan aktualisasi)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		7) Pedoman penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		8) Surat permohonan penerbitan kode registrasi alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		9) Laporan hasil aktualisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT

-570-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		10) Surat Tanda Tamat Pelatihan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		11) Laporan penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.05.02	c Teknis		√	√	√	√	√				
		1) SK penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		2) SK Penetapan Peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		3) Pemanggilan peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT

-571-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Penetapan pengajar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		5) Penetapan jadwal diklat (pembelajaran, seminar rancangan aktualisasi, dan seminar pelaksanaan aktualisasi)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		6) Pedoman penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		7) Surat permohonan penerbitan kode registrasi alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		8) Laporan hasil aktualisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT

-572-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9) Surat Tanda Tamat Pelatihan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		10) Laporan penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
	DL.05.03	d Fungsional										
		1) SK penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		2) SK Penetapan Peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		3) Pemanggilan peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT

-573-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Penetapan pengajar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		5) Penetapan jadwal diklat (pembelajaran, seminar rancangan aktualisasi, dan seminar pelaksanaan aktualisasi)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		6) Pedoman penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		7) Surat permohonan penerbitan kode registrasi alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT
		8) Laporan hasil aktualisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDIKLAT

-574-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9) Surat Tanda Tamat Pelatihan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
		10) Laporan penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
7	DL.06	Sistem informasi Diklat 1) Data lembaga diklat 2) Data prasarana diklat 3) Data sarana diklat 4) Data pengelola diklat 5) Data penyelenggara diklat 6) Data widyaiswara 7) Data program diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
8	DL.07	Monitoring dan Evaluasi Diklat										
	DL.07.00	a Monitoring dan Evaluasi Perencanaan 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT

-575-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DL.07.01	b Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.07.02	c Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Program 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.07.03	d Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kediklatan 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.07.04	e Monitoring dan Evaluasi Peserta Diklat 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.07.05	f Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan diklat 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
	DL.07.06	g Monitoring dan Evaluasi Alumni Pasca Diklat 1) Instrumen monev 2) Hasil pengolahan data 3) Laporan hasil evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT

-576-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DL.07.07	h Penjaminan Mutu Diklat 1) Berita acara/Laporan Komite Penjamin Mutu Diklat 2) SK Komite Penjamin Mutu	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
9	DL.08	Akreditasi Diklat 1) Surat permohonan akreditasi 2) Laporan hasil verifikasi lapangan 3) Berita acara rapat verifikasi 4) Berita acara tim penilai 5) Surat keputusan penetapan akreditasi 6) Sertifikat akreditasi 7) Laporan akreditasi lembaga diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDIKLAT
XV DATA DAN INFORMASI IPTEK DIKTI												
1	DI.00	Kebijakan di bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi 1) Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 2) Penetapan dalam bentuk Kebijakan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja kemenristekdikti	-	PUSDATIN PUSDATIN
2	DI.01	Jaringan & Sarana										
	DI.01.00	a Pengelolaan Data Center										

-577-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Topologi Jaringan	Rahasia	√	√	√	√	√	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDATIN
		2) Layout Perangkat Data Center	Rahasia	√	√	√	√	√	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDATIN
		3) Jadwal Piket	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
		4) SOP Pengelolaan Data Center	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN

-578-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Logbook (Buku Tamu)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
		6) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
	DI.01.01	b Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK 1) Topologi Jaringan	Rahasia	√	√	√	√	√	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDATIN

-579-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Layout Perangkat Infrastruktur	Rahasia	√	√	√	√	√	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDATIN
		3) SOP Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
		4) Laporan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Sarana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
		5) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
		c Pengembangan Jaringan dan Sarana infrastruktur 1) TOR Pengembangan Jaringan dan Sarana	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
	DI.01.02											

-580-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
	DI.01.03	d Layanan Teleconference dan Video Conference										
		1) Logbook Pemakaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
		2) Logbook Perawatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
		3) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
	DI.01.04	e Dokumen Hosting	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
		1) Formulir permintaan hosting										
		2) Laporan hasil uji kelayakan										
		3) Laporan pelaksanaan hosting										

-581-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	DI.02	Aplikasi dan Sistem Informasi										
	DI.02.00	a Pembuatan dan Pengembangan Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
		1) SOP Pengembangan Sistem Informasi										
		2) Standar Pengembangan Sistem Informasi										
		3) Buku Panduan										
		4) Laporan Monitoring dan Evaluasi										
	DI.02.01	b Pemberian Fasilitas dan Layanan aplikasi sistem informasi	Rahasia	√	√	√	√	√	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDATIN
		1) Web Service yang diberikan ke Kementerian/ Lembaga/ Instansi/ Unit Kerja										
	DI.02.02	c Pembaharuan Katalog Layanan Online	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
		1) Daftar Katalog Aplikasi di Kemenristekdikti										
	DI.02.03	d Pengelolaan Website Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
		1) Buku Panduan pengelolaan website										
		2) SOP Permohonan penambahan konten website										

-582-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Laporan pengembangan website 4) Laporan Monitoring dan Evaluasi										
	DI.02.04	e Pemberian Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) 1) SK Tim 2) SOP LPSE 3) Buku Panduan 4) Sertifikat 5) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
	DI.02.05	f Pemeliharaan dan Keamanan Sistem Informasi 1) Buku Panduan Pemeliharaan dan Keamanan Sistem Informasi 2) SOP Pemeliharaan dan Keamanan Sistem Informasi 3) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN

-583-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	DI.03	Pengumpulan Data & Informasi IPTEK										
	DI.03.00	a Instrumen pengumpulan data dan informasi di bidang iptek 1) Pedoman Pengumpulan data: SOP Pengumpulan data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
	DI.03.01	b Pengelolaan data dan informasi dibidang iptek 1) Dokumen data yang dikelola 2) Kamus data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
	DI.03.02	c Pedoman pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik 1) Pedoman Pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
	DI.03.03	d Pengembangan sistem data statistik 1) Dokumen Perancangan pengembangan: Sistem Informasi IPTEK Nasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN

-584-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.03.04	e Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dibidang pengumpulan data di bidang iptek 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dibidang pengumpulan data di bidang iptek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
5	DI.04	Pengolahan Data & Informasi IPTEK										
	DI.04.00	a Analisis data iptek 1) Dokumen analisis data iptek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
	DI.04.01	b Pengelolaan di bidang pengolahan data dan informasi iptek 1) Dokumen Kajian data iptek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
	DI.04.02	c Penyajian dan Layanan data statistik iptek 1) Data Statistik IPTEK	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
	DI.04.03	d Pengembangan sistem pendukung pengambilan keputusan 1) SOP Pengembangan Sistem Informasi 2) Standar Pengembangan Sistem Informasi 3) Buku Panduan 4) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN

-585-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.04.04	e Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan di bidang pengolahan data dan informasi iptek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
6	DI.05	Pengolahan Data PDDIKTI										
	DI.05.00	a Penyiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan PDDIKTI terintegrasi/ intergrasi 1) Dokumen Laporan Pengembangan dan Pemanfaatan PDDIKTI terintegrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
	DI.05.01	b Pengumpulan dan pengolahan data, kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat 1) Dokumen Laporan Pengumpulan Data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
		2) Dokumen Laporan Hasil Analisis Pengumpulan Data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN

-586-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.05.02	c Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan sistem informasi di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi										
		1) Dokumen Perancangan pengembangan: Forlap PDDIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
		2) Dokumen Perancangan pengembangan: Sistem Informasi Geografi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
	DI.05.03	d Pemanfaatan jaringan dan infrastruktur Teknologi Informasi di Lingkungan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi		√	√	√	√	√			-	PUSDATIN
		1) Laporan Kinerja Jaringan dan Infrastruktur PDDIKTI	Biasa/Terbuka						Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
		2) Perencanaan (IT Plan) Jaringan dan Infrastruktur PDDIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
	DI.05.04	e Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi		√	√	√	√	√			-	PUSDATIN

-587-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Dokumentasi perancangan pengembangan: Feeder PDDIKTI	Biasa/Terbuka						Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
		2) Dokumen Perancangan pengembangan: Validator Nasional PDDIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
		3) Laporan Dokumen Up-grade Sistem	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	
	DI.05.05	f Penyiapan bahan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Database Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Kemenristekdikti	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	PUSDATIN
	DI.05.06	g Validasi dan Verifikasi Data pelaporan PDDIKTI		√	√	√	√	√				
		1) Laporan Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi Data PDDIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN

-588-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Dokumen Kumpulan aturan validasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
	DI.05.07	h Penyajian data kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 1) Laporan Penyajian data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	- -	PUSDATIN
	DI.05.08	i Pemutakhiran data kelembagaan, ketenagaan, pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 1) Laporan Hasil Pemutakhiran data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	- -	PUSDATIN
	DI.05.09	j Penyiapan bahan integrasi dan sosialisasi Program PDDIKTI 1) Laporan Sosialisasi dan Workshop PDDIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN

-589-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.05.10	k Monitoring Dan Evaluasi Pengolahan Data Pendidikan Tinggi 1) Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data PDDIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	-	PUSDATIN
7	DI.06	Informasi & Publikasi PDDIKTI										
	DI.06.00	a Penyiapan bahan informasi dan publikasi di bidang Pendidikan Tinggi 1) Data dan informasi PDDIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	- -	PUSDATIN
	DI.06.01	b Penyiapan bahan publikasi program di Lingkungan pusat 1) Buku Publikasi Data dan Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
		2) Publikasi Data dan Informasi melalui media massa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN

-590-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Publikasi data dan informasi dalam bentuk digital (Infografis, e-book)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN
	DI.06.02	c Pemberian layanan informasi dan publikasi di bidang Pendidikan tinggi 1) Dokumen Laporan layanan informasi dan publikasi 2) Data dan informasi Hasil Layanan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	- -	PUSDATIN
	DI.06.03	d Pengembangan strategi pelayanan informasi dan publikasi PDDIKTI 1) Peta jalan Strategi pelayanan informasi dan publikasi PDDIKTI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	- -	PUSDATIN
	DI.06.04	e Pemanfaatan PDDIKTI dibidang informasi dan publikasi data Pendidikan Tinggi 1) Buku Tematik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN

-591-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.06.05	f Desiminasi Publikasi PDDIKTI 1) Laporan Berkala Data dan informasi kepada Pimpinan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti	- -	PUSDATIN
8	DI.07	Monitoring dan Evaluasi Data dan Informasi 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Pusat Data dan Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kemenristekdikti		PUSDATIN

*) Keterangan Pengguna Hak Akses:
1: Penentu Kebijakan
2: Pelaksana Kebijakan
3: Pengawas Internal/ Eksternal
4: Publik
5: Penegak Hukum

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI

NOMOR 23 TAHUN 2018
KLASIFIKASI ARSIP, JRA, DAN
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN
DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN
RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI

KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI PTN

A. KLASIFIKASI ARSIP

KA fungsi substantifnya di urutkan berdasarkan alur kegiatan PTN sedangkan fungsi fasilitatif di PTN diurutkan berdasarkan kronologis fungsi fasilitatif sebagai berikut:

1. Fungsi Substantif

- a) Penerimaan Mahasiswa (TM)
- b) Kurikulum (KR)
- c) Tenaga Pendidik (TD)
- d) Kemahasiswaan (KM)
- e) Perkuliahan (PK)
- f) Data, Informasi Dan Pengembangan Akademik (DI)
- g) Penunjang Akademik (TA)
- h) Penelitian (PT)
- i) Pengabdian Kepada Masyarakat (PM)
- j) Publikasi Jurnal/ Buku (PJ)
- k) Wisuda Dan Alumni (WA)
- l) Penjaminan Mutu (JM)
- m) Tata Pamong (TP)

-2-

2. Fungsi Fasilitatif

- a) Perencanaan (PR)
- b) Hukum (HK)
- c) Organisasi dan Ketatalaksanaan (OT)
- d) Kearsiapan (KA)
- e) Ketatausahaan (TU)
- f) Kerumahtanggaan (RT)
- g) Perlengkapan (PL)
- h) Hubungan Masyarakat (HM)
- i) Pendidikan dan Pelatihan (DL)
- j) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TI)
- k) Pengawasan (PA)
- l) Kepegawaian (KP)
- m) Keuangan (KU)
- n) Badan Usaha (BU)

Adapun daftar KA fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagai berikut:

POLA KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF

TM Penerimaan Mahasiswa

00 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

00 Daya tampung mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daya tampung mahasiswa

01 Petunjuk PMB

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Petunjuk PMB

02 Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)

03 Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa (Peserta Ujian Masuk)

04 Ujian Masuk Perguruan Tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Ujian Masuk Perguruan Tinggi meliputi ujian, tes psikotes, wawancara, dll

05 Naskah Soal Ujian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Naskah Soal Ujian

06 Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi

07 Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 'Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB

08 Mahasiswa Asing

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa Asing

09 Mahasiswa utusan daerah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa utusan daerah/ kementerian/ lembaga/ BUMN/ perusahaan swasta

10 Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD)

11 Laporan PMB

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan PMB

-4-

- 12 Data Peminat/Jumlah Peminat/Pilihan Peminat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data, jumlah dan pilihan peminat
- 01 Registrasi mahasiswa
 - 00 Registrasi Mahasiswa Baru
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Registrasi Mahasiswa Baru
 - 01 Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama
 - 02 Ketetapan Biaya Perkuliahan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketetapan Biaya Perkuliahan
 - 03 Penentuan Biaya Perkuliahan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penentuan Biaya Perkuliahan
 - 04 Penyesuaian Biaya Perkuliahan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyesuaian Biaya Perkuliahan
 - 05 Laporan Pelaksanaan Registrasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Pelaksanaan Registrasi
- 02 Orientasi Mahasiswa Baru
 - 00 Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru
 - 01 Sosialisasi Peraturan Akademik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sosialisasi Peraturan Akademik
 - 02 Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru
 - 03 Evaluasi dan Laporan orientasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan orientasi

-5-

KR KURIKULUM

00 Penyusunan Kurikulum

00 Pedoman kurikulum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pedoman penyusunan kurikulum

01 Perubahan/penyempurnaan kurikulum/pengembangan kurikulum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perubahan/penyempurnaan kurikulum/pengembangan kurikulum

02 Penetapan kurikulum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan kurikulum

01 Pelaksanaan Kurikulum

00 Pedoman/Panduan Akademik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pedoman/Panduan Akademik

01 Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)

02 Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/ Silabus

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)

03 Satuan Acara Praktikum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Satuan Acara Praktikum

04 Penyusunan Bahan ajar/modul perkuliahan/praktikum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan Bahan ajar/modul perkuliahan/praktikum

05 Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran

TD TENAGA PENDIDIK

00 Kebutuhan tenaga pengajar/ pendidik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebutuhan tenaga pengajar/ pendidik

01 Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik

-6-

- 02 Kepakaran
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kepakaran
- 03 Rasio Dosen dengan Mahasiswa
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rasio Dosen dengan Mahasiswa
- 04 Daftar hadir mengajar
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar hadir mengajar
- 05 Pembimbing Akademik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembimbing Akademik
- 06 Pembimbing/ Penguji Tugas Akhir
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembimbing/ Penguji Tugas Akhir
- KM KEMAHASISWAAN
 - 00 Status Mahasiswa
 - 00 Surat Keterangan Aktif Kuliah
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat Keterangan Aktif Kuliah
 - 01 Cuti mahasiswa/dispensasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Cuti mahasiswa/dispensasi
 - 02 Perpanjangan masa studi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perpanjangan masa studi
 - 03 Evaluasi Masa Studi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Masa Studi
 - 04 Mutasi mahasiswa/pindah
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mutasi mahasiswa/pindah
 - 05 Skorsing
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Skorsing
 - 06 Pengunduran diri
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengunduran diri
 - 07 Drop Out
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Drop Out

-7-

- 08 Mahasiswa meninggal dunia
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mahasiswa meninggal dunia
- 01 Kesejahteraan Mahasiswa
 - 00 Beasiswa
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Beasiswa
 - 01 Keringanan/Penundaan biaya pendidikan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Keringanan/Penundaan biaya Pendidikan
 - 02 Layanan Kesehatan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Kesehatan
 - 03 Penyuluhan kesehatan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyuluhan kesehatan
- 02 Asrama
 - 00 Peraturan Asrama
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Asrama
 - 01 Seleksi dan Penetapan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Seleksi dan Penetapan
 - 02 Berkas Perseorangan Penghuni Asrama
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Perseorangan Penghuni Asrama
 - 03 Kegiatan Penghuni Asrama
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan Penghuni Asrama
- 03 Penggunaan fasilitas mahasiswa (gelanggang, lapangan, sanggar, dll)
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penggunaan fasilitas mahasiswa (gelanggang, lapangan, sanggar, dll)
- 04 Organisasi Mahasiswa
 - 00 Pembentukan organisasi
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan organisasi
 - 01 Pengangkatan / Pemberhentian pengurus
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengangkatan / Pemberhentian pengurus

-8-

- 02 Program kerja/kegiatan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program kerja/kegiatan
- 03 Laporan pelaksanaan kegiatan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan pelaksanaan kegiatan
- 05 Pembinaan Mahasiswa
 - 00 Kegiatan rutin (UKM)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan rutin (UKM)
 - 01 Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)
 - 02 Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll)
 - 03 Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, nasional, internasional
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, nasional, internasional
 - 04 Prestasi Mahasiswa
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Prestasi Mahasiswa
 - 05 Inventori mahasiswa
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Inventori mahasiswa (daftar kemampuan untuk mengukur karakteristik kepribadian atau keterampilan mahasiswa)/ pemetaan potensi
- 06 Organisasi himpunan orang tua mahasiswa
 - 00 Pembentukan organisasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan organisasi
 - 01 Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus
 - 02 Kegiatan organisasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kegiatan organisasi

-9-

- 03 Laporan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan
- 07 Berkas Perseorangan Mahasiswa
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Perseorangan Mahasiswa
- PK PERKULIAHAN
 - 00 Penyusunan Kalender Akademik
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan Kalender Akademik
 - 01 Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum
 - 00 Penyusunan Jadwal Perkuliahan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Jadwal Perkuliahan
 - 01 Daftar mahasiswa peserta mata kuliah
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar mahasiswa peserta mata kuliah
 - 02 Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Kuliah Umum/Kuliah Perdana
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Kuliah Umum/Kuliah Perdana
 - 03 Pelaksanaan Perkuliahan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perkuliahan
 - 04 Pelaksanaan Praktikum
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Praktikum
 - 05 Kuliah lintas prodi/lintas fakultas
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kuliah lintas prodi/lintas fakultas
 - 06 Magang/PKL
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan magang/PKL
 - 07 Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum
 - 02 Kegiatan Multiprodi/Multifakultas/Student exchange/Double Degree/Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree
 - 00 Perencanaan Kegiatan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan Kegiatan Multiprodi/Multifakultas/Student exchange/Double Degree/Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree

- 10 -

- 01 Kontrak kerja sama
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kontrak kerja sama antara peserta program dan penyelenggara program
- 02 Berita acara serah terima
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berita acara serah terima
- 03 Ketetapan Pendanaan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ketetapan pendanaan
- 03 Ujian
 - 00 Panitia penyelenggara ujian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Panitia penyelenggara ujian
 - 01 Tata tertib ujian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tata tertib ujian
 - 02 Pengumuman dan jadwal ujian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengumuman dan jadwal ujian
 - 03 Naskah soal ujian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Naskah soal ujian
 - 04 Pengawas ujian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengawas ujian
 - 05 Berita Acara ujian dan daftar hadir ujian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berita Acara ujian dan daftar hadir ujian
 - 06 Nilai hasil ujian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nilai hasil ujian
 - 07 Kartu Hasil Studi (KHS)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kartu Hasil Studi (KHS)
 - 08 Laporan Tugas Akhir
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Tugas Akhir

-11-

- 04 Yudisium
 - 00 Administrasi Yudisium

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Yudisium
 - 01 Penetapan Kelulusan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan Kelulusan
- 05 Ijazah dan transkrip
 - 00 Surat Keterangan Lulus

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat Keterangan Lulus
 - 01 Nomor Induk registrasi lulusan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nomor Induk registrasi lulusan
 - 02 Salinan ijazah dan transkrip nilai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Salinan ijazah dan transkrip nilai
 - 03 Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai
 - 04 Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai
 - 05 Surat keterangan pendamping ijazah

Naskah- naskah yang berkaitan dengan surat keterangan pendamping ijazah untuk profesi
- DI DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK
 - 00 Data mahasiswa
 - 00 Data prestasi mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data prestasi mahasiswa
 - 01 Data inventori mahasiswa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data inventori mahasiswa
 - 02 Data nilai akhir/transkrip

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data nilai akhir/transkrip

-12-

- 03 Data mahasiswa asing
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data mahasiswa asing
- 01 Statistik perguruan tinggi
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Statistik perguruan tinggi
- 02 Bursa Pendidikan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bursa Pendidikan
- 03 Data Akademik
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data akademik
- 04 Informasi akademik
 - 00 Profil lembaga
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Profil Lembaga
 - 01 Publikasi dan informasi
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Publikasi dan informasi
 - 02 Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)
 - 03 Buku wisuda
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan buku wisuda
 - 04 Buku dies natalis
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Buku dies natalis
 - 05 Orasi ilmiah
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Orasi ilmiah
- 05 Pengembangan Akademik
 - 00 Pembentukan Tim
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembentukan Tim Pengembangan Akademik
 - 01 Proposal dan Studi Kelayakan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proposal dan Studi Kelayakan Pengembangan Akademik
 - 02 Naskah Akademik
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Naskah akademik

-13-

- 03 Penetapan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan Pengembangan Akademik
- 04 Laporan dan Evaluasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan dan Evaluasi Pengembangan Akademik
- TA PENUNJANG AKADEMIK
 - 00 Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/ Kebun, Lahan Percobaan /Rumah Produksi/ Pusat Kajian
 - 00 Layanan Praktikum
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Praktikum
 - 01 Layanan Pengujian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Pengujian
 - 02 Layanan Kalibrasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Kalibrasi
 - 03 Layanan Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Penelitian
 - 04 Layanan Bahasa
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Bahasa
 - 01 Perpustakaan
 - 00 Pengembangan koleksi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan koleksi
 - 01 Pengolahan bahan perpustakaan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengolahan bahan perpustakaan
 - 02 Pelayanan perpustakaan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelayanan perpustakaan
 - 03 Preservasi bahan perpustakaan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Preservasi / pemeliharaan bahan perpustakaan
 - 04 Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka

-14-

- 05 Keanggotaan Perpustakaan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi keanggotaan perpustakaan
- 02 Arsip Perguruan tinggi
 - 00 Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip
 - 01 Pembinaan kearsipan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembinaan kearsipan (Akreditasi, Sertifikasi, Bina Arsiparis, bimbingan dan konsultasi, supervisi dan evaluasi, database bimbingan konsultasi dan supervisi, fasilitasi kearsipan, Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Teladan)
 - 02 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
 - Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Persetujuan Jadwal Retensi Arsip
 - 03 Pengelolaan Arsip Statis
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsip Statis meliputi: akuisisi, sejarah lisan, daftar pencarian arsip statis, pengolahan, preservasi, autentikasi arsip dinamis, akses arsip statis dan pameran arsip
 - 04 Pengawasan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengawasan baik internal maupun eksternal
 - 05 Sosialisasi Kearsipan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi kearsipan
- 03 Museum
 - 00 Kebijakan tentang Permuseuman
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan tentang Permuseuman
 - 01 Penambahan koleksi
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penambahan koleksi baik melalui peminjaman, pembelian, hibah, dan penemuan arkeolog
 - 02 Identitas/Deskripsi koleksi/ Daftar koleksi
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Identitas/Deskripsi koleksi/ Daftar koleksi

-15-

- 03 Register Koleksi Cagar Budaya
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Register Koleksi Cagar Budaya
- 04 Konservasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Konservasi
- 05 Penilaian dan Penghapusan koleksi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penilaian dan Penghapusan koleksi
- 06 Dokumen Peminjaman
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Peminjaman
- 04 Kebun Binatang
 - 00 Kebijakan tentang Pengelolaan Kebun Binatang
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan tentang Pengelolaan Kebun Binatang
 - 01 Data Binatang
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Binatang
 - 02 Penangkaran Binatang
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penangkaran Binatang
 - 03 Tukar Menukar Binatang
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tukar Menukar Binatang
 - 04 Pemeliharaan/ Perawatan Binatang
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan/ Perawatan Binatang termasuk rekam medis
- 05 Rumah Sakit
 - 00 Dewan Pengawas
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Rumah Sakit
 - 01 Dewan Pembina
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dewan Pembina Rumah Sakit
 - 02 Badan Koordinasi Pendidikan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Badan Koordinasi Pendidikan

-16-

- 03 Komite
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Komite
- 04 Satuan Pengawasan Intern
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Satuan Pengawasan Intern
- 05 Medik dan Keperawatan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tenaga Medik dan Keperawatan
- 06 Non Medik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tenaga Non Medik
- 07 Dokter tamu
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokter Tamu
- 08 Penunjang medik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penunjang medik
- 09 Rekam medik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rekam Medik
- 10 Farmasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan farmasi
- 11 Pemulasaran jenazah
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemulasaran jenazah
- 12 Kegiatan Akademik dan riset
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pengembangan akademik dan riset rumah sakit
- 13 Laporan *coass (co assistant)*
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan coass (co assistant)
- 14 Rujukan fasilitas kesehatan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan menerima dan memberikan rujukan fasilitas kesehatan
- 15 Asuransi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Asuransi

-17-

- 16 Laporan kelahiran
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan kelahiran
 - 17 Laporan kematian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan kematian
 - 18 Laporan kejadian kecelakaan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan kejadian kecelakaan saat Lebaran
 - 19 Laporan perkembangan pasien
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan statistik perkembangan pasien
 - 20 Laporan kasus terbanyak
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan kasus terbanyak
 - 21 Kasus khusus
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus khusus
 - 22 Laporan Intern Rumah Sakit
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Intern Rumah Sakit
 - 23 Laporan Ekstern Rumah Sakit
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Ekstern Rumah Sakit
 - 24 Izin Praktik Profesi Kesehatan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Izin Praktik Profesi Kesehatan
- PT PENELITIAN
- 00 Kebijakan Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan Penelitian
 - 01 Penjaminan Mutu Penelitian
 - 00 Penawaran Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penawaran Penelitian
 - 01 Perencanaan penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan penelitian

-18-

- 02 Pendanaan Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pendanaan Penelitian
- 03 Kontrak/ Perjanjian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kontrak/ Perjanjian
- 04 Izin Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Surat izin Penelitian
- 05 Pelaksanaan Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penelitian
- 06 Seminar/Workshop Hasil Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Seminar/Workshop Hasil Penelitian
- 07 Desiminasi/Publikasi Hasil Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyebaran hasil penelitian (sosialisasi/ desiminasi)/ Publikasi Hasil Penelitian
- 08 Pemanfaatan Hasil Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemanfaatan Hasil Penelitian
- 09 Monitoring, Laporan dan Evaluasi, Statistik Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring, Evaluasi dan Laporan, Statistik Penelitian termasuk sertifikat
- 02 Forum Penelitian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Forum Penelitian
- 03 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
 - 00 Pengajuan paten
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengajuan paten
 - 01 Pengajuan Hak Cipta
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengajuan Hak Cipta
 - 02 Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten
 - 03 Data Paten/Hak Cipta
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Paten/Hak Cipta

PM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

00 Kuliah Kerja Nyata

00 Pedoman/panduan KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pedoman/panduan KKN

01 Administrasi KKN (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Administrasi KKN (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN)

02 Pembekalan KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembekalan KKN

03 Pelaksanaan KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan KKN

04 Nilai KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nilai KKN

05 Sertifikat KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikat KKN

06 Statistik KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Statistik KKN

07 Pengembangan KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan KKN

08 Asuransi Mahasiswa KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Asuransi Mahasiswa KKN

09 Laporan KKN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan KKN

01 Layanan Masyarakat

00 Penawaran Pengabdian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 'Penawaran Pengabdian

01 Kontrak perjanjian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 'Kontrak perjanjian

02 Pembinaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembinaan

-20-

- 03 Bantuan Sosial
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Sosial
- 04 Monitoring dan evaluasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring, Laporan dan evaluasi
- 02 Data statistik pengabdian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data statistik pengabdian
- 03 Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian
- 04 Penerbitan hasil pengabdian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penerbitan hasil pengabdian
- 05 Forum Pengabdian Kepada Masyarakat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan forum pengabdian kepada masyarakat
- PJ PUBLIKASI JURNAL/BUKU
 - 00 Pengajuan
 - 00 Proposal Publikasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proposal Publikasi
 - 01 Naskah Jurnal/Buku
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Naskah Jurnal/Buku
 - 02 Penilaian dan Review Proposal/ Naskah
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penilaian dan Review Proposal/ Naskah
 - 03 Sidang Review Proposal
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sidang Review Proposal
 - 04 Pendampingan dan Workshop
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pendampingan dan Workshop
 - 05 Kontrak Penerbitan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kontrak Penerbitan

-21-

- 01 Produksi
 - 00 Pembuatan Lembar Kerja
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan lembar kerja
 - 01 Proses Pengeditan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengeditan
 - 02 Pembuatan Master Jurnal/Buku
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Master Jurnal/Buku
 - 03 ISSN/ISBN
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ISSN/ISBN
- 02 Pemasaran dan Evaluasi
 - 00 Dokumen Pemasaran
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Pemasaran
 - 01 Evaluasi
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi publikasi jurnal/buku
 - 02 Laporan Akhir
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan akhir
- WA WISUDA DAN ALUMNI
 - 00 Wisuda
 - 00 Penyelenggaraan wisuda
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan wisuda
 - 01 Biodata wisudawan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Biodata wisudawan
 - 02 Sumpah Profesi
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sumpah Profesi
 - 03 Laporan kegiatan wisuda
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan kegiatan wisuda
 - 01 Alumni
 - 00 Data/Buku induk alumni
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data/Buku induk alumni

-22-

- 01 Statistik Alumni
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Statistik Alumni
 - 02 Organisasi alumni
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Organisasi alumni
 - 03 Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring
 - 04 Tracer studi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hasil Tracer studi
- JM PENJAMINAN MUTU
- 00 Audit Mutu Akademik Internal/ Eksternal
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Audit Mutu akademik Internal/ Eksternal
 - 01 Akreditasi
 - 00 Akreditasi Nasional
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Akreditasi Nasional meliputi akreditasi perguruan tinggi, dan program studi
 - 01 Akreditasi Internasional
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Akreditasi Internasional
 - 02 Sertifikasi
 - 00 Sertifikasi Nasional
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikasi Nasional, yaitu: Lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal
 - 01 Sertifikasi Internasional
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikasi Internasional
- TP TATA PAMONG
- 00 Majelis Wali Amanat (MWA)
 - 00 Peraturan/Surat Keputusan MWA
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan MWA
 - 01 Notula/risalah rapat MWA
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat MWA

- 02 Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi
- 03 Data anggota MWA
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data anggota MWA
- 01 Senat Akademik
 - 00 Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik
 - 01 Notula/risalah rapat Senat Akademik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat Senat Akademik
 - 02 Penyusunan Kode etik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan Kode etik
 - 03 Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi
 - 04 Pemberian Gelar Doktor HC
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemberian Gelar Doktor HC
 - 05 Dewan Kehormatan Universitas (DKU)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dewan Kehormatan Universitas (DKU)
 - 06 Izin Pembukaan Fakultas, Vokasi, Departemen, Bagian, Jurusan/Prodi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Izin Pembukaan Fakultas, Vokasi, Departemen, Bagian, Jurusan/Prodi
 - 07 Data Anggota Senat Akademik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Anggota Senat Akademik
 - 08 Pertimbangan Jabatan Fungsional Dosen
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertimbangan jabatan fungsional dosen
- 02 Dewan Guru Besar (DGB)
 - 00 Peraturan/Surat Keputusan DGB
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan DGB

-24-

- 01 Rapat DGB
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat DGB
- 02 Pelaksanaan Kode Etik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Kode Etik
- 03 Pengukuhan Guru Besar
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengukuhan Guru Besar
- 04 Data Anggota Guru Besar
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Anggota Guru Besar
- 05 Apresiasi kepada Masyarakat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Apresiasi kepada Masyarakat
- 03 Komite Audit/ Dewan Audit
 - 00 Data anggota Komite Audit
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data anggota Komite Audit
 - 01 Laporan review hasil audit
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan review hasil audit
 - 02 Laporan review RKAT
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan review RKAT
- 04 Dewan Pengawas
 - 00 Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pengawas
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pengawas
 - 01 Notula/risalah rapat Dewan Pengawas
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat Dewan Pengawas
 - 02 Data Anggota Dewan Pengawas
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Anggota Dewan Pengawas

-25-

- 03 Laporan Dewan Pengawas
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Dewan Pengawas
- 05 Dewan Pertimbangan
 - 00 Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan
 - 01 Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan
 - 02 Data Anggota Dewan Pertimbangan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Anggota Dewan Pertimbangan
 - 03 Laporan Dewan Pertimbangan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Dewan Pertimbangan
- 06 Dewan Penyantun
 - 00 Peraturan/Surat Keputusan Dewan Penyantun
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan/Surat Keputusan Dewan Penyantun
 - 01 Notula/risalah rapat Dewan Penyantun
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Notula/risalah rapat Dewan Penyantun
 - 02 Data Anggota Dewan Penyantun
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data Anggota Dewan Penyantun
 - 03 Laporan Dewan Penyantun
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Dewan Penyantun

-26-

POLA KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

PR PERENCANAAN

00 Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan

00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)

01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan Rencana Strategis

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan Rencana Strategis

02 Rencana Operasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Operasional

03 Program kerja tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program kerja tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga)

01 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)

00 Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)

01 Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara

02 Penyusunan RAPB

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan RAPB

02 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

00 Pembahasan/penelaahan anggaran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembahasan/penelaahan anggaran

01 Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara

-27-

- 02 Ketetapan pagu definitif
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketetapan pagu definitif
- 03 Rencana kerja anggaran
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana kerja anggaran
- 04 Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petunjuk operasional kegiatan (POK) dan revisinya
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petunjuk operasional kegiatan (POK) dan revisinya
- 05 Ketentuan yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketentuan yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban
- 06 Target penerimaan negara bukan pajak
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Target penerimaan negara bukan pajak
- 03 Revisi Anggaran
 - 00 Rupiah Murni
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Revisi anggaran Rupiah Murni
 - 01 PNBPN
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Revisi anggaran PNBPN
 - 02 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Revisi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri / Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri (BPPTNBH)
- 04 Laporan
 - 00 Laporan Berkala
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Berkala
 - 01 Laporan insidental
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan insidental

-28-

- 02 LAKIP
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan LAKIP
- 05 Monitoring dan Evaluasi
 - 00 Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja
 - 01 Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi
- 06 Ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran
- HK HUKUM
 - 00 Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi yang bersangkutan
 - 01 Peraturan Rektor, Direktur, Ketua
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Rektor, Direktur, Ketua
 - 02 Keputusan Rektor, Direktur, Ketua
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Keputusan Rektor, Direktur, Ketua
 - 03 Peraturan dekan/direktur/ketua lembaga
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peraturan dekan/direktur/ketua lembaga
 - 04 Keputusan dekan /direktur/ketua lembaga
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Keputusan dekan /direktur/ketua lembaga
 - 05 Instruksi Rektor
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Instruksi Rektor
 - 06 Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap tingkat perguruan tinggi

- 07 MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian)
 - 00 Dalam negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian) Dalam negeri
 - 01 Luar negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian) Luar negeri
- 08 Sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan hukum
 - 00 Sosialisasi/ penyuluhan hukum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sosialisasi/ penyuluhan hukum
 - 01 Pembinaan hukum

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembinaan hukum
- 09 Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi
 - 00 Pidana

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Pidana
 - 01 Perdata

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Perdata
 - 02 Tata usaha negara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Tata usaha negara
 - 03 Ketenagakerjaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Ketenagakerjaan
 - 04 Internasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Internasional

-30-

- 05 Agama
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi Agama
- 10 Kasus atau sengketa hukum
 - 00 Pidana
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus atau sengketa hukum Pidana
 - 01 Perdata
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus atau sengketa hukum Perdata
 - 02 Tata Usaha Negara
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus atau sengketa hukum Tata Usaha Negara
 - 03 Arbitrase
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus atau sengketa hukum Arbitrase
 - 04 Sengketa Adat
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kasus atau sengketa hukum Sengketa Adat
- 11 Perizinan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perijinan non akademik sejak permohonan sampai dengan diterbitkan surat ijin
- 12 Doktrin/ Pendapat Pakar
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Doktrin/ Pendapat Pakar
- OT ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
 - 00 Organisasi
 - 00 Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga
 - 01 Struktur tugas dan fungsi organisasi
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Struktur tugas dan fungsi organisasi

-31-

- 01 Tata Laksana
 - 00 Sistem dan Prosedur Kerja
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Kerja
 - 01 Pembakuan sarana kerja
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembakuan sarana kerja
 - 02 Kajian/Analisis jabatan/Analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kajian/Analisis jabatan/Analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan
 - 03 Standar kompetensi jabatan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Standar kompetensi jabatan
- 02 Internalisasi Reformasi Birokrasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Internalisasi Reformasi Birokrasi
- KA KEARSIPAN
 - 00 Pembinaan Kearsipan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembinaan kearsipan : bimbingan teknis , bimbingan konsultasi
 - 01 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 00 Penciptaan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penciptaan Arsip Dinamis
 - 01 Penggunaan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penggunaan Arsip Dinamis
 - 02 Pemeliharaan arsip (*hard copy* dan soft copy)
 - 00 Pemberkasan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemberkasan
 - 01 Penataan arsip inaktif
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penataan arsip inaktif
 - 02 Penyimpanan (Fumigasi.dll)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyimpanan (Fumigasi.dll)

-32-

- 03 Alih media arsip
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas proses alih media arsip
- 04 Program Arsip Vital dan Arsip Terjaga
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan berkas arsip vital dan arsip terjaga
- 03 Penyusutan Arsip
 - 00 Pemindahan arsip inaktif
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemindahan arsip inaktif
 - 01 Pemusnahan arsip
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemusnahan arsip
 - 02 Penyerahan arsip statis
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyerahan arsip statis
- TU KETATAUSAHAAN
 - 00 Permintaan penggandaan dokumen/arsip
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Permintaan penggandaan dokumen/arsip
 - 01 Risalah/notula rapat
 - 00 Rapat staf
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rapat staf
 - 01 Rapat pimpinan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rapat pimpinan
- RT KERUMAHTANGGAAN
 - 00 Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/Fax, cctv,tv, kabel dan internet
 - 00 Penggunaan peralatan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/Fax, cctv,tv, kabel dan internet mulai dari permintaan hingga penggunaan
 - 01 Perjalanan dinas
 - 00 Dalam negeri
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjalanan Dalam negeri
 - 01 Luar negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjalanan Luar negeri

02 Penggunaan fasilitas kantor

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas kantor, meliputi berkas tentang permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan dan fasilitas kantor lainnya selain peralatan telekomunikasi dimulai dari pengusulan sampai penggunaan

03 Pengurusan kendaraan dinas

00 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengurusan surat-surat kendaraan dinas

01 Pemeliharaan dan perbaikan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan dan perbaikan

02 Pengurusan kehilangan kendaraan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengurusan kehilangan kendaraan

04 Permohonan pemeliharaan gedung dan taman

00 Pertamanan/*landscaping*

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pertamanan/*landscaping*

01 Perbaikan gedung

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perbaikan gedung

02 Perbaikan rumah dinas/wisma

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perbaikan rumah dinas/wisma

03 Kebersihan gedung dan taman

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kebersihan gedung dan taman

04 Sewa (Tanah, Gedung, Peralatan dan mesin)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sewa (Tanah, Gedung, Peralatan dan mesin)

05 Mekanikal dan engineering : jaringan listrik, air, gas dan komputer

00 Pemasangan jaringan/instalasi listrik, air, gas dan komputer

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemasangan jaringan/instalasi listrik, air, gas dan komputer

-34-

- 01 Pengelolaan jaringan/instalasi listrik, air, gas, dan komputer,
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan jaringan listrik, air, gas dan komputer
- 06 Keamanan dan ketertiban/Sekuriti
 - 00 Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus
 - 01 Ketertiban dan keamanan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketertiban dan keamanan
- 07 Pengelolaan parkir
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan parkir
- 08 Pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya
- 09 Konsumsi dan akomodasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konsumsi dan akomodasi
- PL PERLENGKAPAN
 - 00 Rencana kebutuhan barang/Rencana umum pengadaan
 - 00 Rencana kebutuhan unit kerja
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana kebutuhan unit kerja
 - 01 Rencana kebutuhan Perguruan Tinggi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana kebutuhan Perguruan Tinggi
 - 01 Pengadaan barang
 - 00 Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung)
 - 01 Pengadaan barang melalui lelang

-35-

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang melalui lelang

02 Pengadaan Jasa

00 Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung)

01 Pengadaan jasa melalui lelang

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan jasa melalui lelang

03 Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah

04 Pengadaan Barang dan jasa melalui bantuan/hibah/pinjaman dana asing

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah/pinjaman dana asing

05 Pengadaan barang dan jasa melalui tukar menukar

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa melalui tukar menukar

06 Pengadaan barang dan jasa melalui pinjaman

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa melalui pinjaman

07 Pengadaan barang dan jasa melalui sewa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan barang dan jasa melalui sewa

08 Penyimpanan/pegudangan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyimpanan/pegudangan

09 Penyaluran/Distribusi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyaluran/Distribusi

10 Inventarisasi barang

00 Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)

01 Kartu inventaris barang (KIB)

-36-

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kartu inventaris barang (KIB)

02 Laporan SIMAK BMN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan SIMAK BMN

11 Perbaikan/pemeliharaan

00 Pemeliharaan barang bergerak/inventaris kantor

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan barang bergerak/inventaris kantor

01 Perbaikan/pemeliharaan barang investasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perbaikan/pemeliharaan barang investasi

12 Penghapusan barang

00 Penghapusan barang bergerak/inventaris

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penghapusan barang bergerak/inventaris, diantaranya berkas usulan penghapusan, panitia penghapusan sampai dengan berita acara penghapusan barang

01 Penghapusan barang tidak bergerak/investasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penghapusan barang tidak bergerak/investasi, diantaranya berkas nota usulan penghapusan, panitia penghapusan sampai dengan berita acara penghapusan barang

13 Bukti-bukti kepemilikan aset

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bukti-bukti kepemilikan aset

14 Pemanfaatan Aset

00 Kertas kerja penghitungan tarif

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kertas kerja penghitungan tarif

01 Perjanjian kerjasama

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian kerjasama

15 Penggunaan Aset

00 Ijin Penggunaan tanah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ijin Penggunaan tanah

01 Ijin Penggunaan aset selain tanah

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ijin Penggunaan aset selain tanah

HM HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)

00 Keprotokolan

00 Upacara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, serah terima jabatan, peresmian

01 Kunjungan kedinasan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan kedinasan dalam dan luar negeri

02 Dies natalis

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dies natalis

03 Agenda kegiatan pemimpin perguruan tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Agenda kegiatan pemimpin perguruan tinggi

04 Daftar nama dan alamat pejabat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar nama dan alamat pejabat

05 Dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan (rektor, warek, dekan atau yang sejajar) dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan (rektor, warek, dekan atau yang sejajar) dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman

06 Pengumpulan pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengumpulan pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan

01 Hubungan antar Lembaga

00 Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif)

01 Hubungan antar perguruan tinggi/Sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG), praktek kerja lapangan (PKL)

-38-

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hubungan antar perguruan tinggi/Sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG), praktek kerja lapangan (PKL)

- 02 Forum kehumasan/bakohumas/perhumas
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Forum kehumasan/bakohumas/perhumas
- 03 Hubungan dengan media massa
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hubungan dengan media massa
- 04 Hubungan dengan pihak swasta/LSM/Ormas Orpol
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hubungan dengan pihak swasta/LSM/Organisasi masyarakat Organisasi Politik
- 05 Hubungan Luar Negeri
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hubungan luar negeri
- 06 *Hearing* (dengar pendapat) DPR
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *Hearing* (dengar pendapat) DPR
- 07 Bahan/materi untuk sidang kabinet
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bahan/materi untuk sidang kabinet
- 08 Penerbitan majalah, buletin, koran
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penerbitan majalah, buletin, koran
- 09 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
- 10 Pameran/sayembara, festival
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pameran/sayembara, festival
- 11 Penghargaan/ tanda kenang-kenangan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penghargaan/ tanda kenang-kenangan baik yang diterima oleh Perguruan Tinggi dan diberikan dari Perguruan Tinggi

-39-

- 12 Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf
- 02 Layanan Informasi Publik (PPID)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Informasi Publik (PPID)
- DL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 - 00 Pedoman kediklatan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pedoman kediklatan
 - 01 Kurikulum dan Silabus Diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kurikulum dan Silabus Diklat
 - 02 Jadwal diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jadwal diklat
 - 03 Modul/materi/bahan diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Modul/materi/bahan diklat
 - 04 Panduan/fasilitator
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Panduan/fasilitator
 - 05 Sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat
 - 06 Akreditasi lembaga diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Akreditasi lembaga diklat
 - 07 Sertifikasi sumberdaya manusia kediklatan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikasi sumberdaya manusia kediklatan
 - 08 Sistem informasi Diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sistem informasi Diklat
 - 09 Registrasi peserta diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Registrasi peserta diklat
 - 10 Rencana Tahunan Diklat

-40-

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana tahunan diklat

- 11 Rencana penyelenggaraan diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana penyelenggaraan diklat
- 12 Penyelenggaraan diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan diklat
- 13 Evaluasi penyelenggaraan Diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat
- 14 Registrasi alumni diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Registrasi alumni diklat
- 15 Evaluasi alumni pasca Diklat
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi alumni pasca Diklat
- 16 Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan
- 17 Seminar/lokakarya/temukarya/workshop
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Seminar /lokakarya/temukarya/workshop

TI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- 00 Organisasi TI
 - 00 Rencana Strategis TI
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Strategis TI
 - 01 Enterprise Architecture
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Enterprise Architecture
 - 02 Tata Kelola Teknologi Informasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tata Kelola Teknologi Informasi
 - 03 Perencanaan IT
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan IT
- 01 Sistem Informasi
 - 00 Perencanaan dan Analisis Sistem

-41-

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan dan Analisis Sistem

01 Perancangan Sistem

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perancangan Sistem

02 Pembangunan dan Implementasi Sistem

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pembangunan dan Implementasi Sistem

03 Pemeliharaan Sistem Informasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan Sistem Informasi

04 Dokumentasi Sistem Informasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumentasi Sistem Informasi

02 Manajemen Layanan Teknologi Informasi

00 Desain Strategi Layanan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Desain Strategi Layanan

01 Rancangan Layanan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rancangan Layanan

02 Transisi Layanan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Transisi Layanan

03 Layanan Operasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan Operasional

03 Pengelolaan Data

00 Tata Kelola Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tata Kelola Data

01 Pengelolaan Arsitektur Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Arsitektur Data

02 Pengembangan Data

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengembangan Data

03 Pengelolaan Pengoperasian Data

-42-

- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Pengoperasian Data
- 04 Pengelolaan Keamanan Data
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Keamanan Data
- 05 Pengelolaan Kualitas Data
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan Kualitas Data
- 06 Pencadangan (Backup) Data
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pencadangan (Backup) Data
- 04 Pengolahan Data
- 00 Perencanaan Pengolahan Data
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan Pengolahan Data
- 01 Persiapan pengolahan Data
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Persiapan pengolahan Data
- 02 Pelaksanaan Pengolahan Data
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengolahan Data
- 03 Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Data
- 05 Jaringan dan Komunikasi
- 00 Analisis Jaringan Komputer
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Analisis Jaringan Komputer
- 01 Perancangan Jaringan Komputer
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perancangan Jaringan Komputer
- 02 Implementasi Jaringan Komputer
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Implementasi Jaringan Komputer
- 03 Pemeliharaan Jaringan
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan Jaringan

-43-

- 04 Keamanan Jaringan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Keamanan Jaringan
- 06 Manajemen Fasilitas TI
 - 00 Perencanaan fasilitas TI
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan fasilitas TI
 - 01 Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI
 - 02 Pemeliharaan fasilitas TI
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemeliharaan fasilitas TI
- 07 Audit TI
 - 00 Perencanaan Audit TI
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perencanaan Audit TI
 - 01 Tinjauan Awal Audit TI
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tinjauan Awal Audit TI
 - 02 Analisis data Audit TI
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Analisis data Audit TI
 - 03 Evaluasi Temuan
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Evaluasi Temuan
- 08 Manajemen Risiko TI
 - 00 Identifikasi risiko TI
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Identifikasi risiko TI
 - 01 Penilaian risiko TI
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penilaian risiko TI
 - 02 Pengendalian Risiko TI
 - Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengendalian Risiko TI
 - 03 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI

-44-

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI

09 Pemetaan TI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemetaan TI

PA PENGAWASAN

00 Rencana Pengawasan

00 Rencana Strategis Pengawasan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana Strategis Pengawasan

01 Rencana kinerja tahunan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rencana kinerja tahunan

02 Penetapan kinerja tahunan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan evaluasi penetapan kinerja tahunan

03 Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi

04 Rakor pengawasan tingkat nasional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rakor pengawasan tingkat nasional

01 Program Kerja Pengawasan

00 Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan

01 Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional

02 Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan

03 Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi

-45-

- 04 Program AKIP perguruan tinggi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Program AKIP perguruan tinggi
- 02 Pelaksanaan Pengawasan
 - 00 Pengawasan Internal
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengawasan Internal
 - 01 Pengawasan Eksternal
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengawasan Eksternal
- KP KEPEGAWAIAN
 - 00 Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian
 - 00 Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik di bidang manajemen kepegawaian
 - 01 Penyusunan kebijakan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian
 - 02 Perumusan kebijakan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian
 - 03 Pemberian masukan dan dukungan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan pemberian masukan dan dukungan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian
 - 04 Penetapan kebijakan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penetapan kebijakan di bidang manajemen kepegawaian
 - 05 *Memorandum of Understanding*
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan *Memorandum of Understanding*
 - 01 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Apratur Sipil Negara
 - 00 Perencanaan Kebutuhan ASN

-46-

- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
Perencanaan Kebutuhan ASN
- 01 Perencanaan Pertimbangan Formasi
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
Perencanaan Pertimbangan Formasi
- 02 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Penetapan
Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
- 03 Standarisasi Jabatan
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan
Standarisasi Jabatan
- 02 Formasi Pegawai
- 00 Usulan dari Unit Kerja
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usulan dari Unit
Kerja
- 01 Usulan permintaan formasi
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usulan permintaan
formasi
- 02 Persetujuan formasi dari Menpan
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Persetujuan formasi
dari Menpan
- 03 Penetapan formasi di Perguruan Tinggi
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan formasi
di perguruan tinggi
- 04 Penetapan formasi khusus
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan formasi
khusus
- 03 Pengadaan ASN PNS
- 00 Proses Penerimaan Pegawai
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses Penerimaan
Pegawai
- 01 Berkas lamaran yang tidak diterima
- Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran
yang diterima
- 02 Berkas lamaran yang tidak diterima

-47-

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang tidak diterima

03 Usul dan kelengkapan penetapan NIP

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nota usul dan kelengkapan penetapan NIP

04 Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Nota usul dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun

05 SK CPNS/PNS Kolektif

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SK CPNS/PNS Kolektif

06 Usul dan kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN)

Dokumen-dokumen yang berkaitan Usul dan kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN)

07 Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan open bidding (seleksi terbuka jabatan)

04 Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/ Pegawai Kontrak

00 Proses Penerimaan Pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses Penerimaan Pegawai ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/Pegawai Kontrak)

01 Pengangkatan ASN P3K

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengangkatan ASN P3K

02 Berkas lamaran yang diterima

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang diterima

03 Berkas lamaran yang tidak diterima

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang tidak diterima

05 Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas

00 Proses Penerimaan Pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Proses Penerimaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas

- 01 Pengangkatan Pegawai Honorer/ harian lepas
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai honorer/ harian lepas
- 02 Berkas lamaran yang diterima
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang diterima
- 03 Berkas lamaran yang tidak diterima
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas lamaran yang tidak diterima
- 06 Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai
 - 00 Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas
 - 01 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
 - 02 Pakta Integritas
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pakta Integritas (perjanjian kerja)
 - 03 Penetapan Angka Kredit (PAK)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penetapan Angka Kredit (PAK)
 - 04 Sertifikasi Pegawai
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Sertifikasi Pegawai
 - 05 Kode Etik
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kode Etik
 - 06 Disiplin pegawai
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Disiplin pegawai
 - 07 Hukuman disiplin
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hukuman disiplin
 - 08 Penghargaan dan tanda jasa

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penghargaan dan tanda jasa seperti Satyalencana Karyasatya, Pegawai Berprestasi (Dosen, Arsiparis, Pustakawan, Peneliti, dll)

07 Sistem Informasi Kepegawaian

00 Pengolahan data dan informasi kepegawaian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pengolahan data dan informasi kepegawaian

01 Pengembangan sistem informasi kepegawaian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan sistem informasi kepegawaian

02 Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian

08 Pengawasan dan pengendalian

00 Formasi, pengadaan dan pasca diklat

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Formasi, pengadaan dan pasca diklat

01 Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan

02 Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja

03 Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN

04 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian

05 Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer

09 Mutasi Pegawai

-50-

- 00 Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit
- 01 Mutasi keluarga

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Mutasi keluarga
- 02 Usul kenaikan pangkat Golongan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usul kenaikan pangkat Golongan
- 03 Kenaikan Gaji berkala

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kenaikan gaji berkala
- 04 Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional
- 05 Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai
- 06 Peninjauan masa kerja

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Peninjauan masa kerja
- 07 Berkas BAPERJAKAT

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)
- 10 Administrasi Pegawai
 - 00 Cuti besar

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Cuti besar
 - 01 Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan
 - 02 Cuti alasan penting

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Cuti alasan penting

-51-

- 03 Cuti di luar Tanggungan Negara (CTLN)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Cuti di luar Tanggungan Negara (CTLN)
- 04 Dokumentasi identitas pegawai :
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu
- 05 Daftar Urut kepangkatan (DUK)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan DUK
- 11 Kesejahteraan Pegawai
 - 00 Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai
 - 01 Asuransi Pegawai/BPJS atau sejenisnya
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Asuransi Pegawai/BPJS atau sejenisnya
 - 02 Tabungan Perumahan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tabungan Perumahan
 - 03 Bantuan Sosial
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Bantuan Sosial
 - 04 Rekreasi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rekreasi
- 12 Pemberhentian pegawai
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemberhentian pegawai
- 13 Perselisihan/Sengketa kepegawaian
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perselisihan/Sengketa kepegawaian
- 14 Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas
- 15 Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan berkas perseorangan pegawai ASN PNS

-52-

- 16 Berkas perseorangan ASN P3K
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Berkas perseorangan ASN P3K
 - 17 Berkas Perseorangan Pegawai Honorer
Dokumen-Dokumen yang berkaitan dengan Berkas Perseorangan Pegawai Honorer
 - 18 Penilaian Kompetensi
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penilaian kompetensi
- KU KEUANGAN
- 00 Pelaksanaan Anggaran
 - 00 Pendapatan
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pendapatan
 - 01 Belanja
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Belanja
 - 01 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri
 - 00 Permohonan pinjaman luar negeri (*blue book*)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Permohonan pinjaman luar negeri (*blue book*)
 - 01 Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (*green book*)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (*green book*)
 - 02 Dokumen *memorandum of understanding* (MoU) dan dokumen sejenisnya
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya
 - 03 Dokumen *loan agreement* pinjaman hibah luar negeri (PHLN)
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN)
 - 04 Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri
Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri
 - 05 Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN)

06 Otorisasi penarikan dana (*payment advice*)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Otorisasi penarikan dana (*payment advice*)

07 Realisasi pencairan dana bantuan/pinjaman/hibah luar negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Realisasi pencairan dana bantuan/pinjaman/hibah luar negeri

08 *Replenishment* (permintaan penarikan dana dari negara donor)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *Replenishment* (permintaan penarikan dana dari negara donor)

09 *Staff Appraisal Report*

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *Staff Appraisal Report*

10 Report /laporan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Report /laporan

11 Laporan hutang negara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan hutang negara

12 Ketentuan/kebijakan yang menyangkut hibah luar negeri

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Ketentuan/kebijakan yang menyangkut hibah luar negeri

02 Pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

00 Penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan surat Penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

03 Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

00 Manual Implementasi sistem akuntansi Instansi (SAI)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Implementasi sistem akuntansi Instansi (SAI)

01 Kebijakan Akuntansi

-54-

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi

02 Arsip data komputer dan Berita acara rekonsiliasi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Arsip data komputer dan Berita acara rekonsiliasi

03 Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PK), penerimaan (PN), dokumen sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS), surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PK), penerimaan (PN), dokumen sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS), surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)

04 Laporan realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran

04 Pertanggungjawaban Keuangan

00 Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI

01 Dokumen penyelesaian kerugian negara

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Dokumen penyelesaian kerugian negara

BU BADAN USAHA

00 Legalitas

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Legalitas Badan Usaha

01 Surat Keputusan Direksi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan, penetapan SK Direksi

02 Rencana Pendapatan dan Belanja

-55-

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja

03 Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham)

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham)

04 Rapat Komisaris

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rapat Komisaris

05 Rapat Manajer Unit dan Direksi

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Rapat Manajer Unit dan Direksi

06 Data Konsumen

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Data konsumen

07 Laporan Perusahaan

Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Laporan Perusahaan

B. JADWAL RETENSI ARSIP

Jadwal retensi arsip di PTN disusun berdasarkan urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Penerapan, Perekayasaan serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan urusan Pendidikan dan Kebudayaan, urusan Kearsipan, Keuangan, Kepegawaian, Non Keuangan dan Non Kepegawaian, yang dikelompokkan dalam fungsi substantif dan fasilitatif sebagaimana berikut:

PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

NO.	CONTOH JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	PENERIMAAN MAHASISWA			
I	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)			
a	Daya tampung mahasiswa - Usulan daya tampung dari Fakultas, Program Studi, Jurusan - Notula Rapat Daya tampung - Penetapan Daya Tampung	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali rekapitulasi daya tampung Permanen
b	Petunjuk PMB - Juklak dan Juknis PME	1 tahun setelah diperbaharui	1 tahun	Musnah
c	Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) - Usulan Nama-nama dalam kepanitia PMB - Pelaksanaan tugas dan kegiatan PMB - Operasional Rapat panitia PMB dan notula rapat - Pelaksanaan kegiatan PMB - Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Khusus - Pengiriman informasi PMB ke SMU - SK Penetapan Panitia PMB	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Panitia Permanen
d	Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa - Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa - Isian Formulir - Buku Panduan pengisian (jadwal penerimaan)	1 tahun	1 tahun	Musnah, kecuali yang diterima masuk berkas perseorangan mahasiswa

1	2	3	4	5
e	Ujian Masuk Perguruan Tinggi - Berkas seleksi penerimaan mahasiswa baru (Kartu peserta, Daftar hadir peserta, daftar hadir pengawas, berita acara, dll)	2 tahun setelah penerimaan mahasiswa baru	3 tahun	Musnah
f	Naskah Soal Ujian - Naskah soal nasional	2 Tahun setelah pelaksanaan test	3 Tahun	Musnah, kecuali master soal Permanen
g	Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi			
1)	Lembar Jawaban Ujian	2 tahun setelah penerimaan mahasiswa baru	3 tahun	Musnah
2)	Rekap Nilai Ujian	2 tahun setelah penerimaan mahasiswa baru	3 tahun	Musnah
3)	Berita Acara Pelaksanaan Ujian	2 tahun setelah penerimaan mahasiswa baru	3 tahun	Musnah
4)	Pendaftaran Calon Mahasiswa	2 tahun setelah penerimaan mahasiswa baru	3 tahun	Musnah

-59-

1	2	3	4	5
	5) Ujian Seleksi -Ujian Tes masuk -Hasil tes buta warna -Kartu peserta ujian masuk -Daftar hadir peserta ujian -Hasil Psikotes -Nilai Uji Keterampilan -Hasil/nilai Wawancara -Hasil Tes bebas narkoba -Pakta integritas -Tata tertib	2 tahun setelah penerimaan mahasiswa baru	3 tahun	Musnah
	6) TPA/ TES PSIKOTES	2 Tahun setelah pelaksanaan test	3 Tahun	Permanen
	7) Naskah soal lokal	2 Tahun setelah pelaksanaan test	3 Tahun	Musnah, kecuali master Permanen
	h Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB - Notula rapat Penetapan Mahasiswa yang diterima - SK Penetapan Mahasiswa yang diterima - Pengumuman mahasiswa yang diterima	2 tahun setelah penerimaan mahasiswa baru	3 tahun	Musnah, kecuali sk penetapan Permanen
	i Mahasiswa Asing - Surat izin mahasiswa asing -Visa Tinggal -Visa Belajar - Rekomendasi mahasiswa asing -Permohonan rekomendasi mahasiswa asing -Jawaban atas permohonan rekomendasi mahasiswa asing - Registrasi mahasiswa asing -Pendaftaran mahasiswa asing -Surat menyurat dalam rangka pendaftaran mahasiswa asing	1 tahun	4 tahun	Permanen

-60-

1	2	3	4	5
	- -Kartu induk mahasiswa -Kartu mahasiswa -KRS -KHS -Kartu Daftar Ulang -Kartu tanda registrasi administrasi mahasiswa -Kartu peserta kuliah/praktikum -Kartu tanda anggota perpustakaan/cyber -Surat keterangan izin - Jaminan Sponsor			
	j Mahasiswa utusan daerah - Rekomendasi - Biodata - Surat Jawaban - MoU Perguruan tinggi dengan Lembaga lain	1 tahun setelah mahasiswa lulus	1 tahun	Permanen
	k Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD) - Rekomendasi - Biodata - Surat Jawaban - MoU Perguruan tinggi dengan Lembaga lain	1 tahun setelah mahasiswa lulus	1 tahun	Permanen
	l Laporan PMB	2 tahun	3 tahun	Permanen
	m Data Peminat/Jumlah Peminat/Pilihan Peminat	2 tahun	3 tahun	Permanen
	2 Registrasi mahasiswa			
	a Registrasi Mahasiswa Baru - Biodata Mahasiswa baru - Pembuatan Kartu Mahasiswa - Registrasi pendaftaran mahasiswa - Bukti pembayaran - Bukti diterima sebagai mahasiswa - SK Penetapan Mahasiswa dan Nomor Induk Mahasiswa	1 tahun setelah mahasiswa lulus	2 tahun	Musnah, kecuali SK Penetapan Mahasiswa dan Nomor Induk Mahasiswa masuk berkas perseorangan mahasiswa

-61-

1	2		3	4	5
	b	Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama - Bukti pembayaran - Persetujuan Dosen Wali/ Pembimbing Akademik - KHS - KRS	1 tahun	1 tahun	Musnah, kecuali KHS dan KRS masuk berkas perseorangan mahasiswa
	c	Ketetapan Biaya Perkuliahan - Surat Usulan Perhitungan BKT atau UKT berikut lampirannya (Tabel Perhitungan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagai usulan)	1 tahun setelah mahasiswa lulus	1 tahun	Musnah
	d	Penentuan Biaya Perkuliahan - Penentuan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) atau UKT (Uang Kuliah Tunggal)	1 tahun setelah mahasiswa lulus	1 tahun	Musnah
	e	Penyesuaian Biaya Perkuliahan - Usulan dari mahasiswa untuk penyesuaian UKT - Penetapan Penyesuaian UKT - Berita Acara mengenai Konfirmasi Penyesuaian UKT	1 tahun setelah mahasiswa lulus	1 tahun	Musnah
	f	Laporan Pelaksanaan Registrasi - Daftar Rekapitulasi Mahasiswa yang melakukan registrasi - Slip Pembayaran Registrasi	1 tahun setelah mahasiswa lulus	2 tahun	Musnah, kecuali Daftar Rekapitulasi Mahasiswa Permanen
	3	Orientasi Mahasiswa Baru			
	a	Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru - Draf panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru - Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	b	Sosialisasi Peraturan Akademik - Surat Undangan - Notula - Laporan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

-62-

1	2		3	4	5
		- Daftar hadir - Materi sosialisasi			
	c	Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru - Proposal - Kepanitiaan - Presensi Orientasi Mahasiswa - Materi Orientasi Mahasiswa - Salinan sertifikat/piagam/surat keterangan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah, kecuali salinan sertifikat/piagam/surat keterangan masuk berkas perseorangan mahasiswa
	d	Evaluasi dan Laporan orientasi - Evaluasi - Notula - Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali laporan Permanen
	II KURIKULUM				
I	Penyusunan Kurikulum				
	a	Pedoman kurikulum - Usulan penyusunan kurikulum fakultas/ program studi - Notula Rapat - Exit Survey - Master Pedoman Kurikulum - Deskripsi matakuliah	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	b	Perubahan/penyempurnaan kurikulum/pengembangan kurikulum - Surat edaran - Tim penyusun re-Kurikulum, Notula rapat - Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) - Hasil Focus Group Discussion - Kurikulum	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	c	Penetapan kurikulum	1 tahun	4 tahun	Permanen

-63-

1	2	3	4	5
	- Usulan - Draf - Master SK Kurikulum			
2	Pelaksanaan Kurikulum			
a	Pedoman/Panduan Akademik - Draf Pedoman/Panduan Akademik - Pedoman/Panduan Akademik Final	1 tahun	4 tahun	Permanen
b	Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP) - Analysis Instructional - Dokumen Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)	selama masih berlaku	2 tahun	Permanen
c	Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/ Silabus - Satuan acara perkuliahan - Satuan acara perkuliahan berisi jadwal dan materi tiap matakuliah - Deskripsi Mata kuliah - Modul-modul tiap matakuliah - Sajian matakuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB)	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
d	Satuan Acara Praktikum - Panduan dan Pedoman Praktik/Praktikum - Isian Penilaian oleh Instruktur dan Penilai Praktek Satuan acara praktikum pada tiap matakuliah praktikum	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
e	Penyusunan Bahan ajar/modul perkuliahan/praktikum - Bahan ajar/ bahan penunjang/modul pendidikan/modul perkuliahan/praktikum	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
f	Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran - Desain instruksional - manual alat peraga - model pembelajaran	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen

-64-

1	2	3	4	5
III	TENAGA PENDIDIK			
1	Kebutuhan tenaga pengajar/ pendidik - Pengajuan kebutuhan tutor - Hasil seleksi administrasi - Tutor yang diterima	2 tahun	3 tahun	Musnah
2	Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik - Surat Keputusan	2 tahun	3 tahun	Permanen
3	Kepakaran - Buku Kepakaran - Surat Keputusan tentang Kepakaran	2 tahun	3 tahun	Permanen
4	Rasio Dosen dengan Mahasiswa - Data Statistik Mahasiswa - Identitas dosen dan ampuan matakuliah	2 tahun	3 tahun	Permanen
5	Daftar hadir mengajar - Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)/ Tutor	1 tahun setelah penetapan angka kredit	4 tahun	Musnah
6	Pembimbing Akademik - Surat Penunjukan Pembimbing Akademik dari Program Studi - SK Master/minuta Pembimbing Akademik	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali SK Pembimbing Akademik Permanen
7	Pembimbing/ Penguji Tugas Akhir - Surat Tugas Pembimbing/Penguji - SK Pembimbing/Penguji	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali SK Pembimbing/ penguji tugas akhir Permanen
IV	KEMAHASISWAAN			
1	Status Mahasiswa			
a	Surat Keterangan Aktif Kuliah - Surat Keterangan - Bukti registrasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
b	Cuti mahasiswa/dispensasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-65-

1	2	3	4	5
	- Surat permohonan cuti kuliah - SK cuti kuliah mahasiswa - Surat penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa (masa cuti habis wajib registrasi) ngak ada penetapan pengaktifan			
c	Perpanjangan masa studi - Surat Usulan - Surat Persetujuan - KRS	2 Tahun	-	Masuk berkas perseorangan mahasiswa
d	Evaluasi Masa Studi - Surat Pemberitahuan - Transkrip Nilai Sementara	2 Tahun	-	Masuk berkas perseorangan mahasiswa
e	Mutasi mahasiswa/pindah - Surat Permohonan ybs - Surat Pengantar dari Prodi - Surat Pengantar dari Fakultas - Surat Pengantar dari Universitas - Surat Jawaban	2 Tahun	-	Masuk berkas perseorangan mahasiswa
f	Skorsing - Surat peringatan - Usulan skorsing - Penetapan skorsing	2 Tahun	-	Masuk berkas perseorangan mahasiswa
g	Pengunduran diri - Usulan pengunduran diri - Penetapan pengunduran diri	2 Tahun	-	Musnah, kecuali penetapan pengunduran diri masuk berkas perseorangan mahasiswa
h	Drop Out - Usulan Program Studi	2 tahun	-	Musnah, kecuali SK Penetapan DO

-66-

1	2	3	4	5
	- Usulan Fakultas - Surat peringatan - SK Penetapan DO			masuk berkas perseorangan mahasiswa
i	Mahasiswa meninggal dunia - Surat Keterangan Kematian	2 Tahun	-	Masuk berkas perseorangan mahasiswa
2	Kesejahteraan Mahasiswa			
a	Beasiswa - Persyaratan Beasiswa - Usulan pengajuan - Notula rapat hasil penerima beasiswa - Penetapan penerima beasiswa - Laporan kemajuan penerima beasiswa - Laporan Pengelolaan beasiswa	1 tahun setelah beasiswa selesai	4 tahun	Musnah, kecuali dana asing Permanen
b	Keringanan/Penundaan biaya pendidikan - Surat permohonan - Surat Pengantar Prodi - Surat Pengantar Fakultas - Surat Jawaban	1 tahun setelah mahasiswa lulus	4 tahun	Musnah
c	Layanan Kesehatan Mahasiswa - Registrasi pasien - Kartu pasien - Rujukan - Klaim asuransi - Laporan dan monitoring layanan kesehatan - Rekam Medis dan bimbingan konseling	2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat	4 tahun	Musnah
d	Penyuluhan kesehatan			

-67-

1	2	3	4	5
	- Laporan Penyuluhan Kesehatan	1 tahun	1 tahun	Musnah
3	Asrama			
a	Peraturan Asrama - Draf Peraturan Asrama - Peraturan Asrama Final	1 tahun setelah diperbaharui	1 tahun	Permanen
b	Seleksi dan Penetapan - Daftar Nama Pendaftar - Hasil Seleksi	1 tahun	1 tahun	Musnah
c	Berkas Perseorangan Penghuni Asrama - Surat pernyataan/perjanjian - Bukti Pembayaran	1 tahun setelah tidak menjadi penghuni asrama	1 tahun	Musnah
d	Kegiatan Penghuni Asrama - Surat Usulan Izin Kegiatan - Surat Jawaban Izin Kegiatan	1 tahun setelah tidak menjadi penghuni asrama	1 tahun	Musnah
4	Penggunaan fasilitas mahasiswa (gelanggang, lapangan, sanggar, dll) - Surat permohonan - Surat persetujuan/penolakan - Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah
5	Organisasi Mahasiswa			
a	Pembentukan organisasi - Usulan Pembentukan Organisasi - Notula Rapat - Surat Keputusan - Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)	2 tahun	3 tahun	Permanen

-68-

1	2	3	4	5
	b Pengangkatan / Pemberhentian pengurus - Usulan Pengangkatan/ Pemberhentian Pengurus - Surat Keputusan Pengurus	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c Program kerja/kegiatan - Proposal Kegiatan - Surat Ajuan - Surat Jawaban atas usulan program kerja/kegiatan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d Laporan pelaksanaan kegiatan - Laporan kegiatan	2 tahun	3 tahun	Permanen
6	Pembinaan Mahasiswa			
a	Kegiatan rutin (UKM) - Proposal Kegiatan - Surat Permohonan - Surat Izin - Laporan kegiatan mahasiswa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b	Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) - Proposal Kegiatan - Surat Permohonan - Surat Izin - Laporan kegiatan mahasiswa	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
c	Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll) - Surat Rekomendasi - Hasil Psikotes	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d	Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, nasional, internasional			

-69-

1	2	3	4	5
	- Laporan kegiatan lomba	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali sertifikat masuk berkas perseorangan mahasiswa
e	Prestasi Mahasiswa - Usulan Nama Mahasiswa - Seleksi mahasiswa berprestasi - Pengumuman mahasiswa berprestasi - Surat-menyurat berkenaan dengan mahasiswa berprestasi - Sertifikat bagi mahasiswa berprestasi	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali sertifikat masuk berkas perseorangan mahasiswa
f	Inventori mahasiswa	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
7	Organisasi himpunan orang tua mahasiswa			
a	Pembentukan organisasi - Draf Organisasi Himpunan Orang Tua - Peraturan Organisasi Himpunan Orang Tua Final	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b	Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus - Draf SK Pengangkatan/Pemberhentian pengurus - SK Pengangkatan/Pemberhentian pengurus	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, Kecuali SK Pengangkatan Pengurus Permanen
c	Kegiatan organisasi - Laporan perkegiatan organisasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
d	Laporan - Laporan berkala	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8	Berkas Perseorangan Mahasiswa - Kartu mahasiswa - Kartu Rencana Studi (KRS)	1 tahun setelah lulus dan terpenuhi kewajibannya	4 tahun	Permanen

-70-

1	2	3	4	5
	- Kartu hasil studi (KHS) - Kartu Tanda registrasi / administrasi mahasiswa (KTRM) - Surat Keterangan izin/tugas - Sertifikat/ piagam/ surat keterangan orientasi mahasiswa baru - Berkas pendaftaran mahasiswa - Nilai tugas akhir - Piagam/ Sertifikasi KKN/ KKM - Sertifikat/ penghargaan bagi mahasiswa berprestasi - Salinan Ijazah - Salinan Transkrip Nilai - Biodata Mahasiswa			
V	PERKULIAHAN			
1	Penyusunan Kalender Akademik - Surat Undangan Rapat - SK Tim - Draft Kalender Akademik - Notula Rapat - Penetapan Kalender Akademik	2 tahun	3 tahun	Musnah, Kecuali Penetapan Kalender Akademik Permanen
2	Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum			
a	Penyusunan Jadwal Perkuliahan - Surat Undangan Rapat - Draft Jadwal Perkuliahan - Notula Rapat - Jadwal Perkuliahan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
b	Daftar mahasiswa peserta mata kuliah	1 tahun setelah mahasiswa lulus	2 tahun	Musnah
c	Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Kuliah Umum/Kuliah Perdana - Daftar hadir	1 tahun	1 Tahun	

-71-

1	2	3	4	5
	- Materi perkuliahan - SK Penetapan Dosen Tamu/Kuliah Umum			Musnah, kecuali materi perkuliahan Permanen
d	Pelaksanaan Perkuliahan - Daftar hadir dan Laporan Kehadiran - Materi/tutorial	4 tahun	1 Tahun	Musnah
e	Pelaksanaan Praktikum - Daftar hadir dan Laporan Kehadiran - Materi - Surat peminjaman dan penggunaan laboratorium - SOP Praktikum - Daftar Inventaris Alat dan Bahan Praktikum - Laporan Praktikum	4 tahun	1 Tahun	Musnah, Kecuali SOP Permanen
f	Kuliah lintas prodi/lintas fakultas - Usulan mata kuliah - GBPP - Laporan kuliah lintas prodi/lintas fakultas	1 tahun	1 Tahun	Musnah
g	Magang/PKL - Permohonan magang/PKL - Persetujuan/penolakan - Jadwal pelaksanaan magang/PKL - Presensi - Laporan - Surat keterangan melakukan magang/Sertifikat PKL	2 tahun	3 tahun	Musnah
h	Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum - Dokumen Evaluasi - Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

-72-

1	2	3	4	5
3	Kegiatan Multiprodi/Multifakultas/Student exchange/Double Degree/Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree			
a	Perencanaan Kegiatan - Dokumen penawaran - Usulan/pendaftaran - Proses seleksi - Penetapan hasil seleksi	2 tahun	3 tahun	Musnah
b	Kontrak kerja sama - Usulan draf kontrak kerja sama - Kontrak	1 tahun setelah perjanjian berakhir	1 tahun	Permanen
c	Berita acara serah terima	1 tahun setelah perjanjian berakhir	1 tahun	Permanen
d	Ketetapan Pendanaan - Draf SK Pendanaan - SK Pendanaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
4	Ujian			
a	Panitia penyelenggara ujian - SK tim panitia penyelenggaraa ujian - Undangan rapat - Notula rapat	1 tahun	2 tahun	Musnah
b	Tata tertib ujian - SOP tata tertib ujian - Juklak - Juknis	1 tahun setelah diperbaharui	1 tahun	Musnah

-73-

1	2		3	4	5
	c	Pengumuman dan jadwal ujian - Pengumuman ujian - Jadwal ujian	1 tahun	1 tahun	Musnah
	d	Naskah soal ujian - UTS - UAS	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e	Pengawas ujian - SK tim pengawas - Daftar hadir pengawas - Jadwal pengawas	1 tahun	1 tahun	Musnah
	f	Berita Acara ujian dan daftar hadir ujian - Berita acara - Daftar hadir peserta	1 tahun setelah mahasiswa lulus	4 tahun	Musnah
	g	Nilai hasil ujian - Rekapitulasi Nilai hasil ujian	1 tahun setelah mahasiswa lulus	4 tahun	Musnah
	h	Kartu Hasil Studi (KHS) - Rekapitulasi Kartu Hasil Studi	1 tahun setelah mahasiswa lulus	4 tahun	masuk berkas perseorangan
	i	Laporan Tugas Akhir - Tugas akhir - Skripsi - Tesis - Disertasi	1 tahun	4 tahun	Permanen
5	Yudisium				
	a	Administrasi Yudisium - Lembaran yudisium - Daftar transkrip nilai sementara - Notula rapat yudisium	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali notula Permanen

-74-

1	2		3	4	5
	b	Penetapan Kelulusan - SK Kelulusan	2 tahun	3 tahun	Permanen
6	Ijazah dan transkrip				
	a	Surat Keterangan Lulus	sampai ijazah diterima	2 tahun	Musnah
	b	Nomor Induk registrasi lulusan - Buku Registrasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c	Salinan ijazah dan transkrip nilai - Tanda terima - Salinan Ijazah - Salinan Transkrip Nilai	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d	Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai - Tanda terima - Surat Laporan Kepolisian	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e	Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai - Tanda terima - Surat Keterangan Penganti Ijazah	2 tahun	3 tahun	Permanen
	f	Surat keterangan pendamping ijazah - Tanda terima - Surat keterangan pendamping ijazah untuk profesi	2 tahun	3 tahun	Permanen
VI	DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK				
1	Data mahasiswa				
	a	Data prestasi mahasiswa	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
	b	Data inventori mahasiswa	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen

-75-

1	2		3	4	5
	c	Data nilai akhir/transkrip	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
	d	Data mahasiswa asing	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
2	Statistik perguruan tinggi				
	a	Data Statistik Perguruan Tinggi	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
3	Bursa Pendidikan				
	-	Lowongan Kerja	1 tahun	1 tahun	Musnah
4	Data Akademik		1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
	-	Data kepakaran			
	-	Data lulusan mahasiswa/ data lulusan mahasiswa terbaik			
	-	Data mahasiswa program beasiswa			
	-	Data alumni			
5	Informasi akademik				
	a	Profil Lembaga	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
	b	Publikasi dan informasi			
	-	Materi Publikasi dan Informasi	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
	c	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)			
	-	Data Pendidikan Tinggi	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
	d	Buku Wisuda	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen

-76-

1	2		3	4	5
	e	Buku Dies Natalis	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
	f	Orasi ilmiah	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master materi orasi Permanen
	-	Daftar hadir			
	-	Materi Orasi Ilmiah			
	-	SK Panitia Orasi Ilmiah			
6	Pengembangan Akademik				
	a	Pembentukan Tim			
	-	Usulan Pengembangan Akademik	1 tahun setelah perubahan	4 Tahun	Musnah
	-	SK Tim Pengembangan Akademik			
	b	Proposal dan Studi Kelayakan			
	-	Proposal dan Hasil Studi Kelayakan Pengembangan Akademik	1 tahun setelah perubahan	4 Tahun	Musnah
	c	Naskah Akademik	1 tahun setelah perubahan	4 Tahun	Musnah, kecuali naskah akademik yang diterima Permanen
	-	Usulan Naskah Akademik			
	-	Naskah Akademik yang diterima			
	d	Penetapan			
	1)	Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi	1 tahun setelah ditetapkan	4 Tahun	Permanen
	e	Laporan dan Evaluasi			
	-	Laporan dan Evaluasi Pengembangan Akademik	1 tahun	4 Tahun	Permanen
VII	PENUNJANG AKADEMIK				
1	Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/ Kebun, Lahan Percobaan /Rumah Produksi/ Pusat Kajian				
	a	Layanan Praktikum	1 tahun	1 Tahun	Musnah
	-	Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium			
	-	Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek			

-77-

1	2		3	4	5
	b	Layanan Pengujian - Surat Permohonan Izin penggunaan Layanan Pengujian - Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek - Hasil Pengujian	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c	Layanan Kalibrasi - Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium - Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek - Hasil Kalibrasi	2 tahun setelah masa berlaku habis	3 tahun	Musnah
	d	Layanan Penelitian - Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium - Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek - Hasil Penelitian	2 tahun	3 tahun	Musnah
	e	Layanan Bahasa - Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium - Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek - Data Peserta Kursus - Hasil Pengujian Bahasa	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	2 Perpustakaan				
	a	Pengembangan koleksi			
		1) Daftar pengembangan koleksi dari internal perguruan tinggi: - Daftar buku terseleksi - Daftar buku dalam pemesanan - Daftar buku dalam permintaan	2 tahun	3 tahun	Permanen
		2) Pembelian buku/jurnal/majalah oleh perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		3) Program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4) Hibah/ hadiah/ sumbangan buku untuk perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah

-78-

1	2		3	4	5
		5) Penyiangan bahan perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali berita acara Permanen
	b	Pengolahan bahan perpustakaan - Panduan Katalogisasi - Panduan Klasifikasi	2 tahun setelah diperbaharui	3 tahun	Musnah
	c	Pelayanan perpustakaan			
		1) Kebijakan Layanan Perpustakaan	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
		2) Layanan perpustakaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
		3) Surat menyurat usulan, saran yang berkaitan dengan layanan bagi peminjaman	2 tahun	3 tahun	Musnah
		4) Layanan dengan fasilitas komputerisasi (layanan elektronik)	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d	Preservasi bahan perpustakaan			
		1) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit	2 tahun	3 tahun	Musnah
		2) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	1 tahun	1 tahun	Musnah
	e	Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka - Surat Undangan - Daftar Hadir - Materi/Bahan - Laporan	1 tahun	4 tahun	Musnah
	f	Keanggotaan Perpustakaan			
		1) Kartu Anggota	1 tahun setelah diperbaharui	1 tahun	Musnah

-79-

1	2		3	4	5
	2)	Daftar Anggota	selama perpustakaan berdiri	-	Musnah
3	Arsip Perguruan tinggi				
	a	Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip - Pengkajian dan pengusulan kebijakan - Penyiapan kebijakan - Perumusan kebijakan - Penetapan Norma,Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b	Pembinaan kearsipan			
	1)	Akreditasi Lembaga Kearsipan			
		a) Proses Akreditasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b) Berkas Penetapan Akreditasi	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	2)	Sertifikasi Arsiparis			
		a) Proses Sertifikasi	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b) Berkas Penetapan Sertifikasi	2 Tahun	3 tahun	Permanen
		c) Data base sertifikasi arsiparis	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	3)	Bina Arsiparis a) Pengembangan profesi arsiparis - Formasi jabatan arsiparis - Standar kompetensi arsiparis	1 tahun	1 tahun	Permanen
		b) Bimbingan konsultasi arsiparis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c) Penilaian arsiparis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah

-80-

1	2		3	4	5
		d) Pemilihan arsiparis teladan - Penyelenggaraan arsiparis teladan - Penetapan arsiparis teladan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali penetapan arsiparis teladan Permanen
		c) Database arsiparis	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4)	Bimbingan dan Konsultasi a) Penetapan Sistim b) Penggunaan Sarana dan Prasarana c) Unit Kearsipan d) Sumber Daya Manusia	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	5)	Supervisi dan Evaluasi			
		a) Perencanaan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
		b) Pelaksanaan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
		c) Laporan hasil supervisi dan evaluasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	6)	Database Bimbingan Konsultasi dan Supervisi	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	7)	Fasilitasi Kearsipan			
		a) SDM Kearsipan	1 Tahun	1 tahun	Musnah
		b) Sarana dan Prasarana	1 Tahun	9 Tahun	Musnah
	8)	Lembaga Kearsipan Teladan			
		a) Penyelenggaraan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
		b) Berkas Penetapan Lembaga Kearsipan Teladan	2 Tahun	3 tahun	Musnah, kecuali Penetapan LKPT Teladan Permanen

-81-

1	2		3	4	5
	9)	Unit Kearsipan Teladan			
		a) Penyelenggaraan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
		b) Berkas Penetapan Unit Kearsipan Teladan	2 Tahun	3 tahun	Musnah kecuali penetapan UK Teladan Permanen
	c	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip			
		a) Penyusunan rancangan/Revisi JRA di Perguruan Tinggi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
		b) Permohonan Persetujuan JRA sampai dengan Persetujuan Kepala ANRI	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	d	Pengelolaan Arsip Statis			
		1. Akuisisi			
		a) Monitoring Fisik dan Daftar	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b) Verifikasi terhadap Daftar Arsip	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		c) Penetapan Status Arsip Statis	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		d) Persetujuan untuk Penyerahan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		e) Penetapan Arsip yang akan diserahkan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		f) Berita Acara Penyerahan Arsip	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		g) Daftar Arsip yang diserahkan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		2. Sejarah Lisan			
		a) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
		b) Hasil Wawancara Sejarah Lisan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen

-82-

1	2		3	4	5
		- Berita Acara			
		- Laporan Kegiatan			
		- Hasil Wawancara dan transkrip			
	3.	Daftar Pencarian Arsip Statis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		- Pengumuman			
	4.	- Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis			
		Penghargaan dan Imbalan	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	5.	Pengolahan			
		a) Penataan Informasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b) Penataan Fisik	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		c) Penyusunan Sarana Bantu Temu Balik	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		- Guide			
		- Daftar Arsip Statis			
		- Inventaris Arsip Statis			
	6.	Preservasi			
		a) Preventif			
		1) Penyimpanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2) Pengendalian Hama Terpadu	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		3) Reproduksi (alih media): berita acara alih media dan daftar arsip yang dialihmediakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		4) Perencanaan dan Penanggulangan Bencana	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b) Kuratif	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		-Perawatan Arsip			
	7.	c) Laporan Hasil Pengujian Mutu Preservasi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		Autentifikasi Arsip Dinamis	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
		- Pembuktian Autentisitas			

-83-

1	2		3	4	5
		- Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autensitas Arsip Statis/Surat Pernyataan Pencipta Arsip			
	8.	Akses Arsip Statis			
		a) Layanan Arsip	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		b) Penerbitan Naskah Sumber 1) Administrasi dan Proses Penyusunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2) Hasil Naskah Sumber Arsip	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	9.	Pameran Arsip	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e	Pengawasan			
		1. Pengawasan Eksternal	2 Tahun setelah rekomendasi perbaikan dalam laporan pengawasan eksternal (LAKE) selesai ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
		2. Pengawasan Internal	2 Tahun setelah rekomendasi perbaikan dalam laporan pengawasan internal (LAKI) selesai ditindaklanjuti	3 Tahun	Permanen
	f	Sosialisasi Kearsipan	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
4	Museum				
	a	Kebijakan tentang Permuseuman - Panduan/Pedoman/SOP Permuseuman	2 tahun	3 tahun	Permanen

-84-

1	2		3	4	5
		- SK Pendirian Museum			
	b	Penambahan koleksi - Usulan penambahan koleksi - Persetujuan Pimpinan Museum	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c	Identitas/Deskripsi koleksi/ Daftar koleksi - Daftar koleksi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d	Register Koleksi Cagar Budaya	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e	Konservasi - Daftar Koleksi - Berita Acara	2 tahun	3 tahun	Permanen
	f	Penilaian dan Penghapusan koleksi - Berita Acara	5 tahun	5 tahun	Permanen
	g	Dokumen Peminjaman - Surat Pengajuan - Surat Persetujuan - Isian Formulir/ Buku Peminjaman - Pakta Integritas - Berita Acara	1 tahun setelah barang dikembalikan	1 tahun	Musnah
	5	Kebun Binatang			
	a	Kebijakan tentang Pengelolaan Kebun Binatang - Pedoman/Panduan/SOP Pengelolaan - Kebun Binatang - SK Pendirian Kebun Binatang	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b	Data Binatang	2 tahun	3 tahun	dinilai kembali
	c	Penangkaran Binatang - Data Penangkaran Binatang	2 tahun	3 tahun	dinilai kembali
	d	Tukar Menukar Binatang - Surat Pengajuan	2 tahun	3 tahun	Musnah

-85-

1	2	3	4	5
	- Surat Persetujuan - Isian Formulir/ Buku Peminjaman - Pakta Integritas - Berita Acara			
	e Pemeliharaan/ Perawatan Binatang - Isian Formulir Pemeliharaan/Perawatan Binatang	2 tahun	3 tahun	Musnah
6	Rumah Sakit			
	a Dewan Pengawas - Usulan Anggota Dewan Pengawas - SK Dewan Pengawas	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali SK Dewan Pengawas Permanen
	b Dewan Pembina - Usulan Anggota Dewan Pembina - SK Dewan Pembina	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali SK Dewan Pembina Permanen
	c Badan Koordinasi Pendidikan - Usulan Anggota Badan Koordinasi Pendidikan - SK Badan Koordinasi Pendidikan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali SK Badan Koordinasi Pendidikan Permanen
	d Komite - Usulan Anggota Komite - SK Komite	2 tahun	3 tahun	Musnah, Kecuali SK Komite Permanen

-86-

1	2	3	4	5
	e Satuan Pengawasan Intern - Usulan Anggota Satuan Pengawasan Intern - SK Satuan Pengawasan Intern - Hasil Pengawasan	2 tahun	3 tahun	Musnah, Kecuali SK Satuan Pengawasan Intern Permanen
	f Medik dan Keperawatan - Usulan Tenaga Medik dan Keperawatan - SK Tenaga Medik dan Keperawatan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali SK Tenaga Medik dan Keperawatan Permanen
	g Non Medik - Usulan Tenaga Non Medik - SK Tenaga Non Medik	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali SK Tenaga Non Medik Permanen
	h Dokter tamu - Usulan Dokter Tamu - SK Dokter Tamu	2 tahun	3 tahun	Musnah
	i Penunjang medik - Usulan Penunjang medik - SK Penunjang medik	2 tahun	3 tahun	Musnah
	j Rekam medik	5 tahun setelah pasien tanggal terakhir berobat/ dipulangkan	1 tahun	Musnah, kecuali ringkasan pulang dan surat persetujuan tindakan medik disimpan minimal 10 tahun sejak dibuat
	k Farmasi - Daftar Obat - Daftar Suplier	1 tahun	1 tahun	Musnah
	l Pemulasaran jenazah			

-87-

1	2	3	4	5
	- Berita Acara Pemulasaran Jenazah	1 tahun	1 tahun	Musnah, kecuali ada catatan khusus
m	Kegiatan Akademik dan riset - Renstra riset RS - Proposal/TOR - Hasil Riset - Evaluasi - Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah
n	Laporan <i>coass</i> (<i>co assistant</i>) - Permohonan coass - Persetujuan/penolakan - Jadwal pelaksanaan coass - Presensi - Laporan - Surat keterangan melakukan coass	2 tahun	3 tahun	Musnah
o	Rujukan fasilitas kesehatan - Surat penerimaan rujukan - Surat pemberian rujukan	2 tahun	3 tahun	Musnah
p	Asuransi - Surat Permohonan Klaim Asuransi	1 tahun setelah urusan selesai	1 tahun	Musnah
q	Laporan kelahiran - Rekapitulasi tingkat kelahiran	1 tahun	1 tahun	Musnah
r	Laporan kematian - Rekapitulasi tingkat kematian	2 tahun	3 tahun	Musnah
s	Laporan kejadian kecelakaan - Laporan kejadian kecelakaan saat Lebaran	1 tahun	1 tahun	Musnah

-88-

1	2	3	4	5
t	Laporan perkembangan pasien - Data statistik - Laporan perkembangan	1 tahun	1 tahun	Musnah
u	Laporan kasus terbanyak	2 tahun	3 tahun	Musnah
v	Kasus khusus - Laporan Kasus khusus	25 tahun	5 tahun	Permanen
w	Laporan Intern Rumah Sakit	5 tahun	5 tahun	Musnah
x	Laporan Ekstern Rumah Sakit	5 tahun	5 tahun	Musnah
y	Izin Praktik Profesi Kesehatan - Surat izin praktik profesi kesehatan (dokter, perawat, apoteker, bidan, dll)	5 tahun	5 tahun	Permanen
VIII	PENELITIAN			
1	Kebijakan Penelitian - Renstra penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	Penjaminan Mutu Penelitian			
a	Penawaran Penelitian - Panduan penelitian - Informasi penerimaan proposal penelitian - SK tim reviewer - Hasil penilaian proposal - SK proposal yang diterima	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
b	Perencanaan penelitian			
1)	Proposal yang diterima	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2)	Proposal yang ditolak	1 tahun	1 Tahun	Musnah
c	Pendanaan Penelitian			

-89-

1	2	3	4	5
	- Laporan Keuangan Penelitian	1 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	9 Tahun	Musnah, kecuali sumber dana asing
d	Kontrak/ Perjanjian - Draf Kontrak/perjanjian - Kontrak Perjanjian	3 tahun setelah kontrak /perjanjian berakhir	2 Tahun	Permanen
e	Izin Penelitian - Surat Permohonan - Surat Persetujuan/Penolakan - Surat Izin Penelitian	1 Tahun setelah penelitian selesai	1 Tahun	Musnah
f	Pelaksanaan Penelitian - Kontrak Kerja - Surat Keputusan - Penetapan biaya penelitian - Laporan Penelitian	1 Tahun setelah penelitian selesai	1 Tahun	Musnah, kecuali Laporan Penelitian Permanen
g	Seminar/Workshop Hasil Penelitian - Proposal - Penetapan Pembicara - Jadwal acara	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
h	Desiminasi/Publikasi Hasil Penelitian - Materi Desiminasi/Publikasi Hasil Peneltian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
i	Pemanfaatan Hasil Penelitian - Laporan Pemanfaatan Hasil Penelitian	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
j	Monitoring, Laporan dan Evaluasi, Statistik Penelitian - Sertifikat Penelitian	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-90-

1	2	3	4	5
	- Data Statistik - Laporan			
3	Forum Penelitian - Dokumen Kegiatan - Laporan Kegiatan	1 tahun	4 Tahun	Musnah
4	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)			
a	Pengajuan paten - Surat Pengajuan Paten - Sertifikat Paten	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b	Pengajuan Hak Cipta - Surat Pengajuan Hak Cipta - Sertifikat Hak Cipta	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c	Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten - Surat Permohonan Pembiayaan Paten	2 Tahun setelah masa pemeliharaan selesai	1 Tahun	Musnah
d	Data Paten/Hak Cipta	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
IX PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
1	Kuliah Kerja Nyata			
a	Pedoman/panduan KKN	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Musnah
b	Administrasi KKN (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN) - Administrasi Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN	1 tahun	4 tahun	Musnah

-91-

1	2	3	4	5
1	c Pembekalan KKN - Pengumuman - Daftar Hadir - Materi	1 tahun	4 tahun	Musnah
	d Pelaksanaan KKN - Daftar Hadir - Laporan kegiatan KKN	1 tahun	4 tahun	Musnah
	e Nilai KKN	5 tahun	-	masuk berkas perseorangan
	f Sertifikat KKN - Salinan Sertifikat KKN	5 tahun	-	masuk berkas perseorangan
	g Statistik KKN - Data Statistik KKN	1 tahun	4 tahun	Musnah
	h Pengembangan KKN - Program Pengembangan KKN	1 tahun	4 tahun	Musnah
	i Asuransi Mahasiswa KKN - Data Klaim Asuransi KKN	1 tahun	4 tahun	Musnah
	j Laporan KKN	1 tahun	4 tahun	Musnah
	2 Layanan Masyarakat			
	a Penawaran Pengabdian	2 tahun	3 tahun	Musnah
2	b Kontrak perjanjian - Surat Kontrak Perjanjian	1 tahun setelah Kontrak /Perjanjian selesai	4 tahun	Musnah
	c Pembinaan - Laporan Pembinaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	d Bantuan Sosial	2 tahun	3 tahun	Musnah

-92-

1	2	3	4	5
	- Laporan Bantuan Sosial			
	e Monitoring dan evaluasi - Laporan Monitoring dan Evaluasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	3 Data statistik pengabdian	2 tahun	3 tahun	Permanen
4	Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian - Laporan Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian	2 tahun	3 tahun	Musnah
5	Penerbitan hasil pengabdian - Laporan Pengabdian	2 tahun	3 tahun	Permanen
6	Forum Pengabdian Kepada Masyarakat - Surat Undangan - Daftar Hadir - Notula Sidang - Materi/Bahan - Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah
X	PUBLIKASI JURNAL/BUKU			
1	Pengajuan			
	a Proposal Publikasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
	b Naskah Jurnal/Buku - Jurnal/Buku	1 tahun setelah diterbitkan	1 tahun	Musnah
	c Penilaian dan Review Proposal/ Naskah	1 tahun	1 tahun	Musnah
	d Sidang Review Proposal - Surat Undangan - Daftar Hadir - Notula Sidang - Materi/Bahan	1 tahun	1 tahun	Musnah

-93-

1	2	3	4	5
	- Laporan			
e	Pendampingan dan Workshop - Surat Undangan - Daftar Hadir - Notula Sidang - Materi/Bahan - Laporan	1 tahun	1 tahun	Musnah
f	Kontrak Penerbitan - Kontrak	1 tahun setelah kontrak selesai	1 tahun	Permanen
2	Produksi			
a	Pembuatan Lembar Kerja - Lembar Kerja	1 tahun	1 tahun	Musnah
b	Proses Pengeditan - Hasil pengeditan	1 tahun setelah terbit	1 tahun	Musnah
c	Pembuatan Master Jurnal/Buku - Master Jurnal/Buku yang sudah diterbitkan	1 tahun	1 tahun	Permanen
d	ISSN/ISBN - Pengajuan ISSN/ISBN - Daftar ISSN/ISBN	1 tahun setelah pembaharuan	1 tahun	Permanen
3	Pemasaran dan Evaluasi			
a	Dokumen Pemasaran	1 tahun	1 tahun	Musnah
b	Evaluasi - Laporan Evaluasi Publikasi Jurnal/Buku	1 tahun	1 tahun	Musnah
c	Laporan Akhir	1 tahun	1 tahun	Musnah

-94-

1	2	3	4	5
XI	WISUDA DAN ALUMNI			
1	Wisuda			
a	Penyelenggaraan wisuda - Berkas pendaftaran dan persyaratan wisuda - Surat usulan fakultas/ sekolah/prodi, jurusan - Penetapan daftar wisudawan - Penetapan panitia wisuda - Notula rapat panitia wisuda - Daftar hadir wisudawan - Sambutan Rektor/Direktur - Sambutan wakil wisudawan	2 tahun	3 tahun	Musnah
b	Biodata wisudawan - Daftar Biodata Wisudawan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali master Permanen
c	Sumpah Profesi - Presensi - Berita Acara - Naskah sumpah profesi	1 tahun	1 tahun	Musnah, kecuali berita acara masuk berkas perseorangan
d	Laporan kegiatan wisuda - Laporan	2 tahun	3 tahun	Permanen
2	Alumni			
a	Data/Buku induk alumni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
b	Statistik Alumni - Data Statistik Alumni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
c	Organisasi alumni - SK Pembentukan Organisasi Alumni	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-95-

1	2	3	4	5
	d Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring - Laporan Kegiatan Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
	e Tracer studi - Hasil Tracer Studi	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
XII	PENJAMINAN MUTU			
1	Audit Mutu Akademik Internal/ Eksternal - Instrumen audit - Borang audit - Hasil Audit - Laporan - Tindak lanjut hasil audit	1 tahun	1 tahun	Musnah kecuali laporan dan tindak lanjut hasil audit Permanen
2	Akreditasi			
a	Akreditasi Nasional - Borang - SK Penetapan Akreditasi dari BAN-PT	1 tahun setelah masa berlaku habis	1 tahun	Musnah, kecuali SK penetapan akreditasi Permanen
b	Akreditasi Internasional - Borang - SK Penetapan Akreditasi	1 tahun setelah masa berlaku habis	1 tahun	Musnah, kecuali SK penetapan akreditasi Permanen
3	Sertifikasi			
a	Sertifikasi Nasional - Portofolio/Usulan - Borang - Sertifikat	1 tahun setelah masa berlaku habis	5 tahun	Musnah, kecuali sertifikat Permanen
b	Sertifikasi Internasional - Portofolio - Sertifikat	2 tahun setelah masa berlaku habis	2 tahun	Musnah, kecuali sertifikat masuk berkas perseorangan

-96-

1	2	3	4	5
XIII	TATA PAMONG			
1	Majelis Wali Amanat (MWA)			
a	Peraturan/Surat Keputusan MWA - Usulan - Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/Surat Keputusan MWA - SK MWA - Peraturan MWA	2 tahun	3 tahun	Permanen
b	Notula/risalah rapat MWA - Notula - Risalah Rapat	2 tahun	3 tahun	Permanen
c	Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi - Surat Usulan - Pertimbangan MWA - Pedoman Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi - Notula - Pelaksanaan Kegiatan - Keputusan MWA Tentang Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi - Laporan	2 tahun	3 tahun	Permanen
d	Data anggota MWA - Surat-surat usulan dari Fakultas - Keputusan MWA tentang anggota MWA	2 tahun	3 tahun	Permanen
2	Senat Akademik			
a	Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik - Usulan - Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/ Surat Keputusan Senat Akademik - SK Senat Akademik - Peraturan Senat Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen

-97-

1	2	3	4	5	
	b	Notula/risalah rapat Senat Akademik - Notula - Risalah Rapat Senat Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c	Penyusunan Kode etik - Draf sampai dengan Master Kode Etik - Peraturan Senat Akademik Tentang Kode Etik	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	d	Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi - Surat Usulan - Pertimbangan Senat Akademik - Pedoman Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi - Notula - Materi presentasi calon pemimpin perguruan tinggi - Hasil pemilihan senat pemimpin perguruan tinggi - Pelaksanaan Kegiatan - Keputusan Senat Akademik Tentang Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi - - Laporan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	e	Pemberian Gelar Doktor HC - Usulan - Notula Rapat - Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi - Keputusan Senat Akademik - Buku Acara Pengukuhan - Naskah Orasi Ilmiah - Berita Acara Penganugerahan Honoris Causa - Dokumentasi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	f	Dewan Kehormatan Universitas (DKU) - SK Dewan Kehormatan Universitas (DKU)	2 tahun	3 tahun	Permanen

-98-

1	2	3	4	5
g	Izin Pembukaan Fakultas, Vokasi, Departemen, Bagian, Jurusan/Prodi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	- Surat Usulan - Notula Rapat - Borang - SK Pemberian Izin			
h	Data Anggota Senat Akademik	2 tahun	3 tahun	Permanen
	- Keputusan Tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik - Berita Acara Pemilihan Anggota Senat Akademik dari Fakultas-Fakultas			
i	Pertimbangan Jabatan Fungsional Dosen	2 tahun	3 tahun	Permanen
	- Dokumen Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang bersangkutan - Surat Keputusan Fungsional - Dokumen Penilai Jabatan			
3	Dewan Guru Besar (DGB)			
	a	2 tahun	3 tahun	Permanen
	- Peraturan/Surat Keputusan DGB - Usulan - Notula Rapat terkait pembahasan peraturan/Surat Keputusan Dewan Guru Besar - SK Dewan Guru Besar - Peraturan Dewan Guru Besar			
	b	2 tahun	3 tahun	Permanen
	- Rapat DGB - Notula/Risalah Rapat Dewan Guru Besar			
	c	2 tahun	3 tahun	Permanen
- Pelaksanaan Kode Etik - Dokumen Kode Etik Internal				
d	Pengukuhan Guru Besar	2 tahun	3 tahun	Permanen
	- Surat Pengantar - Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme			

-99-

1	2	3	4	5
	- Surat Keterangan Reviewer - Buku Karya Guru Besar - Naskah Orasi ilmiah - Daftar hadir - SK Dari Dirjen Dikti - Orasi Ilmiah - Peluncuran Buku			
	e Data Anggota Guru Besar - Daftar Guru Besar - CV Guru Besar - Karya Ilmiah Guru Besar - Penghargaan tingkat nasional dan internasional guru besar	2 tahun	3 tahun	Permanen
	f Apresiasi kepada Masyarakat - Laporan Apresiasi kepada masyarakat	2 tahun	3 tahun	Permanen
	4 Komite Audit/ Dewan Audit			
	a Data anggota Komite Audit - SK auditor oleh rektor	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b Laporan review hasil audit - Daftar hadir auditor dan auditee - Temuan hasil audit - Laporan close pada temuan - Persetujuan kedua belah pihak auditor dan auditee - Laporan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c Laporan review RKAT	2 tahun	3 tahun	Permanen
	5 Dewan Pengawas			
	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pengawas - Usulan - SK dewan pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen

-100-

1	2	3	4	5
	b Notula/risalah rapat Dewan Pengawas - Daftar hadir dewan pengawas - Notula rapat dewan pengawas - Keputusan rapat dewan pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c Data anggota dewan pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d Laporan Dewan Pengawas - Kegiatan dewan pengawas - Daftar hadir kegiatan - Notula rapat dewan pengawas - Hasil rapat dewan pengawas	2 tahun	3 tahun	Permanen
	6 Dewan Pertimbangan			
	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan - Usulan - SK Dewan Pertimbangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan - Notula rapat - Laporan dewan pertimbangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c Data Anggota Dewan Pertimbangan - Data anggota pertimbangan - Kegiatan dewan pertimbangan - Notula kegiatan dewan pertimbangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d Laporan Dewan Pertimbangan - Daftar hadir - Laporan dewan pertimbangan	2 tahun	3 tahun	Permanen
	7 Dewan Penyantun			
	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Penyantun - Usulan - SK Dewan Penyantun	2 tahun	3 tahun	Permanen

-101-

1	2	3	4	5
	b Notula/risalah rapat Dewan Penyantun - Daftar Hadir - Notula rapat - Keputusan rapat	2 tahun	3 tahun	Permanen
	c Data Anggota Dewan Penyantun - Data dewan penyantun	2 tahun	3 tahun	Permanen
	d Laporan Dewan Penyantun - Notula rapat - Laporan dewan penyantun	2 tahun	3 tahun	Permanen

-102-

PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISTE, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI

NO.	CONTOH JENIS ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	PERENCANAAN			
1	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan			
	a Rencana Pembangunan Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)	1 tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	Permanen
	b Rencana Pembangunan Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan Rencana Strategis	1 tahun setelah tidak berlaku	3 tahun	Permanen
	c Rencana Operasional	1 tahun setelah diperbaharui	1 tahun	Permanen
	d Program kerja tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga)			
	1) Usulan dari unit kerja dan data pendukungnya	2 tahun	2 tahun	Musnah
	2) Usulan dari perguruan tinggi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	3) Program kerja tahunan unit kerja	2 tahun	3 tahun	Musnah
	4) Program kerja tahunan perguruan tinggi	2 tahun	3 tahun	Permanen
2	Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja (RAPB)			
	a Rencana Kerja Anggaran (RKA)	2 tahun	3 tahun	Permanen
	b Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara	2 tahun setelah Tahun anggaran berakhir	4 tahun	Dinilai kembali
	c Penyusunan RAPB			

-103-

1	2	3	4	5
	1) Arah kebijakan, strategis, prioritas dan renstra perguruan tinggi serta petunjuk penyusunan anggaran	2 tahun setelah dinyatakan tidak berlaku	4 tahun	Permanen
	2) Rencana anggaran kerja perguruan tinggi (RAKIP) dan RKAKL (termasuk usulan anggaran dari unit organisasi)	2 tahun setelah Tahun anggaran berakhir	5 Tahun	Dinilai kembali
	3) Rancangan anggaran satuan kerja Perguruan Tinggi	2 tahun setelah Tahun anggaran berakhir	5 Tahun	Musnah
3	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja			
	a Pembahasan/penelaahan anggaran - Surat Undangan - Notula Rapat - Hasil Pembahasan/penelaahan anggaran	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah
	b Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Musnah
	c Ketetapan pagu definitif	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Permanen
	d Rencana kerja anggaran 1) Rencana Kerja Anggaran unit kerja 2) Rencana Kerja Anggaran perguruan tinggi	2 tahun	3 tahun	Musnah
		2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Permanen

-104-

1	2	3	4	5
	e Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petunjuk operasional kegiatan (POK) dan revisinya	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	4 tahun	Permanen
	f Ketentuan yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	g Target penerimaan negara bukan pajak	1 tahun setelah UU Pertanggungjawaban APBN disahkan	9 Tahun	Permanen
4	Revisi Anggaran			
	a Rupiah Murni	3 tahun setelah rencana anggaran ditetapkan	4 tahun	dinilai kembali
	b PNB	3 tahun setelah rencana anggaran ditetapkan	4 tahun	dinilai kembali
	c Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH)	3 tahun setelah rencana anggaran ditetapkan	4 tahun	dinilai kembali
5	Laporan			
	a Laporan Berkala 1) Laporan bulanan 2) Laporan triwulan	1 tahun	1 tahun	Musnah
		1 tahun	1 tahun	Musnah

-105-

1	2	3	4	5
	3) Laporan semesteran	1 tahun	1 tahun	Musnah
	4) Laporan tahunan	1 tahun	1 tahun	Permanen
	b Laporan insidental	2 tahun	4 tahun	dinilai kembali
	c LAKIP			
	1) LAKIP Unit Kerja	2 tahun	2 tahun	Musnah
	2) LAKIP Perguruan Tinggi	2 tahun	2 tahun	Permanen
6	Monitoring dan Evaluasi			
	a Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja	2 tahun	4 tahun	Musnah, setelah masuk laporan program perguruan tinggi
	1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja			
	b Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi	2 tahun	4 tahun	Permanen
	1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi			
7	Ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran	1 tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	- Pedoman/panduan/SOP penyusunan anggaran			
	- Pedoman/panduan/SOP pelaksanaan anggaran			
	- Pedoman/panduan/SOP pertanggungjawaban anggaran			
II	HUKUM			
1	Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi	1 Tahun setelah tidak berlaku	4 tahun	Permanen
	- Peraturan Pemerintah			
	- Peraturan Presiden			
	- Keputusan Presiden			
	- Instruksi Presiden			
	- Peraturan Menteri			
	- Keputusan Menteri			
	- Instruksi Menteri			

-106-

1	2	3	4	5
2	Peraturan Rektor, Direktur, Ketua	1 Tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	- Surat undangan			
	- Notula			
	- Draft			
	- Master Peraturan			
3	Keputusan Rektor, Direktur, Ketua	1 Tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	- Surat undangan			
	- Notula			
	- Draf			
	- Master Keputusan			
4	Peraturan dekan/direktur/ketua lembaga	1 Tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	- Surat undangan			
	- Notula			
	- Draf			
	- Master Peraturan			
5	Keputusan dekan /direktur/ketua lembaga	1 Tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	- Surat undangan			
	- Notula			
	- Draf			
	- Master Keputusan			
6	Instruksi Rektor	1 Tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	- Surat undangan			
	- Notula			
	- Draf			
	- Master Instruksi			
7	Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap	1 Tahun setelah diperbaharui	4 tahun	Permanen
	- Surat undangan			

-107-

1	2	3	4	5
	- Notula - Draft - Master Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap			
8	MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian)			
	a Dalam Negeri			
	1) Administrasi penandatanganan MoU, MoA dan PKS (undangan, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, dll)	1 tahun	1 tahun	Musnah
	2) MoU/ Nota Kesepahaman	1 tahun setelah kontrak/perjanjian berakhir	4 tahun	Permanen
	3) MoA	1 tahun setelah kontrak/perjanjian berakhir	4 tahun	Permanen
	4) Perjanjian Kerjasama (PKS)	1 tahun setelah kontrak/perjanjian berakhir	4 tahun	Permanen
	b Luar Negeri	1 tahun setelah kontrak/perjanjian berakhir	4 tahun	Permanen
	- MoU/ Nota Kesepahaman - MoA - Perjanjian Kerjasama (PKS)			
9	Sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan hukum			
	a Sosialisasi/ penyuluhan hukum	1 tahun setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah
	- Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)			

-108-

1	2	3	4	5
	b Pembinaan Hukum	1 tahun setelah pelaksanaan	1 tahun	Musnah
	- Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)			
10	Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi			
	a Pidana	2 tahun setelah keputusan tetap	2 tahun	Dinilai kembali
	- Surat permohonan - Surat persetujuan/penolakan - Hasil bantuan dan konsultasi hukum /advokasi pidana			
	b Perdata	2 tahun setelah keputusan tetap	2 tahun	Dinilai kembali
	- Surat permohonan - Surat persetujuan/penolakan - Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasiperdata			
	c Tata Usaha Negara	2 tahun setelah keputusan tetap	2 tahun	Dinilai kembali
	- Surat permohonan - Surat persetujuan/penolakan - Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi tata usaha negara			
	d Ketenagakerjaan	2 tahun setelah keputusan tetap	2 tahun	Dinilai kembali
	- Surat permohonan - Surat persetujuan/penolakan - Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi ketenagakerjaan			
	e Internasional	2 tahun setelah keputusan tetap	2 tahun	Dinilai kembali
	- Surat permohonan - Surat persetujuan/penolakan - Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi internasional			
	f Agama	2 tahun setelah keputusan tetap	2 tahun	Dinilai kembali
	- Surat permohonan			

-109-

1	2	3	4	5
	- Surat persetujuan/penolakan - Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi agama			
11	Kasus atau sengketa hukum			
	a Pidana - Surat gugatan - Surat pemanggilan - Surat kuasa khusus - Putusan Sidang - Banding - Tindak Lanjut hasil sidang	2 tahun Setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	dinilai kembali
	b Perdata - Surat gugatan - Surat pemanggilan - Surat kuasa khusus - Putusan Sidang - Banding - Tindak Lanjut hasil sidang	2 tahun Setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	dinilai kembali
	c Tata Usaha Negara - Surat gugatan - Surat pemanggilan - Surat kuasa khusus - Putusan Sidang - Banding - Tindak Lanjut hasil sidang	2 tahun Setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	dinilai kembali
	d Arbitrase - Surat gugatan	2 tahun Setelah keputusan	3 tahun	dinilai kembali

-110-

1	2	3	4	5
	- Surat pemanggilan - Surat kuasa khusus - Putusan Sidang - Banding - Tindak Lanjut hasil sidang	berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban		
	e Sengketa Adat - Surat gugatan - Surat pemanggilan - Surat kuasa khusus - Putusan Sidang - Banding - Tindak Lanjut hasil sidang	2 tahun Setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	3 tahun	Permanen
12	Perizinan - Surat Permohonan - Syarat Perizinan - Surat Izin	1 tahun setelah ijin di perbarui	2 tahun	Permanen
13	Doktrin/ Pendapat Pakar - Surat Permohonan - Surat Persetujuan - Hasil Rekomendasi Doktrin/pendapat pakar	1 Tahun setelah keputusan berkekuatan hukum tetap dan dipenuhi hak dan kewajiban	2 tahun	Permanen
III	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN			
1	Organisasi			
	a Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga	1 tahun setelah tidak berlaku	4 tahun	Permanen
	b Struktur tugas dan fungsi organisasi			
	1) Pembentukan	1 tahun setelah tidak berlaku	4 tahun	Permanen

-111-

1	2	3	4	5
	2) Pengubahan	1 tahun setelah tidak berlaku	4 tahun	Permanen
	3) Pembubaran	1 tahun setelah tidak berlaku	4 tahun	Permanen
	4) Evaluasi kelembagaan	1 tahun	4 tahun	Permanen
2	Tata Laksana			
	a Sistem dan Prosedur Kerja - SOP/ Prosedur Tetap	1 tahun setelah diperbarui	4 tahun	Permanen
	b Pembakuan sarana kerja - SOP/ Prosedur Tetap	1 tahun setelah diperbarui	4 tahun	Permanen
	c Kajian/Analisis jabatan/Analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan - Analisis organisasi - Uraian jabatan - Analisis beban kerja - Peta jabatan	1 tahun setelah diperbarui	4 tahun	Permanen
	d Standar kompetensi jabatan - Struktural - Fungsional	1 tahun setelah diperbarui	4 tahun	Permanen
3	Internalisasi Reformasi Birokrasi - Surat Undangan - Notula Rapat - SK Tim Reformasi Birokrasi PTN - Rancangan Reformasi Birokrasi PTN - Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah

-112-

1	2	3	4	5
IV	KEARSIPAN			
1	Pembinaan Kearsipan - Bimbingan Teknis/Konsultasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2	Pengelolaan Arsip Dinamis			
	a Penciptaan			
	1) Pencatatan -Buku Agenda -Kartu Kendali	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	2) Pendistribusian -Ekspedisi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b Penggunaan			
	1) Pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip	1 Tahun	1 Tahun	Permanen
	2) Peminjaman arsip	1 Tahun	1 Tahun	Musnah
3	Pemeliharaan arsip (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>)			
	a Pemberkasan - Daftar Berkas - Daftar Isi Berkas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	b Penataan arsip inaktif - Pengaturan fisik - Pengolahan informasi arsip - Penyusunan daftar arsip inaktif	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	c Penyimpanan (Pumigasi, dll)			
	1) Skema penyimpanan arsip	1 tahun setelah diperbaharui	2 Tahun	Musnah
	2) Skema pengamanan arsip	1 tahun setelah diperbaharui	2 Tahun	Musnah
	3) Daftar arsip	Selama dipergunakan 1 tahun		Musnah
	4) Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	1 tahun	2 Tahun	Musnah

-113-

1	2	3	4	5
	d Alih media arsip - Kebijakan alih media arsip - Autentikasi - Berita acara - Daftar arsip yang dialihmediakan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	e Program Arsip Vital dan Arsip Terjaga - Identifikasi - Perlindungan dan pengamanan - Penyelamatan dan pemilihan - Berita acara penyerahan salinan arsip terjaga - Daftar arsip vital dan arsip terjaga	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	4 Penyusutan Arsip			
	a Pemindahan Arsip Inaktif - Berita acara pemindahan arsip - Daftar arsip yang dipindahkan	1 Tahun setelah arsip dimusnahkan atau diserahkan	2 Tahun	Musnah
	b Pemusnahan Arsip - SK Tim/Panitia Pemusnahan Arsip - Notula Tim/Panitia Pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian - Surat Pertimbangan Tim/Panitia Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip - Surat Persetujuan dari Pimpinan Pencipta Arsip - Surat Persetujuan dari Kepala ANRI (untuk retensi 10 Tahun ke atas) - Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Pemusnahan - Berita acara pemusnahan - Daftar arsip yang dimusnahkan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

-114-

1	2	3	4	5
	c Penyerahan Arsip Statis - SK Tim/Panitia Penyerahan Arsip Statis - Notula Tim/Panitia Penyerahan arsip pada saat melakukan penilaian - Surat Pertimbangan Tim/Panitia Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip - Surat Persetujuan dari Lembaga Kearsipan - Surat Pernyataan dari Pimpinan Bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan - Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis - Berita acara Penyerahan arsip statis - Daftar arsip yang diserahkan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
V KETATAUSAHAAN				
1	Permintaan penggandaan dokumen/arsip - Surat Permintaan - Isian Formulir - Rekapitulasi Permintaan penggandaan	1 tahun	2 tahun	Musnah
2	Risalah/notula rapat			
	a Rapat Staf - Surat Undangan - Daftar Hadir - Notula Rapat	1 tahun	4 tahun	dinilai kembali
	b Rapat Pimpinan - Surat Undangan - Daftar Hadir - Notula Rapat	1 tahun	4 tahun	dinilai kembali

-115-

1	2	3	4	5
VI	KERUMAHTANGGAAN			
1	Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/Fax, cctv,tv, kabel dan internet			
	a Penggunaan peralatan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	- Permohonan fasilitasi			
	- Persetujuan/Penolakan			
	- Laporan penggunaan			
2	Perjalanan dinas			
	a Dalam Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Surat Tugas			
	- SPPD			
	- Laporan			
	b Luar Negeri	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Undangan			
	- Surat Tugas			
	- Pengurusan Visa			
	- Surat Setkab			
	- Exit permit			
	- SPPD			
	- Laporan			
3	Penggunaan fasilitas kantor	1 tahun	1 tahun	Musnah
	- Surat permintaan/isian formulir penggunaan ruang, gedung, kendaraan dan fasilitas kantor			
4	Pengurusan kendaraan dinas			
	a Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	2 tahun	-	Musnah
	- Pengurusan STNK			
	- Pengurusan BPKB			
	b Pemeliharaan dan perbaikan	2 tahun	-	Musnah
	- Laporan Pemeliharaan dan perbaikan			

-116-

1	2	3	4	5
	c Pengurusan kehilangan kendaraan	2 tahun setelah kasus selesai	1 tahun	Musnah
	- Laporan Pengurusan kehilangan kendaraan			
5	Permohonan pemeliharaan gedung dan taman			
	a Pertamanan/landscaping	1 tahun	1 tahun	Musnah
	- Permohonan fasilitasi			
	- Persetujuan/Penolakan			
	- Laporan			
	b Perbaikan gedung	1 tahun	1 tahun	Musnah
	- Permohonan fasilitasi			
	- Persetujuan/Penolakan			
	- Laporan			
	c Perbaikan rumah dinas/wisma	1 tahun	1 tahun	Musnah
	- Permohonan fasilitasi			
	- Persetujuan/Penolakan			
	- Laporan			
	d Kebersihan gedung dan taman	1 tahun	1 tahun	Musnah
	- Permohonan fasilitasi			
	- Persetujuan/Penolakan			
	- Laporan			
	e Sewa (Tanah, Gedung, Peralatan dan mesin)	Selama sewa masih berlangsung	1 tahun	Musnah
	- Permohonan fasilitasi			
	- Persetujuan/Penolakan			
	- Laporan			
6	Mekanikal dan engineering : jaringan listrik, air, gas dan komputer			
	a Pemasangan jaringan/instalasi listrik, air, gas dan komputer	1 tahun setelah tidak berfungsi	1 tahun	Musnah
	- Gambar teknik			
	- Laporan			

-117-

1	2	3	4	5
	b Pengelolaan jaringan/instalasi listrik, air, gas, dan komputer - Gambar teknik - Laporan	1 tahun setelah tidak berfungsi	1 tahun	Musnah
7	Keamanan dan ketertiban/Sekuriti - a Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus - Laporan Pengamanan/penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus - b Ketertiban dan keamanan - Laporan Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan	2 tahun	3 tahun	Musnah
8	Pengelolaan parkir - Laporan pengelolaan parkir	1 tahun	1 tahun	Musnah
9	Pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya - Laporan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya	1 tahun	1 tahun	Musnah
10	Konsumsi dan akomodasi - Laporan konsumsi dan akomodasi	1 tahun	1 tahun	Musnah
VII	PERLENGKAPAN			
1	Rencana kebutuhan barang/Rencana umum pengadaan - a Rencana kebutuhan unit kerja - Surat Usulan Rencana Kebutuhan dari Unit Kerja - b Rencana kebutuhan Perguruan Tinggi - Surat Usulan Rencana Kebutuhan dari Perguruan Tinggi	2 tahun	1 tahun	Musnah
2	Pengadaan barang - a Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung) - Usulan dari unit kerja dan data pendukung - Company Profile - Berita acara serah terima barang	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 tahun setelah barang dihapuskan	Musnah, kecuali berita acara serah terima barang Permanen

-118-

1	2	3	4	5
	- Berita acara pemeriksaan			
	b Pengadaan barang melalui lelang - Usulan dari unit kerja dan data pendukung - Company Profile - Berita acara serah terima barang - Berita acara pemeriksaan	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 tahun setelah barang dihapuskan	Musnah, kecuali berita acara serah terima barang Permanen
3	Pengadaan Jasa - a Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung) - Usulan dari unit kerja dan data pendukung - Company Profile - Berita acara serah terima barang - Berita acara pemeriksaan - b Pengadaan jasa melalui lelang - Usulan dari unit kerja dan data pendukung - Company Profile - Berita acara serah terima barang - Berita acara pemeriksaan	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 tahun setelah pekerjaan dilaksanakan	Musnah, kecuali berita acara serah terima jasa Permanen
4	Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung 2) Company Profile	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 tahun setelah barang dihapuskan	dinilai kembali

-119-

1	2	3	4	5
	3) Berita acara serah terima barang	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 tahun setelah barang dihapuskan	dinilai kembali
	4) Berita acara pemeriksaan	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 tahun setelah barang dihapuskan	dinilai kembali
	5) Berkas Penawaran Hibah	1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	2 Tahun	Dinilai Kembali
5	Pengadaan Barang dan jasa melalui bantuan/hibah/pinjaman dana asing			
	1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 tahun setelah barang dihapuskan	dinilai kembali
	2) Company Profile	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 tahun setelah barang dihapuskan	dinilai kembali
	3) Berita acara serah terima barang	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 tahun setelah barang dihapuskan	dinilai kembali
	4) Berita acara pemeriksaan	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	4 tahun setelah barang dihapuskan	dinilai kembali
	5) Berkas Penawaran	1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	2 Tahun	Dinilai Kembali

-120-

1	2	3	4	5
6	Pengadaan barang dan jasa melalui tukar menukar			
	1) Pengajuan tukar menukar barang dan jasa	1 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	sampai dengan pinjaman selesai	dinilai kembali
	2) Berita Acara Tukar Menukar Barang	1 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	sampai dengan dihapuskan	dinilai kembali
	3) Berkas Penawaran	1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	2 Tahun	Dinilai Kembali
7	Pengadaan barang dan jasa melalui pinjaman			
	1) Pengajuan pinjaman barang dan jasa	1 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	sampai dengan pinjaman selesai	dinilai kembali
	2) Berita Acara Pinjaman Barang dan Jasa	1 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	sampai dengan dihapuskan	dinilai kembali
	3) Berkas Penawaran	1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	2 Tahun	Dinilai Kembali
8	Pengadaan barang dan jasa melalui sewa			
	1) Pengajuan sewa barang dan jasa	1 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	sampai dengan pinjaman selesai	dinilai kembali
	2) Berita Acara Sewa Barang dan Jasa	1 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	sampai dengan dihapuskan	dinilai kembali
	3) Berkas Penawaran	1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	2 Tahun	Dinilai Kembali

-121-

1	2	3	4	5
9	Penyimpanan/pegudangan - Tanda terima/surat pengantar pengiriman barang - Surat pernyataan harga dan mutu barang - Serah terima barang - Buku penerimaan - Buku persediaan barang/kartu stok barang - Kartu barang/kartu gudang	Sampai dengan barang didistribusikan	2 tahun	Musnah
10	Penyaluran/Distribusi - Surat penerimaan barang dari unit kerja/formulir permintaan - Persetujuan sampai dengan surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) - Berita acara serah terima barang - Laporan dan berita acara mutasi barang - Berita acara serah terima barang	1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	2 Tahun	Musnah
11	Inventarisasi barang			
	a Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)	1 Tahun	2 Tahun	Musnah
	b Kartu inventaris barang (KIB)	Sampai barang dihapuskan	2 Tahun	Musnah
	c Laporan SIMAK BMN - Laporan barang persediaan - Laporan bulanan - Berita acara rekonsiliasi internal - Laporan tengah tahunan/semester - Berita acara rekonsiliasi eksternal - Laporan tahunan	1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	4 Tahun	Musnah kecuali Laporan Tahunan Permanen
12	Perbaikan/pemeliharaan			
	a Pemeliharaan barang bergerak/inventaris kantor		2 Tahun	Musnah

-122-

1	2	3	4	5
	- Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan - Penawaran pada/dari rekanan - Surat perintah kerja (SPK) - Berita acara penyelesaian pekerjaan	1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai		
	b Perbaikan/pemeliharaan barang investasi - Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan - Penawaran pada/dari rekanan - Surat perintah kerja (SPK) - Berita acara penyelesaian pekerjaan	1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	2 Tahun	Musnah kecuali Berita acara penyelesaian pekerjaan Dinilai Kembali
13	Penghapusan barang			
	a Penghapusan barang bergerak/inventaris - dokumen usulan penghapusan, - panitia penghapusan - Persetujuan/penolakan - berita acara penghapusan barang - SK Penghapusan	1 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan	3 Tahun	Permanen
	b Penghapusan barang tidak bergerak/investasi - dokumen usulan penghapusan, - panitia penghapusan - Persetujuan/penolakan - berita acara penghapusan barang - SK Penghapusan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
14	Bukti-bukti kepemilikan aset - Izin Mendirikan Bangunan(IMB) - Pajak Bumi Bangunan(PBB) - Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) - Sertifikat Tanah	Sampai dengan dihapuskan/ dipindahtangankan	-	-

-123-

1	2	3	4	5
	- Denah gambar bangunan/instalasi listrik, saluran air dan gas, jaringan internet			
15	Pemanfaatan Aset			
	a Kertas kerja penghitungan tarif	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	b Perjanjian kerjasama	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	- Draf Perjanjian Kerjasama			
	- Perjanjian Kerjasama			
16	Penggunaan Aset			
	a Ijin Penggunaan tanah	1 Tahun setelah penggunaan selesai	4 Tahun	Permanen
	- Surat Permohonan Izin Penggunaan Tanah			
	- Surat Persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah			
	b Ijin Penggunaan aset selain tanah	1 Tahun setelah penggunaan selesai	4 Tahun	Musnah
	- Surat Permohonan Izin Penggunaan aset selain tanah			
	- Surat Persetujuan/penolakan Izin Penggunaan aset selain tanah			
VIII	HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)			
1	Keprotokolan			
	a Upacara	1 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali pelantikan eselon I, Eselon II dan Peresmian Permanen
	- Undangan			
	- Susunan Acara			
	- Sambutan/Pidato			
	b Kunjungan Kedinasan			
	- Surat Permohonan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Surat Persetujuan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi			
	- Surat Undangan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi			
	- Surat Tugas Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi			
	- Laporan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi			

-124-

1	2	3	4	5
	Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	1 tahun	3 tahun	Musnah
	- Surat Permohonan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai			
	- Surat Persetujuan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai			
	- Surat Undangan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai			
	- Surat Tugas Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai			
	- Laporan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai			
	c Dies Natalis	1 tahun	1 tahun	Musnah, kecuali Laporan Permanen
	- Usulan Panitia			
	- SK Kepanitiaan			
	- Susunan Acara			
	- Daftar hadir			
	- Orasi			
	- Laporan			
	d Agenda Kegiatan Pemimpin Perguruan Tinggi	1 tahun	4 tahun	Musnah, kecuali peristiwa bermakna nasional Permanen
	- Jadwal Kegiatan Pemimpin			
	e Daftar nama dan alamat pejabat	Selama berlaku		Musnah
	- Daftar nama dan alamat kantor pejabat			
	f Dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan (rektor, warek, dekan atau yang sejajar) dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman	2 tahun	3 Tahun	dinilai kembali
	- Hasil Dokumentasi			
	- Hasil liputan kegiatan pimpinan			
	g Pengumpulan pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan			
	1) Kliping koran terkait perguruan tinggi yang bersangkutan	1 Tahun	4 Tahun	Permanen
	2) Brosur/leaflet/poster	1 tahun	2 tahun	Musnah
	3) Pengumuman/pemberitaan	1 tahun	2 tahun	Musnah

-125-

1	2	3	4	5
2	Hubungan antar Lembaga			
	a Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudukatif, Legislatif) - Surat Permohonan	1 tahun	4 Tahun	dinilai kembali
	b Hubungan antar perguruan tinggi/Sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG), praktek kerja lapangan (PKL) - Surat Permohonan Magang/ PSG/PKL - Surat Persetujuan Magang/ PSG/PKL - Daftar hadir - Laporan	1 tahun	2 tahun	Musnah
	c Forum kehumasan/bakohumas/perhumas - Dokumen kegiatan - Laporan kegiatan	1 tahun	2 tahun	Musnah
	d Hubungan dengan media massa			
	1) Siaran pers/konferensi pers/press release	1 tahun	4 Tahun	Permanen
	2) Kunjungan wartawan/peliputan/wawancara	1 tahun	2 tahun	Musnah
	f Hubungan dengan pihak swasta/LSM/Ormas Orpol - Surat Permohonan - Surat Persetujuan - Daftar hadir - Notula	1 tahun	4 Tahun	dinilai kembali
	g Hubungan Luar Negeri - Surat Permohonan - Surat Persetujuan - Daftar hadir - Notula	1 tahun	4 Tahun	dinilai kembali
	h Hearing (dengar pendapat) DPR - Surat Undangan - Materi Bahan RDP Terbuka	1 tahun	4 Tahun	Permanen

-126-

1	2	3	4	5
	- Materi Bahan RDP Tertutup - Hasil RDP Tertutup - Hasil RDP Terbuka			
	i Bahan/materi untuk sidang kabinet - Surat Undangan - Materi Bahan Sidang Kabinet - Hasil Sidang Kabinet	1 tahun	4 Tahun	Permanen
	j Penerbitan majalah, buletin, koran - Surat Undangan Rapat - Notula - Master	1 tahun	3 Tahun	Musnah kecuali master Permanen
	k Publikasi melalui media cetak maupun elektronik - Surat Undangan Rapat - Notula - Master	1 tahun	3 Tahun	Musnah kecuali master Permanen
	l Pameran/sayembara, festival - Surat Undangan - Notula - Proposal/ Penawaran - Surat Jawaban - Materi Pameran - Laporan	1 tahun	4 Tahun	dinilai kembali
	m Penghargaan/ tanda kenang-kenangan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	n Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf - Surat/Ucapan Terimakasih, Bela sungkawa, permohonan maaf	1 tahun	1 Tahun	Musnah
	3 Layanan Informasi Publik (PPID) - Permohonan Permintaan Informasi Publik	1 tahun	2 Tahun	Musnah kecuali prosedur dan laporan layanan informasi publik Permanen

-127-

1	2	3	4	5
	- Prosedur Permintaan Informasi layanan informai publik - Aspirasi publik - Sanggahan Informasi - Sengketa Informasi - Mediasi - Laporan layanan informasi publik			
IX	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
1	Pedoman kediklatan - Usulan Pedoman - Buku Panduan/ Buku Manual	Selama berlaku	10 tahun	Permanen
2	Kurikulum dan Silabus Diklat - Kurikulum Diklat - Silabus Diklat	Selama menjadi pedoman/Selama berlaku	4 tahun	Musnah
3	Jadwal diklat - Jadwal diklat	Sampai dengan diperbaharui	2 tahun	Musnah
4	Modul/materi/bahan diklat - Notula - Modul Diklat - Materi Diklat - Bahan Diklat	Selama berlaku	5 tahun	Permanen
5	Panduan/fasilitator - Panduan Fasilitator	Selama berlaku	5 tahun	Permanen
6	Sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat - Administrasi - Notula - Laporan	1 tahun	1 tahun	Musnah

-128-

1	2	3	4	5
7	Akreditasi lembaga diklat - Surat Permohonan Akreditasi - Laporan Hasil Verifikasi Lapangan - Berita acara rapat tim penilai - Surat Keputusan Penetapan Akreditasi - Sertifikasi Akreditasi - Laporan Akreditasi lembaga diklat	Selama berlaku	10 tahun	Permanen
8	Sertifikasi sumberdaya manusia kediklatan - Surat Permohonan Sertifikasi - Laporan Hasil Verifikasi Lapangan - Berita acara rapat verifikasi - Berita acara rapat tim penilai/ asesor - Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi - Sertifikat dari Sertifikasi - Laporan Sertifikasi individual	Selama berlaku	10 tahun	Permanen
9	Sistem informasi Diklat - Daftar lembaga - Daftar prasarana diklat - Daftar sarana Diklat - Daftar pengelola Diklat - Daftar Penyelenggara - Daftar widyaiswara - Daftar Pogram diklat	1 tahun setelah diperbaharui	5 tahun	Musnah, kecuali data prasarana dan sarana diklat dinilai kembali
10	Registrasi peserta diklat - Surat permohonan kode register - Buku induk register - Surat peyampaian kode register	15 tahun	10 tahun	Permanen

-129-

1	2	3	4	5
11	Rencana Tahunan Diklat - Rencana Tahunan Diklat - Undangan rapat - Notula - Daftar Hadir rapat - Draf penyelenggaraan diklat - Laporan rencana tahunan diklat	2 tahun	2 tahun	Musnah
12	Rencana penyelenggaraan diklat - Rencana Tahunan Diklat - Undangan rapat - Notula - Daftar hadir rapat - Draf rencana penyelenggaraan diklat	1 tahun	1 tahun	Musnah
13	Penyelenggaraan diklat - Surat pemanggilan peserta - Surat Keputusan Tim Penyelenggara - Surat keputusan tim pengajar - Panduan diklat - Sambutan pembukaan penyelenggara diklat - Bahan ajar diklat - Daftar hadir peserta diklat - Daftar hadir widyaiswara - Isian Formulir evaluasi peserta - Isian Formulir evaluasi widyaiswara - hasil formulasi evaluasi peserta diklat - Sambutan penutup - Laporan Penyelenggaraan Diklat	1 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali Laporan Penyelenggaraan Diklat Dinilai Kembali

-130-

1	2	3	4	5
14	Evaluasi penyelenggaraan Diklat - Isian formulir evaluasi widyaiswara - Isian formulir penyelenggara - Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat	2 tahun	2 tahun	dinilai kembali
15	Registrasi alumni diklat - Surat permohonan nomor register - Buku Register - Surat Penyampaian kode register - Salinan STTPL	15 tahun	10 tahun	Musnah, kecuali Buku Register dan Salinan STTPL Permanen
16	Evaluasi alumni pasca Diklat - Isian formulir evaluasi alumni peserta pasca diklat - Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat	2 tahun	2 tahun	dinilai kembali
17	Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan - Surat permohonan observasi lapangan - Surat persetujuan - Surat tugas - Jadwal observasi - Laporan	2 tahun	2 tahun	Musnah
18	Seminar/lokakarya/temukarya/workshop - Rencana Seminar/lokakarya/temukarya/workshop - Notula rapat - Daftar hadir rapat - Daftar hadir peserta - Daftar hadir narasumber - Materi Seminar/lokakarya/temukarya/workshop - Laporan	2 tahun	2 tahun	Musnah

-131-

1	2	3	4	5
X	TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN KOMUNIKASI			
1	Organisasi TI			
	a Rencana Strategis TI	Selama berlaku	5 tahun	Permanen
	b Enterprise Architecture	Selama berlaku	5 tahun	Permanen
	c Tata Kelola Teknologi Informasi - Rancangan Tata Kelola Teknologi Informasi	Selama berlaku	5 tahun	Permanen
	d Perencanaan IT	Selama berlaku	5 tahun	dinilai kembali
2	Sistem Informasi			
	a Perencanaan dan Analisis Sistem	1 tahun setelah Sistem Informasi tidak digunakan	5 tahun	Musnah
	b Perancangan Sistem	1 tahun setelah Sistem Informasi tidak digunakan	5 tahun	Musnah
	c Pembangunan dan Implementasi Sistem	1 tahun setelah Sistem Informasi tidak digunakan	5 tahun	Musnah
	d Pemeliharaan Sistem Informasi	1 tahun setelah Sistem Informasi tidak digunakan	5 tahun	Musnah
	e Dokumentasi Sistem Informasi	1 tahun setelah Sistem Informasi tidak digunakan	5 tahun	dinilai kembali
3	Manajemen Layanan Teknologi Informasi			
	a Desain Strategi Layanan	Selama berlaku	5 tahun	Musnah
	b Rancangan Layanan	Selama berlaku	5 tahun	Musnah

-132-

1	2	3	4	5
	c Transisi Layanan	Selama berlaku	5 tahun	Musnah
	d Layanan Operasional	Selama berlaku	5 tahun	Musnah
4	Pengelolaan Data			
	a Tata Kelola Data	Selama berlaku	5 tahun	dinilai kembali
	b Pengelolaan Arsitektur Data	Selama berlaku	5 tahun	dinilai kembali
	c Pengembangan Data	Selama berlaku	5 tahun	dinilai kembali
	d Pengelolaan Pengoperasian Data	Selama berlaku	5 tahun	dinilai kembali
	e Pengelolaan Keamanan Data	Selama berlaku	5 tahun	dinilai kembali
	f Pengelolaan Kualitas Data	Selama berlaku	5 tahun	dinilai kembali
	g Pencadangan (Backup) Data	Selama berlaku	5 tahun	dinilai kembali
5	Pengolahan Data			
	a Perencanaan Pengolahan Data	1 tahun	5 tahun	Musnah
	b Persiapan pengolahan Data	1 tahun	5 tahun	Musnah
	c Pelaksanaan Pengolahan Data	1 tahun	5 tahun	Musnah
	d Monitoring dan Evaluasi	1 tahun	5 tahun	Musnah
6	Jaringan dan Komunikasi			
	a Analisis Jaringan Komputer	1 tahun	5 tahun	Musnah
	b Perancangan Jaringan Komputer	Selama jaringan dipergunakan	5 tahun	Musnah
	c Implementasi Jaringan Komputer	Selama jaringan dipergunakan	5 tahun	Musnah
	d Pemeliharaan Jaringan	1 tahun	5 tahun	Musnah
	e Keamanan Jaringan	1 tahun	5 tahun	Musnah
7	Manajemen Fasilitas TI			
	a Perencanaan fasilitas TI	Selama berlaku	5 tahun	Musnah
	b Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI	Selama berlaku	5 tahun	Musnah
	c Pemeliharaan fasilitas TI	Selama berlaku	5 tahun	Musnah

-133-

1	2	3	4	5
8	Audit TI			
	a Perencanaan Audit TI	1 tahun setelah audit	5 tahun	Musnah
	b Tinjauan Awal Audit TI	1 tahun setelah audit	5 tahun	Musnah
	c Analisis data Audit TI	1 tahun setelah audit	5 tahun	Musnah
	d Evaluasi Temuan	1 tahun setelah audit	5 tahun	dinilai kembali
9	Manajemen Risiko TI			
	a Identitas risiko TI	1 tahun	5 tahun	Musnah
	b Penilaian Risiko TI	1 tahun	5 tahun	Musnah
	c Pengendalian Risiko TI	1 tahun	5 tahun	Musnah
	d Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI	1 tahun	5 tahun	Musnah
10	Pemetaan TI	1 tahun setelah pemetaan	5 tahun	dinilai kembali
XI	PENGAWASAN			
1	Rencana Pengawasan			
	a Rencana Strategis Pengawasan	5 tahun	10 tahun	Permanen
	b Rencana kinerja tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c Penetapan kinerja tahunan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Laporan evaluasi penetapan kinerja tahunan			
	d Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Surat Undangan			
	- Notula Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi			
	- Daftar Hadir			

-134-

1	2	3	4	5
	- Hasil Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi			
e	Rakor pengawasan tingkat nasional	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali hasil rakor pengawasan tingkat nasional dinilai kembali
	- Surat Undangan			
	- Notula Rakor pengawasan tingkat nasional			
	- Daftar Hadir			
	- Hasil Rakor pengawasan tingkat nasional			
2	Program Kerja Pengawasan			
	a Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Rencana Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan			
	- Laporan Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan			
	b Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Rencana Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional			
	- Laporan Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional			
	c Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Rencana Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan			
	- Laporan Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan			
	d Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi	2 tahun	3 tahun	Musnah
	- Rencana Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi			
	- Laporan Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi			
	e Program AKIP perguruan tinggi	2 tahun	3 tahun	Permanen
	- Rencana Program AKIP di lingkungan perguruan tinggi			
	- Laporan Program AKIP di lingkungan perguruan tinggi			

-135-

1	2	3	4	5
3	Pelaksanaan Pengawasan			
	a Pengawasan Internal			
	1) Surat penugasan	1 tahun	2 tahun	Musnah
	2) Surat pemberitahuan, dll	1 tahun	2 tahun	Musnah
	3) laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)	1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Permanen
	4) Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	2 tahun	3 tahun	dinilai kembali
	5) Laporan hasil audit investigasi (LHAi) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	1 tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Musnah, kecuali yang berskala nasional permanen
	6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	8) Laporan keuangan dan review	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	15) Laporan hasil audit investigasi (LHAi) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	2 Tahun	3 tahun	Musnah, kecuali yang berskala nasional permanen

-136-

1	2	3	4	5
	b Pengawasan Eksternal			
	1) Surat penugasan	1 tahun	2 tahun	Musnah
	2) Surat pemberitahuan, dll	1 tahun	2 tahun	Musnah
	3) laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)	1 tahun setelah tindak lanjut selesai	3 tahun	Permanen
	4) Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	2 tahun	3 tahun	dinilai kembali
	5) Laporan hasil audit investigasi (LHAi) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	1 tahun setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap	3 tahun	Musnah, kecuali yang berskala nasional permanen
	6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	8) Laporan keuangan dan review	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi	2 Tahun	3 tahun	Musnah
	13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut	2 Tahun	3 tahun	Permanen
	14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut	2 Tahun	3 tahun	Musnah

-137-

1	2	3	4	5
	15) Laporan hasil audit investigasi (LHAi) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut	2 Tahun	3 tahun	Musnah, kecuali yang berskala nasional permanen
	16 Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat	1 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai	2 tahun	musnah
	17 Laporan perkembangan Barang Milik Negara	2 Tahun setelah penghapusan	3 Tahun	musnah
XII	KEPEGAWAIAN			
1	Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian - Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik - Penyusunan kebijakan - Perumusan kebijakan - Pemberian masukan dan dukungan - Penetapan kebijakan	2 Tahun sejak kebijakan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
2	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara - a Perencanaan Kebutuhan ASN - Bahan penyusunan rencana kebutuhan - Analisis Kebutuhan -Aparatur Sipil Negara -Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - Pengolahan data kebutuhan - b Perencanaan Pertimbangan Formasi - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN - Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	2 Tahun setelah data diperbaharui 2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawab kan/diaudit	3 Tahun	- Musnah - Musnah

-138-

1	2	3	4	5
	c Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	2 Tahun sejak kebijakan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Musnah
	d Standarisasi Jabatan - Informasi Jabatan - Kompetensi Jabatan - Klasifikasi Jabatan	2 Tahun setelah standar baru ditetapkan	3 Tahun	Permanen
3	Formasi Pegawai - a Usulan dari Unit kerja 1) Analisis jabatan 2) Analisis beban kerja - b Usulan permintaan formasi 1) Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan - c Persetujuan formasi dari Menpan 1) Surat persetujuan formasi dari Menpan - d Penetapan formasi di Perguruan Tinggi 1) SK Penetapan formasi - e Penetapan formasi khusus 1) SK Penetapan formasi khusus	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah tahun anggaran berakhir 2 tahun setelah realisasi	2 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun	- Musnah - Musnah - Musnah - Musnah - Permanen
4	Pengadaan ASN PNS - a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test,	2 Tahun setelah diangkat PNS	2 Tahun	Musnah

-139-

1	2	3	4	5
	5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian 8) Keputusan kelulusan			
	b Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	1 tahun setelah tahun anggaran	-	Masuk berkas perseorangan
	c Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	1 tahun setelah tahun anggaran	1 tahun	Musnah
	d Usul dan kelengkapan penetapan NIP 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP	-	-	Masuk berkas perseorangan
	e Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun Pengangkatan CPNS	1 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Masuk berkas perseorangan
	f SK CPNS/PNS Kolektif 1) SK CPNS/PNS Kolektif	2 Tahun setelah SK ditetapkan	3 Tahun	Permanen, Petikan masuk berkas perseorangan
	g Usul dan kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN)	1 tahun	1 tahun	

-140-

1	2	3	4	5
	1) Pengajuan Nomor Induk Dosen 2) Surat persetujuan			Musnah, kecuali NIDN masuk berkas perseorangan
	h Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)	2 Tahun sejak kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Musnah
5	Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/ Pegawai Kontrak			
	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian	2 tahun setelah diangkat ASN P3K	3 Tahun	Musnah
	b Pengangkatan ASN P3K 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	2 tahun	-	Masuk berkas perseorangan
	c Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	1 tahun setelah tahun anggaran	-	Masuk berkas perseorangan
	d Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran	1 tahun setelah tahun anggaran	1 tahun	Musnah

-141-

1	2	3	4	5
	2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter			
6	Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas			
a	Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian	2 tahun setelah diangkat pegawai honorer	3 Tahun	Musnah
b	Pengangkatan Pegawai Honorer/ harian lepas 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	2 tahun	-	Masuk berkas perseorangan
c	Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	1 tahun setelah tahun anggaran	-	Masuk berkas perseorangan
d	Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	1 tahun setelah tahun anggaran	1 tahun	Musnah

-142-

1	2	3	4	5
7	Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai			
a	Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi 1) Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut 2) Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi 3) Laporan hasil tes masuk perguruan tinggi yang dituju 4) Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar, surat perintah/tugas belajar/sk/surat ijin, surat-surat sponsor, laporan perkembangan studi, laporan halangan/ketidakmampuan/rintangan selama studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah, akreditasi program studi, STTPL, Sertifikat	1 tahun setelah studi lanjut selesai	3 tahun	Musnah kecuali ikatan kerja, surat perjanjian tugas/ijin belajar, dan ijazah masuk berkas perseorangan
b	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1) SKP	1 Tahun setelah kenaikan pangkat/jabatan terakhir	1 tahun	Musnah
c	Pakta Integritas 1) Pakta Integritas	2 tahun	-	berkas perseorangan
d	Penetapan Angka Kredit (PAK) 1) DUPAK/DUPNK 2) PAK	1 tahun anggaran berjalan	2 Tahun	Musnah kecuali SK PAK masuk berkas perseorangan
e	Sertifikasi Pegawai 1) Portofolio 2) Sertifikat	Selama masih berlaku	5 Tahun	Musnah, kecuali portofolio masuk berkas perseorangan

-143-

1	2	3	4	5
	f Kode Etik	2 Tahun sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
	g Disiplin pegawai 1) Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran	1 tahun anggaran berjalan	2 tahun	Musnah
	h Hukuman disiplin 1) Surat Pemanggilan 2) Surat Peringatan 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) Pernyataan Tidak Puas 5) SK Pemberian hukuman disiplin 6) Permohonan Banding 7) SK Ketetapan banding	1 tahun anggaran berjalan	2 Tahun setelah berkekuatan hukum tetap	Musnah kecuali BAP dan SK masuk berkas perseorangan
	i Penghargaan dan tanda jasa 1) Surat pengajuan penghargaan dan tanda jasa 2) SK 3) Sertifikat/ Piagam	2 Tahun setelah SK ditetapkan	2 Tahun	Musnah kecuali SK/piagam masuk berkas perseorangan
8	Sistem Informasi Kepegawaian			
	a Pengolahan data dan informasi kepegawaian - Pengolahan Data - Pengelolaan database kepegawaian ASN - Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN - Informasi kepegawaian - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN - Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah

-144-

1	2	3	4	5
	b Pengembangan sistem informasi kepegawaian	2 Tahun setelah diperbaharui	3 Tahun	Musnah
	c Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian - Arsip kepegawaian elektronik - Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian - Perekaman dan arsip kepegawaian - Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik - Arsip Kepegawaian Fisik	2 Tahun setelah diperbaharui 1 Tahun	3 Tahun 2 Tahun	Permanen Musnah
	9 Pengawasan dan pengendalian			
	a Formasi, pengadaan dan pasca diklat - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	b Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	c Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	d Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah

-145-

1	2	3	4	5
	e Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
	f Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer	2 Tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan dinyatakan selesai	1 tahun	Musnah
10	Mutasi Pegawai			
	a Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Nota persetujuan/pertimbangan BKN 4) Surat Keputusan	1 tahun setelah ditetapkan	2 tahun setelah menjalankan tugas	Musnah kecuali nota persetujuan/pertimbangan BKN dan SK masuk berkas perseorangan
	b Mutasi keluarga 1) Surat Izin Pernikahan/Perceraian 2) Surat Penolakan Izin Pernikahan/Perceraian 3) Surat Nikah /Ceraai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal dunia	2 tahun	-	Masuk berkas perseorangan
	c Usul kenaikan pangkat Golongan 1) Surat persetujuan Kenaikan Pangkat/ Golongan 2) SK Kenaikan Pangkat/golongan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali nota dan SK masuk berkas perseorangan

-146-

1	2	3	4	5
	d Kenaikan Gaji berkala 1) Usulan persetujuan kenaikan gaji berkala 2) Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	2 tahun		Masuk berkas perseorangan
	e Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 1) Usulan dan SK Kenaikan Jabatan 2) Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan 3) Usulan dan SK pemberhentian Jabatan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan
	f Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai 1) Surat Usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai 2) Nota persetujuan 3) SK 4) Surat Persetujuan	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali surat persetujuan dan SK masuk berkas perseorangan
	g Peninjauan masa kerja 1) Surat Usulan penetapan Peninjauan masa kerja 2) Nota persetujuan 3) SK 4) Surat Persetujuan	2 Tahun setelah ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali nota dan SK masuk berkas perseorangan
	h Berkas BAPERJAKAT 1) Surat undangan rapat 2) Daftar hadir rapat 3) Notula 4) Laporan hasil BAPERJAKAT	1 tahun setelah SK ditetapkan	5 tahun	Musnah
11	Administrasi Pegawai			
	a Cuti besar 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	2 Tahun setelah SK ditetapkan	-	Masuk berkas perseorangan

-147-

1	2	3	4	5
	b Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	1 tahun setelah pelaksanaan	2 tahun	Musnah
	c Cuti alasan penting 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	1 Tahun setelah dilaksanakan	2 tahun	Musnah
	d Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	3 tahun setelah pelaksanaan	-	Masuk berkas perseorangan
	e Dokumentasi identitas pegawai 1) Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu 2) LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN) 3) LHKKPN (Laporan Harta Kekayaan KPN) 4) Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan 5) LP2P/SPT Tahunan/NPWP 6) KP4	1 tahun setelah identitas ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali keanggotaan organisasi profesi/kedinasan masuk berkas perseorangan
	f Daftar Urut kepengkatan (DUK)	2 tahun	1 tahun	Musnah
12	Kesejahteraan Pegawai			
	a Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai 1) Rekam Medis 2) Kartu Anggota 3) Surat Keterangan Sehat 4) Surat Keterangan Sakit	2 tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat	1 tahun	Musnah, kecuali rekam medis masuk berkas perseorangan

-148-

1	2	3	4	5
	b Asuransi Pegawai/BPJS atau sejenisnya 1) Surat permohonan Pendaftaran penawaran asuransi 2) Salinan Kartu Anggota BPJS atau sejenisnya	Selama masih berlaku	-	Musnah, kecuali salinan Kartu anggota BPJS atau sejenisnya Masuk berkas perseorangan
	c Tabungan Perumahan 1) Surat permohonan Pendaftaran Penawaran Perumahan 2) Salinan Kartu Anggota Tabungan Perumahan atau sejenisnya	Selama masih berlaku	-	Musnah, kecuali salinan Kartu Anggota tabungan perumahan atau sejenisnya Masuk berkas perseorangan
	d Bantuan Sosial 1) Tanda Terima 2) Surat Ucapan	1 tahun	1 tahun	Musnah
	e Rekreasi 1) Surat pengajuan rekreasi	2 tahun	3 tahun	Musnah
13	Pemberhentian pegawai 1) Usulan pemberhentian pegawai 2) Penetapan pemberhentian pegawai	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah, kecuali SK Masuk berkas perseorangan
14	Perselisihan/Sengketa kepegawaian 1) Surat Pengaduan 2) Notula 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) SK 5) Laporan	1 tahun setelah memperoleh keputusan tetap	2 tahun setelah hak dan kewajiban habis	Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan

-149-

1	2	3	4	5
15	Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 1) Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 2) SK pemberhentian dan penetapan pensiun	1 tahun setelah SK ditetapkan	2 tahun	Musnah kecuali SK masuk berkas perseorangan
16	Berkas perseorangan Pegawai ASN PNS 1) Berkas lamaran yang diterima 2) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya 3) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 4) SK Pengangkatan CPNS 5) Hasil Pengujian Kesehatan 6) SK Pengangkatan PNS 7) SK Peninjauan Masa Kerja 8) SK Kenaikkan Pangkat 9) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan 10) Surat Pernyataan Pelantikan 11) SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional 12) SK Perpindahan Wilayah Kerja 13) SK Perpindahan Antar Instansi 14) SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) 15) Berita Acara Pemeriksaan 16) SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS 17) SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk 18) SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan 19) SK Pemberian Uang Tunggu 20) SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara 21) SK Pengalihan PNS	1 tahun setelah berhenti/pensiun	9 tahun	Musnah kecuali pejabat yang setara eselon 1, 2, dan pejabat lain yang secara individual ditentukan oleh instansi dan PNS yang berjasa/terlibat peristiwa berskala nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan Permanen

-150-

1	2	3	4	5
	22) SK Pemberhentian sebagai PNS 23) SK Pemberhentian Sementara 24) Surat Keterangan Pernyataan Hilang 25) Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang 26) SK Penggantian Nama 27) Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran 28) Surat Nikah/Cerai 29) Akta Kelahiran 30) Isian Formulir PUPNS 31) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan 32) Surat Permohonan Menjadi Anggota Parpol 33) Surat Keterangan Mutasi Keluarga 34) Surat Keterangan Meninggal Dunia 35) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan 36) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional 37) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus 38) Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala 39) Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri 40) Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri 41) Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS 42) Ijazah/Sertifikat 43) SK Penempatan/ Penarikan Pegawai 44) SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk 45) Surat Pertimbangan Status PNS 46) SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS 47) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organisasi karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah 48) SK Pensiun			

-151-

1	2	3	4	5
17	Berkas perseorangan ASN P3K 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	1 tahun setelah berhenti	4 tahun	Musnah
18	Berkas Perseorangan Pegawai Honorer 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	1 tahun setelah berhenti	4 tahun	Musnah
19	Penilaian Kompetensi 1) Berkas Penilaian Kompetensi 2) Hasil Penilaian Kompetensi	2 Tahun setelah penilaian berakhir	3 Tahun	Musnah
XIII KEUANGAN				
1	Pelaksanaan Anggaran			
	a Pendapatan 1) Surat Setoran Pajak (SSP)/ Buku Pajak	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawabana APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali

-152-

1	2	3	4	5
	2) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawabana APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali
	3) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawabana APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali
	4) Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau SSPB	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawabana APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali
	5) Bunga dan/atau jasa giro pada bank	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawabana APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali

-153-

1	2	3	4	5
	6) Piutang negara	Selama piutang belum tertagih	5 tahun	dinilai kembali
	7) Pengelolaan barang milik negara	Selama barang masih dikuasai	1 tahun	Permanen
	8) Dana pemerintah	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	8 tahun	Musnah
	9) Dana masyarakat	2 tahun setelah tahun anggaran berakhir	8 tahun	Musnah
	b Belanja			
	1) Dokumen pelaksanaan barang/jasa pemerintah: a. Barang habis pakai	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	3 tahun	Musnah
	b. Barang inventaris bergerak	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali
	c. Barang inventaris tidak bergerak (tanah dan bangunan)	Selama barang masih dikuasai	1 tahun	Permanen

-154-

1	2	3	4	5
	d. Jasa	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali
	e. Software computer	Selama software masih digunakan/ 2 tahun setelah hasil pemeriksaan selesai	1 tahun	Permanen
	2) Dokumen pembayaran keuangan	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali
	3) Dokumen tata usaha anggaran: a. Buku kas umum b. Buku kas pembantu c. Buku/kartu pengawas kredit anggaran d. rekening koran bank	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawaban APBN disahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali
	4) Daftar gaji/tunjangan/lembur/honorarium	2 tahun setelah tindak lanjut audit/pemeriksaan telah selesai	3 tahun	Musnah

-155-

1	2	3	4	5
	5) Kartu gaji	2 tahun setelah pegawai pensiun	3 tahun	dinilai kembali
	6) Bukti setor iuran/ kontribusi pemerintah RI kepada badan/organisasi internasional	2 tahun setelah tindak lanjut audit/pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali
	7) Laporan arus kas/dokumen akuntansi keuangan: -Berita Acara Pemeriksaan - Kas/register penutupan kas - Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer - Laporan pendapatan negara - laporan kredit anggaran bulanan/triwulan/semester	2 tahun setelah tindak lanjut audit/pemeriksaan telah selesai	5 tahun	Musnah
	8) Laporan keuangan tahunan: a. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer b. Neraca c. Catatan atas laporan keuangan	2 tahun setelah tindak lanjut audit/pemeriksaan telah selesai	5 tahun	Permanen
2	Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri			
	a Permohonan pinjaman luar negeri (blue book) 1) Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	b Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book) 1) Daftar kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	3 tahun	Permanen
	c Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya 1) Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen

-156-

1	2	3	4	5
	d Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN) 1) Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN)	3 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	e Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri 1) Laporan Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	f Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN) 1) Reimbursement 2) Direct payment/transfer procedure 3) Special commitment/L/C/ opening 4) Special account/imprest fund 5) Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri 6) Notice of disbursement	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	g Otorisasi penarikan dana (payment advice) 1) Laporan Otorisasi penarikan dana (payment advice)	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	h Realisasi pencairan dana bantuan/pinjaman/hibah luar negeri 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3) Kontrak 4) Berita Acara 5) Data pendukung lainnya	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	i Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) 1) No objection letter (NOL) 2) Project implementation 3) Notification of contract 4) Withdrawal authorization (WA) 5) Statement of expenditure	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen

-157-

1	2	3	4	5
	j Staff Appraisal Report	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	k Report /laporan 1) Laporan kemajuan, 2) Laporan berkala bulanan, 3) Laporan berkala triwulanan, 4) Laporan akhir	2 tahun setelah perjanjian pinjaman berakhir	5 tahun	Permanen
	l Laporan hutang negara 1) Laporan pembayaran dan laporan posisi hutang negara	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawabana APBN disyahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	Permanen
	m Ketentuan/kebijakan yang menyangkut hibah luar negeri 1) SOP/ Prosedur Tetap	2 tahun setelah tindak lanjut audit/pemeriksaan telah selesai	1 tahun	permanen
3	Pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)			
	a Penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 1) SK Kuasa pengguna anggaran 2) SK Kuasa pengguna barang/jasa 3) SK Pejabat pembuat komitmen 4) SK Pejabat pembuat daftar gaji 5) SK Pejabat penandatanganan SPM 6) SK Bendahara penerimaan/pengeluaran	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawabana APBN disyahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali

-158-

1	2	3	4	5
	7) SK Pengelola barang 8) Berita acara serah terima jabatan			
4	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)			
	a Manual Implementasi sistem akuntansi Instansi (SAI)	1 tahun setelah ketentuan/peraturan diperbarui	2 tahun	Permanen
	b Kebijakan Akuntansi 1) Pedoman akuntansi 2) Panduan akuntansi 3) SOP	Selama belum ada perubahan	2 tahun	Permanen
	c Arsip data komputer dan Berita acara rekonsiliasi 1) Berita acara rekonsiliasi	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawabana APBN disyahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	Musnah
	d Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PK), penerimaan (PN), dokumen sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS), surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)	2 tahun setelah UU tentang pertanggungjawabana APBN disyahkan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	Musnah
	e Laporan realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran 1) Laporan bulanan SAI 2) Laporan triwulan SAI 3) Laporan Semesteran SAI	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	2 tahun	Musnah

-159-

1	2	3	4	5
5	Pertanggungjawaban Keuangan			
	a Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI	2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan telah selesai	5 tahun	dinilai kembali
	b Dokumen penyelesaian kerugian negara 1) Tuntutan perbendaharaan 2) Tuntutan ganti rugi	2 tahun setelah tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi	2 tahun setelah hak dan kewajibannya habis	dinilai kembali
XIV	BADAN USAHA			
1	Legalitas 1) Akte Pendirian Badan Usaha 2) Surat Izin Usaha 3) NPWP 4) Keputusan Kemenhum 5) Pengumuman Berita Negara 6) Register di Pengadilan Negeri Setempat	Selama Badan Usaha masih berdiri	1 tahun	Permanen
2	Surat Keputusan Direksi 1) Usulan SK Direksi 2) SK Direksi yang ditandatangani	2 tahun	3 tahun	Permanen
3	Rencana Pendapatan dan Belanja 1) Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2) Notula Rapat penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja 3) Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja	3 tahun	2 tahun	Musnah, kecuali penetapan RAPB Permanen
4	Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham) 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll)	2 tahun	3 tahun	Permanen, kecuali administrasi rapat Musnah

-160-

1	2	3	4	5
	2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat			
5	Rapat Komisaris 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat	2 tahun	3 tahun	Permanen, kecuali administrasi rapat Musnah
6	Rapat Manajer Unit dan Direksi 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat	2 tahun	3 tahun	Permanen, kecuali administrasi rapat Musnah
7	Data Konsumen 1) Daftar Nama dan alamat konsumen 2) Database konsumen	2 tahun setelah pembaharuan	3 tahun	Musnah
8	Laporan Perusahaan 1) Neraca 2) Laporan Berkala (Triwulan, Tahunan)	1 tahun	10 tahun	Permanen

C. SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

SKKAAD di PTN di kelompokkan menjadi 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi substantif dan fungsi fasilitatif sebagaimana daftar berikut:

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP SUBSTANTIF

NO.	KLASIFIKASI	CONTOH JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PENERIMAAN MAHASISWA											
1	TM.00	Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)										
	TM.00.00	a Daya tampung mahasiswa 1) Usulan daya tampung dari Fakultas, Program Studi, Jurusan 2) Notula Rapat Daya tampung 3) Penetapan Daya Tampung	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.01	b Petunjuk PMB 1) Juklak dan Juknis PMB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.02	c Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 1) Usulan Nama-nama dalam kepanitian PMB 2) Pelaksanaan tugas dan kegiatan PMB 3) Operasional Rapat panitia PMB dan notula rapat 4) Pelaksanaan kegiatan PMB 5) Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Khusus 6) Pengiriman informasi PMB ke SMU 7) SK Penetapan Panitia PME	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.00.03	d Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa 1) Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa 2) Isian Formulir 3) Buku Panduan pengisian (jadwal penerimaan)	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	 Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.04	e Ujian Masuk Perguruan Tinggi 1) Berkas seleksi penerimaan mahasiswa baru (Kartu peserta, Daftar hadir peserta, daftar hadir pengawas, berita acara, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

- 164 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.00.05	f Naskah Soal Ujian 1) Naskah soal nasional	Rahasia	√	√			√	Eselon II pada Universitas/Institut atau Eselon III pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.06	g Hasil Penilaian Ujian Masuk Perguruan Tinggi 1) Lembar Jawaban Ujian 2) Rekap Nilai Ujian	Terbatas Terbatas	√ √	√ √			√ √	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik Unit yang membidangi bidang akademik

- 165 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Berita Acara Pelaksanaan Ujian	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		4) Pendaftaran Calon Mahasiswa	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		5) Ujian Seleksi -Ujian Tes masuk -hasil tes buta warna -daftar hadir peserta ujian -hasil Psikotes -nilai Uji Keterampilan -hasil/nilai Wawancara -hasil Tes bebas narkoba -Pakta integritas -tata tertib	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

- 166 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) TPA/ TES PSIKOTES	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		7) Naskah soal lokal	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.07	h Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB 1) Notula rapat Penetapan Mahasiswa yang diterima 2) SK Penetapan Mahasiswa yang diterima 3) Pengumuman mahasiswa yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.08	i Mahasiswa Asing 1) Surat izin mahasiswa asing -Visa Tinggal -Visa Belajar	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang akademik

- 167 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Rekomendasi mahasiswa asing -Permohonan rekomendasi mahasiswa asing -Jawaban atas permohonan rekomendasi mahasiswa asing 3) Registrasi mahasiswa asing -Pendaftaran mahasiswa asing -Surat menyurat dalam rangka pendaftaran mahasiswa asing 4) -kartu induk mahasiswa -kartu mahasiswa -KRS -KHS -Kartu Daftar Ulang -Kartu tanda registrasi administrasi mahasiswa -kartu peserta kuliah/praktikum -kartu tanda anggota perpustakaan/cyber -surat keterangan izin 5) Jaminan Sponsor							atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain		Nomor 14 Tahun 2008	
	TM.00.09	j Mahasiswa utusan daerah 1) Rekomendasi 2) Biodata	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

- 168 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Politeknik atau sebutan lain			
		3) Surat Jawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) MoU Perguruan tinggi dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TM.00.10	k Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD)										
		1) Rekomendasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		2) Biodata	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

- 169 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Jawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) MoU Perguruan tinggi dengan Lembaga lain	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TM.00.11	l Laporan PMB										
		1) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.00.12	m Data Peminat/Jumlah Peminat/Pilihan Peminat										
		1) Data Statistik Peminat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	TM.01	Registrasi mahasiswa	Terbatas	√	√	√	√	√				
	TM.01.00	a Registrasi Mahasiswa Baru										
		1) Biodata Mahasiswa baru							Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		2) Pembuatan Kartu Mahasiswa										
		3) Registrasi pendaftaran mahasiswa										
		4) Bukti pembayaran										
		5) Bukti diterima sebagai mahasiswa										
		6) SK Penetapan Mahasiswa dan Nomor Induk Mahasiswa										

-170-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.01.01	b Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama 1) Bukti pembayaran 2) Persetujuan Dosen Wali/ Pembimbing Akademik 3) KHS 4) KRS	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.02	c Ketetapan Biaya Perkuliahan 1) Surat Usulan Perhitungan BKT dan UKT berikut lampirannya (Tabel Perhitungan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagai usulan)	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.03	d Penentuan Biaya Perkuliahan										Unit yang membidangi bidang akademik

-171-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Penentuan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TM.01.04	c Penyesuaian Biaya Perkuliahan 1) Usulan dari mahasiswa untuk penyesuaian UKT 2) Penetapan Penyesuaian UKT 3) Berita Acara mengenai Konfirmasi Penyesuaian UKT	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	TM.01.05	f Laporan Pelaksanaan Registrasi 1) Daftar Rekapitulasi Mahasiswa yang melakukan registrasi 2) Slip Pembayaran Registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
3	TM.02	Orientasi Mahasiswa Baru										
	TM.02.00	a Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru 1) Draf panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru 2) Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

-172-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TM.02.01	b Sosialisasi Peraturan Akademik 1) Surat Undangan 2) Notula 3) Laporan 4) Daftar hadir 5) Materi sosialisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	TM.02.02	c Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru 1) Proposal 2) Kepanitiaan 3) Presensi Orientasi Mahasiswa 4) Materi Orientasi Mahasiswa 5) Salinan sertifikat/piagam/surat keterangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	TM.02.03	d Evaluasi dan Laporan orientasi 1) Evaluasi 2) Notula 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
II KURIKULUM												
1	KR.00	Penyusunan Kurikulum										
	KR.00.00	a Pedoman kurikulum 1) Usulan penyusunan kurikulum fakultas/ program studi 2) Notula Rapat 3) Exit Survey 4) Master Pedoman Kurikulum 5) Deskripsi matakuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

-173-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KR.00.01	b Perubahan/penyempurnaan kurikulum/pengembangan kurikulum 1) Surat edaran 2) Tim penyusun re-Kurikulum, Notula rapat 3) Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4) Hasil Focus Group Discussion 5) Kurikulum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	KR.00.02	c Penetapan kurikulum 1) Usulan 2) Draf	Terbatas Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik Unit yang membidangi bidang akademik

-174-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Master SK Kurikulum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	KR.01	Pelaksanaan Kurikulum										
	KR.01.00	a Pedoman/Panduan Akademik										
		1) Draf Pedoman/Panduan Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
		2) Pedoman/Panduan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	KR.01.01	b Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Analysis Instructional										
		2) Dokumen Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)										

-175-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KR.01.02	c Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/ Silabus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Satuan acara perkuliahan										
		2) Satuan acara perkuliahan berisi jadwal dan materi tiap matakuliah										
		3) Deskripsi Mata kuliah										
		4) Modul-modul tiap matakuliah										
		5) Sajian matakuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB)										
	KR.01.03	d Satuan Acara Praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Panduan dan Pedoman Praktik/Praktikum										
		2) Isian Penilaian oleh Instruktur dan Penilai Praktek Satuan acara praktikum pada tiap matakuliah praktikum										
	KR.01.04	e Penyusunan Bahan ajar/modul perkuliahan/praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Bahan ajar/ bahan penunjang/modul pendidikan/modul perkuliahan/praktikum										
	KR.01.05	f Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		1) Desain instruksional										
		2) manual alat peraga										
		3) model pembelajaran										
III	TENAGA PENDIDIK											
1	TD.00	Kebutuhan tenaga pengajar/ pendidik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		1) Pengajuan kebutuhan tutor										
		2) Hasil seleksi administrasi										
		3) Tutor yang diterima										

- 176 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	TD.01	Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik 1) Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
3	TD.02	Kepakaran 1) Buku Kepakaran 2) Surat Keputusan tentang Kepakaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
4	TD.03	Rasio Dosen dengan Mahasiswa 1) Data Statistik Mahasiswa 2) Identitas dosen dan ampunan matakuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
5	TD.04	Daftar hadir mengajar 1) Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)/ Tutor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
6	TD.05	Pembimbing Akademik 1) Surat Penunjukan Pembimbing Akademik dari Program Studi 2) SK Master/minuta Pembimbing Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

- 177 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	TD.06	Pembimbing/ Penguji Tugas Akhir 1) Surat Tugas Pembimbing/Penguji 2) SK Pembimbing/Penguji	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
IV KEMAHASISWAAN												
1	KM.00	Status Mahasiswa										
	KM.00.00	a Surat Keterangan Aktif Kuliah 1) Surat Keterangan 2) Bukti registrasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.01	b Cuti mahasiswa/dispensasi 1) Surat permohonan cuti kuliah 2) SK cuti kuliah mahasiswa 3) Surat penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa (masa cuti habis wajib registrasi) ngak ada penetapan pengaktifan	Terbatas	√	√	√	√	√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.02	c Perpanjangan masa studi 1) Surat Usulan 2) Surat Persetujuan 3) KRS	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

-178-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.00.03	d Evaluasi Masa Studi 1) Surat Pemberitahuan 2) Transkrip Nilai Sementara	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.04	e Mutasi mahasiswa/pindah 1) Surat Permohonan ybs 2) Surat Pengantar dari Prodi 3) Surat Pengantar dari Fakultas 4) Surat Pengantar dari Universitas 5) Surat Jawaban	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.05	f Skorsing 1) Surat peringatan 2) Usulan skorsing 3) Penetapan skorsing	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

-179-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.00.06	g Pengunduran diri 1) Surat peringatan 2) Usulan pengunduran diri 3) Penetapan pengunduran diri	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.07	h Drop Out 1) Usulan Program Studi 2) Usulan Fakultas 3) Surat Peringatan 4) SK Penetapan DO	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.00.08	j Mahasiswa meninggal dunia 1) Surat Keterangan Kematian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
2	KM.01	Kesejahteraan Mahasiswa										
	KM.01.00	a Beasiswa 1) Persyaratan Beasiswa 2) Usulan pengajuan 3) Notula rapat hasil penerima beasiswa 4) Penetapan penerima beasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

- 180 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Laporan kemajuan penerima beasiswa 6) Laporan Pengelolaan beasiswa										
	KM.01.01	b Keringanan/Penundaan biaya pendidikan 1) Surat permohonan 2) Surat Pengantar Prodi 3) Surat Pengantar Fakultas 4) Surat Jawaban	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.01.02	c Layanan Kesehatan 1) Registrasi pasien	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		2) Kartu pasien	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		3) Rujukan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

- 181 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Klaim asuransi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		5) Laporan dan monitoring layanan kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
		6) Rekam Medis dan bimbingan konseling	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.01.03	d Penyuluhan kesehatan 1) Laporan Penyuluhan Kesehatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
3	KM.02	Asrama										
	KM.02.00	a Peraturan Asrama 1) Draf Peraturan Asrama 2) Peraturan Asrama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan

- 182 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KM.02.01	b Seleksi dan Penetapan 1) Daftar Nama Pendaftar 2) Hasil Seleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan
	KM.02.02	c Berkas Perseorangan Penghuni Asrama 1) Surat pernyataan/perjanjian 2) Bukti Pembayaran	Biasa/Terbuka Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi disesuaikan
	KM.02.03	d Kegiatan Penghuni Asrama 1) Surat Usulan Izin Kegiatan 2) Surat Jawaban Izin Kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan

- 183 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KM.03	Penggunaan fasilitas mahasiswa (gelanggang, lapangan, sanggar, dll) 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan
5	KM.04	Organisasi Mahasiswa										
	KM.04.00	a Pembentukan organisasi 1) Usulan Pembentukan Organisasi 2) Notula Rapat 3) Surat Keputusan 4) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.04.01	b Pengangkatan / Pemberhentian pengurus 1) Usulan Pengangkatan/ Pemberhentian Pengurus 2) Surat Keputusan Pengurus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.04.02	c Program kerja/kegiatan 1) Proposal Kegiatan 2) Surat Ajuan 3) Surat Jawaban atas usulan program kerja/kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.04.03	d Laporan pelaksanaan kegiatan 1) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

- 184 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	KM.05	Pembinaan Mahasiswa										
	KM.05.00	a Kegiatan rutin (UKM) 1) Proposal Kegiatan 2) Surat Permohonan 3) Surat Izin 4) Laporan kegiatan mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05.01	b Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 1) Proposal Kegiatan 2) Surat Permohonan	 Terbatas Terbatas	 √	 -	 √	 -	 √	 Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	 Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	 Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

- 185 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat Izin	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		4) Laporan kegiatan mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi		
	KM.05.02	c Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll) 1) Surat Rekomendasi	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

- 186 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Hasil Psikotes	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KM.05.03	d Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, nasional, internasional 1) Laporan kegiatan lomba	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05.04	e Prestasi Mahasiswa 1) Usulan Nama Mahasiswa 2) Seleksi mahasiswa berprestasi 3) Pengumuman mahasiswa berprestasi 4) Surat-menyurat berkenaan dengan mahasiswa berprestasi 5) Sertifikat bagi mahasiswa berpretasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	KM.05.05	f Inventori mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan

- 187 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	KM.06	Organisasi himpunan orang tua mahasiswa										
	KM.06.00	a Pembentukan organisasi 1) Draf Organisasi Himpunan Orang Tua 2) Peraturan Organisasi Himpunan Orang Tua	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.01	b Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus 1) Draf SK Pengangkatan/Pemberhentian pengurus 2) SK Pengangkatan/Pemberhentian pengurus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.02	c Kegiatan organisasi 1) Laporan perkegiatan organisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	KM.06.03	d Laporan 1) Laporan berkala	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi

- 188 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	KM.07	Berkas Perseorangan Mahasiswa 1) Kartu mahasiswa 2) Kartu Rencana Studi (KRS) 3) Kartu hasil studi (KHS) 4) Kartu Tanda registrasi / administrasi mahasiswa (KTRM) 5) Surat Keterangan izin/tugas 6) Sertifikat/ piagam/ surat keterangan orientasi mahasiswa baru 7) Berkas pendaftaran mahasiswa 8) Nilai tugas akhir 9) Piagam/ Sertifikasi KKN/KKM 10) Sertifikat/ penghargaan bagi mahasiswa berprestasi 11) Salinan Ijazah 12) Salinan Transkrip Nilai 13) Biodata Mahasiswa	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
V PERKULIAHAN												
1	PK.00	Penyusunan Kalender Akademik 1) Surat Undangan Rapat 2) SK Tim 3) Draft Kalender Akademik 4) Notula Rapat 5) Penetapan Kalender Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	PK.01	Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum										
	PK.01.00	a Penyusunan Jadwal Perkuliahan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√				

- 189 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Surat Undangan Rapat 2) Draft Jadwal Perkuliahan 3) Notula Rapat 4) Jadwal Perkuliahan								Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.01	b Daftar mahasiswa peserta mata kuliah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.02	c Penyelenggaraan Kuliah Tamu/Kuliah Umum/Kuliah Perdana 1) Daftar hadir 2) Materi perkuliahan 3) SK Penetapan Dosen Tamu/Kuliah Umum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.03	d Pelaksanaan Perkuliahan 1) Daftar hadir dan Laporan Kehadiran 2) Materi/tutorial	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.04	e Pelaksanaan Praktikum 1) Daftar hadir dan Laporan Kehadiran 2) Materi 3) Surat peminjaman dan penggunaan laboratorium 4) SOP Praktikum 5) Daftar Inventaris Alat dan Bahan Praktikum 6) Laporan Praktikum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

- 190 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.01.05	f Kuliah lintas prodi/lintas fakultas 1) Usulan matakuliah 2) GBPP 3) Laporan kuliah lintas prodi/lintas fakultas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.06	g Magang/PKL 1) Permohonan magang/PKL 2) Persetujuan/penolakan 3) Jadwal pelaksanaan magang/PKL 4) Presensi 5) Laporan 6) Surat keterangan melakukan magang/PKL	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.01.07	h Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum 1) Dokumen Evaluasi 2) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
3	PK.02	Kegiatan Multiprodi/Multifakultas/Student exchange/Double Degree/Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree										
	PK.02.00	a Perencanaan Kegiatan 1) Dokumen penawaran 2) Usulan/pendaftaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang

- 191 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Proses seleksi 4) Penetapan hasil seleksi								kinerja Perguruan Tinggi		kemahasiswaan
	PK.02.01	b Kontrak kerja sama 1) Usulan draf kontrak kerja sama 2) Kontrak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	PK.02.02	c Berita acara serah terima -	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
	PK.02.03	d Ketetapan Pendanaan 1) Draf SK Pendanaan 2) SK Pendanaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kemahasiswaan
4	PK.03 PK.03.00	Ujian a Panitia penyelenggara ujian 1) SK tim panitia penyelenggara ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

-192-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Undangan rapat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Notula rapat	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	
	PK.03.01	b Tata tertib ujian 1) SOP tata tertib ujian 2) Juklak 3) Juknis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.02	c Pengumuman dan jadwal ujian 1) Pengumuman ujian 2) Jadwal ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

-193-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.03.03	d Naskah soal ujian 1) UTS 2) UAS	Terbatas Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.04	e Pengawas ujian 1) SK tim pengawas 2) Daftar hadir pengawas 3) Jadwal pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.05	f Berita Acara ujian dan daftar hadir ujian 1) Berita acara 2) Daftar hadir peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

-194-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.03.06	g Nilai hasil ujian 1) Rekapitulasi Nilai hasil ujian	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.07	h Kartu Hasil Studi (KHS) 1) Rekapitulasi Kartu Hasil Studi	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf h Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.03.08	i Laporan Tugas Akhir 1) Tugas akhir 2) Skripsi 3) Tesis 4) Disertasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
5	PK.04	Yudisium										
	PK.04.00	a Administrasi Yudisium 1) Lembaran yudisium 2) Daftar transkrip nilai sementara	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang akademik

-195-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Notula rapat yudisium							atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain		Nomor 14 Tahun 2008	
	PK.04.01	b Penetapan Kelulusan 1) SK Kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
6	PK.05	Ijazah dan transkrip										
	PK.05.00	a Surat Keterangan Lulus	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

- 196 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PK.05.01	b Nomor Induk registrasi lulusan 1) Buku Registrasi	Biasaa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.02	c Salinan ijazah dan transkrip nilai 1) Tanda terima	Biasaa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
		2) Sainan Ijazah	Biasaa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Salinan Transkrip Nilai	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	PK.05.03	d Surat kehilangan ijazah/transkrip nilai	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat	Pasal 17 huruf h	Unit yang membidangi

- 197 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Tanda terima 2) Surat Laporan Kepolisian							Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang akademik
	PK.05.04	e Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai 1) Tanda terima 2) Surat Keterangan Penganti Ijazah	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	PK.05.05	f Surat keterangan pendamping ijazah 1) Tanda terima 2) Surat keterangan pendamping ijazah untuk profesi	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

- 198 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI	DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK											
1	DI.00	Data mahasiswa										
	DI.00.00	a Data prestasi mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Akademik Fakultas
	DI.00.01	b Data inventori mahasiswa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Akademik Fakultas
	DI.00.02	c Data nilai akhir/transkrip	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Akademik Fakultas
	DI.00.03	d Data mahasiswa asing	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Akademik Fakultas
2	DI.01	Statistik perguruan tinggi										
	DI.01.00	a Data Statistik Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Akademik Fakultas

- 199 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	DI.02	Bursa Pendidikan										
		1) Lowongan Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Humas
4	DI.03	Data Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Akademik Fakultas
		1) Data kepakaran										
		2) Data lulusan mahasiswa/ data lulusan mahasiswa terbaik										
		3) Data mahasiswa program beasiswa										
5	DI.04	Informasi akademik										
	DI.04.00	a Profil Lembaga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DI.04.01	b Publikasi dan informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
		1) Materi Publikasi dan Informasi										
	DI.04.02	c Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
		1) Data Pendidikan Tinggi										

-200-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.04.03	d Buku Wisuda	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DI.04.04	e Buku Dies Natalis	Biaaa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
	DI.04.04	f Orasi ilmiah 1) Daftar hadir 2) Materi Orasi Ilmiah 3) SK Panitia Orasi Ilmiah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan
6	DI.05	Pengembangan Akademik										
	DI.05.00	a Pembentukan Tim 1) Usulan Pengembangan Akademik	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

-201-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Tim Pengembangan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	DI.05.01	b Proposal dan Studi Kelayakan 1) Proposal dan Hasil Studi Kelayakan Pengembangan Akademik	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.02	c Naskah Akademik 1) Usulan Naskah Akademik 2) Naskah Akademik yang diterima	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik

-202-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	DI.05.03	d Penetapan 1) Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	DI.05.04	e Laporan dan Evaluasi 1) Laporan dan Evaluasi Pengembangan Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
VII PENUNJANG AKADEMIK												
1	TA.00	Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/ Kebun, Lahan Percobaan /Rumah Produksi/ Pusat Kajian										
	TA.00.00	a Layanan Praktikum 1) Surat Permohonaan Izin penggunaan laboratorium 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Jurusan/ Program Studi

-203-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.00.01	b Layanan Pengujian 1) Surat Permohonaan Izin penggunaan Layanan Pengujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		disesuaikan
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Hasil Pengujian	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	TA.00.02	c Layanan Kalibrasi 1) Surat Permohonaan Izin penggunaan laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Jurusan/ Program Studi
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-204-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Kalibrasi	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Jurusan/ Program Studi
	TA.00.03	d Layanan Penelitian										
		1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Hasil Penelitian	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-205-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									k atau sebutan lain	persaingan usaha tidak sehat		
	TA.00.04	e Layanan Bahasa										Lab. Bahasa
		1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Data Peserta Kursus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Hasil Pengujian Bahasa	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-206-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	TA.01	Perpustakaan										
	TA.01.00	a Pengembangan koleksi 1) Daftar pengembangan koleksi dari internal perguruan tinggi: - Daftar buku terseleksi - Daftar buku dalam pemesanan - Daftar buku dalam permintaan 2) Pembelian buku/jurnal/majalah oleh perpustakaan 3) Program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka 4) Hibah/ hadiah/ sumbangan buku untuk perpustakaan 5) Penyediaan bahan perpustakaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan
	TA.01.01	b Pengolahan bahan perpustakaan 1) Panduan Katalogisasi 2) Panduan Klasifikasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan
	TA.01.02	c Pelayanan perpustakaan 1) Kebijakan Layanan Perpustakaan 2) Layanan perpustakaan 3) Surat menyurat usulan, saran yang berkaitan dengan layanan bagi peminjaman 4) Layanan dengan fasilitas komputerisasi (layanan elektronik)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan

-207-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.01.03	d Preservasi bahan perpustakaan 1) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit 2) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan
	TA.01.04	e Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Materi/Bahan 4) Laporan f Keanggotaan Perpustakaan 1) Kartu Anggota 2) Daftar Anggota	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		UPT Perpustakaan UPT Perpustakaan
3	TA.02	Arsip Perguruan tinggi										
	TA.02.00	a Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip 1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2) Penyiapan kebijakan 3) Perumusan kebijakan 4) Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit Kearsipan I
	TA.02.01	b Pembinaan kearsipan 1) Akreditasi Lembaga Kearsipan										Unit Kearsipan I

-208-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		a) Proses Akreditasi	Terbatas	√	√			√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		b) Berkas Penetapan Akreditasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Sertifikasi Arsiparis										
		a) Proses Sertifikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		b) Berkas Penetapan Sertifikasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-209-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									IV pada Politeknik atau sebutan lain			
		c) Data base sertifikasi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Bina Arsiparis								Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		a) Pengembangan profesi arsiparis - Formasi jabatan arsiparis - Standar kompetensi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		b) Bimbingan konsultasi arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		c) Penilaian arsiparis	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		d) Pemilihan arsiparis teladan - Penyelenggaraan arsiparis teladan - Penetapan arsiparis teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	

-210-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		e) Database arsiparis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Bimbingan dan Konsultasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		a) Penetapan Sistim										
		b) Penggunaan Sarana dan Prasarana										
		c) Unit Kearsipan										
		d) Sumber Daya Manusia										
		5) Supervisi dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		a) Perencanaan										
		b) Pelaksanaan										
		c) Laporan hasil supervisi dan evaluasi										
		6) Database Bimbingan Konsultasi dan Supervisi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-211-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Fasilitas Kearsipan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		a) SDM Kearsipan										
		b) Sarana dan Prasarana										
		8) Lembaga Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		a) Penyelenggaraan										
		b) Berkas Penetapan Lembaga Kearsipan Teladan										
		9) Unit Kearsipan Teladan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		a) Penyelenggaraan										
		b) Berkas Penetapan Unit Kearsipan Teladan										
	TA.02.02	c) Persetujuan Jadwal Retensi Arsip	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit Kearsipan I
		a) Penyusunan rancangan/Revisi JRA di Perguruan Tinggi										
		b) Permohonan Persetujuan JRA sampai dengan Persetujuan Kepala ANRI										

-212-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.02.03	d Pengelolaan Arsip Statis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit Kearsipan I
		1) Akuisisi										
		a) Monitoring Fisik dan Daftar										
		b) Verifikasi terhadap Daftar Arsip										
		c) Penetapan Status Arsip Statis										
		d) Persetujuan untuk Penyerahan										
		e) Penetapan Arsip yang akan diserahkan										
		f) Berita Acara Penyerahan Arsip										
		g) Daftar Arsip yang diserahkan										
		2) Sejarah Lisan										
		a) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan										
		b) Hasil Wawancara Sejarah Lisan										
		- Berita Acara										
		- Laporan Kegiatan										
		- Hasil Wawancara dan transkrip										
		3) Daftar Pencarian Arsip Statis										
		- Pengumuman										
		- Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis										

-213-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Penghargaan dan Imbalan										
		5) Pengolahan										
		a) Penataan Informasi										
		b) Penataan Fisik										
		c) Penyusunan Sarana Bantu Temu Balik										
		- Guide										
		- Daftar Arsip Statis										
		- Inventaris Arsip Statis										
		6) Preservasi										
		a) Preventif										
		1) Penyimpanan										
		2) Pengendalian Hama Terpadu										
		3) Reproduksi (alih media): berita acara alih media dan daftar arsip yang dialihmediakan										
		4) Perencanaan dan Penanggulangan Bencana										
		b) Kuratif										
		-Perawatan Arsip										
		c) Laporan Hasil Pengujian Mutu Preservasi										

-214-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Atentifikasi Arsip Dinamis - Pembuktian Autentisitas - Pendapat Tenaga Ahli - Pengujian - Penetapan Autentisitas Arsip Statis/Surat Pernyataan Pencipta Arsip 8) Akses Arsip Statis a) Layanan Arsip b) Penerbitan Naskah Sumber 1) Administrasi dan Proses Penyusunan 2) Hasil Naskah Sumber Arsip 9) Pameran Arsip										
	TA.02.04	e Pengawasan 1) Pengawasan Eksternal 2) Pengawasan Internal	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-215-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	TA.03	Museum										
	TA.03.00	a Kebijakan tentang Permuseuman 1) Panduan/Pedoman/SOP Permuseuman 2) SK Pendirian Museum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.01	b Penambahan koleksi 1) Usulan penambahan koleksi 2) Persetujuan Pemimpin Museum	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.02	c Identitas/Deskripsi koleksi/ Daftar koleksi 1) Daftar koleksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.03	d Register Koleksi Cagar Budaya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.04	e Konservasi 1) Daftar Koleksi 2) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi

-216-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.03.05	f Penilaian dan Penghapusan koleksi 1) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
	TA.03.06	g Dokumen Peminjaman 1) Surat Pengajuan 2) Surat Persetujuan 3) Isian Formulir/ Buku Peminjaman 4) Pakta Integritas 5) Berita Acara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Museum Perguruan Tinggi
5	TA.04	Kebun Binatang										
	TA.04.00	a Kebijakan tentang Pengelolaan Kebun Binatang 1) Pedoman/Panduan/SOP Pengelolaan 2) Kebun Binatang 3) SK Pendirian Kebun Binatang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit pengelola kebun binatang
	TA.04.01	b Data Binatang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit pengelola kebun binatang
	TA.04.02	c Penangkaran Binatang 1) Data Penangkaran Binatang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit pengelola kebun binatang
	TA.04.03	d Tukar Menukar Binatang 1) Surat Pengajuan 2) Surat Persetujuan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit pengelola

-217-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Isian Formulir/ Buku Peminjaman 4) Pakta Integritas 5) Berita Acara								kinerja Perguruan Tinggi		kebudayaan
	TA.04.04	e Pemeliharaan/ Perawatan Binatang 1) Isian Formulir Pemeliharaan/Perawatan Binatang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit pengelola kebun binatang
6	TA.05	Rumah Sakit										
	TA.05.00	a Dewan Pengawas 1) Usulan Anggota Dewan Pengawas 2) SK Dewan Pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.01	b Dewan Pembina 1) Usulan Anggota Dewan Pembina 2) SK Dewan Pembina	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.02	c Badan Koordinasi Pendidikan 1) Usulan Anggota Badan Koordinasi Pendidikan 2) SK Badan Koordinasi Pendidikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit

-218-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.03	d Komite	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
		1) Usulan Anggota Komite										
		2) SK Komite										
	TA.05.04	e Satuan Pengawasan Intern										Rumah Sakit
		1) Usulan Anggota Satuan Pengawasan Intern	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) SK Satuan Pengawasn Intern	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-219-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Hasil Pengawasan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	TA.05.05	f Medik dan Keperawatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
		1) Usulan Tenaga Medik dan Keperawatan										
		2) SK Tenaga Medik dan Keperawatan										
	TA.05.06	g Non Medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
		1) Usulan Tenaga Non Medik										
		2) SK Tenaga Non Medik										
	TA.05.07	h Dokter tamu	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
		1) Usulan Dokter Tamu										
		2) SK Dokter Tamu										

-220-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.08	i Penunjang medik 1) Usulan Penunjang medik 2) SK Penunjang medik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.09	j Rekam medik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
	TA.05.10	k Farmasi 1) Daftar Obat 2) Daftar Suplier	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.11	l Pemulasaran jenazah 1) Berita Acara Pemulasaran Jenazah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.12	m Kegiatan Akademik dan riset 1) Renstra riset RS 2) Proposal/TOR 3) Hasil Riset 4) Evaluasi 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit

-221-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									sebutan lain			
	TA.05.13	n Laporan coass (co assistant) 1) Permohonan coass 2) Persetujuan/penolakan 3) Jadwal pelaksanaan coass 4) Presensi 5) Laporan	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	√ √ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	√ √ √ √	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	 Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit

-222-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Surat keterangan melakukan coass	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TA.05.14	o Rujukan fasilitas kesehatan 1) Surat penerimaan rujukan 2) Surat pemberian rujukan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
	TA.05.15	p Asuransi 1) Surat Permohonan Klaim Asuransi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.16	q Laporan kelahiran 1) Rekapitulasi tingkat kelahiran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.17	r Laporan kematian 1) Rekapitulasi tingkat kematian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit

-223-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.18	s Laporan kejadian kecelakaan 1) Laporan kejadian kecelakaan saat Lebaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.19	t Laporan perkembangan pasien 1) Data statistik 2) Laporan perkembangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.20	u Laporan kasus terbanyak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.21	v Kasus khusus 1) Laporan Kasus khusus	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Rumah Sakit
	TA.05.22	w Laporan Intern Rumah Sakit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit

-224-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TA.05.23	x Laporan Ekstern Rumah Sakit	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
	TA.05.24	y Izin Praktik Profesi Kesehatan 1) Surat izin praktik profesi kesehatan (dokter, perawat, apoteker, bidan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Rumah Sakit
VIII PENELITIAN												
1	PT.00	Kebijakan Penelitian 1) Renstra penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
2	PT.01	Penjaminan Mutu Penelitian										
	PT.01.00	a Penawaran Penelitian 1) Panduan penelitian 2) Informasi penerimaan proposal penelitian 3) SK tim reviewer 4) Hasil penilaian proposal 5) SK proposal yang diterima	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

-225-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PT.01.01	b Perencanaan penelitian 1) Proposal yang diterima 2) Proposal yang ditolak	Terbatas Terbatas	√ √	 √	 √	 √	 √	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
	PT.01.02	c Pendanaan Penelitian 1) Laporan Keuangan Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

-226-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PT.01.03	d Kontrak/ Perjanjian										
		1) Draf Kontrak/perjanjian	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
		2) Kontrak Perjanjian	Biasa/Terbuka	√	√	√		√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PT.01.04	e Izin Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√		√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
		1) Surat Permohonan										
		2) Surat Persetujuan/Penolakan										
	PT.01.05	f Pelaksanaan Penelitian										
		1) Kontrak Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√		√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

-227-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2) Surat Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008			
		3) Penetapan biaya penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi				
		4) Laporan Penelitian	Terbatas	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat						
	PT.01.06	g Seminar/Workshop Hasil Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM		
	PT.01.07	h Desiminasi/Publikasi Hasil Penelitian	1) Proposal											
			2) Penetapan Pembicara											
			3) Jadwal acara											
	PT.01.07	h Desiminasi/Publikasi Hasil Penelitian	1) Materi Diseminasi/Publikasi Hasil Peneltian								Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM	

-228-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PT.01.08	i Pemanfaatan Hasil Penelitian 1) Laporan Pemanfaatan Hasil Penelitian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PT.01.09	j Monitoring, Laporan dan Evaluasi, Statistik Penelitian 1) Sertifikat Penelitian 2) Data Statistik 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
3	PT.02	Forum Penelitian 1) Dokumen Kegiatan 2) Laporan Kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
4	PT.03	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)										
	PT.03.00	a Pengajuan paten 1) Surat Pengajuan Paten	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM

-229-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Sertifikat Paten	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PT.03.01	b Pengajuan Hak Cipta 1) Surat Pengajuan Hak Cipta 2) Sertifikat Hak Cipta	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √		Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008		LPPM
				√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PT.03.02	c Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten 1) Surat Permohonan Pembiayaan Paten	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

-230-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PT.03.03	d Data Paten/Hak Cipta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
IX	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT											
1	PM.00	Kuliah Kerja Nyata										
	PM.00.00	a Pedoman/panduan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.01	b Administrasi KKN (Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN) 1) Administrasi Survei Lapangan, Pendaftaran Peserta, Penetapan Lokasi, Pembimbing KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.02	c Pembekalan KKN 1) Pengumuman 2) Daftar Hadir 3) Materi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.03	d Pelaksanaan KKN 1) Daftar Hadir 2) Laporan kegiatan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

-231-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.00.04	e Nilai KKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
	PM.00.05	f Sertifikat KKN 1) Salinan Sertifikat KKN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	LPPM
	PM.00.06	g Statistik KKN 1) Data Statistik KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.07	h Pengembangan KKN 1) Program Pengembangan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

-232-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.00.08	i Asuransi Mahasiswa KKN 1) Data Klaim Asuransi KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.00.09	j Laporan KKN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
2	PM.01	Layanan Masyarakat										
	PM.01.00	a Penawaran Pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.01.01	b Kontrak perjanjian 1) Surat Kontrak Perjanjian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.01.02	c Pembinaan 1) Laporan Pembinaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
	PM.01.03	d Bantuan Sosial 1) Laporan Bantuan Sosial	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

-233-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PM.01.04	e Monitoring dan evaluasi 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
3	PM.02	Data statistik pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
4	PM.03	Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian 1) Laporan Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
5	PM.04	Penerbitan hasil pengabdian 1) Laporan Pengabdian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM
6	PM.05	Forum Pengabdian Kepada Masyarakat 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		LPPM

-234-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	PUBLIKASI JURNAL/BUKU											
1	PJ.00	Pengajuan										
	PJ.00.00	a Proposal Publikasi	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.00.01	b Naskah Jurnal/Buku	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

-235-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.00.02	c Penilaian dan Review Proposal/ Naskah	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
		1) Hasil Penilaian dan Review Proposal/ Naskah										
	PJ.00.03	d Sidang Review Proposal	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
		1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan										
	PJ.00.04	e Pendampingan dan Workshop	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
		1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Sidang 4) Materi/Bahan 5) Laporan										

-236-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.00.05	f Kontrak Penerbitan 1) Kontrak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
2	PJ.01	Produksi										
	PJ.01.00	a Pembuatan Lembar Kerja 1) Lembar Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.01.01	b Proses Pengeditan 1) Hasil pengeditan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.01.02	d Master Jurnal/Buku 1) Master Jurnal/Buku yang sudah diterbitkan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

-237-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PJ.01.03	c ISSN/ISBN 1) Pengajuan ISSN/ISBN 2) Daftar ISSN/ISBN	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
3	PJ.02	Pemasaran dan Evaluasi										
	PJ.02.00	a Dokumen Pemasaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.02.01	b Evaluasi 1) Laporan Evaluasi Publikasi Jurnal/Buku	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing
	PJ.02.02	c Laporan Akhir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit disesuaikan di perguruan tinggi masing-masing

-238-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI	WISUDA DAN ALUMNI											
1	WA.00 WA.00.00	Wisuda a penyelenggaraan wisuda 1) Berkas pendaftaran dan persyaratan wisuda 2) Surat usulan fakultas/ sekolah/prodi, jurusan 3) Penetapan daftar wisudawan 4) Penetapan panitia wisuda 5) Notula rapat panitia wisuda 6) Daftar hadir wisudawan 7) Sambutan Rektor/Direktur 8) Sambutan wakil wisudawan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
										Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	-	Unit yang membidangi bidang akademik
	WA.00.01	b Biodata wisudawan 1) Daftar Biodata Wisudawan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
	WA.00.02	c Sumpah Profesi 1) Presensi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik

-239-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Berita Acara 3) Naskah sumpah profesi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	WA.00.03	d Laporan kegiatan wisuda 1) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang akademik
2	WA.01	Alumni										
	WA.01.00	a Data/Buku induk alumni	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	WA.01.01	b Statistik Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi disesuaikan

-240-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1) Data Statistik Alumni								kinerja Perguruan Tinggi		tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	WA.01.02	c Organisasi alumni 1) SK Pembentukan Organisasi Alumni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	WA.01.03	d Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring 1) Laporan Kegiatan Bursa Kerja/Job hunting/Campus Hiring	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi
	WA.01.04	e Tracer studi 1) Hasil Tracer Studi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi disesuaikan tupoksi unit kerja masing-masing perguruan tinggi

-241-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XII	PENJAMINAN MUTU											
1	JM.00	Audit Mutu Akademik Internal/ Eksternal 1) Instrumen audit 2) Borang audit 3) Hasil Audit 4) Laporan 5) Tindak lanjut hasil audit	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang penjaminan mutu
2	JM.01	Akreditasi										
	JM.01.00	a Akreditasi Nasional 1) Borang 2) SK Penetapan Akreditasi dari BAN-PT	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik, disesuaikan
			Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi			

-242-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	JM.01.01	b Akreditasi Internasional										
		1) Borang	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang akademik, disesuaikan
		2) SK Penetapan Akreditasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	JM.02	Sertifikasi										
	JM.02.00	a Sertifikasi Nasional										
		1) Portofolio/Usulan	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

-243-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Borang	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Sertifikat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	JM.02.01	b Sertifikasi Internasional										
		1) Portofolio	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
		2) Sertifikat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-244-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XIII	TATA PAMONG											
1	TP.00	Majelis Wali Amanat (MWA)										
	TP.00.00	a Peraturan/Surat Keputusan MWA 1) Usulan 2) Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/Surat Keputusan MWA 3) SK MWA 4) Peraturan MWA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		MWA
	TP.00.01	b Notula/risalah rapat MWA 1) Notula 2) Risalah Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	MWA
	TP.00.02	c Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 1) Surat Usulan 2) Pertimbangan MWA 3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 4) Notula 5) Pelaksanaan Kegiatan 6) Keputusan MWA Tentang Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 7) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		MWA

-245-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.00.03	d Data anggota MWA 1) Surat-surat usulan dari Fakultas 2) Keputusan MWA tentang anggota MWA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		MWA
2	TP.01	Senat Akademik										
	TP.01.00	a Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik 1) Usulan 2) Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/ Surat Keputusan Senat Akademik 3) SK Senat Akademik 4) Peraturan Senat Akademik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.01.01	b Notula/risalah rapat Senat Akademik 1) Notula 2) Risalah Rapat Senat Akademik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

-246-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.01.02	c Penyusunan Kode etik 1) Draf 2) Peraturan Senat Akademik Tentang Kode Etik	Terbatas Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik	
	TP.01.03	d Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 1) Surat Usulan 2) Pertimbangan Senat Akademik 3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 4) Notula 5) Materi presentasi calon pemimpin perguruan tinggi 6) Hasil pemilihan senat pemimpin perguruan tinggi 7) Pelaksanaan Kegiatan 8) Keputusan Senat Akademik Tentang Pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi 9) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik	

-247-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TP.01.04	e	Pemberian Gelar Doktor HC 1) Usulan 2) Notula Rapat 3) Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi 4) Keputusan Senat Akademik 5) Buku Acara Pengukuhan 6) Naskah Orasi Ilmiah 7) Berita Acara Penganugerahan Honoris Causa 8) Dokumentasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
TP.01.05	f	Dewan Kehormatan Universitas (DKU) 1) SK Dewan Kehormatan Universitas (DKU)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
TP.01.06	g	Izin Pembukaan Fakultas, Vokasi, Departemen, Bagian, Jurusan/Prodi 1) Surat Usulan 2) Notula Rapat	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik

-248-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Borang	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		4) SK Pemberian Izin	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	TP.01.07	h Data Anggota Senat Akademik 1) Keputusan Tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik 2) Berita Acara Pemilihan Anggota Senat Akademik dari Fakultas-Fakultas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik

-249-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.01.08	i Pertimbangan Jabatan Fungsional Dosen 1) Dokumen Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang bersangkutan 2) Surat Keputusan Fungsional 3) Dokumen Penilai Jabatan	Rahasia	√	√	√			Eselon II pada Universitas/Institut atau Eselon III pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Senat Akademik

-250-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	TP.02	Dewan Guru Besar (DGB)										
	TP.02.00	a Peraturan/Surat Keputusan DGB										Senat Akademik
		1) Usulan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Notula Rapat terkait pembahasan peraturan/Surat Keputusan Dewan Guru Besar	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		3) SK Dewan Guru Besar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Peraturan Dewan Guru Besar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-251-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.02.01	b Rapat DGB	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
		1) Notula/Risalah Rapat Dewan Guru Besar										
	TP.02.02	c Pelaksanaan Kode Etik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
		1) Dokumen Kode Etik Internal										
	TP.02.03	d Pengukuhan Guru Besar	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
		1) Surat Pengantar										
		2) Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme										
		3) Surat Keterangan Reviewer										
		4) Buku Karya Guru Besar										
		5) Naskah Orasi ilmiah										
		6) Daftar hadir										
		7) SK Dari Dirjen Dikti										
		8) Orasi Ilmiah										
	TP.02.04	e Peluncuran Buku	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
		1) Data Anggota Guru Besar										
		2) Daftar Guru Besar										
		3) CV Guru Besar										
		4) Karya Ilmiah Guru Besar										
		5) Penghargaan tingkat nasional dan internasional guru besar										

-252-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.02.05	f Apresiasi kepada Masyarakat 1) Laporan Apresiasi kepada masyarakat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
4	TP.03	Komite Audit/ Dewan Audit										
	TP.03.00	a Data anggota Komite Audit 1) SK auditor oleh rektor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Sekretariat Senat
	TP.03.01	b Laporan review hasil audit 1) Daftar hadir auditor dan auditee 2) Temuan hasil audit 3) Laporan close pada temuan 4) Persetujuan kedua belah pihak auditor dan auditee 5) Laporan	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sekretariat Senat

-253-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.03.02	c Laporan review RKAT	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Sekretariat Senat
5	TP.04	Dewan Pengawas										
	TP.04.00	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pengawas 1) Usulan 2) SK dewan pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.04.01	b Notula/risalah rapat Dewan Pengawas 1) Daftar hadir dewan pengawas 2) Notula rapat dewan pengawas 3) Keputusan rapat dewan pengawas	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

-254-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.04.02	c Data anggota dewan pengawas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.04.03	d Laporan Dewan Pengawas 1) Kegiatan Dewan Pengawas 2) Daftar Hadir kegiatan 3) Notula rapat dewan pengawas 4) Hasil Rapat dewan pengawas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Senat Akademik
6	TP.05	Dewan Pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
	TP.05.00	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan 1) Usulan 2) SK Dewan Pertimbangan										
	TP.05.01	b Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan 1) Notula rapat 2) Laporan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik

-255-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.05.02	c Data Anggota Dewan Pertimbangan										Senat Akademik
		1) Data anggota pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		2) Kegiatan dewan pertimbangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Notula kegiatan dewan pertimbangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	

-256-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.05.03	d Laporan Dewan Pertimbangan										
		1) Daftar hadir	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
		2) Laporan dewan pertimbangan	Terbatas	√	√	√			Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
7	TP.06	Dewan Penyantun										
	TP.06.00	a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Penyantun	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
		1) Usulan										
		2) SK Dewan Penyantun										

-257-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TP.06.01	b Notula/risalah rapat Dewan Penyantun	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
		1) Daftar Hadir										
		2) Notula rapat										
		3) Keputusan rapat										
	TP.06.02	c Data Anggota Dewan Penyantun	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Senat Akademik
		1) Data dewan penyantun										
	TP.06.03	d Laporan Dewan Penyantun	Terbatas	√	√	√	√	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Senat Akademik
		1) Notula rapat										
		2) Laporan dewan penyantun										

-258-

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP FASILITATIF

NO.	KLASIFIKASI	CONTOH JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	PENGGUNA YANG BERHAK AKSES*					HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)	UNIT PENGOLAH
				1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	PERENCANAAN											
1	PR.00	Pokok-pokok kebijakan dan strategi pembangunan										
	PR.00.00	a Rencana Pembangunan Jangka Panjang /master plan (RPJP) bidang pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.00.01	b Rencana Pembangunan Jangka Menengah /RPJM bidang pendidikan Rencana Strategis	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.00.02	c Rencana Operasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.00.03	d Program kerja tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukungnya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan

-259-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Usulan dari perguruan tinggi 3) Program kerja tahunan unit kerja 4) Program kerja tahunan perguruan tinggi										
2	PR.01	Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja (RAPB)										
	PR.01.00	a Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.01.01	b Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.01.02	c Penyusunan RAPB 1) Arah kebijakan, strategis, prioritas dan renstra perguruan tinggi serta petunjuk penyusunan anggaran 2) Rencana anggaran kerja perguruan tinggi (RAKIP) dan RKAKL (termasuk usulan anggaran dari unit organisasi) 3) Rancangan anggaran satuan kerja Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
3	PR.02	Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja										
	PR.02.00	a Pembahasan/penelaahan anggaran 1) Surat Undangan 2) Notula Rapat 3) Hasil Pembahasan/penelaahan anggaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan

-260-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.02.01	b Ketetapan pagu indikatif/pagu sementara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.02	c Ketetapan pagu definitif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.03	d Rencana kerja anggaran 1) Rencana Kerja Anggaran unit kerja 2) Rencana Kerja Anggaran perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.04	e Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petunjuk operasional kegiatan (POK) dan revisinya	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.05	f Ketentuan yang menyangkut pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.02.06	g Target penerimaan negara bukan pajak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan

-261-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	PR.03	Revisi Anggaran										
	PR.03.00	a Rupiah Murni 1) Revisi anggaran Rupiah Murni	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.03.01	b PNPB 1) Revisi anggaran PNPB	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.03.02	c Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) 1) Revisi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri / Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri (BPPTNBH)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
5	PR.04	Laporan										
	PR.04.00	a Laporan Berkala 1) Laporan bulanan 2) Laporan triwulan 3) Laporan semesteran 4) Laporan tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan

-262-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PR.04.01	b Laporan insidental	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.04.02	c LAKIP 1) LAKIP Unit Kerja 2) LAKIP Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
6	PR.05	Monitoring dan Evaluasi										
	PR.05.00	a Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
	PR.05.01	b Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi 1) Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan
7	PR.06	Ketentuan/kebijakan yang menyangkut penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 1) Pedoman/panduan/SOP penyusunan anggaran 2) Pedoman/panduan/SOP pelaksanaan anggaran 3) Pedoman/panduan/SOP pertanggungjawaban anggaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perencanaan

-263-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	HUKUM											
1	HK.00	Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi 1) Peraturan Pemerintah 2) Peraturan Presiden 3) Keputusan Presiden 4) Instruksi Presiden 5) Peraturan Menteri 6) Keputusan Menteri 7) Instruksi Menteri	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
2	HK.01	Peraturan Rektor, Direktur, Ketua 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft 4) Master Peraturan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
3	HK.02	Keputusan Rektor, Direktur, Ketua 1) Surat undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum

-264-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Notula	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		3) Draf	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		4) Master Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
4	HK.03	Peraturan dekan/direktur/ketua lembaga 1) Surat undangan 2) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang hukum

-265-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Draf 4) Master Peraturan								kinerja Perguruan Tinggi		
5	HK.04	Keputusan dekan /direktur/ketua lembaga 1) Surat undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		2) Notula	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		3) Draf	Terbatas						Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	

-266-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Master Keputusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
6	HK.05	Instruksi Rektor 1) Surat undangan 2) Notula	Biasa/Terbuka Terbatas	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √	 Eselon III pada Universit as /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	 Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	 Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang hukum

-267-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Draf	Terbatas						Eselon III pada Universit as /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		4) Master Instruksi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
7	HK.06	Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap 1) Surat undangan 2) Notula 3) Draft 4) Master Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum

-268-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	HK.07	MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/draft sampai dengan rancangan final, Telaah/kajian/evaluasi dan pertimbangan hukum, Naskah asli yang ditandatangani, Risalah pembuatan MoU, Kontrak, perjanjian)										
	HK.07.00	a Dalam Negeri										
		1) Administrasi penandatanganan MoU, MoA dan PKS (undangan, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		2) MoU/ Nota Kesepahaman	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		3) MoA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		4) Perjanjian Kerjasama (PKS)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum

-269-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.07.01	b Luar Negeri										
		1) MoU/ Nota Kesepahaman	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		2) MoA	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
		3) Perjanjian Kerjasama (PKS)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
9	HK.08	Sosialisasi/penyuluhan dan pembinaan hukum										
	HK.08.00	a Sosialisasi/ penyuluhan hukum										
		1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum

-270-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.08.01	b Pembinaan Hukum 1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang hukum
10	HK.09	Bantuan dan konsultasi hukum/advokasi										
	HK.09.00	a Pidana 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum /advokasi pidana	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.09.01	b Perdata 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi perdata	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

-271-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HK.09.02	c Tata Usaha Negara 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi tata usaha negara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.09.03	d Ketenagakerjaan 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi ketenagakerjaan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.09.04	e Internasional 1) Surat permohonan 2) Surat persetujuan/penolakan 3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi internasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

-274-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
	HK.10.01	b Perdata 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

-275-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

-276-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membina dan melindungi bidang hukum
	HK.10.02	c Tata Usaha Negara 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

-277-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

-278-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.03	d Arbitrase 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

-279-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

-280-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
	HK.10.04	e Sengketa Adat 1) Surat gugatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
		2) Surat pemanggilan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

-281-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Surat kuasa khusus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
		4) Putusan Sidang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	

-282-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Tindak Lanjut hasil sidang	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	
12	HK.11	Perizinan 1) Surat Permohonan 2) Syarat Perizinan 3) Surat Izin	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum
13	HK.12	Doktrin/ Pendapat Pakar 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Hasil Rekomendasi Doktrin/pendapat pakar	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa	Pasal 17 huruf a dan i Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang hukum

-283-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN											
1	OT.00	Organisasi										
	OT.00.00	a Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
	OT.00.01	b Struktur tugas dan fungsi organisasi 1) Pembentukan 2) Perubahan 3) Pembubaran 4) Evaluasi kelembagaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
2	OT.01	Tata Laksana										
	OT.01.00	a Sistem dan Prosedur Kerja 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
	OT.01.01	b Pembakuan sarana kerja 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
	OT.01.02	c Kajian/Analisis jabatan/Analisis manajemen serta penyuluhan ketatalaksanaan 1) Analisis organisasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi bidang organisasi

-284-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Uraian jabatan 3) Analisis beban kerja 4) Peta jabatan								kinerja Perguruan Tinggi		dan ketatalaksanaan
	OT.01.03	d Standar kompetensi jabatan 1) Struktural 2) Fungsional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
	3	OT.02 Internalisasi Reformasi Birokrasi 1) Surat Undangan 2) Notula Rapat 3) SK Tim Reformasi Birokrasi PTN 4) Rancangan Reformasi Birokrasi PTN 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang organisasi dan ketatalaksanaan
IV KEARSIPAN												
1	KA.00	Pembinaan Kearsipan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kearsipan
2	KA.01 KA.01.00	Pengelolaan Arsip Dinamis a Penciptaan 1) Pencatatan -Buku Agenda -Kartu Kendali	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-285-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Pendistribusian -Ekspedisi										
	KA.01.01	b Penggunaan 1) Pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip 2) Peminjaman arsip	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	3	KA.02 KA.02.00	Pemeliharaan arsip (<i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>) a Pemberkasan 1) Daftar Berkas	Terbatas	√		√		Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
	KA.02.01	b Penataan Arsip Inaktif 1) Pengaturan Fisik 2) Pengolahan informasi arsip 3) Penyusunan daftar arsip inaktif	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-286-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KA.02.02	c Penyimpanan (Fumigasi, dll) 1) Skema penyimpanan arsip 2) Skema pengamanan arsip 3) Daftar arsip 4) Pemeliharaan Arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
	KA.02.03	d Alih media arsip 1) Kebijakan alih media arsip 2) Autentikasi 3) Berita Acara 4) Daftar arsip yang dialihmediakan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
	KA.02.04	Program Arsip Vital dan Arsip Terjaga 1) Identifikasi 2) Perlindungan dan pengamanan 3) Penyelamatan dan pemilihan 4) Berita acara penyerahan salinan arsip terjaga	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan

-287-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Daftar Arsip vital dan arsip terjaga										
4	KA.03	Penyusutan Arsip										
	KA.03.00	a Pemindahan Arsip Inaktif 1) Berita acara pemindahan arsip 2) Daftar arsip yang dipindahkan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
	KA.03.01	b Pemusnahan Arsip 1) SK Tim/Panitia Pemusnahan Arsip 2) Notula Tim/Panitia Pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian 3) Surat Pertimbangan Tim/Panitia Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip 4) Surat Persetujuan dari Pimpinan Pencipta Arsip 5) Surat Persetujuan dari Kepala ANRI (untuk retensi 10 Tahun ke atas) 6) Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Pemusnahan 7) Berita acara pemusnahan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan

-288-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		8) Daftar arsip yang dimusnahkan										
	KA.03.02	c Penyerahan Arsip Statis 1) SK Tim/Panitia Penyerahan Arsip Statis 2) Notula Tim/Panitia Penyerahan arsip pada saat melakukan penilaian 3) Surat Pertimbangan Tim/Panitia Penilai Arsip Kepada Pimpinan Pencipta Arsip 4) Surat Persetujuan dari Lembaga Kearsipan 5) Surat Pernyataan dari Pimpinan Bahwa Arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan 6) Keputusan Pimpinan Pencipta Arsip tentang Pelaksanaan Penyerahan Arsip Statis 7) Berita acara Penyerahan arsip statis 8) Daftar arsip yang diserahkan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kearsipan
V KETATAUSAHAAN												
1	TU.00	Permintaan penggandaan dokumen/arsip 1) Surat Permintaan 2) Isian Formulir 3) Rekapitulasi Permintaan penggandaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang ketatausahaan

-289-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	TU.01	Risalah/notula rapat										
	TU.01.00	a Rapat Staf 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang ketatausahaan
	TU.01.01	b Rapat Pimpinan 1) Surat Undangan 2) Daftar Hadir 3) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang ketatausahaan
VI KERUMAHTANGGAAN												
1	RT.00	Telekomunikasi : telepon, radio, teleks/ Fax, cctv,tv, kabel dan internet										
	RT.00.00	a Penggunaan peralatan 1) Permohonan fasilitas 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan penggunaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-290-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	RT.01	Perjalanan dinas										
	RT.01.00	a Dalam Negeri 1) Surat Tugas 2) SPPD 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan
	RT.01.01	b Luar Negeri 1) Undangan 2) Surat Tugas 3) Pengurusan Visa 4) Surat Setkab 5) Exit permit 6) SPPD 7) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan
3	RT.02	Penggunaan fasilitas kantor 1) Surat permintaan/isian formulir penggunaan ruang, gedung, kendaraan dan fasilitas kantor	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
4	RT.03	Pengurusan kendaraan dinas										
	RT.03.00	a Pengurusan surat-surat kendaraan dinas 1) Pengurusan STNK 2) Pengurusan BPKP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-291-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.03.01	b Pemeliharaan dan perbaikan 1) Laporan Pemeliharaan dan perbaikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.03.02	c Pengurusan kehilangan kendaraan 1) Laporan Pengurusan kehilangan kendaraan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.04	Permohonan pemeliharaan gedung dan taman										
5	RT.04.00	a Pertamanan/landscaping 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.04.01	b Perbaikan gedung 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.04.02	c Perbaikan rumah dinas/wisma 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/Penolakan 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-292-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	RT.04.03	d Kebersihan gedung dan taman 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/ Penolakan 3) Laporan	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	RT.04.04	e Sewa (Tanah, Gedung, Peralatan dan mesin) 1) Permohonan fasilitasi 2) Persetujuan/ Penolakan 3) Laporan	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
6	RT.05	Mekanikal dan engineering : jaringan listrik, air, gas dan komputer										
	RT.05.00	a Pemasangan jaringan/ instalasi listrik, air, gas dan komputer 1) Laporan 2) Gambar teknik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas / Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan
	RT.05.01	b Pengelolaan jaringan/ instalasi listrik, air, gas dan komputer 1) Laporan 2) Gambar teknik	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas / Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang- Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan

-293-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	RT.06	Keamanan dan ketertiban/ Sekuriti										
	RT.06.00	a Pengamanan/ penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus 1) Laporan Pengamanan/ penjagaan dan pengawalan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas / Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat menungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kerumahtanggaan
	RT.06.01	b Ketertiban dan keamanan 1) Laporan Kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
8	RT.07	Pengelolaan parkir 1) Laporan pengelolaan parkir	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
9	RT.08	Pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya 1) Laporan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya	Biasa/ Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-294-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	RT.09	Konsumsi dan akomodasi 1) Laporan konsumsi dan akomodasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
VII PERLENGKAPAN												
1	PL.00	Rencana kebutuhan barang/ Rencana umum pengadaan										
	PL.00.00	a Rencana kebutuhan unit kerja 1) Surat Usulan Rencana Kebutuhan dari Unit Kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.00.01	b Rencana kebutuhan Perguruan Tinggi 1) Surat Usulan Rencana Kebutuhan dari Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
2	PL.01 PL.01.00	Pengadaan barang a Pengadaan barang tidak melalui lelang (penunjukan langsung) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan

-295-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PL.01.01	b Pengadaan barang melalui lelang 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan

-296-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	PL.02	Pengadaan Jasa										
	PL.02.00	a Pengadaan jasa tidak melalui lelang (penunjukan langsung) 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan

-297-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
	PL.02.01	b Pengadaan jasa melalui lelang 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan

-298-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
4	PL.03	Pengadaan barang dan jasa melalui bantuan/hibah 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan

-299-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Company Profile	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		4) Berita acara pemeriksaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		5) Berkas Penawaran Hibah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-300-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	PL.04	Pengadaan Barang dan jasa melalui bantuan/hibah/pinjaman dana asing 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung 2) Company Profile 3) Berita acara serah terima barang 4) Berita acara pemeriksaan 5) Berkas Penawaran	Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	√ √ √ √ √	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan		

-301-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	PL.05	Pengadaan barang dan jasa melalui tukar menukar 1) Pengajuan tukar menukar barang dan jasa 2) Berita Acara Tukar Menukar Barang 3) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
7	PL.06	Pengadaan barang dan jasa melalui pinjaman 1) Pengajuan pinjaman barang dan jasa 2) Berita Acara Pinjaman Barang dan Jasa 3) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
8	PL.07	Pengadaan barang dan jasa melalui sewa 1) Pengajuan sewa barang dan jasa 2) Berita Acara Sewa Barang dan Jasa 3) Berkas Penawaran	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
9	PL.08	Penyimpanan/pergudangan 1) Tanda terima/surat pengantar pengiriman barang 2) Surat pernyataan harga dan mutu barang 3) Serah terima barang 4) Buku penerimaan 5) Buku persediaan barang/kartu stok barang 6) Kartu barang/kartu gudang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan

-302-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	PL.09	Penyaluran/Distribusi 1) Surat penerimaan barang dari unit kerja/formulir permintaan 2) Persetujuan sampai dengan surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) 3) Berita acara serah terima barang 4) Laporan dan berita acara mutasi barang 5) Berita acara serah terima barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
11	PL.10	Inventarisasi barang										
	PL.10.00	a Daftar opname fisik barang inventaris (DOFBI)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.10.01	b Kartu inventaris barang (KIB)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.10.02	c Laporan SIMAK BMN 1) Laporan barang persediaan 2) Laporan bulanan 3) Berita acara rekonsiliasi internal 4) Laporan tengah tahunan/semester 5) Berita acara rekonsiliasi eksternal 6) Laporan tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan

-303-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	PL.11	Perbaikan/pemeliharaan										
	PL.11.00	a Pemeliharaan barang bergerak/inventaris kantor 1) Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan 2) Penawaran pada/dari rekanan 3) Surat perintah kerja (SPK) 4) Berita acara penyelesaian pekerjaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.11.01	b Perbaikan/pemeliharaan barang investasi 1) Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan 2) Penawaran pada/dari rekanan 3) Surat perintah kerja (SPK) 4) Berita acara penyelesaian pekerjaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
13	PL.12	Penghapusan barang										
	PL.12.00	a Penghapusan barang bergerak/inventaris 1) dokumen usulan penghapusan, 2) panitia penghapusan 3) Persetujuan/penolakan 4) berita acara penghapusan barang 5) SK Penghapusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
	PL.12.01	b Penghapusan barang tidak bergerak/investasi 1) dokumen usulan penghapusan 2) panitia penghapusan 3) Persetujuan/penolakan 4) berita acara penghapusan barang	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan

-304-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) SK Penghapusan										
14	PL.13	Bukti-bukti kepemilikan aset 1) Izin Mendirikan Bangunan(IMB) 2) Pajak Bumi Bangunan(PBB) 3) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 5) Sertifikat Tanah 6) Denah gambar bangunan/instalasi listrik, saluran air dan gas, jaringan internet	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan
15	PL.14	Pemanfaatan Aset a Kertas kerja penghitungan tarif b Perjanjian kerjasama 1) Draf Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka Terbatas	√	√	√	√	√	 Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	 Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang perlengkapan Unit yang membidangi bidang perlengkapan

-305-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Perjanjian Kerjasama	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan
16	PL.15	Penggunaan Aset a Ijin Penggunaan tanah 1) Surat Permohonan Izin Penggunaan Tanah 2) Surat Persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah b Ijin Penggunaan aset selain tanah 1) Surat Permohonan Izin Penggunaan aset selain tanah 2) Surat Persetujuan/penolakan Izin Penggunaan aset selain tanah	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√	 √	Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang perlengkapan Unit yang membidangi bidang perlengkapan
VIII HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)												
1	HM.00 HM.00.00	Keprotokolan a Upacara 1) Undangan 2) Susunan Acara 3) Sambutan/Pidato	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehormatan

-306-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.00.01	b Kunjungan Kedinasan										
		1) Surat Permohonan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		2) Surat Persetujuan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		3) Surat Undangan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		4) Surat Tugas Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		5) Laporan Kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

-307-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai										
		1) Surat Permohonan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		2) Surat Persetujuan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		3) Surat Undangan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		4) Surat Tugas Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
		5) Laporan Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

-308-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.00.02	c Dies Natalis 1) Usulan Panitia 2) SK Kepanitiaan 3) Susunan Acara 4) Daftar hadir 5) Orasi 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.03	d Agenda Kegiatan Pemimpin Perguruan Tinggi 1) Jadwal Kegiatan Pemimpin	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.04	e Daftar nama dan alamat pejabat 1) Daftar nama dan alamat kantor pejabat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.00.05	f Dokumentasi/liputan kegiatan pimpinan (rektor, warek, dekan atau yang seajar) dalam acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa dalam berbagai media: kertas/foto/video/rekaman 1) Hasil Dokumentasi 2) Hasil liputan kegiatan pimpinan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

-309-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.00.06	g Pengumpulan pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan 1) Kliping koran 2) Brosur/leaflet/poster 3) Pengumuman/pemberitaan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
2	HM.01	Hubungan antar Lembaga										
	HM.01.00	a Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif) 1) Surat Permohonan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.01	b Hubungan antar perguruan tinggi/Sekolah termasuk magang, pendidikan sistem ganda (PSG), praktek kerja lapangan (PKL) 1) Surat Permohonan Magang/ PSG/PKL 2) Surat Persetujuan Magang/ PSG/PKL 3) Daftar hadir 4) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.02	c Forum kehumasan/bakohumas/perhumas 1) Dokumen kegiatan 2) Laporan kegiatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

-310-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.01.03	d Hubungan dengan media massa 1) Siaran pers/konferensi pers/press release 2) Kunjungan wartawan/peliputan/wawancara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.04	f Hubungan dengan pihak swasta/LSM/Ormas Orpol 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir 4) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.05	g Hubungan Luar Negeri 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Daftar hadir 4) Notula	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.06	h Hearing (dengar pendapat) DPR 1) Surat Undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

-311-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Materi Bahan RDP Terbuka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
		3) Materi Bahan RDP Tertutup	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	
		4) Hasil RDP Tertutup	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	
		5) Hasil RDP Terbuka	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-312-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.01.07	i Bahan/materi untuk sidang kabinet 1) Surat Undangan 2) Materi Bahan Sidang Kabinet 3) Hasil Sidang Kabinet	Rahasia	√		√		√	Eselon II pada Universitas/Institut atau Eselon III pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.08	j Penerbitan majalah, buletin, koran 1) Surat Undangan Rapat 2) Notula 3) Master	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.09	k Publikasi melalui media cetak maupun elektronik 1) Surat Undangan Rapat 2) Notula 3) Master	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.10	l Pameran/sayembara, festival 1) Surat Undangan 2) Notula 3) Proposal/Penawaran 4) Surat Jawaban 5) Materi Pameran 6) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

-313-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	HM.01.11	m Penghargaan/ tanda kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
	HM.01.12	n Ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, permohonan maaf 1) Surat/Ucapan Terimakasih, Bela sungkawa, permohonan maaf	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan
3	HM.02	Layanan Informasi Publik (PPID) 1) Permohonan Permintaan Informasi Publik 2) Prosedur Permintaan Informasi layanan informai publik 3) Aspirasi publik 4) Sanggahan Informasi 5) Sengketa Informasi 6) Mediasi 7) Laporan layanan informasi publik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kehumasan

-314-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
IX	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
1	DL.00	Pedoman kediklatan 1) Usulan Pedoman 2) Buku Panduan/ Buku Manual	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
2	DL.01	Kurikulum dan Silabus Diklat 1) Kurikulum Diklat 2) Silabus Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
3	DL.02	Jadwal diklat 1) Jadwal diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
4	DL.03	Modul/materi/bahan diklat 1) Notula 2) Modul Diklat 3) Materi Diklat 4) Bahan Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
5	DL.04	Panduan/fasilitator 1) Panduan Fasilitator	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan

-315-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	DL.05	Sosialisasi/koordinasi kebijakan diklat 1) Administrasi 2) Notula 3) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
7	DL.06	Akreditasi lembaga diklat 1) Surat Permohonan Akreditasi 2) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan 3) Berita acara rapat tim penilai 4) Surat Keputusan Penetapan Akreditasi 5) Sertifikasi Akreditasi 6) Laporan Akreditasi lembaga diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
8	DL.07	Sertifikasi sumberdaya manusia kediklatan 1) Surat Permohonan Sertifikasi 2) Laporan Hasil Verifikasi Lapangan 3) Berita acara rapat verifikasi 4) Berita acara rapat tim penilai/ asesor 5) Surat Keputusan Penetapan Sertifikasi 6) Sertifikat dari Sertifikasi 7) Laporan Sertifikasi individual	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
9	DL.08	Sistem informasi Diklat 1) Daftar lembaga 2) Daftar prasarana diklat 3) Daftar sarana Diklat 4) Daftar pengelola Diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan

-316-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5) Daftar Penyelenggara 6) Daftar widyaiswara 7) Daftar Pogram diklat										
10	DL.09	Registrasi peserta diklat 1) Surat permohonan kode register 2) Buku induk register 3) Surat peyampaian kode register	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
11	DL.10	Rencana Tahunan Diklat 1) Rencana Tahunan Diklat 2) Undangan rapat 3) Notula 4) Daftar Hadir rapat 5) Draf penyelenggaraan diklat 6) Laporan rencana tahunan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
12	DL.11	Rencana penyelenggaraan diklat 1) Rencana Tahunan Diklat 2) Undangan rapat 3) Notula 4) Daftar hadir rapat 5) Draf rencana penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
13	DL.12	Penyelenggaraan diklat 1) Surat pemanggilan peserta	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang		Unit yang membidangi

-317-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Surat Keputusan Tim Penyelenggara 3) Surat keputusan tim pengajar 4) Panduan diklat 5) Sambutan pembukaan penyelenggara diklat 6) Bahan ajar diklat 7) Daftar hadir peserta diklat 8) Daftar hadir widyaiswara 9) Isian Formulir evaluasi peserta 10) Isian Formulir evaluasi widyaiswara 11) hasil formulasi evaluasi peserta diklat 12) Sambutan penutup 13) Laporan Penyelenggaraan Diklat								mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		bidang pendidikan dan pelatihan
14	DL.13	Evaluasi penyelenggaraan Diklat 1) Isian formulir evaluasi widyaiswara 2) Isian formulir penyelenggara 3) Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
15	DL.14	Registrasi alumni diklat 1) Surat permohonan nomor register 2) Buku Register 3) Surat Penyampaian kode register 4) Copy SITPL	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan

-318-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	DL.15	Evaluasi alumni pasca Diklat 1) Isian formulir evaluasi alumni peserta pasca diklat 2) Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
17	DL.16	Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan 1) Surat permohonan observasi lapangan 2) Surat persetujuan 3) Surat tugas 4) Jadwal observasi 5) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan
18	DL.17	Seminar/lokakarya/temukarya/workshop 1) Rencana Seminar/lokakarya/temukarya/workshop 2) Notula rapat 3) Daftar hadir rapat 4) Daftar hadir peserta 5) Daftar hadir narasumber 6) Materi Seminar/lokakarya/temukarya/workshop 7) Laporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pendidikan dan pelatihan

-319-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI											
1	TI.00	Organisasi TI										
	TI.00.00	a Rencana Strategis TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.00.01	b Enterprise Architecture 1) Rancangan Enterprise Architecture	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.00.02	c Tata Kelola Teknologi Informasi 1) Rancangan Tata Kelola Teknologi Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-320-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.00.03	d Perencanaan IT	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
2	TI.01	Sistem Informasi										
	TI.01.00	a Perencanaan dan Analisis Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.01.01	b Perancangan Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-321-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.01.02	c Pembangunan dan Implementasi Sistem	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.01.03	d Pemeliharaan Sistem Informasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.01.04	e Dokumentasi Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
		1) Daftar Sistem Informasi										
		2) Laporan Sistem Informasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-322-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Tl.02	Manajemen Layanan Teknologi Informasi										
	Tl.02.00	a Desain Strategi Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	Tl.02.01	b Rancangan Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	Tl.02.02	c Transisi Layanan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	Tl.02.03	d Layanan Operasional	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-323-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Tl.03	Pengelolaan Data										
	Tl.03.00	a Tata Kelola Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	Tl.03.01	b Pengelolaan Arsitektur Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	Tl.03.02	c Pengembangan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-324-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.03.03	d Pengelolaan Pengoperasian Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.03.04	e Pengelolaan Keamanan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.03.05	f Pengelolaan Kualitas Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-325-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	TI.03.06	g Pencadangan (Backup) Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.04	Pengolahan Data										
	TI.04.00	a Perencanaan Pengolahan Data	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.04.01	b Persiapan pengolahan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-326-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.04.02	c Pelaksanaan Pengolahan Data	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.04.03	d Monitoring dan Evaluasi 1) Laporan Hasil Pengolahan Data Monitoring dan Evaluasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
6	TI.05	Jaringan dan Komunikasi										
	TI.05.00	a Analisis Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-327-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.05.01	b Perancangan Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.05.02	c Implementasi Jaringan Komputer	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.05.03	d Pemeliharaan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-328-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.05.04	c Keamanan Jaringan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
7	TI.06	Manajemen Fasilitas TI										
	TI.06.00	a Perencanaan fasilitas TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.06.01	b Pengoperasian dan evaluasi fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-329-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.06.02	c Pemeliharaan fasilitas TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
8	TI.07	Audit TI										
	TI.07.00	a Perencanaan Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.07.01	b Tinjauan Audit TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.07.02	c Analisis data Audit TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-330-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.07.03	d Evaluasi Temuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
9	TI.08	Manajemen Risiko TI										
	TI.08.00	a Identitas risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.08.01	b Penilaian Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-331-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TI.08.02	c Pengendalian Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
	TI.08.03	d Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang teknologi informasi
10	TI.09	Pemetaan TI	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang teknologi informasi

-332-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
XI	PENGAWASAN											
1	PA.00	Rencana Pengawasan										
	PA.00.01	a Rencana Strategis Pengawasan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
	PA.00.02	b Rencana kinerja tahunan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
	PA.00.03	c Penetapan kinerja tahunan 1) Laporan evaluasi penetapan kinerja tahunan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan

-333-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.00.04	d Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi 1) Surat Undangan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan
		2) Notula Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
		3) Daftar Hadir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		

-334-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Hasil Rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	
	PA.00.05	e Rakor pengawasan tingkat nasional 1) Surat Undangan 2) Notula Rakor pengawasan tingkat nasional 3) Daftar Hadir 4) Hasil Rakor pengawasan tingkat nasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
2	PA.01	Program Kerja Pengawasan										
	PA.01.00	a Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 1) Rencana Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan Laporan Program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan

-335-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PA.01.01	b Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional 1) Rencana Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional 2) Laporan Program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
	PA.01.02	c Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan 1) Rencana Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan 2) Laporan Program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
	PA.01.03	d Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 1) Rencana Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 2) Laporan Program AKIP unit kerja di lingkungan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang pengawasan
	PA.01.04	e Program AKIP perguruan tinggi 1) Rencana Program AKIP di lingkungan perguruan tinggi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu		Unit yang membidangi

-336-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Laporan Program AKIP di lingkungan perguruan tinggi								kinerja Perguruan Tinggi		bidang pengawasan
3	PA.02	Pelaksanaan Pengawasan										
	PA.02.00	a Pengawasan Internal	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
		1) Surat penugasan										
		2) Surat pemberitahuan, dll										
		3) laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)										
		4) Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)										
		5) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut										
		6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi										
		7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan										
		8) Laporan keuangan dan review										
		9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan										
		10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan										

-337-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan										
		12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi										
		13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut										
		14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut										
		15) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut										
	PA.02.01	b Pengawasan Eksternal	Terbatas	√		√		√		Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009	Unit yang membidangi bidang pengawasan
		1) Surat penugasan										
		2) Surat pemberitahuan, dll										
		3) laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang memerlukan tindak lanjut (TL)										
		4) Laporan hasil audit (LHA), laporan hasil pemeriksaan (LHP), laporan hasil evaluasi (LHE), laporan akuntan (LA), laporan auditor independen (LAI), yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)										
		5) Laporan hasil audit investigasi (LHAI) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut										
		6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi										

-338-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan 8) Laporan keuangan dan review 9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan 10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan 11) Laporan Hasil Studi Kebijakan Pengawasan Pendidikan 12) Laporan Evaluasi kinerja pada unit kerja di lingkungan perguruan tinggi 13) Laporan Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi yang memerlukan tindak lanjut 14) Laporan evaluasi Kinerja perguruan tinggi yang tidak memerlukan tindak lanjut 15) Laporan hasil audit investigasi (LHAi) yang mengandung tindak pidana korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut - 16) Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat - 17) Laporan perkembangan Barang Milik Negara										
XII KEPEGAWAIAN												
1	KP.00	Kebijakan di bidang manajemen Kepegawaian - Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik - Penyusunan kebijakan - Perumusan kebijakan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-339-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Pemberian masukan dan dukungan - Penetapan kebijakan										
2	KP.01	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara										
	KP.01.00	a Perencanaan Kebutuhan ASN - Bahan penyusunan rencana kebutuhan - Analisis Kebutuhan -Aparatur Sipil Negara -Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) - Pengolahan data kebutuhan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.01	b Perencanaan Pertimbangan Formasi - Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN - Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.02	c Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.01.03	d Standarisasi Jabatan - Informasi Jabatan - Kompetensi Jabatan - Klasifikasi Jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-340-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	KP.02.0	Formasi Pegawai										
	KP.02.00	a Usulan dari Unit kerja 1) Analisis jabatan 2) Analisis beban kerja	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.01	b Usulan permintaan formasi 1) Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.02	c Persetujuan formasi dari Menpan 1) Surat persetujuan formasi dari Menpan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.03	d Penetapan formasi di Perguruan Tinggi 1) SK Penetapan formasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.02.04	e Penetapan formasi khusus 1) SK Penetapan formasi khusus	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-341-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	KP.03	Pengadaan ASN PNS										
	KP.03.00	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test, 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian 8) Keputusan kelulusan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.01	b Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.02	c Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-342-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.03.03	d Usul dan kelengkapan penetapan NIP 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.04	e Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun 1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun Pengangkatan CPNS	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.05	f SK CPNS/PNS Kolektif 1) SK CPNS/PNS Kolektif	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-343-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.03.06	g Usul dan kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN) 1) Pengajuan Nomor Induk Dosen 2) Surat persetujuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.03.07	h Open Bidding (Seleksi Terbuka Jabatan)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
3	KP.04	Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/ Pegawai Kontrak										
	KP.04.00	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-344-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.04.01	b Pengangkatan ASN P3K 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.04.02	c Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.04.03	d Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-345-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	KP.05	Pengadaan Pegawai Honorer/ Harian Lepas										
	KP.05.00	a Proses Penerimaan Pegawai 1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai 2) Pengumuman 3) Surat lamaran 4) Surat pemanggilan peserta test 5) Daftar peserta ujian 6) Hasil Wawancara 7) Keputusan hasil ujian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.05.01	b Pengangkatan Pegawai Honorer/ harian lepas 1) Surat keputusan 2) Surat Perjanjian Kerja	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.05.02	c Berkas lamaran yang diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-346-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.05.03	d Berkas lamaran yang tidak diterima 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
5	KP.06	Pembinaan/ Pengembangan Karir Pegawai										
	KP.06.00	a Tugas belajar/ijin belajar/diklat/kursus/ujian dinas/uji kompetensi 1) Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut 2) Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi 3) Laporan hasil tes masuk perguruan tinggi yang dituju	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	√ √	√ √	√ √	√ √		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi			Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-347-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar, surat perintah/tugas belajar/sk/surat ijin, surat-surat sponsor, laporan perkembangan studi, laporan halangan/ketidakmampuan/rintangan selama studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah, akreditasi program studi, STTPL, Sertifikat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.06.01	b Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 1) SKP	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.02	c Pakta Integritas 1) Pakta Integritas	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-348-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.06.03	d Penetapan Angka Kredit (PAK) 1) DUPAK/DUPNK 2) PAK	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.04	e Sertifikasi Pegawai 1) Portofolio 2) Sertifikat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.05	f Kode Etik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-349-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.06.06	g Disiplin pegawai 1) Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.07	h Hukuman disiplin 1) Surat Pemanggilan 2) Surat Peringatan 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) Pernyataan Tidak Puas 5) SK Pemberian hukuman disiplin 6) Permohonan Banding 7) SK Ketetapan banding	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.06.08	i Penghargaan dan tanda jasa 1) Surat pengajuan penghargaan dan tanda jasa 2) SK 3) Sertifikat/ Piagam	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.07 KP.07.00	Sistem Informasi Kepegawaian a Pengolahan data dan informasi kepegawaian - Pengolahan Data - Pengelolaan database kepegawaian ASN	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-350-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- Penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN - Informasi kepegawaian - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN - Penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN - Pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik							atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain		Nomor 14 Tahun 2008	
	KP.07.01	b Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.07.02	c Pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian - Arsip kepegawaian elektronik - Verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian - Perekaman dan arsip kepegawaian - Pengelolaan arsip kepegawaian elektronik - Arsip Kepegawaian Fisik	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-351-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.08 KP.08.00	Pengawasan dan pengendalian a Formasi, pengadaan dan pasca diklat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.01	b Kependidikan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.02	c Gaji dan tunjangan, kesejahteraan dan kinerja - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi,evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-352-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.08.03	d Kode Etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan - Monitoring dan Evaluasi - Rekomendasi, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.04	c Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.08.05	f Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorrer	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
6	KP.09	Mutasi Pegawai										
	KP.09.00	a Alih status, pindah instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantuan, Dipekerjakan, Penugasan sementara, Pindah sementara, Mutasi antar unit 1) Surat Permohonan 2) Surat Persetujuan 3) Nota persetujuan/pertimbangan BKN 4) Surat Keputusan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-353-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.09.01	b Mutasi keluarga 1) Surat Izin 2) Surat Penolakan Izin 3) Surat Nikah /Cerai 4) Akte Kelahiran Anak 5) Surat Keterangan Adopsi Anak 6) Surat Keterangan Meninggal dunia	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.02	c Usul kenaikan pangkat Golongan 1) Surat persetujuan Kenaikan Pangkat/ Golongan 2) SK Kenaikan Pangkat/golongan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.03	d Kenaikan Gaji berkala 1) Usulan persetujuan kenaikan gaji berkala 2) Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-354-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.09.04	c Usul pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 1) Usulan dan SK Kenaikan Jabatan 2) Usulan dan SK Pengangkatan Jabatan 3) Usulan dan SK pemberhentian Jabatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.05	f Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai 1) Surat Usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai 2) Nota persetujuan 3) SK 4) Surat Persetujuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.06	g Peninjauan masa kerja 1) Surat Usulan penetapan Peninjauan masa kerja 2) Nota persetujuan 3) SK 4) Surat Persetujuan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.09.07	h Berkas BAPERJAKAT 1) Surat undangan rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat	Pasal 17 huruf h	Unit yang membidangi

-355-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) Daftar hadir rapat 3) Notula 4) Laporan hasil BAPERJAKAT							Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang kepegawaian
8	KP.10	Administrasi Pegawai										
	KP.10.00	a Cuti besar 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.01	b Cuti sakit, Cuti bersalin, Cuti tahunan 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.02	c Cuti alasan penting 1) Surat Permohonan Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada	Memiliki dampak yang dapat	Pasal 17 huruf h	Unit yang membidangi

-356-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2) SK Cuti							Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	mengungkap data rahasia pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	bidang kepegawaian
	KP.10.03	d Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN) 1) Surat Permohonan Cuti 2) SK Cuti	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.10.04	e Dokumentasi identitas pegawai 1) Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu 2) LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN) 3) LHKKPN (Laporan Harta Kekayaan KPN) 4) Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan 5) LP2P/SPT Tahunan/NPWP 6) KP4	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-357-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.10.05	f Daftar Urut kepangkatan (DUK)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
9	KP.11	Kesejahteraan Pegawai										
	KP.11.00	a Layanan pemeliharaan kesehatan pegawai 1) Rekam Medis 2) Kartu Anggota 3) Surat Keterangan Sehat 4) Surat Keterangan Sakit	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.01	b Asuransi Pegawai/ ASKES/ BPJS 1) Surat permohonan Pendaftaran penawaran asuransi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-358-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.11.02	c Tabungan Perumahan 1) Surat permohonan Pendaftaran Penawaran Perumahan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.03	d Bantuan Sosial 1) Tanda Terima 2) Surat Ucapan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
	KP.11.04	e Rekreasi 1) Surat pengajuan rekreasi	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang kepegawaian
10	KP.12	Pemberhentian pegawai 1) Usulan pemberhentian pegawai 2) Penetapan pemberhentian pegawai	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-359-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	KP.13	Perselisihan/Sengketa kepegawaian 1) Surat Pengaduan 2) Notula 3) Berita Acara Pemeriksaan 4) SK 5) Laporan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
12	KP.14	Usul pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 1. Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda & PNS yang tewas 2. SK pemberhentian dan penetapan pensiun	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
13	KP.15	Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS 1) Berkas lamaran yang diterima 2) Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya 3) Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 4) SK Pengangkatan CPNS 5) Hasil Pengujian Kesehatan 6) SK Pengangkatan PNS 7) SK Peninjauan Masa Kerja 8) SK Kenaikkan Pangkat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-360-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		9) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan										
		10) Surat Pernyataan Pelantikan										
		11) SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari Jabatan Struktural/Fungsional										
		12) SK Perpindahan Wilayah Kerja										
		13) SK Perpindahan Antar Instansi										
		14) SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN)										
		15) Berita Acara Pemeriksaan										
		16) SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin PNS										
		17) SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Induk										
		18) SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan										
		19) SK Pemberian Uang Tunggu										
		20) SK Pembebasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara										
		21) SK Pengalihan PNS										
		22) SK Pemberhentian sebagai PNS										
		23) SK Pemberhentian Sementara										
		24) Surat Keterangan Pernyataan Hilang										
		25) Surat Keterangan Kembalinya PNS yang dinyatakan hilang										
		26) SK Penggantian Nama										
		27) Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran										
		28) Surat Nikah/Cerai										

-361-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		29) Akta Kelahiran										
		30) Isian Formulir PUPNS										
		31) Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji PNS dan Jabatan										
		32) Surat Permohonan Menjadi Anggota Farpol										
		33) Surat Keterangan Mutasi Keluarga										
		34) Surat Keterangan Meninggal Dunia										
		35) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan										
		36) Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional										
		37) Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus										
		38) Surat Pemberitahuan Kenaikkan Gaji Berkala										
		39) Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri										
		40) Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri										
		41) Kartu Pendaftaran Ulang (Kardaf) PNS										
		42) Ijazah/Sertifikat										
		43) SK Penempatan/Penarikan Pegawai										
		44) SK Pengangkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk										
		45) Surat Pertimbangan Status PNS										
		46) SK Pengaktifan Kembali Sebagai PNS										
		47) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organisasi karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah										
		48) SK Pensiun										

-362-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	KP.12	Berkas perseorangan ASN P3K 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
15	KP.16	Berkas Perseorangan Pegawai Honorer 1) Surat lamaran 2) Ijazah 3) SKCK 4) Kartu Kuning 5) Surat Keterangan dokter 6) SK Pengangkatan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
16	KP.17	Penilaian Kompetensi										
	KP.17.00	a Berkas Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian

-363-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KP.17.01	b Hasil Penilaian Kompetensi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang kepegawaian
XIII KEUANGAN												
1	KU.00	Pelaksanaan Anggaran										
	KU.00.00	a Pendapatan										
		1) Surat Setoran Pajak (SSP)/ Buku Pajak	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		2) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang	Unit yang membidangi bidang keuangan

-364-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									sebutan lain		Nomor 43 tahun 2009	
		3) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		4) Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau SSPB	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		5) Bunga dan/atau jasa giro pada bank	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan

-365-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6) Piutang negara	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		7) Pengelolaan barang milik negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		8) Dana pemerintah	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		9) Dana masyarakat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan

-366-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.00.01	b Belanja										
		1) Dokumen pelaksanaan barang/jasa pemerintah:										
		a. Barang habis pakai	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		b. Barang inventaris bergerak	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		c. Barang inventaris tidak bergerak (tanah dan bangunan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		d. Jasa	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan

-367-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		e. Software computer	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
		2) Dokumen pembayaran keuangan	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		3) Dokumen tata usaha anggaran:	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		a. Buku kas umum										
		b. Buku kas pembantu										
		c. Buku/kartu pengawas kredit anggaran										
		d. rekening koran bank										

-368-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4) Daftar gaji/tunjangan/lembur/honorarium	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		5) Kartu gaji	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		6) Bukti setor iuran/ kontribusi pemerintah RI kepada badan/organisasi internasional	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan

-369-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7) Laporan arus kas/dokumen akuntansi keuangan: a. Berita Acara Pemeriksaan b. Kas/register penutupan kas c. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer d. Laporan pendapatan negara e. laporan kredit anggaran bulanan/triwulan/semester	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009	Unit yang membidangi bidang keuangan
		8) Laporan keuangan tahunan: a. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer b. Neraca c. Catatan atas laporan keuangan	Biasa/Terbuka	√		√		√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
2	KU.01	Bantuan/ Pinjaman Luar Negeri										
	KU.01.00	a Permohonan pinjaman luar negeri (blue book) 1) Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri	Terbatas	√	-	√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

-370-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.01.01	b Dokumen kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book) 1) Daftar kesanggupan negara donor untuk membiayai (green book)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.02	c Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya 1) Dokumen memorandum of understanding (MoU) dan dokumen sejenisnya	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.03	d Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN) 1) Dokumen loan agreement pinjaman hibah luar negeri (PHLN)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

-371-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									pada Politeknik atau sebutan lain			
	KU.01.04	e Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri 1) Laporan Alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.05	f Aplikasi penarikan dana bantuan luar negeri (BLN) 1) Reimbursement 2) Direct payment/transfer procedure 3) Special commitment/L/C/opening 4) Special account/imprest fund 5) Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri 6) Notice of disbursement	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

-372-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.01.06	g Otorisasi penarikan dana (payment advice) 1) Laporan Otorisasi penarikan dana (payment advice)	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.07	h Realisasi pencairan dana bantuan/pinjaman/hibah luar negeri 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 3) Kontrak 4) Berita Acara 5) Data pendukung lainnya	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.08	i Replenishment (permintaan penarikan dana dari negara donor) 1) No objection letter (NOL) 2) Project implementation	Terbatas	√	-	√	-	√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

-373-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Notification of contract 4) Withdrawal authorization (WA) 5) Statement of expenditure							atau sebutan lain			
	KU.01.09	j Staff Appraisal Report	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.10	k Report /laporan 1) Laporan kemajuan, 2) Laporan berkala bulanan, 3) Laporan berkala triwulanan, 4) Laporan akhir	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.11	l Laporan hutang negara 1) Laporan pembayaran dan laporan posisi hutang negara	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.01.12	m Ketentuan/kebijakan yang menyangkut hibah luar negeri 1) SOP/ Prosedur Tetap	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan

-374-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	KU.02	Pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)										
	KU.02.00	a Penugasan/pendelegasian wewenang pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 1) SK Kuasa pengguna anggaran 2) SK Kuasa pengguna barang/jasa 3) SK Pejabat pembuat komitmen 4) SK Pejabat pembuat daftar gaji 5) SK Pejabat penandatanganan SPM 6) SK Bendahara penerimaan/pengeluaran 7) SK Pengelola barang 8) Berita acara serah terima jabatan	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
4	KU.03	Sistem Akuntansi Instansi (SAI)										
	KU.03.00	a Manual Implementasi sistem akuntansi Instansi (SAI)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.01	b Kebijakan Akuntansi 1) Pedoman akuntansi 2) Panduan akuntansi 3) SOP	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Unit yang membidangi bidang keuangan

-375-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KU.03.02	c Arsip data komputer dan Berita acara rekonsiliasi 1) Berita acara rekonsiliasi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.03	d Daftar transaksi (DT), pengeluaran (PK), penerimaan (PN), dokumen sumber (DS), bukti jurnal (BJ), surat tanda setor (STS), surat setor bukan pajak (SSBP), surat perintah pencairan dana (SP2D), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian pajak (SSBP), SPM dalam daftar ringkasan pengembalian dan potongan dari pengeluaran (SPDR)	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
	KU.03.04	e Laporan realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari unit akuntansi kuasa pengguna anggaran dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran 1) Laporan bulanan SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

-376-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									Politeknik atau sebutan lain			
		2) Laporan triwulan SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
		3) Laporan Semesteran SAI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	
5	KU.04	Pertanggungjawaban Keuangan										
	KU.04.00	a Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan

-377-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									atau sebutan lain			
	KU.04.01	b Dokumen penyelesaian kerugian negara 1) Tuntutan perbendaharaan 2) Tuntutan ganti rugi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Unit yang membidangi bidang keuangan
XIV BADAN USAHA												
1	BU.00	Legalitas 1) Akte Pendirian Badan Usaha 2) Surat Izin Usaha 3) NPWP 4) Keputusan Kementerian Hukum dan HAM 5) Pengumuman Berita Negara 6) Register di Pengadilan Negeri Setempat	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Badan Usaha
2	BU.01	Surat Keputusan Direksi 1) Usulan SK Direksi	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha

-378-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									atau sebutan lain			
		2) SK Direksi yang ditandatangani	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
3	BU.02	Rencana Pendapatan dan Belanja 1) Usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja <										

-379-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3) Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja	Biasa/Terbuka	√		√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		
4	BU.03	Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham) 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
5	BU.04	Rapat Komisaris 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat 3) Keputusan Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
6	BU.05	Rapat Manajer Unit dan Direksi 1) Administrasi Rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll) 2) Notula Rapat	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universitas /Institut atau Eselon IV pada Politeknik	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha

-380-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									atau sebutan lain			
7	BU.06	Data Konsumen 1) Daftar Nama dan alamat konsumen 2) Database konsumen	Terbatas	√		√		√	Eselon III pada Universit as /Institut atau Eselon IV pada Politeknik atau sebutan lain	Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi, dan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Pasal 17 huruf b dan h Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008	Badan Usaha
8	BU.07	Laporan Perusahaan 1) Neraca 2) Laporan Berkala (Triwulan, Tahunan)	Biasa/Terbuka	√	√	√	√	√		Tidak Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Perguruan Tinggi		Badan Usaha

*) Keterangan Pengguna Hak Akses:
1: Penentu Kebijakan
2: Pelaksana Kebijakan
3: Pengawas Internal/ Eksternal
4: Publik
5: Penegak Hukum

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR